

Panel Petani Nasional

REKONSTRUKSI AGENDA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI



Editor: Bambang Irawan, Ening Ariningsih, Effendi Pasandaran

PANEL PETANI NASIONAL
REKONSTRUKSI AGENDA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI

PANEL PETANI NASIONAL

REKONSTRUKSI AGENDA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Editor:

Bambang Irawan
Ening Ariningsih
Effendi Pasandaran



Indonesian Agency for Agricultural Research
and Development (IAARD) Press
2015

PANEL PETANI NASIONAL
REKONSTRUKSI AGENDA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Cetakan 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang
©Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2015

Katalog dalam terbitan (KDT)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Panel petani nasional: rekonstruksi agenda peningkatan kesejahteraan petani/Editor, Bambang Irawan, Ening Ariningsih, dan Effendi Pasandaran.-- Jakarta: IAARD Press, 2015.
x, 317 hlm.: ill.; 25 cm

ISBN 978-602-344-104-4

1. Panel Petani Nasional 2. Kesejahteraan Petani

I. Judul. II. Irawan, Bambang III. Ariningsih, Ening IV. Pasandaran, Effendi

631-058.31

Desain Sampul : Ibnu Salman
Tata Letak : Ovi Noviana
Restu Puji Hidayat
Proof Reader : Sri Sunari
Wartiningsih

IAARD Press

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jalan Ragunan No. 29, Pasarminggu, Jakarta 12540
Telp.: +62 21 7806202, Faks.: +62 21 7800644

Alamat Redaksi:

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122
Telp.: +62 251 8321746, Faks.: +62 251 8326561
e-mail: iaardpress@litbang.pertanian.go.id

ANGGOTA IKAPI NO: 445/DKI/2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
KATA SAMBUTAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. PENDAPATAN PERTANIAN: MASIHKAH MENJADI ANDALAN?	7
1. Dinamika PDB Sektor Pertanian dan Pendapatan Petani <i>(Hermanto dan Gatoet S. Hardono)</i>	9
2. Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan di Desa Sawah Berbasis Padi <i>(Erma Suryani dan Supriyati)</i>	35
3. Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Lahan Kering Berbasis Sayuran <i>(Reni Kustiari)</i>	47
4. Peranan Ternak dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga di Perdesaan pada Wilayah Agroekosistem Perkebunan <i>(Bambang Winarso)</i>	65
5. Sintesis Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan <i>(Adi Setiyanto)</i>	81
III. KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN	99
1. Dinamika Konsumsi Pangan <i>(Mewa Ariani dan Hermanto)</i>	101
2. Perubahan Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Sawah Berbasis Padi <i>(Sri Hastuti Suhartini)</i>	125
3. Dinamika Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Palawija <i>(Rizma Aldillah dan Tri Bastuti Purwantini)</i>	139
4. Dinamika Pola dan Keragaman Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan <i>(Tri Bastuti Purwantini)</i>	159
5. Pola Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan: Komparasi Antartipe Agroekosistem <i>(Mewa Ariani dan Handewi Purwati Saliem)</i>	183

IV. BENARKAH PETANI KITA SEMAKIN SEJAHTERA?.....	201
1. Dinamika Nilai Tukar Petani: Perubahan 2003–2013	203
<i>(Sri Hastuti Suhartini dan I Wayan Rusastra)</i>	
2. Nilai Tukar Usaha Tani Palawija: Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu	221
<i>(Muchjidin Rachmat dan Sri Nuryanti)</i>	
3. Dinamika Kemiskinan Rumah Tangga	237
<i>(Tri Bastuti Purwantini dan I Wayan Rusastra)</i>	
4. Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan Lahan Kering Perkebunan ...	265
<i>(Adi Setiyanto)</i>	
5. Dinamika Kemiskinan Rumah Tangga dan Hubungannya dengan Penguasaan Lahan pada Berbagai Agroekosistem	287
<i>(Sri Hery Susilowati)</i>	
V. AGENDA KE DEPAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI.....	301
SEKILAS TENTANG PENULIS	307
INDEKS	311

KATA PENGANTAR

Buku Patanas dengan judul "Rekonstruksi Agenda Peningkatan Kesejahteraan Petani" terbit pada waktu yang tepat sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan dan menjamin ketersediaan dan akses rumah tangga petani terhadap konsumsi pangan. Upaya peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan dikaitkan dengan upaya perbaikan status gizi masyarakat dalam perspektif peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani merupakan aspek yang selalu menantang karena terkait dengan harmonisasi dan integrasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Buku ini mencakup empat subtema yang bersifat integratif yang meliputi struktur sumber pendapatan sektor pertanian, eksistensi konsumsi pangan rumah tangga, dan dinamika kesejahteraan rumah tangga petani. Karya tulis pendukung pada setiap subtema merupakan komplementasi kajian makro (dengan sumber data dari BPS) dan hasil kajian mikro hasil penelitian Patanas yang bersifat saling melengkapi dan memperkaya aspek tematik yang dibahas.

Bahasan pada subtema pertama "Pendapatan Pertanian: Masihkah Menjadi Andalan" terdapat lima aspek yang dibahas, yaitu dinamika PDB dan pendapatan petani, struktur pendapatan rumah tangga petani lahan sawah berbasis komoditas padi, pendapatan petani lahan kering berbasis sayuran, peranan usaha ternak di agroekosistem perkebunan, dan sintesis pendapatan rumah tangga perdesaan. Empat aspek terakhir pada hakekatnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis posisi atau kontribusi pendapatan berbagai komoditas pada basis agroekosistem yang berbeda, yang selanjutnya dikomparasi dengan kondisi makro di tingkat nasional. Pada subtema kedua "Konsumsi Pangan Rumah Tangga: antara Harapan dan Kenyataan" aspek bahasan mencakup dinamika konsumsi pangan, dinamika pola, dan konsumsi rumah tangga pada berbagai agroekosistem berbasis padi, palawija, dan perkebunan, serta komparasi pola pengeluaran dan konsumsi rumah tangga perdesaan antaragroekosistem.

Bahasan subtema ketiga "Benarkah Petani Kita Semakin Sejahtera" terdiri atas enam aspek tematik yang dianalisis, yaitu dinamika nilai tukar petani agregat nasional, nilai tukar usaha tani palawija, nilai tukar petani lahan kering berbasis perkebunan, dinamika kemiskinan rumah tangga agregat nasional, kemiskinan petani lahan kering berbasis komoditas perkebunan, dan kemiskinan kaitannya dengan penguasaan lahan pada berbagai agroekosistem. Jadi, pada bahasan ini ditampilkan komparasi makro-mikro nilai tukar petani yang merefleksikan daya beli petani dan tingkat kemiskinan yang diharapkan dapat merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan petani di perdesaan.

Hasil bahasan ketiga subtema tersebut diharapkan dapat dirumuskan harmonisasi kebijakan peningkatan produksi dan pendapatan petani serta ketersediaan dan akses konsumsi (pangan dan nonpangan) dengan sasaran pemantapan tingkat kesejahteraan petani. Kesejahteraan rumah tangga perdesaan

ini direfleksikan oleh pemantapan dan penguatan kebijakan terkait dengan perbaikan nilai tukar petani dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Inovasi dan inovasi yang dihasilkan dari kajian ini akan bermanfaat bagi peningkatan pendapatan, konsumsi, dan status gizi, serta pemantapan kesejahteraan petani dan masyarakat di perdesaan.

Bogor, Desember 2015

Editor

KATA SAMBUTAN

Sektor pertanian memiliki enam peranan strategis, yaitu sebagai penghasil bahan pangan, bahan baku industri, devisa nasional, nilai tambah ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan sebagai pengguna produk agroindustri seperti pupuk dan pestisida. Aktualisasi dari peranan sektor pertanian tersebut akan melibatkan peranan para petani di perdesaan sebagai pelaku utama usaha pertanian. Oleh karena itu, pembangunan pertanian selama ini tidak terlepas dari dua upaya, yaitu *pertama*, meningkatkan produksi, kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing produk pertanian; dan *kedua*, meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya pertama diperlukan untuk mengantisipasi perubahan pasar produk pertanian dan kebutuhan pasar yang terus meningkat, mendorong perolehan devisa dan nilai tambah sektor pertanian, serta meningkatkan daya serap tenaga kerja dan daya serap sektor pertanian terhadap produk agroindustri. Upaya kedua diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup para petani dan sekaligus mempertahankan keberlanjutan sektor pertanian.

Pertanyaan sentral terkait dengan kesejahteraan petani adalah sejauh mana pembangunan pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani dan bagaimana pula variasinya menurut tipe desa. Buku ini mengupas secara kritis masalah tersebut yang difokuskan pada empat aspek yang terkait dengan kesejahteraan petani, yaitu pendapatan rumah tangga petani, konsumsi pangan, nilai tukar petani, dan kemiskinan rumah tangga petani. Keempat aspek tersebut dibahas secara makro pada lingkup nasional maupun secara mikro pada lingkup rumah tangga petani untuk memahami apakah dinamika kesejahteraan petani yang diekspresikan dalam indikator makro juga mencerminkan dinamika kesejahteraan pada tingkat rumah tangga petani. Analisis pada lingkup makro nasional dilakukan dengan memanfaatkan data makro yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan analisis pada lingkup mikro dilakukan dengan memanfaatkan data hasil survei Panel Petani Nasional (Patanas) yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada tahun 2007–2012. Patanas merupakan penelitian yang bersifat panel di mana data sosial ekonomi rumah tangga petani dikumpulkan dari rumah tangga contoh dan desa contoh yang sama dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sama pula sehingga konsistensinya dapat dipertahankan.

Hasil bahasan pada keempat aspek kesejahteraan dalam buku ini sangat berguna bagi para akademisi, pemerhati pembangunan pertanian, dan para pengambil kebijakan untuk lebih memahami masalah kesejahteraan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian. Berbagai informasi yang diungkapkan lebih lanjut dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk menyempurnakan agenda pembangunan pertanian ke depan demi terwujudnya petani yang sejahtera dan terwujudnya sektor pertanian yang berdaya saing, memiliki daya tahan, dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih kepada Tim Editor dalam upayanya merumuskan tema, subtema, dan karya tulis

pendukungnya, serta kegiatan editorial lainnya sehingga buku ini layak untuk diterbitkan dan disimak pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi perumusan kebijakan pertanian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian dan perdesaan.

Bogor, Desember 2015
Kepala PSEKP

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Handewi P. Saliem

BAB I PENDAHULUAN

1. Pendahuluan:

PENDAHULUAN

Dalam rangka memantau dan mengevaluasi dinamika sosial ekonomi rumah tangga tani dan perdesaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) telah melakukan penelitian Panel Petani Nasional (Patanas). Patanas merupakan penelitian yang bersifat panel di mana data sosial ekonomi rumah tangga tani dikumpulkan dari rumah tangga contoh dan desa contoh yang sama. Metode pengumpulan data dan pengukuran variabel sosial ekonomi dilakukan dengan cara yang sama pula agar konsistensinya dapat dipertahankan. Pengumpulan data sosial ekonomi rumah tangga dilakukan pada empat tipe desa, yaitu (a) desa lahan sawah berbasis padi, (b) desa lahan kering berbasis sayuran, (c) desa lahan kering berbasis palawija, dan (d) desa lahan kering berbasis tanaman perkebunan. Secara total terdapat 34 desa contoh Patanas yang tersebar di 8 provinsi dan melibatkan 1.238 rumah tangga contoh.

Buku bunga rampai dengan tema "Rekonstruksi Agenda Peningkatan Kesejahteraan Petani" sebagian besar ditulis dengan memanfaatkan data Patanas di samping data sekunder yang diterbitkan oleh BPS. Buku ini terdiri atas tiga subtema, yaitu (a) Pendapatan Pertanian, Masihkah Menjadi Andalan? (b) Konsumsi Pangan Rumah Tangga, antara Harapan dan Kenyataan; dan (c) Benarkah Petani Kita Semakin Sejahtera? Ketiga subtema tersebut memiliki keterkaitan yang kuat, di mana tingkat pendapatan akan menentukan tingkat konsumsi pangan yang pada akhirnya akan menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga perdesaan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana posisi sektor pertanian dalam struktur pendapatan rumah tangga perdesaan, di mana tingkat dominasinya akan menentukan perannya dalam menentukan tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakat petani di perdesaan. Struktur dan tingkat dominasi sektor pertanian dalam struktur pendapatan rumah tangga akan menentukan pilihan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya, apakah melalui modernisasi pertanian, diversifikasi kesempatan kerja, bahkan kemungkinan untuk melakukan transformasi ekonomi pertanian dan perdesaan.

Terkait dengan subtema "Pendapatan Pertanian, Masihkah Menjadi Andalan?" terdapat lima karya tulis ilmiah (KTI) pendukung, yaitu (a) Dinamika PDB Sektor Pertanian dan Pendapatan Petani; (b) Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan di Desa Sawah Berbasis Padi; (c) Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Lahan Kering Berbasis Sayuran; (d) Peran Ternak Besar dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga pada Agroekosistem Perkebunan; dan (e) Sintesis Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan. Perkembangan pendapatan rumah tangga pertanian pada tataran makro perlu dikomparasi dengan besaran dan dinamikanya pada tataran meso dan mikro karena secara spasial membutuhkan intervensi kebijakan yang berbeda. Pada tataran meso, khususnya pada tataran mikro sangat dibutuhkan pemahaman tentang kondisi dan dinamika pendapatan pada berbagai agroekosistem dan basis komoditas. Dalam konteks ini dipertimbangkan agroekosistem lahan sawah basis komoditas padi, lahan kering basis komoditas sayuran, dan agroekosistem perkebunan dengan ternak ruminansia besar. Agroekosistem yang berbeda dengan basis komoditas tertentu akan

memberikan respons yang berbeda terhadap tingkat dan struktur pendapatan rumah tangga, denganantisipasi kebijakan pengembangan yang berbeda.

Dinamika PDB sektor pertanian secara struktural mengalami penurunan sejalan dengan kemajuan perekonomian nasional. Namun, penurunan ini tidak semestinya diikuti dengan penurunan tingkat pendapatan petani, terutama bagi mereka yang menjadikan sektor pertanian sebagai usaha utama. Perubahan struktural sektor pertanian kaitannya dengan tingkat dan struktur pendapatan rumah tangga petani perlu mendapatkan pemahaman yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) penurunan struktur PDB pertanian jika diikuti penurunan tingkat pendapatan rumah tangga pertanian akan berimplikasi terhadap penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (b) penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian akan membutuhkan perluasan diversifikasi kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di perdesaan; (c) di tingkat desa dibutuhkan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani, di samping vitalisasi kegiatan informal nonpertanian di perdesaan; dan (d) urgensi percepatan transformasi ekonomi pertanian dan perdesaan melalui integrasi ekonomi desa-kota dalam rangka konvergensi produktivitas sektor pertanian (perdesaan) dan sektor nonpertanian (perkotaan).

Pemahaman dinamika pendapatan rumah tangga petani pada berbagai agroekosistem dan basis komoditas dinilai strategis dengan justifikasi sebagai berikut: (a) agroekosistem sawah dengan basis komoditas padi pada umumnya telah mengalami overintensifikasi, sehingga perlu dipikirkan paket teknologi dan strategi diversifikasi pertanian serta usaha yang tepat dalam peningkatan pendapatan rumah tangga petani, mengingat ekonomi padi tidak lagi dapat dipandang sebagai dinamisor ekonomi perdesaan; (b) komoditas sayuran di lahan kering dapat dipandang sebagai sumber pertumbuhan baru jika dapat difasilitasi dengan teknologi spesifik lokasi, pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan) dalam menjamin efisiensi usaha tani dan pemasaran, sejalan dengan upaya mendorong diversifikasi konsumsi dan perbaikan status gizi masyarakat; (c) peran ternak besar, khususnya sapi potong, memegang peran strategis dalam pemenuhan konsumsi daging nasional serta pengembangan agroekosistem dan komoditas perkebunan, misalnya melalui pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan keberlanjutan sistem usaha tani.

Pada subtema "Konsumsi Pangan Rumah Tangga, antara Harapan dan Kenyataan" dibahas lima karya tulis ilmiah, yaitu (a) Dinamika Konsumsi Pangan pada tingkat nasional; (b) Perubahan Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Sawah Berbasis Padi; (c) Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Lahan Kering Berbasis Palawija; (d) Dinamika Pola dan Keragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Lahan Kering Berbasis Perkebunan; dan (e) Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan, Komparasi Antartipe Agroekosistem. Hasil analisis konsumsi pangan pada tataran makro vs mikro akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa indikator ketersediaan dan akses pangan serta status gizi masyarakat pada tingkat makro menunjukkan kecenderungan dan pencapaian yang

lebih baik dibandingkan dengan kondisi mikro. Kedua informasi ini diharapkan akan saling melengkapi kebijakan intervensi yang harus dilakukan, yang sepatutnya juga mempertimbangkan kondisi spasial agroekosistem dan basis komoditas. Di samping harmonisasi peran pusat-daerah, pemerintah daerah perlu diberikan kesempatan dan peran yang lebih besar terkait dengan upaya pemantapan ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat dalam perspektif desentralisasi pengembangan ekonomi pangan. Dengan demikian, pemahaman ekonomi konsumsi pangan secara nasional dan pada berbagai agroekosistem akan memegang peranan penting di dalam mengatasi permasalahan terkait dengan kerawanan pangan dan status gizi buruk di lapangan.

Kajian dinamika konsumsi pangan nasional dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dan permasalahan sebagai berikut: (a) mengungkap semangat yang terkandung dalam UU Pangan No. 18 tahun 2012 terkait penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan; (b) pemantapan kebijakan ketahanan pangan yang mencakup kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan, pengembangan sistem distribusi pangan, dan peningkatan kualitas konsumsi pangan; (c) mengungkap kendala danantisipasi solusi pemantapan ketahanan pangan yang mencakup penyempitan luas lahan pertanian khususnya lahan sawah, pertumbuhan luas panen yang semakin terbatas, dan gejala kemandegan dalam pertumbuhan produktivitas komoditas pertanian utama; (d) perkembangan urbanisasi, pemasaran pangan hasil industri, dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang berimplikasi terhadap kesehatan yang diindikasikan oleh masa transisi gizi dalam bentuk peningkatan obesitas dan penyakit kronis lainnya; dan (e) kebijakan pangan ke depan yang akan menekankan pada pengembangan diversifikasi pangan melalui pengurangan jumlah konsumsi pangan pokok yang selanjutnya diimbangi dengan peningkatan konsumsi produk pangan asal ternak, minyak sayur, buah-buahan, dan sayuran.

Kajian konsumsi pangan rumah tangga perdesaan pada berbagai agroekosistem didasarkan atas beberapa pemikiran, di antaranya adalah (a) pemahaman dan aktualisasi multifungsi pangan seperti fungsi fisiologis/biologis, fungsi sosial/komunikasi, fungsi budaya, fungsi religi, fungsi ekonomi, fungsi politis, serta fungsi kelestarian dan lingkungan hidup; (b) pemahaman tentang berbagai faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat yang mencakup sejumlah faktor di antaranya tingkat pendapatan masyarakat, selera konsumen, harga pangan dan komoditas substitusinya, tingkat pendidikan masyarakat, jumlah atau besar kecilnya keluarga, dan lingkungan; (c) klarifikasi dan verifikasi beberapa fakta empiris seperti faktor sosial budaya berhubungan kuat dengan konsumsi makanan pokok masyarakat, dampak urbanisasi terhadap kecenderungan westernisasi diet, serta dampak globalisasi terhadap pola makan dan gizi masyarakat; (d) berkaitan dengan usaha tani pada agroekosistem yang berbeda, fakta empiris menunjukkan bahwa pola pengeluaran dan konsumsi pangan dipengaruhi oleh faktor kepemilikan lahan dan tipologi usaha tani yang akan menentukan produktivitas, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan konsumsi pangan.

Makalah pendukung pada subtema "Benarkah Petani Kita Semakin Sejahtera?" pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi dua makalah utama, yaitu (a) dinamika nilai tukar petani agregat nasional dan pada beberapa agroekosistem; dan (b) dinamika kemiskinan rumah tangga agregat nasional dan pada beberapa agroekosistem. Nilai tukar pada hakekatnya merefleksikan daya beli masyarakat petani yang ditunjukkan oleh rasio indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga petani. Kemampuan daya beli rumah tangga petani bila dikaitkan dengan tingkat pendapatan akan menentukan kemampuan akses mereka terhadap kebutuhan pangan dan nonpangan sebagai faktor penting penentu tingkat kesejahteraan mereka. Garis kemiskinan pada dasarnya adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki rumah tangga petani agar dapat mengakses sejumlah komoditas pangan dan nonpangan untuk kebutuhan hidupnya.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kajian terkait dengan nilai tukar petani dan kemiskinan dalam perspektif peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani di perdesaan di antaranya adalah (a) pemantapan modernisasi pertanian dengan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta nilai tukar yang baik sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan di perdesaan; (b) modernisasi dan formalisasi (berbadan hukum) sektor UKM nonpertanian di perdesaan dengan tingkat produktivitas dan daya saing yang tinggi sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan di perdesaan; (c) diversifikasi kesempatan kerja di perdesaan dengan mempertimbangkan kegiatan informal nonpertanian di samping kegiatan usaha dan kesempatan kerja di sektor pertanian, sebagai jalan transisi keluar dari kemiskinan di perdesaan; dan (d) peningkatan akses dan mobilitas masyarakat perdesaan terhadap kesempatan kerja sektor informal di perkotaan melalui integrasi ekonomi desa-kota sebagai jalan transisi (dapat permanen melalui revitalisasi) keluar dari kemiskinan. Jadi, semua peluang yang ada terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan harus diupayakan, yaitu dua jalan utama dan dua jalan transisi untuk keluar dari kemiskinan perlu diupayakan.

BAB II PENDAPATAN PERTANIAN: MASIHKAN MENJADI ANDALAN?

1. Dinamika PDB Sektor Pertanian dan Pendapatan Petani
(Hermanto dan Gatoet S. Hardono):
2. Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan di
Desa Sawah Berbasis Padi *(Erma Suryani dan Supriyati):*
3. Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Lahan
Kering Berbasis Sayuran *(Reni Kustiari):*
4. Peranan Ternak dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga di
Perdesaan pada Wilayah Agroekosistem Perkebunan
(Bambang Winarso):
5. Sintesis Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan
(Adi Setiyanto):

DINAMIKA PDB SEKTOR PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI

Hermanto dan Gatoet S. Hardono

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang yang padat penduduknya, Indonesia memerlukan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif tinggi untuk meningkatkan pendapatan per kapita bagi penduduknya. Menurut teori makro, pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan konsumsi rumah tangga (Kusumawardhani *et al.*, 2012), sedangkan investasi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Silvia *et al.*, 2013).

Di era globalisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Sihono (2009), ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh di atas 6% karena dukungan ekonomi Cina dan India, tetapi akan mengalami perlambatan akibat gejolak ekonomi global yang dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Raz *et al.* (2012) menyatakan bahwa dampak negatif krisis keuangan global tahun 2008 terhadap perekonomian Asia Timur, termasuk Indonesia, lebih kecil bila dibandingkan dengan krisis keuangan pada tahun 1997 karena perekonomian Indonesia telah mengambil pelajaran setelah krisis tahun 1997 dengan memperkuat fundamental ekonomi, dukungan kredibilitas, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.

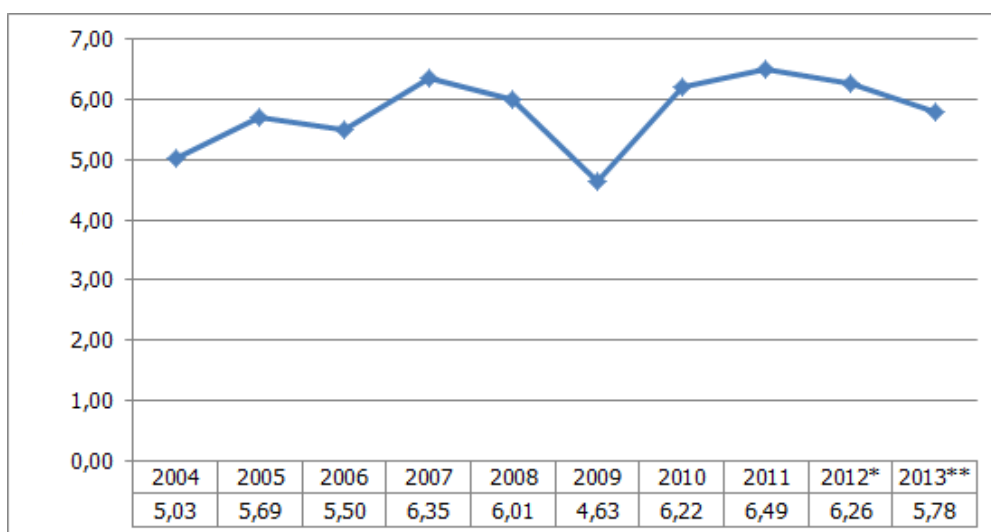
Sektor pertanian selama ini merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup besar, namun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor nonpertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2014 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB adalah sekitar 13,38% (sama dengan sumbangan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor) (BPS, 2015a).

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, walaupun perannya juga cenderung menurun. Pada tahun 2004 peran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja sekitar 45%, menurun menjadi 34% pada tahun 2014 (BPS, 2015b). Walaupun demikian, sektor pertanian masih merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2014.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB, serta dinamika pendapatan per kapita di sektor pertanian pada tingkat nasional dan wilayah. Tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis perubahan distribusi pendapatan per kapita menurut wilayah. Data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

KERAGAAN EKONOMI NASIONAL 2004–2013

Secara umum perekonomian nasional selama periode 2004–2013 tumbuh dengan laju pertumbuhan dari kuartal ke kuartal (Q to Q) rata-rata 5,80%. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu 6,49%. Adapun laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu 4,63%. Penurunan laju pertumbuhan PDB dari 6,01% pada tahun 2008, menjadi 4,63% pada tahun 2009 mengindikasikan terjadinya pengaruh krisis perekonomian global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap laju pertumbuhan perekonomian nasional. Namun demikian, dampak dari krisis perekonomian global terhadap perekonomian nasional tidak terjadi secara berkepanjangan. Perekonomian nasional segera “bangkit” dan pada tahun 2010 laju pertumbuhan PDB sudah pulih mencapai 6,22% (Gambar 1).



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

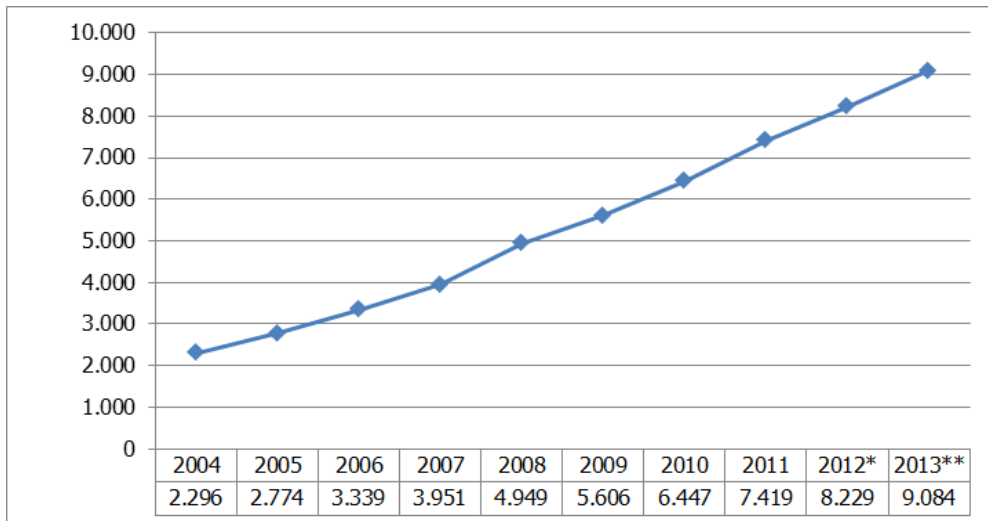
**Angka sangat sementara

Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDB (Q to Q), 2004–2013

Nilai PDB atas harga berlaku pada tahun 2004 adalah sekitar 2.295,8 triliun rupiah, meningkat menjadi 9.084,0 triliun rupiah pada tahun 2013. Dengan demikian, selama periode 2004–2014 nilai PDB nasional atas harga berlaku naik sebesar 3,96 kali (Gambar 2). Dengan kinerja tersebut pada tahun 2012 Indonesia dinilai dari besaran PDB-nya masuk dalam peringkat ke-16 dari 177 negara, dan dari laju pertumbuhan ekonominya masuk dalam peringkat ke-38 dari 179 negara.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai di atas 6% yang terjadi tiga tahun secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2010, 2011, dan 2012, tidak bertahan lama. Pertumbuhan PDB kemudian melemah menjadi 5,78% pada tahun 2013.

Melemahnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 terkait dengan terjadinya defisit neraca berjalan pada kuartal III.



Sumber: BPS (2014), diolah

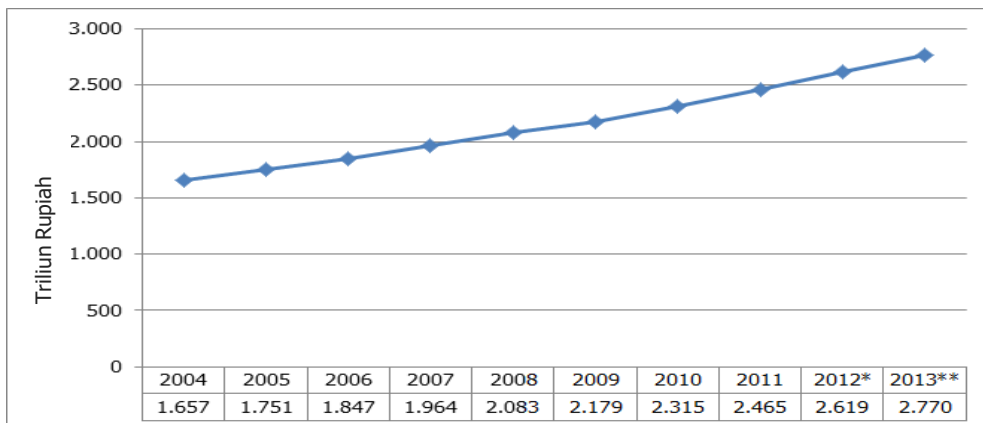
Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 2. PDB Atas Harga Berlaku, 2004–2013

Jika pertumbuhan PDB dianalisis berdasarkan atas harga konstan tahun 2000, terlihat bahwa pertumbuhan PDB nasional pada periode tahun 2004–2013 tidak menggambarkan laju pertumbuhan setinggi laju pertumbuhan PDB atas harga berlaku. Data menunjukkan bahwa PDB tahun 2004 yang diukur atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah sekitar 1.656,5 triliun rupiah. Sementara itu, nilai PDB pada tahun 2013 atas harga konstan tahun 2000 adalah 2.770,3 triliun rupiah.

Dengan menggunakan perhitungan PDB atas harga konstan tahun 2000, dapat dikatakan bahwa PDB tahun 2013 tumbuh 1,67 kali dibandingkan PDB tahun 2004 (Gambar 3). Perubahan nilai PDB atas harga konstan tahun 2000 tersebut hanya sekitar 0,42 kali dibanding dengan perubahan nilai PDB atas harga berlaku pada periode yang sama, yaitu 3,96 kali. Keadaan ini mengindikasikan bahwa volume barang dan jasa yang secara agregat dihasilkan selama periode tahun 2004–2013 hanya naik sebesar 1,67 kali, sedangkan pertumbuhan PDB selama periode tersebut sebagian besar, yaitu 2,28 (3,96 dikurangi 1,67) kali disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa angka inflasi nilai rupiah selama periode 2004–2013 cukup besar, sehingga daya beli masyarakat secara riil sebenarnya tidak naik sebesar pertumbuhan PDB atas harga berlaku.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 3. PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2004–2013

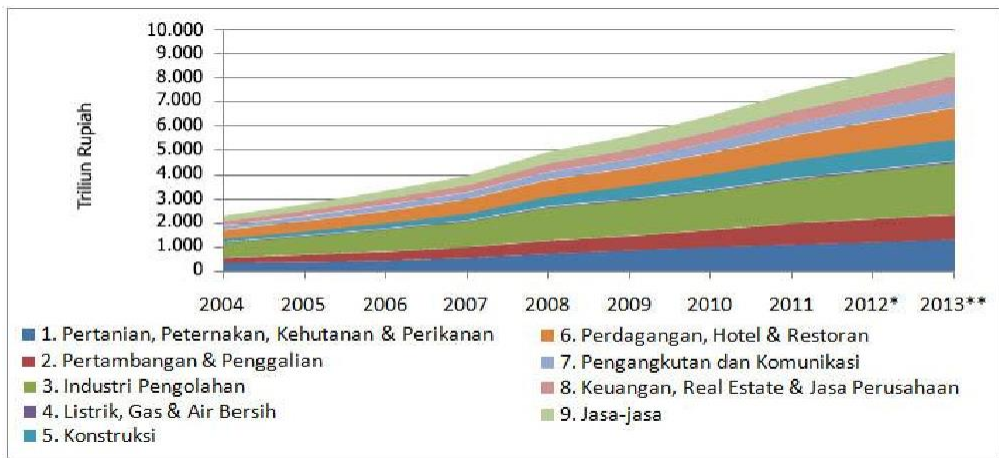
PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Sektor pertanian dalam arti luas (termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sektor pertanian dalam arti luas menyerap lebih dari 35% angkatan kerja. Di samping itu, sektor pertanian dalam arti luas juga merupakan penghasil bahan baku bagi sektor industri, selain juga sebagai pengguna input yang dihasilkan oleh sektor industri, serta pengguna dari sektor jasa angkutan dan perdagangan.

Data menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004–2013 sektor pertanian dalam arti luas masih memegang peran strategis dalam menciptakan pendapatan bagi perekonomian nasional. Nilai PDB masing-masing sektor atas harga berlaku selama periode tahun 2004–2013 tercantum dalam Gambar 4. Pada tahun 2004 PDB sektor pertanian dalam arti luas adalah Rp329,12 triliun, naik menjadi Rp1.311,30 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,98 kali lipat. Sebagai perbandingan, PDB sektor konstruksi adalah Rp151,25 triliun, naik menjadi Rp907,27 triliun pada tahun 2013, atau naik 6 kali lipat. Demikian halnya dengan PDB sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2004 adalah Rp205,25 triliun, naik menjadi Rp1.020,77 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 4,97 kali lipat.

Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku untuk sektor industri pengolahan pada tahun 2004 adalah Rp644,34 triliun, naik menjadi Rp2.152,59 triliun, atau naik sebesar 3,34 kali lipat. Adapun PDB atas dasar harga berlaku untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2004 adalah sebesar Rp368,56 triliun, naik menjadi Rp1.301,51 triliun, atau naik sebesar 3,53 kali lipat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri dan jasa perdagangan yang diharapkan dapat dijadikan motor penggerak ekonomi, setelah menurunnya

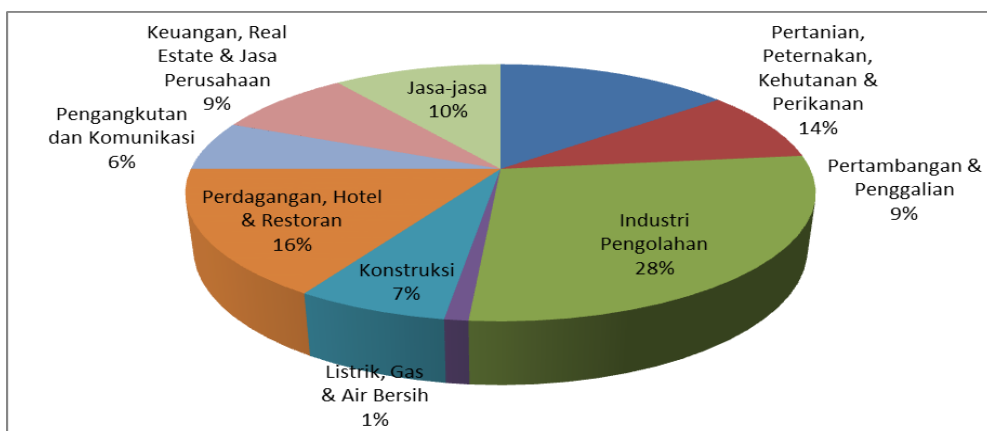
peran sektor pertanian dalam arti luas, tidak dapat direalisasikan dalam periode tahun 2004–2013 ini.



Sumber: BPS (2014), diolah
 Keterangan: *Angka sementara
 **Angka sangat sementara

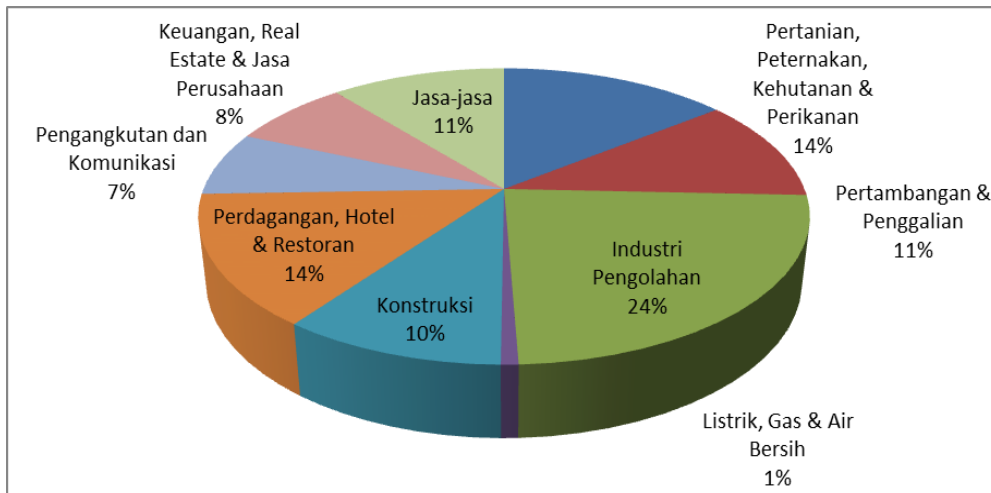
Gambar 4. PDB Atas Harga Berlaku Menurut Sektor, 2004–2013

Perubahan nilai PDB pada masing-masing sektor pada periode tahun 2004–2013 mengubah komposisi sumbangan masing-masing sektor dalam PDB nasional. Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan perubahan komposisi sumbangan masing-masing sektor terhadap PDB atas dasar harga berlaku untuk tahun 2004 dan 2013. Pada tahun 2004, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sekitar 14% dari total PDB nasional. Peran sektor pertanian terhadap PDB nasional tidak mengalami perubahan yang nyata, sehingga sumbangan sektor ini pada tahun 2013 masih tetap, yaitu 14%.



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 5. Sumbangan Masing-Masing Sektor terhadap PDB Atas Harga Berlaku, 2004



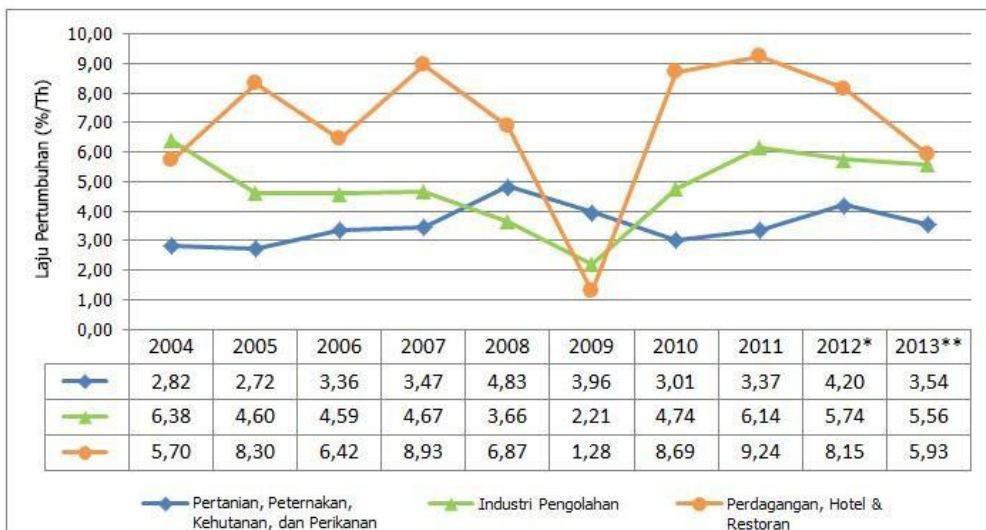
Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 6. Sumbangan Masing-Masing Sektor terhadap PDB Atas Harga Berlaku, 2013

Sektor-sektor yang mengalami peningkatan sumbangannya terhadap PDB nasional adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Adapun sektor-sektor yang mengalami penurunan sumbangannya terhadap PDB nasional adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan.

Gambar 7 menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan kuartal ke kuartal untuk sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam periode tahun 2004–2013. Selama periode tahun 2004–2013, sektor pertanian dalam arti luas tumbuh relatif stabil dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,53%. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 4,83% terjadi pada tahun 2008, yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia, kemudian turun menjadi 3,96% pada tahun 2009 dan menjadi 3,01% pada tahun 2010. Laju pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas meningkat kembali menjadi 3,37% pada tahun 2011 dan menjadi 4,20% pada tahun 2012, tetapi kemudian turun kembali menjadi 3,54% pada tahun 2013.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan selama periode 2004–2013 menunjukkan adanya fluktuasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas. Sektor industri pengolahan tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,83%, dengan laju pertumbuhan terendah sebesar 2,21% pada tahun 2009, yaitu satu tahun setelah krisis, sedangkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,38% pada tahun 2004. Sebagaimana yang terjadi pada sektor lainnya, setelah tahun 2009, laju pertumbuhan sektor ini cenderung meningkat kembali.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDB (Q to Q) Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan, 2004–2013

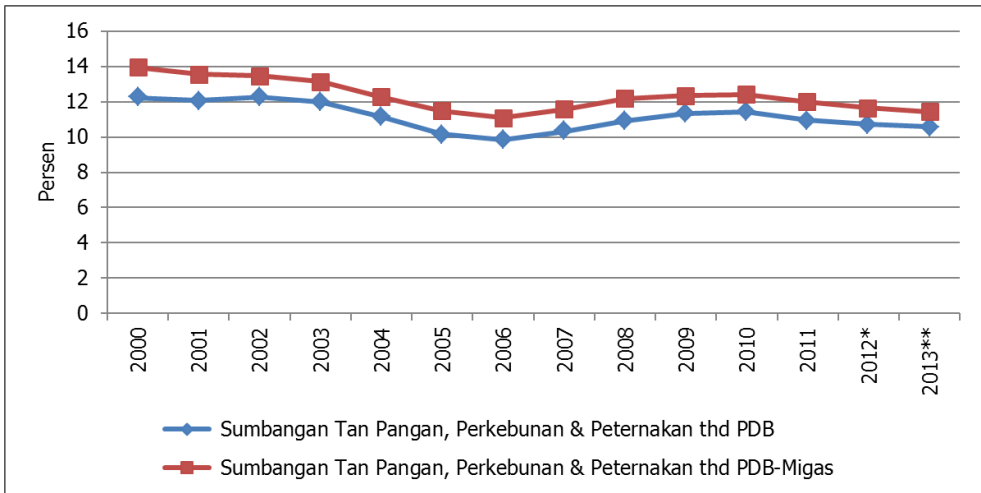
Pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel, dan restoran selama periode tahun 2004–2013 menunjukkan pola fluktuasi yang tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di sektor pertanian dalam arti luas, dan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Selama periode ini, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,95%. Pertumbuhan tertinggi sebesar 9,24% terjadi pada tahun 2011, yaitu tiga tahun setelah terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Pertumbuhan terendah sebesar 1,28% per tahun terjadi pada tahun 2009, yaitu satu tahun setelah terjadinya krisis ekonomi global.

PERAN SUBSEKTOR TANAMAN BAHAN MAKANAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN DALAM SEKTOR PERTANIAN

Pada tahun 2000 sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB adalah sekitar 12,24%, dan sumbangannya terhadap PDB tanpa migas adalah 13,96%. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB cenderung menurun selama periode tahun 2000–2013 (Gambar 8). Pada tahun 2013 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB turun menjadi 10,59% dan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB tanpa migas menjadi 11,43%.

Menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit terhadap PDB mengindikasikan bahwa sudah terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor

pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau subsektor lainnya. Semakin mengecilnya selisih sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit terhadap PDB tanpa migas dengan sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit terhadap PDB menunjukkan bahwa dominasi migas dalam perekonomian nasional juga relatif menurun.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

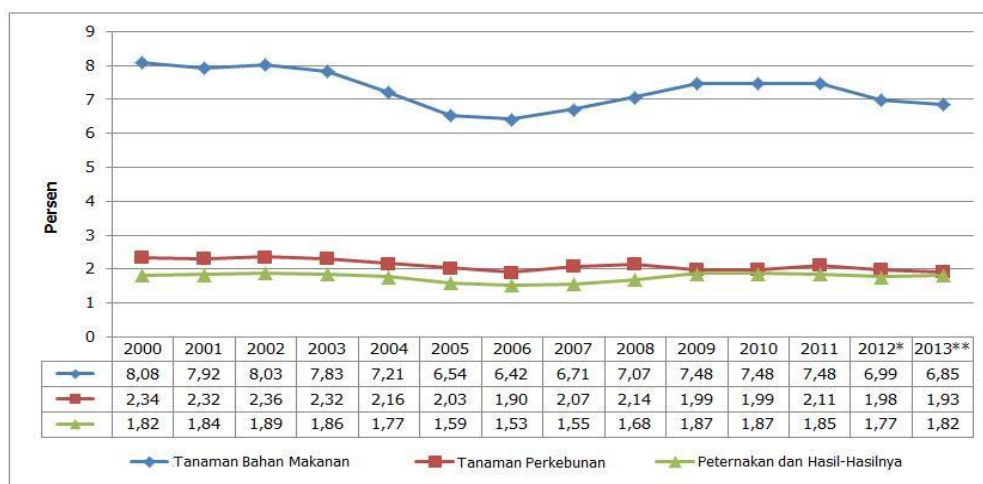
Gambar 8. Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan terhadap PDB, 2000–2013

Sumbangan masing-masing subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan terhadap PDB nasional atas harga berlaku selama periode tahun 2000–2013 dapat dilihat pada Gambar 9. Pada tahun 2000 sumbangan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDB masih sekitar 8,08%. Sumbangan subsektor tanaman bahan makanan cenderung menurun sehingga menjadi 6,85% pada tahun 2013. Sumbangan subsektor ini pada saat pascakrisis ekonomi global tahun 2008 ternyata masih cukup tinggi, yaitu di atas 7% pada tahun 2009 hingga tahun 2011.

Sumbangan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDB pada tahun 2000 masih sekitar 2,34%. Sumbangan subsektor ini terhadap PDB mengalami kecenderungan menurun, hingga pada tahun 2013 menjadi 1,93%. Dilihat dari pola perkembangan sumbangan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDB selama periode tahun 2000–2013, tidak terlihat secara nyata adanya dampak krisis ekonomi global tahun 2008.

Selama periode tahun 2000–2013 tidak terlihat adanya penurunan sumbangan dari subsektor peternakan terhadap PDB nasional. Pada tahun 2000 sumbangan subsektor peternakan terhadap PDB nasional sekitar 1,82%. Pada tahun 2013 sumbangan subsektor ini masih tetap sekitar 1,83%. Ada kemiripan pola

perubahan sumbangannya terhadap PDB dari tahun ke tahun antara subsektor tanaman perkebunan dengan subsektor peternakan.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

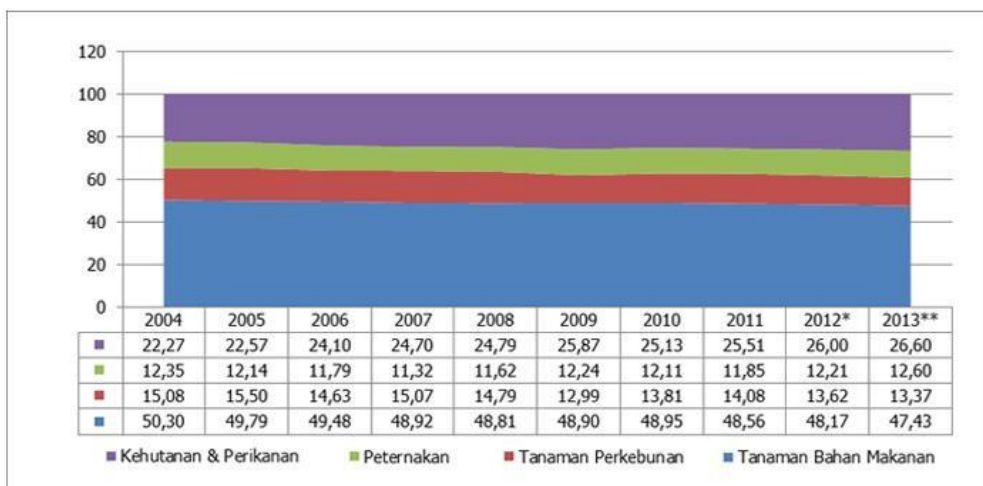
**Angka sangat sementara

Gambar 9. Sumbangan Masing-Masing Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan terhadap PDB, 2000–2013

Perkembangan sumbangan subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, dan gabungan subsektor kehutanan dan perikanan terhadap PDB sektor pertanian dalam arti luas selama periode tahun 2004–2013 dapat dilihat pada Gambar 10. Sumbangan subsektor tanaman bahan makanan pada tahun 2004 adalah 50,30%, turun menjadi 47,43% pada tahun 2013. Sumbangan subsektor tanaman perkebunan juga mengalami penurunan dari 15,08% pada tahun 2004, menjadi 13,37% pada tahun 2013. Sementara itu, sumbangan subsektor peternakan dapat dikatakan stabil, yaitu sebesar 12,35% pada tahun 2004, menjadi 12,60% pada tahun 2013. Adapun sumbangan dari gabungan subsektor kehutanan dan perikanan cenderung meningkat dari 22,27% pada tahun 2004, menjadi 26,60% pada tahun 2013.

Nilai PDB subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan selama periode tahun 2004–2013 dapat dilihat pada Gambar 11. Sebagai subsektor terbesar dalam kelompok ini, nilai PDB atas dasar harga berlaku untuk subsektor tanaman bahan makanan pada tahun 2004 adalah Rp165,56 triliun, naik menjadi Rp621,83 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,76 kali lipat. Nilai PDB atas dasar harga berlaku untuk subsektor tanaman perkebunan pada tahun 2004 adalah Rp49,63 triliun, naik menjadi Rp175,25 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,53 kali lipat. Sementara itu, nilai PDB atas dasar harga berlaku untuk subsektor peternakan pada tahun 2004 adalah Rp40,63 triliun, naik menjadi Rp165,16 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 4,06 kali lipat. Pertumbuhan PDB dari kuartal ke kuartal selama periode tahun 2004–2013 untuk subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan dapat dilihat pada

Gambar 12. PDB subsektor tanaman bahan makanan selama periode tahun 2004–2013 tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,13%. Pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 1,64% terjadi pada tahun 2010, dan pertumbuhan tertinggi adalah 6,06% terjadi pada tahun 2008. Dari grafik pola pertumbuhan dapat dilihat bahwa subsektor tanaman bahan makanan mendapatkan dampak negatif dari krisis ekonomi global selama dua tahun setelah krisis. Pertumbuhan subsektor ini baru menunjukkan gejala pemulihan setelah tahun 2011.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Gambar 10. Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Peternakan terhadap PDB Sektor Pertanian dalam Arti Luas, 2004–2013



Sumber: BPS (2014), diolah

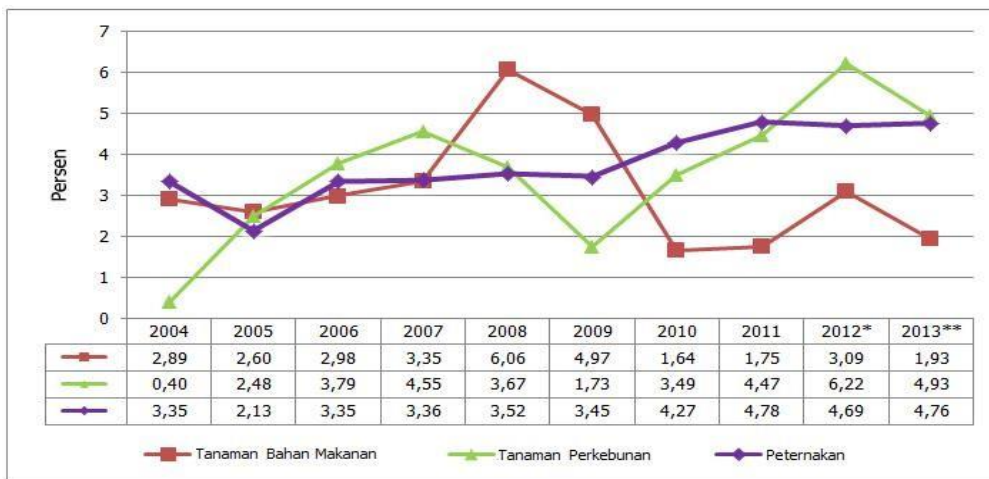
Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 11. PDB Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, 2004–2013

Subsektor tanaman perkebunan selama periode 2004–2013 tumbuh dengan laju pertumbuhan kuartal ke kuartal rata-rata sebesar 3,57%. Pertumbuhan terendah sebesar 0,40 terjadi pada tahun 2004, sedangkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,22% terjadi pada tahun 2012. Pola pertumbuhan tanaman perkebunan juga menunjukkan adanya dampak negatif dari krisis perekonomian global tahun 2008. Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan cenderung turun dari tahun 2007 sebesar 4,55%, menjadi 1,73% pada tahun 2009. Namun, pertumbuhan subsektor ini cenderung meningkat lagi setelah tahun 2009 hingga mencapai puncaknya sebesar 6,22% pada tahun 2012 (Gambar 12).

Dibanding dengan subsektor tanaman bahan pangan dan subsektor tanaman perkebunan, pertumbuhan dari kuartal ke kuartal untuk subsektor peternakan menunjukkan pola yang paling stabil. Selama periode tahun 2004–2013, subsektor peternakan tumbuh dengan laju rata-rata 3,67%. Pertumbuhan terendah sebesar 2,13% terjadi pada tahun 2005, dan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,78% terjadi pada tahun 2011. Tidak terlihat secara nyata dampak negatif dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap laju pertumbuhan subsektor peternakan.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat Sementara

Gambar 12. Laju Pertumbuhan (Q to Q) PDB Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, 2004–2013

DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Di samping pertumbuhan PDB, alat ukur yang sering dipakai untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah adalah distribusi pendapatan per kapita. Ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah dapat

diukur dengan indeks Gini. Nilai indeks Gini yang rendah menunjukkan kecilnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah, dan sebaliknya, nilai indeks Gini yang tinggi di suatu daerah menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Sesuai dengan data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita didekati dengan pengeluaran per kapita. Tabel 1 menunjukkan nilai indeks Gini yang semakin besar, khususnya selama periode 2009–2013, yang menunjukkan semakin senjangnya distribusi pendapatan di Indonesia.

Gambar 13 menunjukkan keadaan indeks Gini per provinsi se-Indonesia pada tahun 2007, diurut dari yang rasio terkecil sampai yang terbesar. Indeks Gini yang terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,259, sedangkan indeks Gini tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,412. Adapun indeks Gini rata-rata untuk Indonesia adalah 0,364. Lima provinsi dengan nilai indeks Gini yang terendah, secara berturut-turut adalah Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Lima provinsi dengan nilai indeks Gini terbesar berturut-turut adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Lampung, dan Papua.

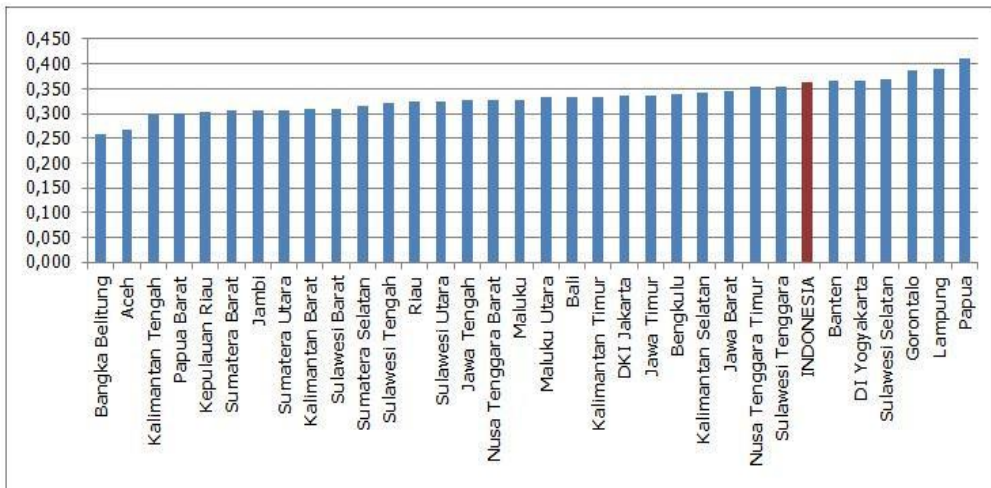
Tabel 1. Dinamika Pendapatan Nasional per Kapita dan Indeks Gini, 2003–2013

Tahun	Pendapatan (Rp juta/kap/thn)		Indeks Gini
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2003	6,17	6,17	0,329
2004	7,02	6,08	
2005	7,54	6,19	0,363
2006	8,11	6,26	
2007	9,19	6,61	0,364
2008	11,01	6,85	0,350
2009	13,01	7,03	0,370
2010	15,22	7,39	0,380
2011	19,09	7,93	0,410
2012	20,94	7,99	0,410
2013	23,97	8,49	0,413
Pertumbuhan (%/thn)			
2003–2008	18,75	4,86	1,13
2009–2013	11,26	4,36	3,41

Sumber: BPS (2014), diolah

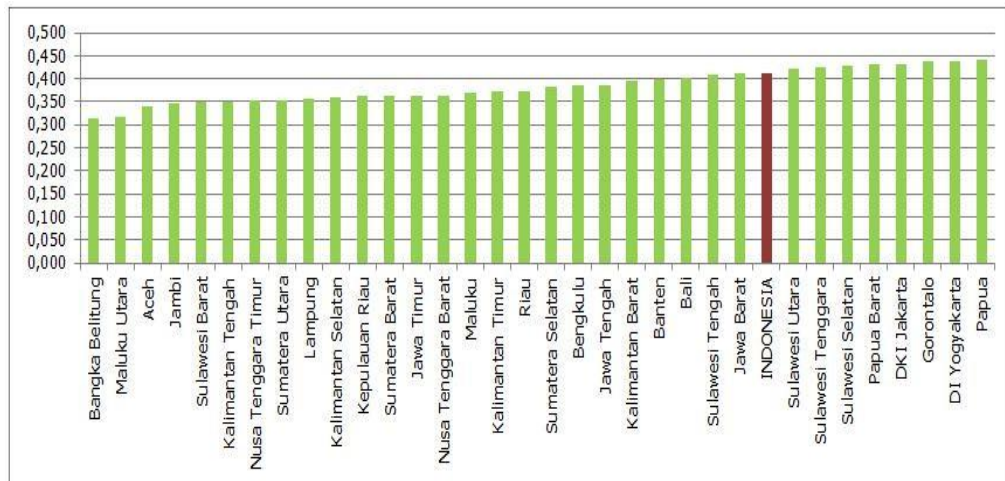
Gambar 14. menunjukkan gambaran indeks Gini per provinsi se-Indonesia pada tahun 2013. Data diurut dari rasio terkecil sampai rasio yang terbesar. Seperti yang terjadi pada tahun 2007, indeks Gini terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,313 atau naik 20,85% dari nilai tahun 2007. Demikian halnya dengan Provinsi Papua yang mempunyai indeks Gini terbesar di

Indonesia pada tahun 2007, tetap menjadi provinsi dengan indeks Gini terbesar pada tahun 2013 dengan nilai 0,442%, atau naik 7,28% dari nilai tahun 2007.



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 13. Indeks Gini Pengeluaran per Provinsi, 2007



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 14. Indeks Gini Pengeluaran per Provinsi, 2013

Rata-rata indeks Gini pada tahun 2013 untuk Indonesia adalah 0,413, atau naik 13,46% dari nilai pada tahun 2007. Dari Gambar 14 juga dapat diketahui bahwa lima provinsi dengan indeks Gini terendah berturut-turut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Aceh, Jambi, dan Sulawesi Barat. Lima provinsi dengan indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah Papua Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, DI Yogyakarta, dan Papua.

Dengan membandingkan Gambar 13 terhadap Gambar 14, dapat diketahui bahwa ada provinsi yang tetap pada posisi lima terendah dan lima tertinggi indeks Gininya. Dua provinsi yang tetap pada posisi lima terendah indeks Gininya adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Aceh. Adapun tiga provinsi yang tetap pada posisi lima terbesar indeks Gininya adalah DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua. Provinsi yang melonjak nilai indeks Gininya adalah Papua Barat, yang pada tahun 2007 masih berada di posisi lima indeks Gini yang terendah, menjadi lima indeks Gini tertinggi pada tahun 2013.

DINAMIKA PDRB MENURUT WILAYAH SE-INDONESIA

Di tingkat regional penggunaan PDB sebagai indikator perekonomian disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai-nilai dalam PDRB menggambarkan kinerja perekonomian makro di tingkat regional pada periode tertentu. Adanya faktor perbedaan kondisi perekonomian dan penguasaan sumber daya antardaerah menyebabkan struktur PDRB menjadi bervariasi antardaerah.

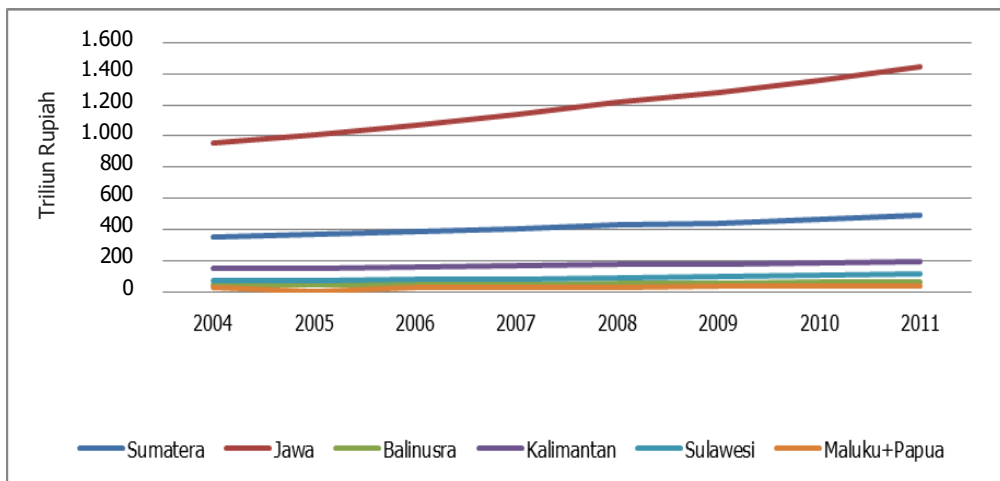
Dalam rangka percepatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah telah menyusun arahan strategis yang tersusun dalam suatu dokumen masterplan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 dan berlaku untuk periode pembangunan 2011–2025. Terdapat enam koridor ekonomi dalam MP3EI, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010).

Koridor ekonomi Sumatera sebagai pusat pembangunan pengolahan hasil bumi dan sumber energi nasional. Koridor Jawa untuk mendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan untuk pusat pengolahan hasil bumi dan hasil tambang nasional. Koridor Sulawesi untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Koridor Bali dan Nusa Tenggara untuk pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, dan Koridor Maluku dan Papua untuk pengembangan pangan perikanan, energi, dan pertambangan nasional.

Sebagaimana yang berlaku pada PDB, pertumbuhan PDRB juga menunjukkan besarnya pertumbuhan perekonomian regional/wilayah untuk periode pembangunan tertentu. Dari Gambar 15 terlihat bahwa selama periode 2004–2011 pembangunan di Jawa lebih maju sehingga tingkat perekonomian masyarakatnya lebih baik dibandingkan wilayah lain di luar Jawa (Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan terlebih Papua). Hal ini terlihat dari akumulasi nilai PDRB di provinsi-provinsi di Jawa yang lebih tinggi dibanding di wilayah luar Jawa (Gambar 15). Secara akumulatif nilai PDRB di Jawa meningkat dari Rp957,6 triliun menjadi Rp1.446,8 triliun pada periode di atas, atau tumbuh dengan laju 5,9%/tahun. Di wilayah lain pencapaian PDRB tidak lebih dari Rp600 triliun, terlebih di Maluku dan Papua.

Perbedaan nilai PDRB yang terlalu jauh mengesankan ketimpangan ekonomi yang cukup besar antara provinsi-provinsi di Jawa dengan provinsi lain di luar Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia. Indikasi ketimpangan ekonomi antarprovinsi sebelumnya juga dikemukakan oleh Kasryno dan Soeparno (2012) pada analisis terkait perspektif kebijakan MP3EI. Menurut Firdaus (2013) ketimpangan pembangunan adalah masalah historis yang dialami setiap negara. Dengan pola perkembangan PDRB seperti pada Gambar 15 dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi di luar Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, perlu lebih diintensifkan agar ketimpangan dapat segera dikurangi.

Perubahan secara temporal besaran dan laju PDRB penting diketahui para pengambil kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini karena data PDRB juga dapat memberikan informasi gambaran pencapaian hasil pembangunan di wilayahnya. Tabel 2–Tabel 4 memperlihatkan bagaimana variasi perkembangan PDRB di 33 provinsi di Indonesia. Dapat disimak bahwa kecuali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), seluruh provinsi memiliki PDRB yang berkembang dengan laju positif. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu analisis (2004–2011) masih meningkatkan kinerja perekonomian masyarakat. Perkembangan PDRB dengan laju negatif hanya terdapat di Provinsi NAD. Laju negatif disebabkan terjadi penurunan nilai PDRB tahun 2005–2011 dibanding nilai PDRB tahun 2004. Pada tahun 2004 nilai PDRB terbesar terdapat di Provinsi DKI Jaya (Rp278.525 miliar) diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp242.228,9 miliar) dan Jawa Barat (Rp230.003 miliar), sedangkan nilai PRDB terendah adalah di Provinsi Gorontalo (Rp1.891,7 miliar).



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 15. Perkembangan PDRB Menurut Wilayah, 2004–2011

Untuk tahun 2011 prestasi PDRB terbesar masih dipegang oleh Provinsi DKI Jaya (Rp422.162 miliar). Urutan berikutnya adalah Provinsi Jatim (Rp366.985 miliar) diikuti Jawa Barat (Rp343.111 miliar). Adapun nilai PDRB terendah terdapat di

Provinsi Gorontalo (Rp3.142 miliar), kemudian diikuti Provinsi Maluku Utara (Rp3.230 miliar). Nilai PDRB pada Tabel 2–Tabel 4 mengesankan bahwa kondisi perekonomian di tingkat regional cukup bervariasi dalam besaran angka sehingga indikasi ketimpangan juga jelas terlihat. Secara umum perekonomian provinsi-provinsi di Jawa memiliki skala atau tingkatan lebih besar dibanding provinsi lain di Luar Jawa. Akan tetapi, pertumbuhan perekonomian di Jawa relatif tidak berbeda jauh dengan provinsi lain di Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, maupun Papua.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Provinsi di Wilayah Sumatera, 2004–2011

Provinsi	PDRB (Rp Juta)		
	2004	2011**	Laju (%/tahun)
NAD	40.374.282	34.781.000	-3,89
Sumut	83.328.949	126.450.000	5,59
Sumbar	27.578.137	41.277.000	5,50
Riau	75.216.719	102.607.000	4,22
Jambi	11.953.885	18.964.000	5,81
Sumsel	47.344.395	68.012.000	4,72
Bengkulu	5.896.255	8.869.000	5,43
Lampung	28.262.289	40.829.000	4,80
Babel	8.414.980	11.575.000	3,87
Kepri	28.509.063	43.817.000	5,69

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 3. Perkembangan PDRB di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2004–2011

Provinsi	PDRB (Rpjuta)		
	2004	2011**	Laju (%/tahun)
DKI	278.524.822	422.162.000	5,46
Jabar	230.003.496	343.111.000	5,34
Jateng	135.789.872	198.226.000	4,99
DIY	16.146.424	22.129.000	4,12
Jatim	242.228.892	366.985.000	5,32
Banten	54.880.407	94.222.000	8,25
Bali	19.963.244	30.754.000	6,01
NTB	14.928.175	19.433.000	4,10
NTT	9.446.770	13.249.000	4,48

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 4. Perkembangan PDRB di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2004–2011

Provinsi	PDRB (Rp juta)		
	2004	2011**	Laju (%/tahun)
Kalbar	22.483.015,4	32.101.000	4,72
Kalteng	13.253.081,2	20.071.000	5,40
Kalsel	22.057.201,2	32.554.000	5,23
Kaltim	91.050.429,1	115.243.000	2,87
Sulut	12.149.501,3	19.736.000	6,52
Sulteng	10.925.464,7	19.241.000	7,28
Sulsel	37.291.394,1	55.116.000	5,00
Sultra	7.480.180,34	12.662.000	6,71
Gorontalo	1.891.763,28	3.142.000	6,65
Sulbar	-	5.238.000	7,29*
Maluku	3.101.995,94	4.507.000	4,75
Malut	2.128.208,25	3.230.000	5,24
Papbar	4.969.210,33	11.915.000	6,14
Papua	16.282.967,6	21.135.000	3,57

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Laju pertumbuhan tahun 2005-2011

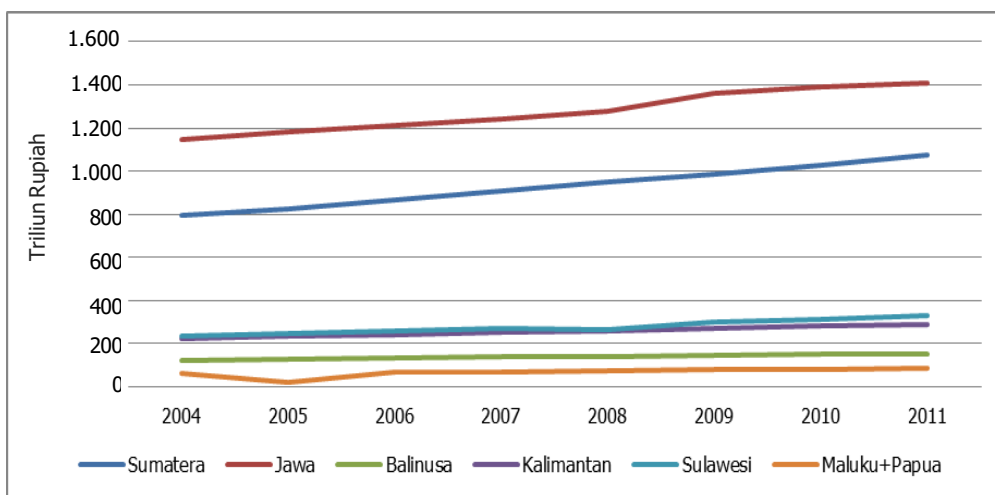
**Angka sangat sementara

PERUBAHAN PDRB PERTANIAN ANTARWILAYAH

Dalam struktur PDB Indonesia, pertanian masih menjadi lapangan usaha utama karena peran sektor tersebut yang strategis. Tidak hanya menjadi sumber produksi pangan dan penyumbang nilai PDB, sektor pertanian juga sebagai penampung tenaga kerja yang besar. Menurut pemikiran teori pembangunan modern, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB akan semakin berkurang dengan semakin majunya perekonomian suatu negara atau wilayah (Todaro, 2000), tetapi penurunan kontribusi tersebut akan terkompensasi oleh peningkatan kontribusi peran sektor lain (sekunder atau tersier). Penurunan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB seharusnya juga diikuti oleh penurunan peran sebagai penampung tenaga kerja.

Sektor pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah sektor pertanian dalam arti luas, yaitu yang tidak hanya mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hasil turunannya, tetapi juga mencakup produk perikanan dan kehutanan (Pusdatin, 2013) yang pengelolaannya di luar tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Pertanian dalam arti sempit adalah jika nilai tambah produk perikanan dan kehutanan dikeluarkan dari perhitungan.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia; (2) pertumbuhan penduduk, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi.



Sumber: BPS (2014), diolah

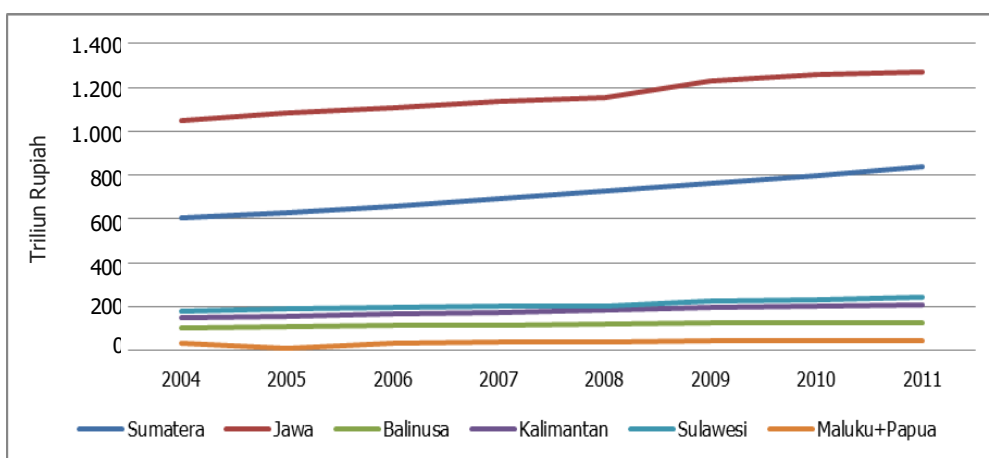
Gambar 16. Perkembangan PDRB Pertanian Arti Luas Menurut Wilayah, 2004–2011

Indikasi ketimpangan juga dapat diamati di tingkat sektoral, khususnya sektor atau lapangan usaha pertanian (pertanian dalam arti luas maupun sempit). Jika dibandingkan antarwilayah tampak bahwa nilai PDRB pertanian di wilayah Jawa lebih besar dibandingkan wilayah luar Jawa selama periode 2004–2011 (Gambar 16 dan Gambar 17). Nilai PDRB pertanian dalam arti luas di Jawa meningkat dari Rp114,7 triliun menjadi Rp140,9 triliun selama kurun 2004–2011, sedangkan PDRB pertanian dalam arti sempit meningkat dari Rp104,9 triliun menjadi Rp127,1 triliun dalam periode yang sama; atau masing-masing meningkat dengan laju 3,1%/tahun dan 3,0%/tahun. Situasi tersebut juga mengindikasikan bahwa sektor pertanian di Jawa memiliki kinerja relatif lebih baik daripada sektor pertanian di tempat lain.

Secara implisit peningkatan PDRB pertanian tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya (faktor-faktor produksi) untuk pengembangan pertanian dan perekonomian secara umum lebih intensif di Jawa dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Jumlah penduduk Jawa yang besar diduga menjadi salah satu faktor pendorong naiknya kebutuhan dasar kehidupan. Peningkatan kebutuhan dasar tersebut memicu kenaikan permintaan terhadap berbagai produk barang dan jasa. Semakin besarnya tingkat permintaan akhirnya akan mendorong aktivitas produksi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan menjadi lebih intensif.

Telah disebutkan bahwa pemerintah melalui program MP3EI berencana mengalihkan sentra pertumbuhan pertanian dari Jawa ke Sulawesi dan mendorong

pengembangan sektor industri dan jasa di Jawa. Memerhatikan ketersediaan faktor sumber daya dan kinerja sektor pertanian di Jawa serta berbagai kendala yang ada, rencana pengembangan sektor industri dan jasa di Jawa hendaknya tetap dapat memberikan prioritas pada jenis industri dan jasa yang menggunakan output pertanian sebagai bahan/faktor produksi (input industri). Tujuannya agar sektor pertanian yang sudah berkembang di Jawa dapat dipertahankan. Jika pengembangan industri dan jasa dalam program MP3EI tidak disinkronkan dengan upaya pengembangan hasil pertanian, sumber daya pertanian yang sudah tersedia dan atau siap olah dikhawatirkan akan kurang termanfaatkan sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di wilayah Jawa. Sebagaimana analisis Kasryno dan Soeparno (2012), implementasi MP3EI di koridor Jawa dan upaya mengalihkan sentra pertanian ke Sulawesi diperkirakan akan menurunkan kinerja ketahanan pangan nasional.



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 17. Perkembangan PDRB Pertanian Arti Sempit Menurut Wilayah, 2004–2011

Dari Gambar 16 dan Gambar 17 terlihat jelas bahwa Jawa tidak hanya memiliki nilai PDRB pertanian yang lebih besar tetapi juga kemiringan (*slope*) PDRB yang relatif lebih tajam sehingga mengesankan perkembangan perekonomian Jawa yang lebih progresif dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Apabila sentra pertanian yang sudah mapan ditinggalkan dan beralih ke lokasi lain yang belum berkembang, di samping membuat investasi pertanian yang sudah ada di Jawa menjadi sia-sia, dikhawatirkan juga akan mengganggu kinerja produksi pangan, di tingkat regional maupun nasional, dan juga mengganggu (menurunkan) kesejahteraan petani.

Perkembangan PDRB pertanian selama periode 2004–2011 tidak menunjukkan pola berbeda dari pola umum perkembangan PDRB wilayah (Tabel 5–Tabel 7). Akan tetapi, terdapat indikasi yang menarik bahwa laju perkembangan PDRB pertanian provinsi-provinsi di Jawa cenderung lebih rendah dibandingkan laju perkembangan PDRB pertanian di luar Jawa meskipun pencapaian nominal PDRB pertanian di Jawa tetap lebih besar dibandingkan di luar Jawa. Situasi demikian

diduga tidak lepas dari pengaruh fenomena perlambatan laju produksi (khususnya pangan) yang sudah terjadi cukup lama di Jawa. Wilayah Jawa masih mendominasi produksi subsektor pangan, tetapi dengan laju peningkatan yang semakin rendah. Faktor lain yang diduga turut berpengaruh terhadap perlambatan sektor pertanian adalah laju pertumbuhan ekspor yang rendah (Bank Indonesia, 2013).

Tabel 5. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Sumatera, 2004–2011

Provinsi	Sektor Pertanian Arti Luas (Rp juta)			Sektor Pertanian Arti Sempit (Rp juta)		
	2004	2011**	Laju (%/th)	2004	2011**	Laju (%/th)
NAD	8.068.976	9.350.000	1,20	6.121.251	7.277.000	1,36
Sumut	21.465.423	29.376.000	4,10	18.041.705	24.731.000	4,09
Sumbar	6.937.173	9.415.000	4,56	5.649.917	7.857.000	4,96
Riau	12.464.887	17.354.000	4,80	6.628.956	10.529.000	5,98
Jambi	3.643.691	5.581.000	6,00	3.197.549	5.103.000	6,56
Sumsel	9.261.544	13.132.000	4,91	7.035.474	10.340.000	5,55
Bengkulu	2.344.921	3.283.000	5,22	1.975.348	2.874.000	5,73
Lampung	11.951.916	15.628.000	4,09	10.306.575	13.110.000	3,38
Babel	1.883.821	2.596.000	3,86	1.233.476	1.752.000	3,96
Kepri	1.388.219	1.871.000	4,36	377.277	513.000	3,82

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2004–2011

Provinsi	Sektor Pertanian Arti Luas			Sektor Pertanian Arti Sempit		
	2004	2011**	Laju (%/th)	2004	2011**	Laju (%/th)
DKI	287.574	306.000	1,03	198.583	199.000	0,13
Jabar	34.457.717	42.101.000	3,30	31.921.617	39.552.000	3,59
Jateng	28.606.237	35.422.000	3,29	26.390.791	32.763.000	3,37
DIY	3.052.935	3.555.000	3,35	2.815.790	3.267.000	3,29
Jatim	43.331.493	52.629.000	2,77	39.049.115	45.240.000	1,81
Banten	4.930.267	6.921.000	4,34	4.487.676	6.110.000	3,76
Bali	4.406.176	5.874.000	4,75	3.583.528	4.636.000	3,87
NTB	3.841.308	4.727.000	2,67	3.326.767	4.056.000	2,45
NTT	4.022.907	4.760.000	2,95	3.637.039	4.251.000	2,78

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 7. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2004–2011

Provinsi	Sektor Pertanian Arti Luas			Sektor Pertanian Arti Sempit		
	2004	2011**	Laju (%/th)	2004	2011**	Laju (%/th)
Kalbar	5.715.853	7.911.000	4,66	4.815.838	6.870.000	5,03
Kalteng	5.240.883	6.002.000	1,33	3.538.349	4.561.000	2,99
Kalsel	5.403.507	7.544.000	5,22	4.146.698	5.901.000	5,73
Kaltim	6.153.325	7.619.000	2,39	2.472.029	3.641.000	5,89
Sulut	2.617.084	3.595.000	4,62	1.994.000	2.724.000	4,68
Sulteng	4.972.230	7.529.000	5,38	3.732.595	5.638.000	5,42
Sulsel	12.321.030	14.737.000	2,49	9.622.378	10.896.000	1,87
Sultra	2.798.071	3.669.000	4,68	1.970.087	2.347.000	3,54
Gorontalo	575.307	886.000	6,40	477.413	717.000	6,15
Sulbar	0	2.420.000	17,25	0	2.059.000	16,45*
Maluku	1.058.272	1.378.000	3,29	527.740	660.000	3,14
Malut	759.077	1.093.000	5,31	606.784	897.000	5,72
Papbar	1.540.907	2.044.000	4,21	471.126	711.000	6,16
Papua	2.921.790	3.842.000	3,66	1.658.791	2.351.000	5,39

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Laju pertumbuhan tahun 2005–2011

**Angka sangat sementara

Di wilayah Sumatera, sentra pertanian terdapat terutama di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Baik untuk pertanian dalam arti luas maupun sempit keempat provinsi tersebut konsisten sebagai daerah dengan PDRB pertanian yang relatif "besar" (di atas Rp10.000 miliar pada tahun 2011) dibanding provinsi lain di Sumatera (Tabel 5). Untuk di Jawa, daerah yang merupakan sentra pertanian adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di ketiga provinsi ini nilai PDRB pertanian mencapai lebih dari Rp30.000 miliar. Adapun untuk Kawasan Timur Indonesia nilai PDRB yang lebih dari Rp10.000 miliar hanya terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari ketiga tabel (Tabel 5–Tabel 7) terlihat bahwa pulau Jawa masih berperan sebagai daerah sentra pertanian di Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengembangan wilayah yang dicanangkan pemerintah hendaknya tidak mengabaikan dan tetap mengakomodasi peran Jawa tersebut agar kinerja sektor pertanian tidak terganggu.

Pada Tabel 8–Tabel 10 dapat disimak bahwa sebagian besar provinsi memiliki pola perkembangan kontribusi sektor pertanian sesuai teori. Varian atau penyimpangan pola hanya ditemukan di Provinsi NAD, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, dan Papua. Di ketujuh provinsi tersebut kontribusi (pangsa) sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2004 menuju tahun 2011 justru meningkat (lebih besar). Padahal, pada periode yang sama, di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan (kecuali

Kalimantan Timur), Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun (berkurang).

Pada tahun 2004 kontribusi sektor pertanian dalam arti luas di Jawa berkisar 0,1% (DKI) sampai 21,1% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2011 berubah menjadi 0,1% sampai 17,9%, masing-masing untuk provinsi yang sama. Kontribusi yang sangat rendah (seperti di Provinsi DKI) mengindikasikan peran sektor pertanian tidak lagi menjadi andalan wilayah perkotaan ini.

Tabel 8. Pangsa Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Wilayah Sumatera, 2004 dan 2011 (%)

Provinsi	Tanaman Pangan		Ternak dan Kebun		Pertanian Arti Luas		Pertanian Arti Sempit	
	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**
NAD	8,06	11,12	7,10	9,80	19,99	26,88	15,16	20,92
Sumut	9,19	7,43	12,46	12,13	25,76	23,23	21,65	19,56
Sumbar	12,76	11,44	7,73	7,59	25,15	22,81	20,49	19,03
Riau	2,19	1,95	6,62	8,32	16,57	16,91	8,81	10,26
Jambi	11,66	10,59	15,09	16,32	30,48	29,43	26,75	26,91
Sumsel	4,69	4,51	10,17	10,69	19,56	19,31	14,86	15,20
Bengkulu	18,11	16,69	15,39	15,72	39,77	37,02	33,50	32,41
Lampung	21,32	18,38	15,15	13,73	42,29	38,28	36,47	32,11
Babel	2,61	2,88	12,05	12,26	22,39	22,43	14,66	15,14
Kepri	0,27	0,26	1,05	0,91	4,87	4,27	1,32	1,17

Sumber: BPS (2014), diolah Keterangan:

**Angka sangat sementara

Tabel 9. Pangsa Sektor Pertanian terhadap PDRB di Wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, 2004 dan 2011 (%)

Provinsi	Tanaman Pangan		Ternak dan Kebun		Pertanian Arti Luas		Pertanian Arti Sempit	
	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**
DKI	0,05	0,03	0,02	0,02	0,10	0,07	0,07	0,05
Jabar	10,80	9,26	3,07	2,27	14,98	12,27	13,88	11,53
Jateng	15,23	12,39	4,21	4,14	21,07	17,87	19,44	16,53
DIY	14,19	11,98	3,25	2,78	18,91	16,06	17,44	14,76
Jatim	10,41	7,84	5,72	4,49	17,89	14,34	16,12	12,33
Banten	5,83	4,10	2,35	2,38	8,98	7,35	8,18	6,48
Bali	11,66	9,34	6,29	5,74	22,07	19,10	17,95	15,07
NTB	15,34	14,58	6,94	6,29	25,73	24,32	22,29	20,87
NTT	22,05	17,40	16,45	14,69	42,58	35,93	38,50	32,09

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 10. Pangsa Sektor Pertanian terhadap PDRB di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2004 dan 2011 (%)

Provinsi	Tanaman Pangan		Ternak dan Kebun		Pertanian Luas		Pertanian Sempit	
	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**
Kalbar	9,83	9,84	11,59	11,56	25,42	24,64	21,42	21,40
Kalteng	7,53	4,41	19,17	18,31	39,54	29,90	26,70	22,72
Kalsel	10,97	10,37	7,83	7,75	24,50	23,17	18,80	18,13
Kaltim	1,23	1,23	1,48	1,93	6,76	6,61	2,72	3,16
Sulut	6,36	5,61	10,06	8,19	21,54	18,22	16,41	13,80
Sulteng	14,61	11,96	19,56	17,34	45,51	39,13	34,16	29,30
Sulsel	15,09	12,91	10,71	6,86	33,04	26,74	25,80	19,77
Sultra	7,95	5,62	18,39	12,91	37,41	28,98	26,34	18,54
Gorontalo	13,76	13,49	11,47	9,33	30,41	28,20	25,24	22,82
Sulbar	-	16,25	-	23,06	-	46,20	-	39,31
Maluku	8,76	7,23	8,25	7,41	34,12	30,57	17,01	14,64
Malut	9,46	8,76	19,05	19,01	35,67	33,84	28,51	27,77
Papbar	5,11	3,04	4,37	2,93	31,01	17,15	9,48	5,97
Papua	8,43	8,82	1,76	2,30	17,94	18,18	10,19	11,12

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Jika subsektor perikanan dan kehutanan tidak diperhitungkan (sektor pertanian dalam arti sempit), terlihat bahwa kontribusi pertanian terhadap PDB (PDRB) menjadi lebih rendah lagi. Pada tahun 2004 berkisar 0,1% (DKI) sampai 19,4% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2011 menjadi 0,1% dan 16,5% untuk provinsi yang sama. Di Jawa Barat dan Jawa Timur yang memiliki nilai PDRB lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah ternyata kontribusi sektor pertaniannya lebih rendah dibanding Jawa Tengah (Tabel 9). Pada tahun 2004 dan 2011 pangsa sektor pertanian di kedua provinsi masing masing hanya 13,9% dan 11,5% (Jawa Barat) serta 17,4% dan 14,8% (Jawa Timur).

Di wilayah Sumatera, kontribusi sektor pertanian secara luas pada tahun 2004 berkisar 4,9% (Kepulauan Riau) sampai 42,3% (Lampung). Pada tahun 2011, besaran kontribusi berubah menjadi 4,3% (Kepulauan Riau) sampai 38,3% (Lampung). Dari Tabel 8 terkesan bahwa di wilayah Lampung, dan Bengkulu sektor pertanian memiliki peran lebih dominan terhadap perekonomian wilayah dibandingkan di tempat lain. Kecenderungan seperti itu tidak berubah meskipun perkebunan dan perikanan dikeluarkan dari perhitungan.

Di wilayah Kalimantan peran sektor pertanian dalam perekonomian masih relatif dominan, kecuali di Provinsi Kalimantan Timur (Tabel 10). Di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2004 bervariasi 24,5% sampai 39,5%. Adapun pada

tahun 2011 nilai kontribusi bervariasi 23,2% sampai 29,9%. Bila dalam arti sempit kisaran kontribusi pertanian berkurang menjadi 18,8% sampai 26,7% pada tahun 2004 dan pada tahun 2011 kisaran kontribusi berkurang menjadi 18,3% sampai 22,7%.

Sektor pertanian di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat juga masih berperan strategis dalam perekonomian masyarakat. Pada tahun 2004 kontribusi sektor pertanian umumnya mencapai lebih dari 30,0%. Hanya di Provinsi Sulawesi Utara yang kontribusi sektor pertanian kurang dari 30,0%. Pada tahun 2011 besaran kontribusi sektor pertanian di beberapa provinsi di wilayah tersebut mengalami penurunan sehingga yang bertahan di atas 30,0% hanya di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Kontribusi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 46,2% di tahun 2011. Akan tetapi, angka ini tidak dapat dibandingkan karena pada saat tahun 2004 data kontribusi belum tersedia.

Sektor pertanian secara internal terdiri atas beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Akan tetapi, pada data yang digunakan untuk analisis ini, subsektor tanaman pangan digabungkan dengan subsektor hortikultura. Demikian pula data subsektor peternakan digabung dengan subsektor perkebunan sehingga sektor pertanian hanya terbagi atas subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan dan perkebunan. Tabel 8–Tabel 10 menunjukkan bahwa wilayah yang kontribusi tanamannya lebih tinggi dari kontribusi peternakan dan perkebunan meliputi Provinsi NAD, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Sebaliknya, wilayah di mana kontribusi peternakan dan perkebunan lebih tinggi dibandingkan kontribusi tanaman pangan adalah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

KESIMPULAN

Selama periode 2004–2013 nilai PDB nasional atas harga berlaku naik sebesar 3,96 kali lipat. Namun, PDB atas harga konstan tahun 2000 dalam periode yang sama hanya naik sebesar 1,67 kali lipat. Hal ini mengindikasikan bahwa angka inflasi nilai rupiah selama periode ini cukup besar, sehingga daya beli masyarakat secara riil sebenarnya tidak naik sebesar pertumbuhan PDB atas harga berlaku.

Pada tahun 2004, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sekitar 14% dari total PDB nasional. Selama periode 2004–2013 peran sektor pertanian terhadap PDB nasional tidak mengalami perubahan yang nyata, sehingga sumbangan sektor ini pada tahun 2013 masih tetap, yaitu 14%.

Sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB cenderung menurun dari 12,24% pada tahun 2000 menjadi 10,59% pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa telah

terjadi transformasi ekonomi nasional dari sektor pertanian dalam arti sempit sebagai sumber pendapatan nasional, menuju ke dominasi sektor nonpertanian sebagai sumber pendapatan.

Dibanding dengan subsektor tanaman bahan pangan dan subsektor tanaman perkebunan, pertumbuhan dari kuartal ke kuartal untuk subsektor peternakan menunjukkan pola yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan relatif kuatnya daya tahan subsektor peternakan terhadap gejolak ekonomi nasional.

Pendapatan nasional per kapita selama periode 2003–2013 naik cukup signifikan, baik pendapatan per kapita menurut harga yang berlaku, maupun pendapatan berdasarkan harga konstan tahun 2000. Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan tersebut cenderung melambat pada periode 2009–2013.

Data BPS menunjukkan bahwa nilai indeks Gini untuk pendapatan per kapita yang semakin besar, khususnya selama periode 2009–2013. Hal ini menunjukkan semakin senjangnya distribusi pendapatan di Indonesia dari waktu ke waktu. Kesenjangan ekonomi juga terjadi antarwilayah. Pada tahun 2013 indeks Gini terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan indeks Gini terbesar terdapat di Provinsi Papua.

Selama periode 2004–2011 pertumbuhan PDRB di Jawa relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB di luar Jawa. Hal ini menunjukkan adanya akumulasi nilai ekonomi nasional di provinsi-provinsi di Jawa.

Nilai PDRB pertanian di wilayah Jawa relatif lebih besar dibandingkan wilayah luar Jawa. Situasi tersebut juga mengindikasikan bahwa pembangunan sektor pertanian di Jawa relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor pertanian di luar Jawa.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB cenderung turun mengindikasikan terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor lain di luar pertanian. Terkait dengan kecenderungan tersebut rumah tangga tani di perdesaan perlu dipersiapkan agar mereka mempunyai kemampuan untuk menganekaragamkan sumber pendapatan rumah tangga dengan mengembangkan kegiatan usaha lain yang lebih produktif.

Di samping itu, menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan sektor nonpertanian, seperti industri pengolahan hasil pertanian dan industri perdesaan, yang diharapkan dapat menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas pembangunan sarana dan prasarana pertanian di kawasan timur Indonesia, serta mempercepat konektivitas antarwilayah di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor pertanian pada khususnya. Demikian pula pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan program reforma agraria untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber daya lahan dan mengatasi meningkatnya kesenjangan pendapatan petani di perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Tabel Dinamis. Badan Pusat Statistik. Jakarta. <http://www.bps.go.id> (4 Oktober 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015a. Berita Resmi Statistik. No. 45/04/Th. XVIII, 5 Mei 2015. Badan Pusat Statistik. Jakarta. <http://www.bps.go.id> (14 September 2015).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015b. Data Sosial dan Kependudukan. Badan Pusat Statistik. Jakarta. <http://www.bps.go.id> (14 September 2015).
- Firdaus, M. 2013. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Kasryno, F. dan H. Soeparno. 2012. Pelaksanaan MP3EI Koridor Jawa akan Menyebabkan Ketahanan Pangan Nasional Semakin Parah. *Dalam* E.E. Ananto, S. Pasaribu, M. Ariani, B. Sayaka, N.S. Saad, K. Suradisastra, K. Subagyo, H. Soeparno, F. Kasryno, E. Pasandaran, dan R. Hermawanto (Eds.). Kemandirian Pangan Indonesia dalam Perspektif Kebijakan MP3EI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. hlm. 16–58.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2010. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.
- Kusumawardhani, N.M.S., I.G.A.M. Sriandi, dan M. Susilawati. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDB Indonesia dengan Persamaan Simultan 2SLS. *e-Jurnal Matematika* 1(1):99–102.
- [Pusdatin] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2013. Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2013. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2013. Laporan Perekonomian Indonesia 2012. Bank Indonesia. Jakarta. <http://www.bi.go.id>. (2 Agustus 2014)
- Raz, A.F., T.P.K. Indra, D.K. Artikasih, dan S. Citra. 2012. Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis dari Perekonomian Asia Timur. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2012:37–56.
- Sihono, T. 2009. Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat terhadap Perekonomian Asia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 6(1):1–20.
- Silvia, E.D., Y. Wardi, dan H. Aimon. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi* 1(2):224–243.
- Todaro, M.P. 2000. *Economics Development*. 7th edn. Addison Wesley Longman, Inc. Boston.

DINAMIKA STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI DESA SAWAH BERBASIS PADI

Erma Suryani dan Supriyati

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2014a), pendapatan rumah tangga adalah seluruh penghasilan atau penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh, baik yang berupa upah/gaji, pendapatan dari usaha rumah tangga, pendapatan lainnya, dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Dengan kata lain, pendapatan rumah tangga merupakan balas jasa faktor produksi tenaga kerja, balas jasa kapital, maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pendapatan sektor pertanian dan nonpertanian. Sumber pendapatan dari sektor pertanian terdiri atas pendapatan dari usaha tani, ternak, buruh petani, menyewakan lahan, dan bagi hasil. Sumber pendapatan dari sektor nonpertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh nonpertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya (Sajogyo, 1990). Pendapatan rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi secara langsung, di samping pangsa pengeluaran pangan, nilai tukar petani, kemiskinan, dan kecukupan kalori (Purwoto *et al.*, 2011).

Berdasarkan Survei Pendapatan Rumah Tangga, dalam periode 2004–2013 rata-rata pendapatan rumah tangga usaha pertanian meningkat, dari Rp4,105 juta menjadi Rp12,413 juta atau meningkat sekitar 200% (BPS, 2014b). Dilihat dari strukturnya, pendapatan dari usaha pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan rumah tangga, yaitu 44% pada 2003 dan 46% pada tahun 2013. Dalam periode tersebut, kontribusi pendapatan dari berburuh di sektor pertanian dan usaha di luar sektor pertanian cenderung menurun, sementara pendapatan berburuh di luar sektor pertanian cenderung meningkat.

Dari sumber yang sama, struktur pendapatan dari usaha pertanian dalam periode 2004–2013 dapat disampaikan sebagai berikut: (1) kontribusi pendapatan terbesar adalah dari tanaman perkebunan (sekitar 33%), tidak terjadi pergeseran, bahkan kontribusi cenderung meningkat; (2) kontribusi pendapatan dari tanaman padi menduduki peringkat kedua, yaitu sekitar 25%; (3) kontribusi pendapatan dari tanaman hortikultura cenderung menurun, dan kontribusinya sekitar 10%; dan (4) kontribusi pendapatan dari tanaman palawija relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan dari tanaman padi, hanya sekitar 7% dan mengalami kecenderungan menurun.

Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) menunjukkan bahwa usaha pertanian di Indonesia didominasi oleh jenis usaha rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau jenis usaha pertanian lainnya. Jumlah

rumah tangga usaha pertanian di Indonesia hasil ST2013 tercatat sebanyak 26,14 juta rumah tangga, menurun sebesar 16,32% dari hasil Sensus Pertanian 2003 (ST2003) yang tercatat sebanyak 31,23 juta rumah tangga. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu sebanyak 4,98 juta rumah tangga, sedangkan Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak (Badan Pusat Statistik, 2013, 2014b). Usaha pertanian di tingkat rumah tangga yang banyak diusahakan adalah tanaman pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan. Jumlah rumah tangga petani padi paling dominan dibandingkan dengan rumah tangga lainnya, yaitu sekitar 14 juta. Pada periode 2003–2013, terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani padi sebesar 0,41%. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengkaji dinamika di perdesaaan sawah berbasis padi. Secara khusus tujuan penulisan makalah ini adalah (1) mengkaji dinamika pendapatan rumah tangga (nominal dan riil); (2) mengkaji struktur pendapatan rumah tangga; dan (3) mengkaji distribusi pendapatan rumah tangga.

METODE ANALISIS

Data yang digunakan dalam analisis adalah data rumah tangga yang bersumber dari data Patanas pada tipe desa sawah berbasis padi tahun 2007 dan 2010 di lima provinsi sentra produksi padi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, yang mencakup 14 desa di 14 kabupaten. Sebaran desa contoh Patanas dengan tipe desa sawah berbasis padi ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Desa Contoh Patanas Berbasis Padi Sawah Menurut Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, 2007 dan 2010

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1.	Sumut	Batu Bara	Lima Puluh	Kwala Gunung
		Serdang Bedagai	Perbaungan	Lidah Tanah
2.	Jabar	Indramayu	Lelea	Tugu
		Subang	Cipunegara	Simpar
		Karawang	Kutawaluya	Sindangsari
3.	Jateng	Cilacap	Majenang	Padangsari
		Klaten	Karang Dowo	Demangan
		Sragen	Karang Malang	Mojorejo
		Pati	Jakenan	Tambah Mulyo
3.	Jatim	Jember	Jombang	Padomasan
		Banyuwangi	Genteng	Kaligundo
		Lamongan	Sekaran	Sungegeneng
4.	Sulsel	Sidrap	Watang Pulu	Carawali
		Luwu	Lamasi	Salujambu

Sumber: Irawan *et al.* (2007), Susilowati *et al.* (2010)

Pada tulisan ini dilakukan agregasi menurut provinsi, yaitu Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Utara (Sumut), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Responden penelitian Patanas 2007 adalah rumah tangga pemilik lahan dan penggarap usaha tani padi sebanyak 25 rumah tangga pada masing-masing desa. Pada Penelitian Patanas 2010, responden diperluas tidak hanya petani, namun ditambah dengan buruh tani, usaha nonpertanian, dan buruh nontani. Dengan demikian, jumlah responden per desa sebanyak 40 rumah tangga, yang terdiri dari 4 kelompok menurut jenis pekerjaan utama, yaitu (a) petani, (b) buruh tani, (c) usaha nonpertanian, dan (d) buruh nonpertanian.

Analisis pendapatan rumah tangga ditujukan untuk memahami besarnya tingkat pendapatan rumah tangga, distribusi pendapatan rumah tangga, dan struktur pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga antarwaktu dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya daya beli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Analisis struktur pendapatan rumah tangga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar lapangan kerja dan usaha pertanian mampu berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Distribusi pendapatan rumah tangga yang diukur dengan indeks Gini dapat digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan rumah tangga sebagai akibat ketidakmerataan aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi.

Metode analisis untuk mengetahui dinamika pendapatan secara nominal adalah dengan menghitung pertumbuhannya dengan rumus (1), sementara untuk mengetahui dinamika pendapatan riil dilakukan dengan mendeflasi pendapatan nominal dengan harga beras. Harga beras yang digunakan sebagai deflator adalah modus harga beras di masing-masing desa.

$$R = (Y_i - Y_{i-1}) / Y_{i-1} \times 100\% \quad (1)$$

di mana: R = pertumbuhan periode awal dan akhir (%)

Y_i = pendapatan tahun akhir

Y_{i-1} = pendapatan tahun awal

Untuk menghitung parameter struktur pendapatan rumah tangga menurut sumbernya digunakan rumus sebagai berikut:

$$P_m = \left[\sum_{i=1}^n X_{ki} \right] / \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} \right] \times 100\% \quad (2)$$

di mana: P_m = pangsa sumber pendapatan ke- k terhadap total pendapatan rumah tangga contoh (%)

X_{ki} = pendapatan dari sumber pendapatan ke- k dari rumah tangga ke- i

X_{ij} = pendapatan dari sumber pendapatan ke- j dari rumah tangga ke- i

$$\sum_{i=1}^n X_{ki} = \text{pendapatan dari sumber pendapatan ke-}k \text{ dari seluruh rumah tangga contoh}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} = \text{total pendapatan (dari berbagai sumber pendapatan) dari seluruh rumah tangga contoh}$$

Untuk mengetahui distribusi pendapatan rumah tangga, digunakan suatu indeks sebagai ukuran ketimpangan, yaitu indeks Gini yang diformulasikan sebagai berikut (Glewwe, 1986; Adams *et al.*, 1995 *dalam* Susilowati *et al.*, 2010):

$$G(y) = \frac{2}{\bar{y}} \sum_{i=1}^n \frac{y_i p(y_i)}{n} \quad (3)$$

di mana: $G(y)$ = indeks Gini total pendapatan rumah tangga
 \bar{y} = rata-rata pendapatan rumah tangga
 y_i = total pendapatan rumah tangga ke- i
 $p(y_i)$ = urutan pendapatan petani, yaitu $p = 1$ untuk urutan rumah tangga berpendapatan terendah dan $p = n$ untuk urutan rumah tangga berpendapatan tertinggi
 n = jumlah populasi rumah tangga yang dianalisis

Nilai G berada pada selang 0 dan 1. Distribusi termasuk kategori timpang apabila nilai $G > 0,5$; kategori sedang bila $0,1 < G < 0,5$; dan kategori ketimpangan ringan apabila $G < 0,4$.

DINAMIKA PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Lahan merupakan aset utama bagi rumah tangga petani dan merupakan faktor produksi utama dalam usaha tani. Lahan berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani (dalam hal ini pendapatan dari usaha tani) lewat luasnya dan atau kesuburannya. Maksudnya, pada lahan dengan tingkat kesuburan tertentu pendapatan dari usaha tani akan semakin tinggi dengan semakin luasnya lahan garapan. Di sisi lain, pada luas lahan tertentu pendapatan dari usaha tani akan semakin tinggi dengan semakin tingginya tingkat kesuburan tanah yang bersangkutan (Purwoto *et al.*, 2011).

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum penguasaan lahan rumah tangga pada tipe lahan sawah berbasis padi cenderung menurun, bahkan di Sumut terjadi penurunan yang relatif besar dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan di Sulsel cenderung meningkat (Tabel 2). Menurut Susilowati *et al.* (2010), penurunan terjadi pada lahan sawah dan lahan perkebunan. Penurunan luas total pemilikan lahan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penguasaan lahan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, walaupun secara rata-rata tidak besar. Hal ini disebabkan adanya transaksi jual-beli, hibah, atau warisan. Peningkatan

penguasaan lahan di Sulsel disebabkan oleh adanya penambahan penguasaan pada lahan kebun.

Tabel 2. Dinamika Penguasaan Lahan Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007–2010

Provinsi	2007	2010	Pertumbuhan (%)
Jabar	1,558	1,518	-2,57
Jateng	0,856	0,834	-2,57
Jatim	0,731	0,729	-0,27
Sulsel	1,113	1,134	1,89
Sumut	1,150	0,945	-17,83

Pendapatan rumah tangga per tahun di desa Patanas dengan agroekosistem lahan sawah berbasis padi pada tahun 2007 berkisar Rp11,7 juta–Rp25,9 juta, dan pada tahun 2010 berkisar Rp26,2–Rp41,0 juta. Dengan demikian, dalam periode tiga tahun (2007–2010) pendapatan rumah tangga secara nominal di semua lokasi meningkat dengan laju peningkatan berkisar 58,40–163,33% (Tabel 3). Peningkatan terbesar terjadi di Sulsel dan terendah di Jabar. Dari kelima lokasi, laju peningkatan yang di bawah 100% terjadi di Jabar dan Sumut, sementara di ketiga provinsi lainnya di atas 100%.

Dinamika pendapatan dari sektor pertanian berkisar 35,44–109,98%. Peningkatan terbesar terjadi di Sulsel dan terendah di Jabar (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pendapatan dari pertanian masih dominan. Rendahnya peningkatan pendapatan pertanian di Jabar disebabkan oleh menurunnya kontribusi pendapatan dari kegiatan berburuh tani serta pertumbuhan pendapatan dari usaha pertanian berbasis lahan yang tidak begitu besar. Pada wilayah ini, usaha peternakan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan yang cukup besar (Tabel 4). Tingginya peningkatan pendapatan pertanian di Sulsel disebabkan peningkatan pendapatan dari usaha peternakan dan atau perikanan yang relatif besar.

Peningkatan pendapatan nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan pertanian (123,42–450,28% vs. 35,44–109,98%). Menurut Susilowati *et al.* (2010), hal ini disebabkan petani harus mencari tambahan sumber penghasilan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan dan harga-harga tersebut. Fenomena ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya sumber pendapatan dan semakin meningkatnya partisipasi kerja, terutama dari sektor nonpertanian. Dari Tabel 4 juga terlihat bahwa peningkatan pendapatan dari usaha nonpertanian sangat besar (3.000–19.000%), kecuali di Sulsel. Pendapatan dari kegiatan berburuh nonpertanian juga meningkat tajam, berkisar 146–1.400%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa di perdesaan semakin berkembang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor nonpertanian.

Tabel 3. Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan (Nominal dan Riil) pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007–2010

Provinsi/Tahun	Pendapatan Rumah Tangga (Rp000)			Pendapatan Rumah Tangga (kg beras) ^a		
	Pertanian	Nonpertanian	Total	Pertanian	Nonpertanian	Total
Jabar						
2007	23.519	2.366	25.885	5.644	568	6.212
2010	31.853	9.149	41.002	5.899	1.694	7.593
r (%) ^b	35,44	286,64	58,40	4,51	198,36	22,23
Jateng						
2007	8.780	3.270	12.050	2.007	747	2.754
2010	16.023	10.236	26.260	3.205	2.047	5.252
r (%) ^b	82,49	213,05	117,92	59,68	173,92	90,68
Jatim						
2007	9.178	2.608	11.786	2.295	652	2.947
2010	18.447	8.879	27.326	3.689	1.776	5.465
r (%) ^b	100,98	240,50	131,85	60,79	172,40	85,48
Sulsel						
2007	10.888	2.024	12.913	2.722	506	3.228
2010	22.863	11.140	34.003	4.573	2.228	6.801
r (%) ^b	109,98	450,28	163,33	67,98	340,23	110,66
Sumut						
2007	14.084	2.328	16.412	2.683	443	3.126
2010	23.155	5.201	28.356	3.859	867	4.726
r (%) ^b	64,40	123,42	72,78	43,85	95,49	51,18

Keterangan:

^a Harga beras (Rp/kg) sebagai deflator: Jabar (2007: 4.167; 2010: 5.400), Jateng (2007: 4.375; 2010: 5.000); Jatim, Sulsel (2007: 4.000; 2010: 5.000) dan Sumut (2007: 5.250; 2010: 6.000);

^b r = pertumbuhan pada periode 2007–2010

Pendapatan rumah tangga riil (setara beras) juga meningkat, meskipun peningkatannya tidak sebesar peningkatan pendapatan nominal (Tabel 4). Pada periode 2007–2010, pendapatan rumah tangga setara beras meningkat berkisar 22,23–110,66%. Peningkatan terendah terjadi di Jabar. Meskipun demikian, pendapatan di Jabar paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Lebih lanjut terlihat bahwa pendapatan rumah tangga setara beras di Jabar relatif tetap (meningkat 4,5% dalam tiga tahun).

Tabel 4. Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Perdesaaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi Menurut Sumber Pendapatan, 2007–2010

Pro- vinsi/ Tahun	Sumber Pendapatan (Rp000)								Total
	Pertanian berbasis lahan	Peter- nakan/ perikanan	Buruh perta- nian	Total perta- nian	Usaha nonper- tanian	Buruh nonper- tanian	Lain- lain	Total nonper- tanian	
Jabar									
2007	22.196	456	867	23.519	232	291	1.844	2.366	25.885
2010	29.207	3.821	475	31.853	5.376	3.452	320	9.149	41.002
r (%) ^a	31,59	738,35	(45,19)	35,44	2.222	1.088	(82,65)	286,64	58,40
Jateng									
2007	7.925	265	591	8.780	16	1.254	2.000	3.270	12.050
2010	12.407	2.360	1.347	16.023	3.119	5.427	1.690	10.236	26.260
r (%) ^a	56,56	790,84	128,06	82,49	19.394	332,73	(15,49)	213,05	117,92
Jatim									
2007	7.674	878	626	9.178	68	1.866	674	2.608	11.786
2010	17.052	892	629	18.447	2.134	6.746	-	8.879	27.326
r (%) ^a	122,20	1,61	0,55	100,98	3.046	261,51	(100,00)	240,50	131,85
Sulsel									
2007	9.892	378	619	10.888	296	663	1.065	2.024	12.913
2010	17.976	9.237	217	22.863	964	10.176	-	11.140	34.003
r (%) ^a	81,73	2.345	(64,94)	109,98	225,31	1.435	(100,00)	450,28	163,33
Sumut									
2007	12.706	402	976	14.084	56	1.194	1.078	2.328	16.412
2010	21.496	823	1.154	23.155	2.255	2.946	-	5.201	28.356
r (%) ^a	69,18	104,40	18,27	64,40	3.936	146,71	(100,00)	123,42	72,78

Keterangan:

^a r = pertumbuhan pada periode 2007–2010

DINAMIKA STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Secara nasional, pangsa PDB sektor pertanian terhadap PDB total cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun, struktur pendapatan pada rumah tangga pertanian sangat berbeda dengan struktur pendapatan nasional. Hasil penelitian Lokollo *et al.* (2007) dan BPS (2014) yang menggunakan data seri Sensus Pertanian 1983–2003 dan 2003–2013 menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian dalam pendapatan rumah tangga masih relatif besar dan cenderung meningkat.

Hasil penelitian Patanas di perdesaaan sawah berbasis padi pada periode 2007–2010 menunjukkan bahwa pangsa pendapatan dari kegiatan pertanian masih tinggi namun ada kecenderungan menurun (Tabel 5). Pada tahun 2007 pangsa pendapatan pertanian terhadap pendapatan total rumah tangga berkisar 72,86–

Tabel 5. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010 (%)

Sumber Pendapatan	Jabar		Jateng		Jatim		Sulsel		Sumut	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Usaha pertanian berbasis lahan	85,75	71,23	65,76	47,25	65,11	62,40	76,60	52,87	77,42	75,81
Peternakan dan perikanan	1,76	9,31	2,20	8,99	7,45	3,27	2,93	27,17	2,45	2,90
Buruh pertanian	3,35	1,16	4,90	5,13	5,31	2,30	4,79	0,64	5,95	4,07
Pertanian	90,86	77,69	72,86	61,02	77,87	67,51	84,32	67,24	85,82	81,66
Usaha nonpertanian	0,90	13,11	0,13	11,88	0,58	7,81	2,29	2,84	0,34	7,95
Buruh nonpertanian	1,22	8,42	10,41	20,67	15,83	24,69	5,13	29,93	7,28	10,39
Lain-lain	7,12	0,78	16,60	6,44	5,72	-	8,24	-	6,57	-
Nonpertanian	9,14	22,31	27,14	38,98	22,13	32,49	15,68	32,76	14,18	18,34
Total (Rp000)	25.885	41.002	12.050	26.260	11.786	27.326	12.913	34.003	16.412	28.356

90,86%, terendah di Jawa Tengah dan tertinggi di Jabar. Pada tahun 2010 pangsa pendapatan pertanian berkisar 61,02–81,66%, terendah masih di Jawa Tengah dan tertinggi di Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika struktur pendapatan berbeda antarwilayah. Pertumbuhan pendapatan nonpertanian di Jabar dan Sulsel cukup tinggi sehingga pangsa pendapatan pertanian menurun lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, terutama Sumut yang penurunannya relatif kecil.

Apabila pendapatan pertanian diperinci menjadi pendapatan dari usaha pertanian berbasis lahan, peternakan, dan perikanan, serta buruh pertanian, terlihat bahwa struktur pendapatan didominasi oleh usaha pertanian berbasis lahan yang pada tahun 2007 berkisar 65–85%. Pada tahun 2010 terjadi pergeseran antarwilayah pangsa usaha pertanian berbasis lahan cenderung menurun, berkisar 47–75%. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya pendapatan dari peternakan dan perikanan, serta dari nonpertanian.

Pangsa pendapatan dari peternakan dan perikanan cenderung meningkat, kecuali di Jatim. Pangsa pendapatan dari buruh tani cenderung menurun, kecuali di Jateng yang relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang mau bekerja di sektor pertanian semakin sedikit. Atau dengan kata lain, kegiatan buruh di sektor pertanian kurang menarik, terutama pada tenaga kerja muda. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi secara umum, yaitu terjadi *farmer aging* di sektor pertanian.

Pangsa pendapatan nonpertanian cenderung meningkat dengan peningkatan berkisar 4–17%, terendah di Sumut dan tertinggi di Sulsel. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya pangsa usaha nonpertanian dan buruh nonpertanian. Peningkatan pangsa usaha nonpertanian berkisar 7,6–12,2%, kecuali di Sulsel yang relatif tetap. Pangsa pendapatan buruh nonpertanian meningkat 3,1–24,8%, tertinggi di Sulsel dan terendah di Sumut. Hal ini berlawanan dengan fenomena kegiatan buruh pertanian yang pangasanya semakin mengecil. Temuan ini mempertegas bahwa kegiatan pertanian kurang menarik lagi bagi tenaga kerja perdesaan.

DINAMIKA DISTRIBUSI PENDAPATAN

Ketimpangan pendapatan selain disebabkan perbedaan jenis komoditas, juga disebabkan perbedaan adopsi teknologi pada komoditas yang sama dan munculnya kegiatan nonpertanian. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Supriyati *et al.* (2004), ketimpangan pendapatan pada wilayah berbasis padi bervariasi. Indeks Gini pendapatan di perdesaan Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat masing-masing 0,60, 0,45, dan 0,8. Fenomena ketimpangan pendapatan di Jawa lebih tinggi dari luar Jawa juga dikemukakan oleh Rachman dan Supriyati (2005) dan Adnyana *et al.* (2000). Lebih lanjut, Rachman dan Supriyati (2005) menyatakan bahwa masuknya kegiatan nonpertanian memperburuk distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan tahun 2000–2007 dari 119 negara di dunia bervariasi, dengan indeks Gini berkisar 25–64,3 (World Bank, 2009). Dari 119 negara yang termasuk kategori ketimpangan ringan sebanyak 61 negara, Indonesia termasuk

dalam kategori ini pada urutan ke-58. Sementara itu, yang termasuk kategori ketimpangan sedang dan berat masing-masing 37 dan 21 negara. Data ketimpangan pendapatan tahun 2008 dari 134 negara di dunia tidak berbeda jauh, dengan indeks Gini berkisar 23–70,7 (CIA, 2008). Jumlah negara dengan kategori ketimpangan ringan, sedang, dan berat masing-masing 71, 37, dan 28 negara. Indeks Gini Indonesia sebesar 36,3, pada posisi ke-54 dari 71 negara yang termasuk kategori ketimpangan ringan.

Hasil kajian di perdesaaan sawah berbasis padi menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada tahun 2007 dan 2010 pada kategori ketimpangan sedang dalam kisaran 0,43–0,52 dan 0,42–0,50 (Tabel 6). Meskipun indeks Gini di Sumut dan Jateng di atas 0,5, namun masih dapat dikatakan dalam kategori sedang. Dalam periode tersebut ada kecenderungan distribusi pendapatan rumah tangga semakin merata, diindikasikan dengan menurunnya indeks Gini, kecuali di Jawa Timur yang meningkat (namun masih dalam kategori ketimpangan sedang).

Distribusi pendapatan yang terjadi disebabkan karena perbedaan penguasaan aset lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta kesempatan kerja dan berusaha nonpertanian. Penguasaan lahan yang berbeda disebabkan rancangan rumah tangga contoh secara sengaja mengambil petani yang tidak mempunyai lahan (buruh tani), petani sempit, dan petani luas. Namun demikian, dengan adanya stratifikasi rumah tangga contoh yang merupakan representasi suatu desa menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan berusaha di sektor pertanian dan nonpertanian saling melengkapi.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya disebabkan perbedaan lokasi penelitian. Lokasi contoh penelitian PSEKP sebenarnya relatif kecil untuk dijadikan agregasi tingkat provinsi, apalagi wilayah Jawa dan luar Jawa.

Tabel 6. Dinamika Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perdesaaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007–2010

Provinsi	2007	2010
Jabar	0,49	0,47
Jateng	0,52	0,50
Jatim	0,43	0,44
Sulsel	0,46	0,46
Sumut	0,51	0,42

KESIMPULAN

Dalam periode 2007–2010, pendapatan rumah tangga perdesaaan baik nominal maupun riil meningkat, laju peningkatan pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Pendapatan rumah tangga yang sudah relatif tinggi pada tahun 2007 meningkat lebih rendah dibandingkan yang lainnya.

Struktur pendapatan rumah tangga bervariasi antarwilayah. Struktur pendapatan rumah tangga masih didominasi oleh pendapatan dari pertanian, terutama dari usaha pertanian berbasis lahan, namun ada kecenderungan menurun. Hal ini mengindikasikan semakin berkembangnya kesempatan kerja dan berusaha nonpertanian di perdesaan sawah berbasis padi. Menurunnya pangsa berburuh pertanian dan meningkatnya pangsa berburuh nonpertanian mengindikasikan bahwa sektor pertanian kurang diminati oleh tenaga kerja perdesaan. Di sisi lain, distribusi pendapatan di perdesaan sawah berbasis padi dalam kategori sedang, dan dalam tiga tahun berikutnya ada kecenderungan menurun.

Untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan pertanian diperlukan dukungan teknologi untuk peningkatan produktivitas, serta harga yang memberikan keuntungan bagi petani. Di samping itu, diperlukan upaya memperluas luas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di kegiatan nonpertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013. Berita Statistik No. 54/07/ Th. XVII, 1 Juli 2014. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [CIA] Central Intelligence Agency. 2008. World Factbook 2008. http://www.photius.com/rankings/economy/distributionof_family_income_gini_index_2008_0.html (25 Januari 2010).
- Adnyana, M.O., Sumaryanto, M. Rachmat, R. Kustiari, S.H. Susilowati, Supriyati, E. Suryani, dan Soeprpto. 2000. Assessing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia. Center for Agro-socioeconomic Research, Bogor and the World Bank, Washington, DC, USA.
- Irawan, B., P. Simatupang, R. Kustiari, Sugiarto, Supadi, J.F. Sinuraya, M. Iqbal, M.Ariani, V Darwis, R. Eliizabeth, Sunarsih, C. Muslim, T.B. Purwantini, dan T. Nurasa. 2007. Panel Petani Nasional (Patanas) Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Laporan Penelitian. Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Lokollo, E., IW. Rusastra, H.P. Saliem, Supriyati, S. Friyatno, G.S. Budhi. 2007. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesasaan: Analisis Perbandingan Antarsensus Pertanian. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Purwoto, A., IW. Rusastra, A.K. Zakaria, B. Winarso, T.B. Purwantini, D. Hidayat, T. Nurasa, C. Muslim, C.R. Adawiyah. 2011. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachman, H.P.S. dan Supriyati. 2005. Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Lahan Sawah di Jawa dan Luar Jawa. Soca 2(2):1–20.

- Sajogyo. 1990. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan dalam Rangka Industrialisasi. *Dalam* Sajogyo dan M. Tambunan (Eds.). *Industrialisasi Perdesaan*. Sekindo Eka Jaya. Jakarta.
- Supriyati, Saptana, dan Y. Supriyatna. 2003. Hubungan Penguasaan Lahan dan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan. *Soca* 3(2):1–22.
- Susilowati, S.H., B. Hutabarat, M. Rachmat, A. Purwoto, Sugiarto, Supriyati, Supadi, A.K. Zakaria, B. Winarso, H. Supriadi, T.B. Purwantini, R. Elizabeth, D. Hidayat, T. Nurasa, C. Muslim, M. Maulana, M. Iqbal, dan R. Aldillah. 2010. *Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi*. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- World Bank. 2009. 2009 World Development Indicators Online. The World Bank. Washington, DC. <http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40> (25 Januari 2010).

PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN PADA DESA LAHAN KERING BERBASIS SAYURAN

Reni Kustiari

PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang berkontribusi relatif besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada 2013 kontribusi sektor pertanian mencapai 15% terhadap PDB Indonesia dan sekitar 35,1% dari total angkatan Indonesia bekerja di sektor pertanian (World Bank, 2014). Walaupun telah banyak inovasi, sektor pertanian masih didominasi oleh petani berskala kecil dan fluktuasi output hasil panen. Pada saat bersamaan, aktivitas nonpertanian memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan pekerjaan terhadap angkatan kerja rumah tangga pertanian dan nonpertanian.

Pada masa sekarang usaha tani tidak dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi petani berskala kecil dan marginal. Di negara berkembang, penghasilan dari lahan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga (Singh *et al.*, 2003). Selain itu, sektor pertanian tidak dapat menyerap laju pertumbuhan buruh perdesaan karena turunnya elastisitas output terhadap tenaga kerja di sektor pertanian.

Peranan pekerjaan di sektor nonpertanian semakin penting karena ekonomi perdesaan saat ini menjadi lebih terdiversifikasi dan semakin meluas ke luar sektor pertanian. Kapasitas penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian sudah mencapai limit atas dan tidak dapat mengakomodasi tenaga kerja perdesaan di sektor pertanian sepanjang tahun. Oleh karena itu, rumah tangga perdesaan mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.

Petani berskala kecil dan yang tidak memiliki tanah pada umumnya bekerja juga di luar sektor pertanian perdesaan sebagai sumber pendapatan sekunder. Faktor pendukung perkembangan, seperti modernisasi pertanian, komersialisasi, peningkatan permintaan produk, dan jasa nonpertanian, urbanisasi, kebijakan intervensi yang berorientasi kesejahteraan telah mendorong tenaga kerja perdesaan untuk keluar dari pertanian ke aktivitas di luar pertanian yang lebih menguntungkan. Selain itu, bencana alam mendorong rumah tangga perdesaan pergi untuk mencari kegiatan nonpertanian untuk menambah pendapatan dan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya diikuti oleh perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang (Makmur, 2011). Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh peranan sektor pertanian yang dominan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, peranan sektor industri dan jasa semakin besar dan sebaliknya peranan sektor pertanian menurun. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok

masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan (*poverty line*), terutama di daerah perdesaan (Tambunan, 2001). Daerah perdesaan pada umumnya dicirikan oleh kemiskinan, pengangguran, kerawanan pangan, tingkat migrasi yang tinggi, fasilitas infrastruktur yang buruk, dan pertanian subsisten.

Distribusi pendapatan dapat dipakai sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan masyarakat di desa Patanas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan dalam rangka pengurangan kemiskinan. Dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat diidentifikasi sasaran yang tepat untuk intervensi sektor pertanian oleh pemerintah.

METODE ANALISIS

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data primer penelitian Patanas yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2011. Penelitian Patanas pada agroekosistem lahan kering berbasis sayuran dilakukan di empat desa, yaitu Desa Baroko, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan; Desa Bendosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; Desa Karang Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; dan Desa Margamulya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pengambilan contoh dilakukan secara acak bertingkat. Pertama dipilih desa contoh secara acak sederhana (*simple random sampling*), kemudian di setiap desa contoh yang terpilih ditetapkan sekitar 25-32 rumah tangga petani sebagai responden.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sangat terkait (Oyekale *et al.*, 2006). Metode analisis yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah metode indeks Gini, terutama untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan atau tingkat distribusi pendapatan keluarga petani. Rumus angka indeks Gini adalah sebagai berikut (Arsyad, 1999):

$$G = 1 - \sum f_i (Y_i + 1) + Y_i$$

di mana: G = indeks Gini

n = jumlah keluarga petani contoh

Y_i = proporsi jumlah pendapatan keluarga petani kumulatif dalam kelas i

i = 1, 2, 3, 4, ..., n

Nilai G bervariasi antara 0 (pendapatan merata sempurna) sampai 1 (pendapatan timpang sempurna) atau $0 < G < 1$. Todaro (2000) mengemukakan ukuran ketimpangan suatu daerah, yaitu (1) $G < 0,4$ adalah ketimpangan rendah; (2) $0,4 < G < 0,5$ adalah ketimpangan sedang; dan (3) $G > 0,50$ adalah ketim-

pangan tinggi. Indeks Gini biasanya disertai dengan kurva yang disebut kurva Lorenz.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan dengan total pendapatan penduduk. Kriteria ini membagi pendapatan (*income*) suatu masyarakat diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi, yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu (1) jumlah proporsi yang diterima oleh 40% penduduk lapisan rendah; (2) jumlah proporsi yang diterima oleh 40% penduduk lapisan sedang; (3) jumlah proporsi yang diterima oleh 20% penduduk lapisan tinggi.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap pendapatan seluruh masyarakat kurang dari 12%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap pendapatan seluruh masyarakat 12–17%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan sedang.
3. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap pendapatan seluruh masyarakat lebih besar dari 17%, maka distribusi pendapatan digolongkan sebagai ketimpangan rendah.

Untuk melihat keterkaitan aset lahan dengan pendapatan di daerah perdesaan maka dihitung koefisien korelasi antara luas penguasaan lahan dengan tingkat pendapatan. Selain itu, dihitung juga koefisien korelasi antara pendapatan dari sektor pertanian dengan tingkat pendapatan dari luar pertanian. Nilai koefisien korelasi dapat mengindikasikan: (a) hubungan positif, artinya makin besar pendapatan dari pertanian karena kemungkinan makin banyak penguasaan aset pertanian, makin besar pendapatan dari luar pertanian ($r > 0,5$); (b) tidak ada hubungan ($r \leq 0,5$); dan (c) hubungan negatif ($r < 0$), artinya makin besar pendapatan dari pertanian makin kecil pendapatan dari luar pertanian atau makin kecil pendapatan dari pertanian karena makin sempitnya luas penguasaan lahan, makin besar pendapatan dari luar pertanian.

TINGKAT DAN SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Tingkat pendapatan adalah perolehan pendapatan yang digunakan para responden untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat pendapatan yang diterima per tahun meningkat, kecuali di Desa Baroko. Pendapatan rata-rata responden rumah tangga di Desa Baroko menurun dari Rp20.977.000 pada tahun 2008 menjadi Rp18.910.990 pada 2011. Hal ini terjadi karena pendapatan dari sektor pertanian yang menurun drastis dari Rp11.517.510 pada tahun 2008 menjadi hanya

Rp4.413.550 pada 2011 sebagai akibat, antara lain dari harga komoditas pertanian yang menurun drastis pada tahun 2011. Pada 2008 rata-rata tingkat pendapatan dari sektor pertanian berkisar Rp6.149.690 (Desa Karang Tengah) sampai Rp11.517.510 (Desa Baroko). Pada tahun 2011 kisaran pendapatan dari sektor pertanian tampak semakin besar, yaitu Rp4.413.550 (Desa Baroko) sampai Rp18.172.900 (Desa Bendosari).

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari sektor nonpertanian. Di Desa Baroko pendapatan dari sektor nonpertanian meningkat dari Rp9.459.490 menjadi Rp14.497.440 atau meningkat sebesar 17,75% per tahun; di Desa Bendosari meningkat dari Rp2.986.560 menjadi Rp6.182.200 atau meningkat sebesar 35,67% per tahun; di Desa Karang Tengah meningkat dari Rp1.639.760 menjadi Rp4.029.800 atau meningkat sebesar 48,58% per tahun; dan di Desa Margamulya meningkat dari Rp2.122.660 menjadi Rp14.470.600 atau meningkat sebesar 193,91% per tahun. Terdapat perbedaan laju peningkatan pendapatan pada masing-masing desa. Hal ini terjadi disebabkan oleh luas lahan dan jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani di daerah penelitian.

Tabel 1. Tingkat Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Luar Pertanian di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Pertanian (Rp000)	Nonpertanian (Rp000)	Total (Rp000)
Baroko	2008	11.517,51	9.459,49	20.977,00
	2011	4.413,55	14.497,44	18.910,99
Bendosari	2008	7.534,77	2.986,56	10.521,33
	2011	18.172,90	6.182,20	24.355,10
Karang Tengah	2008	6.149,69	1.639,76	7.789,45
	2011	8.231,56	4.029,80	12.261,36
Margamulya	2008	10.281,58	2.122,66	12.404,24
	2011	26.124,03	14.470,60	40.594,63

Tabel 2 menyajikan kontribusi pendapatan pertanian dan luar pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga menurut desa. Dari empat desa contoh, sumber pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian berkisar dari 61,28% (Desa Baroko) sampai 77,20% (Desa Margamulya) pada tahun 2008. Perbedaan kontribusi pendapatan dari nonpertanian antardesa semakin besar pada 2011, yaitu 44,57% (Desa Baroko) sampai 76,19% (Desa Bendosari). Studi yang dilakukan oleh Micevka (2012) menunjukkan bahwa pendapatan dari kegiatan pertanian sangat berperan dalam mengakses kegiatan di luar sektor pertanian.

Di Desa Baroko tampak bahwa sumber pendapatan dari luar pertanian lebih besar dari pendapatan pertanian. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan teknologi produksi yang rendah dan mengandalkan sawah nonirigasi teknis. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila masyarakat setempat lebih

mencurahkan perhatian pada pendapatan di luar pertanian. Selain itu, kemungkinan memperoleh pendapatan dari kegiatan di sektor lainnya cukup terbuka, mengingat sudah banyaknya pabrik di dekat wilayah perdesaan. Desa-desa tersebut terletak dekat kota kecamatan dan keberadaan transportasi yang baik menyebabkan kesempatan kerja di luar pertanian lebih tinggi daripada desa yang terletak jauh dari ibu kota kabupaten. Perbedaan sumbangan pendapatan sektor pertanian antardesa dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan sumber daya lahan, ketersediaan kesempatan kerja, dan kemudahan mobilitas penduduk.

Tabel 2. Kontribusi Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Luar Pertanian di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011 (%)

Desa	Tahun	Pertanian	Nonpertanian	Total
Baroko	2008	61,28	38,72	100
	2011	44,57	55,43	100
Bendosari	2008	68,54	31,46	100
	2011	76,19	23,81	100
Karang Tengah	2008	74,56	25,44	100
	2011	72,76	27,24	100
Margamulya	2008	77,0	22,80	100
	2011	67,41	32,59	100

KETERKAITAN ANTARA PENDAPATAN PERTANIAN, NONPERTANIAN, DAN LUAS LAHAN

Hubungan antara luas penguasaan tanah dan pendapatan rumah tangga menurut desa dapat dilihat pada Tabel 3. Tampak bahwa hubungan antara luas penguasaan tanah (dalam hal ini luas tanah yang dikuasai tidak harus dimiliki) dan pendapatan pertanian pada umumnya menunjukkan keeratan yang rendah, kecuali di Desa Karang Tengah (0,79) dan Desa Margamulya (0,92). Dilihat dari pola hubungan pendapatan rumah tangga di desa-desa penelitian tampak bahwa tidak ada hubungan yang pasti antara pendapatan dari pertanian dan luar pertanian. Bila hubungan tersebut dinyatakan dengan angka korelasi (r) maka tampak bahwa tiga dari empat desa penelitian menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan dari pertanian dan luar pertanian. Hanya Desa Margamulya yang menunjukkan hubungan yang positif antara pendapatan pertanian dan luar pertanian. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan tidak ada kelebihan pendapatan pertanian yang digunakan untuk memacu pendapatan luar pertanian karena yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini kemungkinan disebabkan di wilayah perdesaan investasi di sektor pertanian lebih menarik dibandingkan dengan investasi dengan cara lainnya.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa anggapan adanya kelebihan pendapatan dari pertanian (setelah dikurangi kebutuhan keluarga) digunakan untuk usaha luar pertanian tidak seluruhnya benar. Hal ini disebabkan pendapatan dari kegiatan luar pertanian dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pendapatan dari usaha dengan modal, seperti berdagang dan menyewakan aset nonpertanian. Kedua, usaha tidak dengan modal uang langsung, seperti mencari barang di alam bebas dan kiriman. Apabila dicari hubungan antara pendapatan dari pertanian dan luar pertanian akan diperoleh dua (kelompok) hubungan korelasi. Hal tersebut membuktikan bahwa korelasi antara pendapatan pertanian dan pendapatan luar pertanian dari kegiatan yang juga menggunakan modal atau tidak memerlukan investasi/modal dapat menyebabkan hubungan yang berbeda.

Tabel 3. Korelasi antara Pendapatan Pertanian-Luar Pertanian dan Penguasaan Lahan-Pendapatan Pertanian di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Pertanian vs Luar Pertanian	Lahan vs Pendapatan Pertanian
Baroko	2008	-0,26	0,46
	2011	-0,24	0,10
Bendosari	2008	0,23	0,48
	2011	-0,17	0,49
Karang Tengah	2008	-0,39	0,79
	2011	-0,19	0,19
Margamulya	2008	0,47	0,92
	2011	0,34	0,23

Hubungan negatif antara pendapatan dari pertanian dan luar pertanian rumah tangga di desa-desa penelitian dapat diartikan juga bahwa semakin besar pendapatan dari luar pertanian, semakin kecil pendapatan dari pertanian karena bila mungkin rumah tangga tersebut akan cenderung melepaskan diri dari sektor pertanian. Sumber pendapatan dari pertanian tetap diperhitungkan karena tidak ada kesempatan untuk mencari pendapatan dari sektor di luar pertanian yang lebih baik. Hal ini diduga akan terlihat jelas apabila desa-desa beririgasi baik dihitung tersendiri.

Di desa-desa penelitian, pendapatan dari subsektor pertanian yang tidak berbasis lahan, seperti peternakan dan perikanan, masih memberikan kontribusi yang sangat kecil dibandingkan dengan tanaman pangan dan perkebunan. Hal tersebut menunjukkan masih adanya potensi meningkatkan pendapatan petani kecil dengan cara memacu kegiatan pertanian "*non-land base*". Hubungan negatif antara pendapatan pertanian dan luar pertanian dapat diartikan bahwa rumah tangga yang mempunyai penguasaan lahan yang sempit sebagai sumber penghasilan dapat mencari penghasilan di luar pertanian secara lebih baik.

DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Distribusi pendapatan relatif menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi dan menggambarkan variabilitas atau dispersi (penyebaran) pendapatan. Untuk mengetahui distribusi pendapatan digunakan konsep koefisien indeks Gini, seperti yang telah dilakukan oleh Nurmanaf (1988), Syukur (1988), Marisa (1988), Rachman (1989), dan Khan dan Riskin (2007). Pendapatan yang dihitung indeks Gini adalah (1) pendapatan bersih total rumah tangga petani yang berasal dari pertanian dan luar pertanian dalam satu tahun dan (2) pendapatan bersih rumah tangga petani yang hanya dari pertanian dalam satu tahun. Di samping itu, akan dilihat juga ketimpangan penguasaan lahan sawah.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa luas penguasaan tanah memengaruhi besarnya pendapatan rumah tangga dari berbagai sumber. Keadaan tersebut dapat diartikan bagi petani sempit akan kurang mampu mencari penghasilan di luar pertanian dibandingkan dengan petani luas. Bila hal itu benar maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga berhubungan erat dengan distribusi penguasaan sawah. Indeks Gini penguasaan lahan dan indeks Gini pendapatan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Pendapatan Total dan Indeks Gini di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Kelompok Pendapatan			Indeks Gini	
		40%	40%	20%	Pendapatan	Lahan
Baroko	2008	12,93	45,27	41,80	0,42	0,34
	2011	8,71	39,72	51,57	0,30	0,43
Bendosari	2008	11,33	37,06	51,60	0,51	0,54
	2011	19,47	40,55	39,98	0,29	0,35
Karang Tengah	2008	9,12	32,03	58,86	0,60	0,64
	2011	11,30	28,89	59,81	0,67	0,71
Margamulya	2008	5,95	23,57	70,48	0,71	0,63
	2011	7,29	30,56	62,15	0,65	0,62

Terlihat bahwa indeks Gini total pendapatan desa penelitian mempunyai nilai sekitar 0,42–0,71 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa penelitian mempunyai tingkat ketimpangan sedang sampai berat. Ketimpangan ini tampak berlanjut sampai tahun 2011. Hal ini ditunjukkan oleh nilai indeks Gini yang berkisar 0,29–0,67. Keadaan ini juga konsisten dengan distribusi pendapatan pada masing-masing kelompok. Ternyata pada umumnya pendapatan terkonsentrasi di kelompok 20% dengan pendapatan tertinggi memiliki sebagian besar, yaitu 41,8% (Desa Baroko) sampai 70,48% (Desa Margamulya) dari total pendapatan.

Hal yang sebaliknya terjadi, yaitu golongan 40% dengan pendapatan terendah menerima hanya sekitar 5,95% sampai 12,93% dari total pendapatan. Konsentrasi pendapatan di tingkat yang tinggi ini juga menunjukkan ketimpangan yang sedang mengarah ke berat. Indeks Gini luas penguasaan di desa penelitian mempunyai nilai sekitar 0,34–0,64 pada tahun 2008 dan sekitar 0,35–0,71 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang rendah sampai berat.

Tabel 5 menyajikan indeks Gini pendapatan dari sektor pertanian mempunyai nilai sekitar 0,50–0,75 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa penelitian mempunyai tingkat ketimpangan yang berat. Pada 2011 indeks Gini pendapatan dari sektor pertanian mempunyai nilai sekitar 0,36–0,76. Keadaan ini juga konsisten dengan distribusi pendapatan pada masing-masing kelompok. Tampak bahwa pendapatan dari sektor pertanian terkonsentrasi di kelompok 20% dengan pendapatan tertinggi (kelompok ketiga) memiliki sebagian besar, yaitu sekitar 50,69% (Desa Baroko) sampai 73,12% (Desa Margamulya) dari pendapatan sektor pertanian pada tahun 2008. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 2011, pendapatan tertinggi memiliki sebagian besar, yaitu sekitar 43,65% (Desa Bendosari) sampai 71,84% (Desa Margamulya) dari pendapatan sektor pertanian.

Tabel 5. Distribusi Pendapatan Pertanian dan Indeks Gini di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Kelompok Pendapatan			Total	Indeks Gini
		40%	40%	20%		
Baroko	2008	10,57	39,95	50,69	100	0,50
	2011	7,69	35,66	56,65	100	0,37
Bendosari	2008	9,49	39,68	50,91	100	0,53
	2011	13,32	43,03	43,65	100	0,36
Karang Tengah	2008	5,98	30,78	63,24	100	0,66
	2011	7,52	21,96	70,53	100	0,76
Margamulya	2008	4,24	22,66	73,12	100	0,75
	2011	4,91	23,24	71,84	100	0,72

Sementara itu, golongan 40% dengan pendapatan pertanian terendah menerima sekitar 4,24% (Desa Margamulya) sampai 10,57% (Desa Baroko) dari pendapatan sektor pertanian. Konsentrasi pendapatan di tingkat yang tinggi ini juga menunjukkan ketimpangan yang sedang mengarah ke berat. Keadaan ini dapat diatasi antara lain dengan memperbesar kesempatan kerja di sektor luar pertanian dan memperlancar mobilitas penduduk disertai mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk.

Pengembangan industri perdesaan yang dapat memanfaatkan, meningkatkan mutu dan daya guna hasil pertanian dapat membuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja perdesaan. Dengan berkurangnya desakan kebutuhan atas tanah

dan diikuti dengan pengembangan teknologi pertanian dan peningkatan intensitas tanam maka pendapatan buruh tani dan golongan berpendapatan rendah dapat ditingkatkan.

Tabel 6 menunjukkan bahwa indeks Gini pendapatan dari sektor nonpertanian mempunyai nilai sekitar 0,59–0,83 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa penelitian mempunyai tingkat ketimpangan yang berat. Demikian pula pada 2011, indeks Gini pendapatan dari sektor nonpertanian mempunyai nilai sekitar 0,66–0,81. Sumber ketimpangan antara lain kepemilikan kekayaan, *labor income* (kemampuan dan keahlian, intensitas kerja, bidang pekerjaan), dan faktor lainnya (lingkungan, gizi buruk, tingkat pendidikan), dan *property income (life cycle saving, kewirausahaan, dan warisan)*.

Tabel 6. Distribusi Pendapatan Nonpertanian dan Indeks Gini di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Indeks Gini
Baroko	2008	0,69
	2011	0,66
Bendosari	2008	0,83
	2011	0,80
Karang Tengah	2008	0,59
	2011	0,74
Margamulya	2008	0,65
	2011	0,81

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, antara lain (1) mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui kebijakan yang ditujukan untuk mengubah harga relatif faktor. Hal ini terutama dimaksudkan untuk mengurangi/menghilangkan distorsi harga faktor yang merugikan kelompok miskin; (2) memperbaiki distribusi pendapatan melalui redistribusi pemilikan aset secara progresif, yang antara lain dilakukan melalui *land reform* dan pemberian kredit lunak bagi usaha kecil; (3) mengurangi bagian pendapatan penduduk golongan atas (kaya) melalui pajak pendapatan dan pajak kekayaan yang progresif, sehingga peningkatan penerimaan negara hasil pajak itu akan dapat ditujukan pada perbaikan kesejahteraan kelompok miskin; dan (4) meningkatkan bagian pendapatan penduduk golongan bawah (melarat) melalui pembayaran transfer secara langsung serta penyediaan barang dan jasa publik atas tanggungan pemerintah. Hal ini antara lain dilakukan melalui pembebasan/keringanan pajak bagi kelompok miskin, tunjangan atau subsidi pangan, bantuan pelayanan kesehatan, dan bantuan pelayanan umum lainnya (Cholid, 2010).

STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Rumah tangga perdesaan mempunyai sumber-sumber pendapatan yang bervariasi seperti terlihat pada Tabel 7. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagi sebagian rumah tangga, upaya tersebut tidak hanya menambah curahan jam kerja dari kegiatan yang ada, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Hal ini terlihat juga dari beberapa hasil penelitian terdahulu bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah perdesaan mempunyai lebih dari satu sumber pendapatan (Nurmanaf, 1988; Syukur *et al.*, 1988; Marisa, 1988; Rachman, 1989).

Kecenderungan untuk memiliki sumber pendapatan lebih dari satu diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masing-masing kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, anggota rumah tangga di desa yang menguasai lahan relatif lebih sempit memerlukan lebih banyak macam kegiatan untuk menambah pendapatan rumah tangga dibandingkan rumah tangga dengan penguasaan lahan yang luas.

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Sumber Pendapatan di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Jumlah Sumber Pendapatan					Total
		1	2	3	4	>4	
Baroko	2008	4,00	32,00	40,00	24,00	0,00	100
	2011	0,00	16,67	41,67	20,83	20,83	100
Bendosari	2008	21,88	31,25	34,38	9,38	3,13	100
	2011	3,23	45,16	32,26	19,35	0,00	100
Karang Tengah	2008	21,88	28,13	37,50	12,50	0,00	100
	2011	34,38	50,00	12,50	3,13	3,13	100
Margamulya	2008	15,63	34,38	34,38	12,50	3,11	100
	2011	15,63	43,75	21,88	18,75	0,00	100

Rumah tangga yang hanya mempunyai satu sumber pendapatan berkisar dari 4% (Desa Baroko) sampai 21,88% (Desa Bendosari dan Karang Tengah) pada tahun 2008. Kondisi ini berubah pada tahun 2011, persentase rumah tangga yang hanya mempunyai satu sumber pendapatan berkisar dari 0% (Desa Baroko) sampai 34,38% (Desa Karang Tengah). Hal ini terjadi kemungkinan karena di desa penelitian memiliki aksesibilitas yang tinggi, seperti Baroko adalah desa yang relatif dekat dengan kota kecamatan. Sebagian besar rumah tangga di desa-desa penelitian mempunyai 2–3 sumber pendapatan. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang mempunyai lebih dari empat sumber pendapatan. Di Desa Baroko

terdapat sekitar 20,83% dari rumah tangga contoh mempunyai lebih dari empat sumber pendapatan pada tahun 2011.

Sejalan dengan uraian mengenai sumber-sumber pendapatan, berikut ini akan diungkapkan mengenai struktur pendapatan dari rumah tangga di desa penelitian. Dari berbagai jenis kegiatan yang merupakan sumber pendapatan dirinci besarnya kontribusi dari masing-masing sumber tersebut. Kecenderungan dan identifikasi struktur pendapatan rumah tangga dalam lapisan masyarakat perdesaan disajikan pada Tabel 8. Pada umumnya sumber pendapatan dari sektor pertanian memberikan kontribusi pendapatan yang terbesar. Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga terendah di Desa Baroko, yaitu hanya 53,8%; sedang tertinggi di Desa Margamulya mencapai 94,4%. Pendapatan dari sektor pertanian ini termasuk jasa dari aset produktif, yaitu pendapatan dari menyewakan tanah, ternak, dan alat/mesin.

Pendapatan dari kegiatan di luar sektor pertanian untuk semua golongan masyarakat perdesaan sangat penting sebagai tambahan pendapatan yang bersumber dari kegiatan di sektor pertanian. Guna menciptakan kegiatan di luar sektor pertanian, diperlukan modal lebih besar bagi petani yang luas penguasaan lahannya relatif sempit karena kelebihan pendapatan dari kegiatan pertanian lebih kecil. Selain itu, pada umumnya petani luas di samping menguasai sebagai besar sumber daya pertanian (lahan), juga menguasai sumber daya di sektor luar pertanian. Oleh karena itu, para petani sempit atau marginal akan tetap miskin bila tidak ada peluang bekerja di luar desa.

Dari Tabel 8 dapat pula dilihat bahwa pendapatan yang diterima dari kegiatan berburuh tani di luar pertanian menyumbang pendapatan rumah tangga berkisar dari 0,3% (Desa Bendosari) sampai 1,2% (Desa Karang Tengah). Perbedaan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga disebabkan oleh pekerjaan dari jenis kegiatan yang dilakukan. Pendapatan yang diterima setahun dari kegiatan ini pada umumnya adalah sebagai tukang bangunan berupa tukang kayu dan tukang batu. Kegiatan berburuh nonpertanian sebagai tukang bangunan adalah kegiatan yang hanya bersifat sementara tergantung pada kesempatan kerja. Rumah tangga petani yang mempunyai kontribusi pendapatan berburuh nonpertanian cukup besar biasanya melakukan jenis pekerjaan yang bersifat kontinyu sepanjang tahun sehingga secara sosial dapat mengumpulkan pendapatan yang lebih besar, serta sering kali para pekerja tersebut harus mempunyai keterampilan khusus.

Sumber pendapatan lain, berupa pensiunan, kiriman, dan pekerjaan lain bukan merupakan sumber pendapatan yang berarti. Jumlah rumah tangga yang menerima pendapatan dari sumber tersebut relatif kecil dan umumnya bukanlah merupakan sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, sumber pendapatan dari kegiatan ini hanya dapat menyumbang pendapatan rumah tangga sebesar 0,2% (Desa Margamulya) hingga 0,7% (Desa Baroko), sedangkan di Desa Bendosari dan Karang Tengah tidak dijumpai petani contoh yang memperoleh pendapatan dari sumber tersebut.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 8 masih mengindikasikan bahwa di sektor pertanian dalam arti luas (termasuk jasa aset pertanian) merupakan sumber

pendapatan dari lahan yang masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan rumah tangga di desa penelitian, yaitu 47% (Desa Bendosari) sampai 90,0% (Desa Margamulya) pada 2008. Hal ini dapat dimengerti mengingat kondisi kesuburan lahan yang sangat memungkinkan. Variasi pendapatan dari kegiatan di lahan pertanian menunjukkan perbedaan potensi desa, rata-rata penguasaan dan keterampilan dalam pemeliharaan tanaman antardesa penelitian. Sumber pendapatan dari usaha tani berbasis lahan masih memberikan kontribusi pendapatan yang terbesar yaitu sekitar 44,8% (Desa Baroko) sampai 79,6% (Desa Karang Tengah) pada tahun 2011. Perbedaan besarnya kontribusi sumber pendapatan dari usaha tani berbasis lahan sawah diduga disebabkan oleh perbedaan luas penguasaan dan produktivitas lahan. Selain itu, sumber pendapatan terbesar kedua adalah dari kegiatan buruh pertanian, berkisar dari 0,6% (Desa Margamulya) sampai 10,7% (Desa Karang Tengah). Hal ini antara lain karena keterbatasan penguasaan sumber daya lahan dan aset pertanian lainnya.

Besarnya kontribusi usaha ternak terhadap pendapatan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan dari usaha-usaha tersebut, sedangkan keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh jenis ternak yang diusahakan, intensitas pengelolaan, dan efisiensi pemasaran hasil. Diduga bahwa di daerah penelitian usaha tersebut belum dilakukan secara intensif bila dilihat kontribusinya yang kecil terhadap pendapatan rumah tangga dan masih belum banyak dilakukan oleh para petani. Kontribusi usaha ternak terhadap pendapatan rumah tangga berkisar dari 0% (Desa Karang Tengah dan Margamulya) sampai 28,3% (Desa Bendosari) pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 kontribusi usaha peternak sedikit naik menjadi berkisar dari 0,3% (Desa Karang Tengah) sampai 29,2% (Desa Bendosari). Peningkatan kontribusi usaha ternak menunjukkan semakin pentingnya usaha ternak untuk mendukung perekonomian rumah tangga perdesaan.

Variasi kontribusi pendapatan dari kegiatan usaha tani berbasis lahan terhadap pendapatan pertanian berkisar dari 57,5% (Desa Bendosari) sampai 97,5% (Desa Baroko) pada 2008 (Tabel 9). Peran usaha tani berbasis lahan semakin penting. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap pendapatan pertanian yang cenderung meningkat, berkisar dari 63,9% (Desa Bendosari) sampai 92,5% (Desa Margamulya) pada 2011.

Kontribusi pendapatan sebagai pegawai atau karyawan terhadap pendapatan nonpertanian berkisar dari 13,1% (Desa Margamulya) sampai 80,1% (Desa Baroko) pada 2008 (Tabel 10). Di Desa Karang Tengah tidak ada responden yang menjadi pegawai atau karyawan. Pentingnya peran usaha dagang terlihat dari kontribusinya terhadap pendapatan nonpertanian yang cenderung meningkat, berkisar dari 4,6% (Desa Baroko) sampai 20,5% (Desa Margamulya) pada 2008, kemudian berubah menjadi 13,3% (Desa Karang Tengah) sampai 57,7% (Desa Margamulya) pada 2011.

Tabel 8. Struktur Total Pendapatan per Tahun Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sumber Pendapatan di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Nilai (%)	Sumber Pendapatan													
			Total	Lahan	Ternak	Ung-gas	Tam-bak	Buruh tani	Buruh nontani	Pegawai/karyawan	TKI	Da-gang	Lain	Sewa Aset	Perta-nian	Nonper-tanian
Baroko	2008	Nilai	20.471	10.741	84	56	0	131	188	7.579	0	432	1.130	130	11.012	9.460
		(%)	100,0	52,5	0,4	0,3	0,0	0,6	0,9	37,0	0,0	2,1	5,5	0,6	53,8	46,2
	2011	Nilai	27.990	12.525	2.191	0	0	142	10.078	0	190	2.527	337	0	14.858	13.132
		(%)	100,0	44,8	7,8	0,0	0,0	0,5	36,0	0,0	0,7	9,0	1,2	0,0	53,1	46,9
Bendosari	2008	Nilai	15.950	7.620	4.574	0	0	1.058	51	2.036	0	223	217	172	13.251	2.699
		(%)	100,0	47,8	28,7	0,0	0,0	6,6	0,3	12,8	0,0	1,4	1,4	1,1	83,1	16,9
	2011	Nilai	38.333	21.087	11.172	0	0	721	2.124	0	0	2.749	226	253	32.981	5.353
		(%)	100	55,0	29,2	0,0	0,0	1,9	5,5	0,0	0,0	7,2	0,6	0,7	86,0	14,0
Karang Tengah	2008	Nilai	17.440	14.214	0	0	0	1.870	208	0	0	200	706	243	16.083	1.357
		(%)	100,0	81,5	0,0	0,0	0,0	10,7	1,2	0,0	0,0	1,1	4,1	1,4	92,2	7,8
	2011	Nilai	40.800	32.464	135	0	0	3.740	2.750	0	0	592	61	1.058	36.339	4.461
		(%)	100,0	79,6	0,3	0,0	0,0	9,2	6,7	0,0	0,0	1,5	0,2	2,6	89,1	10,9
Marga-mulya	2008	Nilai	37.790	34.017	0	0	0	1.650	256	278	0	436	747	407	35.666	2.124
		(%)	100,0	90,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,7	0,7	0,0	1,2	2,0	1,1	94,4	5,6
	2011	Nilai	55.110	39.088	1.445	0	0	1.717	5.213	0	84	7.421	141	0	42.250	12.860
		(%)	100,0	70,9	2,6	0,0	0,0	3,1	9,5	0,0	0,2	13,5	0,3	0,0	76,7	23,3

Keterangan: Nilai dalam Rp juta/RT/tahun

Tabel 9. Struktur Pendapatan Pertanian per Tahun Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sumber Pendapatan di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Nilai (%)	Sumber Pendapatan					Buruh Tani
			Total pertanian	Lahan	Ternak	Unggas	Tambak	
Baroko	2008	Nilai	11.011,5	10.740,5	84,2	55,6	0,0	131,2
		(%)	100,0	97,5	0,8	0,5	0,0	1,2
	2011	Nilai	14.858,1	12.525,3	2.191,2	0,0	0,0	141,6
		(%)	100,0	84,3	14,7	0,0	0,0	1,0
Bendosari	2008	Nilai	13.250,7	7.619,6	4.573,5	0,0	0,0	1.057,7
		(%)	100,0	57,5	34,5	0,0	0,0	8,0
	2011	Nilai	32.980,6	21.087,1	11.172,3	0,0	0,0	721,2
		(%)	100,0	63,9	33,9	0,0	0,0	2,2
Karang Tengah	2008	Nilai	16.083,2	14.213,5	0,0	0,0	0,0	1.869,6
		(%)	100,0	88,4	0,0	0,0	0,0	11,6
	2011	Nilai	36.338,7	32.463,8	135,4	0,0	0,0	3.739,5
		(%)	100,0	89,3	0,4	0,0	0,0	10,3
Margamulya	2008	Nilai	35.666,3	34.016,8	0,0	0,0	0,0	1.649,6
		(%)	100,0	95,4	0,0	0,0	0,0	4,6
	2011	Nilai	42.250,4	39.088,1	1.445,0	0,0	0,0	1.717,3
		(%)	100,0	92,5	3,4	0,0	0,0	4,1

Tabel 10. Struktur Pendapatan Nonpertanian per Tahun Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sumber Pendapatan di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa	Tahun	Nilai (%)	Sumber Pendapatan							
			Total	Buruh nontani	Pegawai/karyawan	TKI	Nonpertanian	Lain	Sewa Aset	
Baroko	2008	Nilai	9.459,5	188,0	7.579,2	0,0	432,4	1.129,9	130,0	
		(%)	100,0	2,0	80,1	0,0	4,6	11,9	1,4	
	2011	Nilai	13.131,8	10.078,2	0,0	190,0	2.527,1	336,5	0,0	
		(%)	100,0	76,7	0,0	1,4	19,2	2,6	0,0	
	Bendosari	2008	Nilai	2.698,9	50,5	2.036,3	0,0	223,4	216,8	171,9
			(%)	100,0	1,9	75,4	0,0	8,3	8,0	6,4
2011		Nilai	5.352,7	2.124,4	0,0	0,0	2.749,4	225,8	253,1	
		(%)	100,0	39,7	0,0	0,0	51,4	4,2	4,7	
Karang Tengah	2008	Nilai	1.356,5	207,9	0,0	0,0	199,6	706,0	243,1	
		(%)	100,0	15,3	0,0	0,0	14,7	52,0	17,9	
	2011	Nilai	4.460,8	2.749,8	0,0	0,0	592,2	60,9	1.057,8	
		(%)	100,0	61,6	0,0	0,0	13,3	1,4	23,7	
Margamulya	2008	Nilai	2.123,7	256,0	277,5	0,0	435,9	747,3	407,0	
		(%)	100,0	12,1	13,1	0,0	20,5	35,2	19,2	
	2011	Nilai	12.859,5	5.213,3	0,0	84,4	7.420,6	141,3	0,0	
		(%)	100,0	40,5	0,0	0,7	57,7	1,1	0,0	

Perbedaan kontribusi pendapatan dari berburuh nontani terhadap pendapatan nonpertanian disebabkan oleh perbedaan jumlah anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan berburuh nontani. Di desa-desa penelitian jumlah rumah tangga yang menjadikan buruh tani sebagai sumber pendapatan, terdapat dalam persentase yang relatif kecil. Persentase ini berkisar dari 1,9% (Desa Bendosari) hingga 15,3% (Desa Karang Tengah). Peran pendapatan dari berburuh nontani terhadap pendapatan nonpertanian tampak semakin penting dan kontribusinya terhadap pendapatan nonpertanian meningkat drastis menjadi sekitar 39,7% (Desa Bendosari) hingga 76,7% (Desa Baroko).

Usaha sewa aset merupakan sumber pendapatan terbesar keempat. Kontribusi usaha sewa aset berkisar dari 1,4% (Desa Baroko) sampai 19,2% (Desa Margamulya) pada 2008. Kontribusi usaha sewa aset cenderung turun menjadi berkisar dari 0% (Desa Baroko dan Margamulya) sampai 23,7% (Desa Karang Tengah) pada 2011.

KESIMPULAN

Indeks Gini pendapatan rumah tangga, pendapatan pertanian, dan penguasaan lahan menunjukkan ada ketimpangan sedang sampai berat. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang menyeluruh untuk membantu rumah tangga perdesaan, terutama petani berskala kecil, agar mendapat manfaat yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

Pada umumnya rumah tangga di desa penelitian mempunyai sekitar 2–3 sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga cenderung meningkat, kecuali di Desa Baroko karena terjadinya penurunan harga komoditas pertanian, terutama komoditas sayuran yang menurun drastis pada saat panen raya karena belum ada penanganan pascapanen yang memadai. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui industri pengolahan hasil pertanian dan kebijakan perlindungan harga.

Akses terhadap lahan masih sangat penting untuk rumah tangga perdesaan karena pendapatan rumah tangga masih tinggi pada aktivitas usaha tani berbasis lahan untuk mempertahankan kehidupan dan menghasilkan tambahan pendapatan. Pendapatan dari sektor nonpertanian berperan penting sebagai sumber pendapatan rumah tangga perdesaan bahkan semakin meningkat. Untuk mendukung tumbuhnya sektor nonpertanian di wilayah perdesaan diperlukan bantuan keuangan bagi rumah tangga miskin agar dapat memulai aktivitas nonpertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. 1999. *Ekonomi pembangunan*. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta.

- Cholid, I. 2010. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. Slideplayer.info/slide/ 3098466/ (4 April 2014).
- Khan, A.R. and C. Riskin. 2007. Growth and Distribution of Household income in China Between 1995 and 2002. *In* B. Gustafsson, S. Li, and T. Sicular (Eds.) *Inequality and Publicity in China*. Cambridge University. Press. New York.
- Makmur, T., S. Safrida, dan K. Jayanthi. 2011. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *Agrisepe* 12(1):1–10.
- Marisa, Y. dan B. Hutabarat. 1988. Ragam Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Perdesaan Sulawesi Selatan. *Dalam* F. Kasryno (Ed.). *Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Perdesaan menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 314–320.
- Oyekale, A.S., A.I. Adeoti, dan T.O. Oyekale. 2006. Measurement and Sources of Income Inequality in Rural and Urban Nigeria. Paper presented in the 5th Poverty and Economic Policy Research Network General Meeting, 18–22 June 2006, Addis Ababa.
- Nurmanaf, A.R. 1988. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Perdesaan Sumatra Barat. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Rachman, H.P.S. dan A.S. Hadimuslihat. 1989. Struktur Dan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan Jawa Tengah. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Singh, A., A.K. Vasisht and P.K. Jain. 2003. Inter-State Variations in Nonagricultural Employment in Rural India: An Exploratory Analysis. *Agricultural Economics Research Review (Conference Issue)*:60–69.
- Syukur, M. 1988. Kajian Aktivitas Tenaga Kerja Rumah Tangga Tani di Luar Sektor Pertanian: Studi Beberapa Desa di Jawa Barat. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Tambunan, T.H. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia*. Salemba. Jakarta.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Jilid I. Terjemahan Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.
- World Bank. 2014. *World Development Index*.

PERANAN TERNAK DALAM MENOPANG EKONOMI RUMAH TANGGA DI PERDESAAN PADA WILAYAH AGROEKOSISTEM PERKEBUNAN

Bambang Winarso

PENDAHULUAN

Data perkembangan luas areal perkebunan selama tahun 2000–2012 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat baik untuk tanaman sawit, kakao, karet, maupun tebu. Selama kurun waktu tersebut luas perkebunan karet meningkat dari 3,37 juta ha (2000) meningkat menjadi 3,50 juta ha (2012). Luas perkebunan sawit selama periode yang sama meningkat tajam dari 7,00 juta ha (2000) meningkat 9,57 juta ha (2015). Perkembangan luas kebun kakao juga mengalami perkembangan pesat dari 0,75 juta ha (2000) meningkat menjadi 1,7 juta ha (2012), sementara perkembangan luas perkebunan tebu justru mengalami penurunan yang sangat tajam di mana luas areal kebun tebu pada tahun 2000 seluas 1,69 juta ha turun menjadi 0,45 juta ha (2012).

Data perkembangan luas areal perkebunan tersebut setidaknya merupakan petunjuk bahwa di satu sisi ada beberapa komoditas perkebunan yang memiliki peluang besar untuk dijadikan lahan pengembangan ternak melalui pola integrasi, tetapi di sisi lain justru sebaliknya. Salah satu peluang besar untuk pengembangan ternak adalah memanfaatkan lahan perkebunan sebagai basis kegiatan usaha. Areal perkebunan yang saat ini banyak dijadikan sebagai wilayah pengembangan ternak adalah wilayah pengembangan komoditas kelapa sawit dengan ternak sapi potong sebagai ternak yang dikembangkan. Hasil kajian yang dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa pemanfaatan hijauan yang ada di sekitar pohon sawit maupun limbah tanaman, bahkan sampai dengan limbah industri sawit potensial sebagai bahan pakan ternak sapi potong.

Integrasi tanaman-ternak merupakan suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu usaha tani atau dalam suatu wilayah. Keterkaitan tersebut merupakan suatu faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat tani dan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan cara yang berkelanjutan (Pasandaran *et al.*, 2005). Integrasi antara tanaman dan ternak dapat diaplikasikan di wilayah agroekosistem komoditas tanaman pangan (padi dan palawija) dan wilayah agroekosistem tanaman perkebunan. Sistem usaha tani tanaman ternak pada dasarnya merupakan respon petani terhadap faktor risiko yang harus dihadapi, mengingat berbagai ketidakpastian dalam berusaha tani (Soedjana, 2007 *dalam* Prawiradiputra, 2009).

Kaitannya dengan integrasi antara tanaman dan ternak, hasil kajian Zurriyati (2008) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani dapat dilakukan dengan sistem usaha tani terpadu/terintegrasi antara tanaman dan sapi potong.

Pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi merupakan salah satu peluang tambahan pendapatan petani dari kegiatan usaha tani tersebut. Tambahan pendapatan petani dari hasil kompos kasus di Desa Masda Makmur, Kabupaten Rokan Hulu-Riau berkisar antara 30% sampai dengan 100%. Dalam hal optimalisasi pemanfaatan limbah, Diwyanto *et al.* (2002) mengemukakan bahwa penggunaan pupuk organik membuka peluang pasar dan mendorong masyarakat perdesaan untuk mengembangkan industri pupuk dengan memelihara ternak (sapi).

Penulis yang sama juga mengemukakan bahwa anak sapi (pedet) merupakan produk utama dari budi daya sapi dengan sebagian biaya pakan yang dapat diatasi dengan penjualan pupuk organik dan peternakan dapat dipandang sebagai usaha investasi (tabungan) yang tidak terkena inflasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi bagian integral dari sistem usaha tani dan kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan beberapa hasil kajian beberapa ahli tersebut setidaknya menyiratkan bahwa integrasi antara tanaman dan ternak, baik antara tanaman pangan dan ternak maupun tanaman perkebunan dengan ternak, pada intinya adalah tidak sekedar menciptakan kegiatan atau usaha sampingan di luar komoditas utama yang diusahakan. Akan tetapi, ada konsep upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan sampingan lainnya yang ingin dicapai.

Kaitannya dengan integrasi antara tanaman dan ternak, Devendra (*dalam* Winarso dan Basuno, 2002) mengemukakan bahwa ada delapan keuntungan penerapan sistem budi daya tanaman-ternak, yaitu (1) diversifikasi penggunaan sumber daya produksi; (2) mengurangi risiko; (3) efisiensi penggunaan tenaga kerja; (4) efisiensi penggunaan komponen produksi; (5) mengurangi ketergantungan energi kimia dan energi biologi serta masukan sumber daya lainnya dari luar; (6) sistem ekologi lebih lestari dan tidak menimbulkan polusi sehingga melindungi lingkungan hidup; (7) meningkatkan output; dan (8) mengembangkan rumah tangga petani menjadi lebih stabil. Setidaknya, hasil beberapa kajian menunjukkan bahwa konsep pola budi daya integrasi tanaman-ternak telah terbukti secara langsung memberikan keuntungan finansial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana kegiatan integrasi antara beberapa komoditas perkebunan terpilih dengan ternak dengan memanfaatkan masing-masing limbah yang ada mampu berperan dalam menopang dan meningkatkan ekonomi rumah tangga di desa contoh Patanas di mana komoditas perkebunan sebagai komoditas basis.

METODE ANALISIS

Sumber data tulisan ini merupakan data primer penelitian Patanas yang dilakukan pada tahun 2012 dan merupakan hasil resurvei rumah tangga yang telah disurvei pada tahun 2009 pada agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit, karet, kakao, dan tebu lahan kering. Lokasi penelitian di wilayah agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan yang sudah dilakukan pada survei pertama (tahun 2009) adalah Jambi (Kabupaten Batanghari

dan Muaro Jambi, mewakili komoditas karet dan kelapa sawit), Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Lumajang, mewakili komoditas Tebu), Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau, mewakili komoditas karet dan kelapa sawit), dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Pinrang dan Luwu, mewakili komoditas kakao). Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang sederhana.

MODEL PENGEMBANGAN INTEGRASI TANAMAN-TERNAK

Permentan No. 19 tahun 2010 menyebutkan bahwa swasembada daging sapi sudah lama didambakan oleh masyarakat agar ketergantungan terhadap impor baik sapi bakalan maupun daging semakin menurun dengan mengembangkan potensi dalam negeri. Dengan berswasembada, daging sapi tersebut akan diperoleh keuntungan dan nilai tambah, yaitu (1) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak, (2) penyerapan tambahan tenaga kerja baru, (3) penghematan devisa negara, (4) optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal, dan (5) semakin meningkatnya penyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat sehingga ketenteraman lebih terjamin. Permentan No. 19 tahun 2010 tersebut memiliki sasaran utama meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta ekor tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,48%.

Dalam upaya menunjang program tersebut Badan Litbang Pertanian sangat gencar mengintroduksi inovasi teknologi, di antaranya model sistem integrasi tanaman-ternak. Penerapan model usaha tani tanaman-ternak dihadapkan pada dua fenomena yang bertentangan. Di satu pihak, pertanian dituntut dalam penyediaan pangan yang cepat sehingga sangat eksploratif terhadap sumber daya alam yang ada. Di sisi lain, ada koreksi terhadap model pertanian yang mengisyaratkan perlunya pembangunan pertanian berbasis agroekosistem yang berkelanjutan (Sudaratmaja dan Faqi, 2005). Salah satu peluang besar untuk pengembangan sapi potong melalui pola integrasi tanaman-ternak adalah memanfaatkan lahan perkebunan sebagai basis kegiatan usaha budi daya ternak. Areal komoditas perkebunan yang saat ini banyak dijadikan sebagai wilayah pengembangan ternak seperti sapi potong, di antaranya adalah wilayah pengembangan komoditas kelapa sawit, kakao, tebu, dan karet. Bahri dan Tiesnamurti (2012) mengemukakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani secara berkesinambungan perlu pemanfaatan sumber bahan pakan dari produk samping pertanian dan industri pertanian, di samping pengembangan inovasi teknologi pakan untuk memanfaatkan bahan pakan dan pakan nonkonvensional yang tidak berkompetisi dengan kebutuhan manusia.

Integrasi Ternak-Sawit

Konsep integrasi sapi dengan kelapa sawit merupakan suatu sistem usaha tani tanaman-ternak yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena didukung dengan luas tanam kelapa sawit mencapai 7 juta ha dan kesesuaian adaptasi ternak sapi yang baik (Ishak, 2009 *dalam* Hugeng, 2012). Sementara, Barani (2009) mengatakan bahwa kebijakan integrasi ternak sapi-sawit merupakan salah satu bentuk kontribusi perkebunan dalam program swasembada daging sapi dan solusi problematika limbah perkebunan. Oleh karena itu, integrasi ternak sapi-sawit diharapkan dapat mengurangi permasalahan limbah ternak sapi (kotoran) dan limbah kegiatan usaha kelapa sawit. Dengan teknologi sederhana, limbah perkebunan berupa dedaunan sawit dan gulma dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan kotoran sapi untuk pupuk organik. Pemanfaatan hasil dan limbah sawit untuk pakan ternak dengan ketersediaan yang cukup (*in-situ situation*) akan menghidupi ternak tanpa perlu mendatangkan tambahan pakan dari luar (*ex-situ situation*) (Djajanegara *et al.*, 2005).

Yamin *et al.* (2010) mengemukakan bahwa model Sistem Integrasi Sapi di Kebun Sawit (SISKA) di Sumatra Selatan dapat dilakukan dengan pola penggemukan, pembibitan, dan kombinasi. Usaha ini dilakukan oleh petani plasma kebun sawit dengan pengelolaan kelompok untuk usaha penggemukan, pengelolaan individu untuk usaha pembibitan, dan kombinasi. Daru *et al.* (2014) juga mengemukakan bahwa hijauan antartanaman di perkebunan kelapa sawit memiliki potensi yang besar sebagai sumber hijauan bagi sapi potong. Jenis-jenis tanaman yang tumbuh di bawah pohon kelapa sawit umumnya sebagai gulma, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pakan bagi sapi potong. Hal ini digambarkan oleh produksi hijauan yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit maupun komposisi kimia zat-zat makanan yang dikandungnya.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Matheus *et al.* (2005) juga menunjukkan bahwa pakan ternak sapi potong yang berasal dari limbah sawit terutama dalam bentuk hasil fermentasi bungkil sawit yang dilengkapi dengan pelepah kelapa sawit merupakan sumber serat pakan yang baik untuk menambah kenaikan bobot ternak sapi hidup. Teknologi inovatif pakan dan pola pengembangan ternak sistem integrasi ternak di kawasan perkebunan sawit (SISKA) bahkan mendekati '*zero cost*', dengan *carrying capacity* sekitar 1–2 AU/ha. Pengkajian untuk pola ini masih terus dikerjakan yang sepenuhnya dilakukan dengan sistem kredit dan saat ini jumlah ternak sapi telah mencapai 6.000 ekor

Fitriani *et al.* (2012) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh anggota kelompok tani Suka Mulia sebesar Rp52.245.305 per peternak per tahun yang berasal dari usaha tanaman kelapa sawit rata-rata sebesar Rp49.835.504 per peternak per tahun dan dari usaha ternak sapi rata-rata sebesar Rp2.409.801 per peternak per tahun. R/C usaha ternak sapi sebesar 1,18, artinya usaha tersebut menguntungkan karena R/C ratio >1 dan usaha ini layak untuk dikembangkan. Sementara, kontribusi yang diberikan ternak sapi terhadap pendapatan anggota kelompok tani Suka Mulia di perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Merlung rata-rata sebesar 4,36%.

Integrasi Ternak-Tebu

Luas total areal tebu pada tahun 2012 adalah 450.297 ha yang terdiri atas tebu rakyat 252.166 ha dan areal tebu swasta 198.131 ha. Rata-rata produktivitas tebu di Indonesia adalah 76,7 ton/ha dengan limbah tanaman berupa pucuk tebu sebesar 30,8 ton/ha. Limbah pucuk tebu tersebut berpotensi sebagai pakan ternak ruminansia. Dengan luas areal pengembangan saat ini maka akan terdapat 13.869.147,6 ton pucuk tebu yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif atau substitusi hijauan untuk ternak sapi. Adanya potensi pakan ternak yang cukup melimpah dan bermutu ini membuka peluang dikembangkannya ternak, khususnya ternak sapi di lingkungan perkebunan tebu (Romli *et al.*, 2012).

Dalam hal pengembangan integrasi antara tanaman tebu dengan ternak khususnya sapi, Khuluq (2012) mengemukakan bahwa pengembangan model integrasi tebu-sapi sesuai dengan pola pengusahaan tebu/sapi yang penting adalah perlunya penelitian teknik pembuatan silase dari limbah tanaman tebu (daun rogesan, pucuk, dan anakan) untuk pakan ternak yang bernutrisi. Berdasarkan hasil survei tersebut maka model integrasi tebu-ternak yang dikembangkan harus memerhatikan agroekologi, jenis pengelolaan usaha tani tebu, dan sosial budaya masyarakat.

Dalam penelitiannya, Khuluq (2012) juga menyimpulkan bahwa limbah pertanian tebu yang meliputi daun, pucuk tebu, bagas, dan molase dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dengan demikian, limbah daun tebu dan bagas yang melimpah (16,7 juta ton) yang diolah menjadi pakan ternak fermentasi probiotik dapat digunakan untuk pengganti pakan hijauan di musim kemarau dan bahan baku konsentrat. Proses pengolahan limbah perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai nutrisi dan daya cerna pakan limbah tebu. Di sisi lain, Kuswandi (2007) mengemukakan bahwa serat limbah perkebunan tebu (pucuk tebu) dan pabrik gula (*pith* dan bagas) dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak melalui beberapa perlakuan dan suplementasi terutama pemanfaatan bagas. Penggunaan *pith* dan bagas dalam bentuk asli maupun setelah diberi praperlakuan harus tetap disuplementasi beberapa macam bahan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ternak.

Integrasi Ternak-Kakao

Integrasi antara ternak dengan tanaman kakao kurang populer dibandingkan dengan integrasi antara ternak (sapi potong) dengan tanaman kelapa sawit. Sumarsih *et al.* (2009) mengemukakan bahwa kendala pemanfaatan kulit buah kakao sebagai pakan adalah tingginya kandungan serat kasar dengan pencernaan dan protein kasar yang rendah. Akan tetapi, melalui teknologi amoniasi dengan penggunaan urea 7% dan lama pemeraman 21 hari dapat meningkatkan kualitas pada pakan asal limbah kakao. Sementara, Bamualim dan Tiesnamurti (2009) mengemukakan bahwa sistem integrasi kakao dengan ternak sapi sudah mulai dikembangkan di daerah produsen kakao di Sulawesi, tetapi pemanfaatannya masih terbatas. Permasalahannya perkebunan kakao umumnya sudah penuh dengan

tanaman pokok sehingga peluang ketersediaan tanaman pakan sangat kecil dan penggembalaan sapi di antara tanaman kakao sulit dilaksanakan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kuswandi dan Ismeth (2009) bahwa hasil ikutan perkebunan kakao dan pabrik pengolahan cokelat, terutama kulit buah dan kulit biji, dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak melalui beberapa perlakuan yang sederhana yang dapat dilakukan oleh peternak terutama dengan pengawetan agar dapat tahan disimpan dalam waktu lama.

INTEGRASI TANAMAN-TERNAK DI DESA PATANAS

Ragam Sumber Pendapatan Keluarga

Sumber pendapatan rumah tangga di perdesaan Patanas dapat dibedakan menjadi sumber pendapatan yang berasal dari sektor pertanian dan dari sektor nonpertanian. Desa contoh Patanas 2012 merupakan desa-desa yang berbasis perkebunan, maka wajar bila sumber pendapatan masyarakat di desa-desa tersebut sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Namun, letak geografis desa dan akses jalan dan komunikasi yang semakin baik dan maju menyebabkan tidak dominannya sumber pendapatan dari sektor pertanian, dan juga seiring waktu dan proses pembangunan yang terjadi, sebuah desa berbasis perkebunan pun dapat berubah sumber pendapatannya yang tadinya didominasi oleh sumber pendapatan dari sektor pertanian menjadi dari nonpertanian.

Beydha (2002) mengemukakan bahwa struktur masyarakat di Indonesia menurut status pendapatan umumnya terdiri dari lapisan-lapisan sebagai berikut: (1) lapisan teratas adalah perkebunan besar (milik pemerintah) seluas 1,1 juta hektar, di mana penguasaan hutan yang dikelola beberapa perusahaan negara sebesar 1 juta hektar hutan produksi dan perusahaan swasta yang sejak tahun 1967 terdapat 4.000 perusahaan swasta kebanyakan milik perusahaan asing yang mengusahakan penebangan hutan di areal seluas 36 juta hektar di berbagai pulau; (2) lapisan kedua adalah perkebunan berskala menengah yang dimiliki perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dengan luas 1,1 juta hektar; (3) lapisan ketiga adalah petani marginal (memiliki lebih kecil dari 0,5 hektar) sebanyak 6 juta rumah tangga di mana kebanyakan di Jawa, dan dari jumlah tersebut 5,2 juta rumah tangga menguasai tanah seluas 1,5 hektar (sehingga rata-rata luasnya adalah 0,25 hektar); dan (4) petani yang tidak bertanah atau lapisan bawah adalah sebesar 7,2 juta rumah tangga. Dengan struktur demikian, meskipun perkebunan rakyat yang diusahakan oleh rumah tangga pekebun di perdesaan secara keseluruhan memiliki kontribusi yang besar dalam struktur areal maupun produksi perkebunan secara nasional, namun secara perorangan mereka berada pada posisi yang kurang memadai dalam struktur pendapatan masyarakat.

Hasil survei Patanas 2012 menunjukkan bahwa sumber pendapatan desa-desa Patanas umumnya berasal dari sektor pertanian, namun tidak demikian pada desa Patanas di mana komoditas perkebunan sebagai komoditas utama. Desa Bakti

di Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan) merupakan desa berbasis perkebunan kakao yang letaknya dilewati oleh jalan lintas Sulawesi sehingga kondisinya sangat ramai, aktivitas ekonominya sangat beragam, dan akses komunikasinya demikian lancar sehingga sangat memudahkan dan juga menjadi peluang besar bagi masyarakatnya untuk menambah pendapatannya terutama dari sektor nonpertanian seperti berdagang, buka warung/toko, dan usaha transportasi. Oleh sebab itu, walaupun lahan kakao di desa tersebut demikian luas dan tetap menjadi sumber pendapatan masyarakatnya, namun pendapatan rumah tangga petani dari nonpertanian lebih besar dibandingkan pertanian.

Kasus di desa di mana komoditas tebu sebagai komoditas basis menunjukkan bahwa terkait dengan adanya perubahan sumber pendapatan antara tahun 2009 dan 2012, ada hal menarik yang terjadi di dua desa berbasis perkebunan tebu di Kabupaten Malang dan Lumajang. Di Kabupaten Malang pada tahun 2009, sumber pendapatan masyarakat desa sedikit lebih dominan berasal dari sektor nonpertanian (50,91%), namun pada tahun 2012 sumber pendapatan justru lebih dominan dari sektor pertanian (74,33%). Perubahan ini terjadi karena rendemen tebu dan harga gula yang konsisten meningkat sejak 2009 sehingga petani tebu memperluas areal tanam tebu terutama di lahan persawahan yang produktivitas tebunya lebih baik dibandingkan lahan kering. Sementara di Lumajang terjadi sebaliknya, tahun 2009 sumber pendapatan rumah tangga di Lumajang sebagian besar petani berawal dari sektor pertanian (63,09%), akan tetapi pada tahun 2012 sumber pendapatan dominan berawal dari sektor nonpertanian. Hal itu disebabkan karena semakin banyak petani menyewakan lahannya kepada tuan tanah (Susilowati *et al.*, 2012).

Kasus di desa-desa Patanas berbasis komoditas kelapa sawit dan karet, pendapatan dari sektor pertaniannya dominan berasal dari usaha perkebunan, dan dalam periode 2009–2012 kecenderungannya semakin meningkat. Dominannya pendapatan dari usaha kebun karet disebabkan tanaman karet dapat dipanen hampir tiap hari dan dijual setiap dua minggu sekali sehingga petani dapat memperoleh uang dalam waktu cepat dan relatif lebih mudah dari sisi penjualan hasil getah karet. Sementara, pendapatan dari usaha perkebunan kelapa sawit relatif sangat besar dan dapat dipastikan menjadi andalan penghasilan petani dari sektor pertanian. Tambahan pendapatan lainnya dari sektor pertanian berturut-turut berasal dari berburuh tani, usaha tani sawah, dan beternak sapi.

Secara umum, pendapatan usaha perkebunan masih menjadi andalan rumah tangga di desa-desa berbasis komoditas perkebunan. Walaupun demikian, para petani perkebunan ini tetap menyisihkan lahannya untuk dijadikan persawahan dan ditanami padi yang hasilnya tidak dijual, tetapi disimpan sebagai cadangan pangan. Selain itu, pekerjaan berburuh tani menjadi pilihan untuk menambah penghasilan. Sementara, dengan tingkat penghasilan petani perkebunan yang rata-rata lebih baik dibandingkan petani tanaman pangan, maka banyak rumah tangga yang anggota keluarganya bekerja di luar desa sebagai buruh di sektor nonpertanian dan berusaha dagang.

Peran Ternak dalam Ekonomi Rumah Tangga

Hasil penelitian Susilowati *et al.* (2009) menunjukkan bahwa pada wilayah berbasis komoditas perkebunan, struktur pendapatan rumah tangga didominasi oleh pendapatan dari lahan kebun dan tegal yang kontribusinya mencapai 49,54%, sedangkan kontribusi pendapatan dari usaha ternak masih relatif kecil, kecuali pada wilayah komoditas basis tebu yang kontribusinya mencapai sekitar 12%. Belum berkembangnya usaha *non-land base* juga ditemukan pada wilayah lahan sawah. Kontribusi pendapatan dari kegiatan berburuh tani relatif kecil yaitu 6,39% dengan kisaran antarkomoditas basis 1,5–22%. Hal ini disebabkan pasar tenaga kerja tidak berkembang, kegiatan usaha tani dilakukan dengan tenaga kerja keluarga sehingga kesempatan kerja berburuh tani relatif terbatas.

Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan rumah tangga perkebunan berbeda antarkomoditas basis dan lokasi. Pendapatan rumah tangga di daerah berbasis perkebunan berkisar antara Rp13 hingga Rp34 juta per tahun, tertinggi pada komoditas kelapa sawit dan terendah pada komoditas tebu. Pada daerah yang berbasis basis karet, kelapa sawit, dan tebu, sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama dengan kisaran 53–82%. Sementara itu, pada daerah yang berbasis komoditas kakao, peranan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan cenderung menurun, hanya sekitar 43%. Di antara sumber pendapatan di luar sektor pertanian, buruh nonpertanian, dan dagang/pekerja penjualan memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha/kegiatan lainnya.

Berkembangnya buruh nonpertanian dan pekerja penjualan mengindikasikan bahwa kegiatan yang berkembang di wilayah penelitian adalah kegiatan yang tidak memerlukan modal. Hal ini mendukung argumentasi bahwa tidak berkembangnya sektor nonpertanian di perdesaan salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan modal. Rataan kontribusi pendapatan berburuh nonpertanian 17,45%, dengan kisaran antarkomoditas basis 10–38%. Kontribusi transfer pendapatan/kiriman pada wilayah berbasis komoditas perkebunan relatif kecil (1,15%). Pada desa berbasis basis tebu kontribusi transfer pendapatan berkisar antara 1,86–4,58% sebesar 4,58% dan 1,86% pada komoditas basis. Sumbangan pendapatan berasal dari transfer ini terkait dengan keterbatasan kesempatan kerja pada wilayah-wilayah tersebut.

Integrasi Tanaman Perkebunan-Ternak di Desa Patanas

Data hasil penelitian Patanas 2012 menunjukkan bahwa berdasarkan struktur pendapatan selama kurun waktu tiga tahun (2009–2012) terlihat bahwa ternak belum banyak berperan. Secara absolut rata-rata sumbangan hasil ternak terhadap pendapatan rumah tangga selama periode tersebut memang mengalami kenaikan tajam dari <Rp1 juta (2009) meningkat menjadi Rp6,35 juta (2012). Kenaikan tajam tersebut terutama dialami oleh rumah tangga di daerah perkebunan tebu. Meningkatnya sumbangan hasil ternak terhadap pendapatan rumah tangga di daerah tebu tersebut tampaknya ada kaitannya dengan program pengembangan

pembibitan ternak sapi potong di Jawa Timur. Selama periode 2009–2012 pemerintah sedang menggalakkan kredit program pembibitan ternak sapi potong dengan bunga rendah. Di samping pemberian kredit dengan bunga rendah, peternak juga diberikan *grace period* selama dua tahun untuk mulai mencicil utangnya. Program tersebut berdampak langsung semakin meningkatnya jumlah rumah tangga yang memelihara ternak, baik sapi potong maupun sapi perah.

Walaupun secara absolut ternak mampu memberikan sumbangan pendapatan yang semakin meningkat, komoditas subsektor lainnya terutama perkebunan juga mengalami hal yang sama. Komoditas kelapa sawit dan karet merupakan dua komoditas yang sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga selama periode tersebut tetap masih mendominasi. Semakin berkembangnya areal kebun sawit maupun karet yang ditunjang oleh harga yang membaik berdampak terhadap semakin berkembangnya penguasaan kebun karet maupun sawit oleh rumah tangga. Hal ini tentu berdampak terhadap kenaikan pendapatan rumah tangga. Dengan dinamika pendapatan rumah tangga yang demikian, maka di usaha ternak memiliki andil positif terhadap perkembangan pendapatan secara keseluruhan. Akan tetapi, perkembangan pendapatan dari usaha ternak cenderung tetap lamban. Secara persentase sumbangan ternak terhadap pendapatan rumah tangga masih sangat kecil, yaitu kurang dari 3% (Tabel 1).

Tabel 1. Sumbangan Hasil Ternak Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Berdasarkan Komoditas Basis di Desa Patanas Berbasis Tanaman Perkebunan, 2009 dan 2012

No.	Komoditas	Karet	Kakao	Sawit	Tebu	Rata2
				(%)		
1.	Ternak ruminansia	0,73	1,39	0,01	10,73	2,07
2.	Ternak unggas	-	-	0,02	1,12	0,18
3.	Total ternak	0,73	1,39	0,03	11,85	2,25
4.	Total pendapatan RT (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				(%)		
1.	Ternak ruminansia	1,27	0,76	0,29	4,5	1,7
2.	Ternak unggas	1,17	0,02	-	1,99	0,8
3.	Total ternak	2,44	0,78	0,29	6,49	2,5
4.	Total pendapatan RT (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				(Rp ribu)		
1.	Ternak ruminansia	150	245	4	1.426	465
2.	Ternak unggas	-	-	9	148	40
3.	Total ternak	150	245	13	1.574	505
4.	Total pendapatan RT (juta)	20,6	17,9	33,87	12,87	21,44
				(Rp ribu)		
1.	Ternak ruminansia	3.475	935	2.767	4.848	3.006
2.	Ternak unggas	6.057	126	-	7.197	3.345
3.	Total ternak	9.532	1.061	2.767	12.045	6.351
4.	Total pendapatan RT(Rp juta)	46,04	36,9	72,15	44,38	49,86

Ada beberapa penyebab mengapa ternak belum berkembang di desa-desa Patanas. *Pertama*, masih terbatasnya program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan ternak baik ternak unggas maupun ternak ruminansia di areal perkebunan di desa contoh, dalam artian bahwa desa contoh Patanas belum banyak tersentuh oleh program pengembangan ternak baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. *Kedua*, masyarakat di wilayah perkebunan cenderung enggan untuk melakukan budi daya ternak, mengingat bahwa hasil kebun telah dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan padatnya aktivitas kebun maka alokasi tenaga kerja akan terbagi, sementara curahan jam kerja untuk aktivitas budi daya kebun sudah cukup padat bahkan kekurangan tenaga kerja. *Ketiga*, masyarakat sekitar lokasi perkebunan belum membutuhkan diversifikasi pendapatan, mengingat usia tanaman sedang dalam masa-masa produktif. Masyarakat akan mencari penghasilan lain di luar komoditas utama, manakala dihadapkan pada permasalahan tanaman utama perkebunan, seperti harga produk yang jatuh secara berkepanjangan atau tanaman sudah memasuki usia-usia tidak produktif, terutama masa-masa *replanting* atau tanaman pada usia tua.

Peran Ternak dalam Menciptakan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga di wilayah perkebunan memiliki lahan kebun, sehingga sebagian rumah tangga mengandalkan pendapatannya dari luar usaha tani kebun baik sebagai buruh yang berkaitan dengan perkebunan maupun di luar perkebunan, maupun usaha lainnya. Beternak, dagang, atau jasa menjadi solusi untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Rumah tangga di wilayah perkebunan yang melakukan budi daya ternak terutama ternak besar, khususnya sapi potong, secara umum curahan kerja keluarga tetap didominasi tenaga pria dewasa baik dalam kegiatan merawat kandang, mencari rumput, menggembala ternak, maupun kegiatan pemeliharaan ternak lainnya.

Secara proporsional dalam kegiatan budi daya ternak tersebut dibutuhkan curahan kerja tenaga pria dewasa sebesar 68,18%, tenaga wanita sebesar 23,17% sementara tenaga anak-anak sebesar 8,65%. Artinya, walaupun peran tenaga kerja keluarga terutama pria sangat dominan dalam usaha budi daya ternak, terutama ternak besar, namun tenaga kerja wanita juga turut berperan. Hal tersebut senada dengan hasil kajian Lestariningsih *et al.* (2006) yang menunjukkan bahwa wanita peternak sapi perah mempunyai peran dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Alokasi waktu kerja wanita yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan sapi perah adalah sekitar 1–2 jam per hari, sedangkan alokasi waktu laki-laki adalah sebesar 2–4 jam per hari. Masih dapat dilakukan pembinaan untuk mengisi waktu luang peternak pria dan wanita agar dapat meningkatkan keterampilan dan pendapatan peternak. Secara umum, kontribusi pendapatan istri (wanita) dalam keluarga cukup besar, yaitu 44,99% dari total pendapatan keluarga sehingga wanita berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Manfaat Ternak di Lokasi Contoh

Selain diandalkan untuk memberikan sumbangan pendapatan keluarga, ternak juga mempunyai manfaat lain. Di samping dapat dimanfaatkan tenaganya, ternak juga dapat menghasilkan limbah kotoran ternak sebagai pupuk kompos. Akan tetapi, pemanfaatan ternak dan hasil ternak tersebut tersebut masih sangat terbatas. Sebagai contoh, dalam hal pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik tampaknya masih sangat minim sekali. Sebagian besar responden masih belum sadar betul tentang manfaat pupuk kotoran ternak. Hanya masyarakat di wilayah perkebunan tebu yang baru memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik, itu pun masih dalam rumah tangga yang terbatas dan kecil (3,7%).

Ada beberapa kemungkinan mengapa kotoran ternak cenderung kurang dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. *Pertama*, sistem pemeliharaan cenderung *ekstensif* di mana ternak dilepas bebas baik siang maupun malam sehingga kotoran ternak tidak ter"manage" dengan baik dan cenderung tercecer ke mana-mana. *Kedua*, pola pemeliharaan ternak yang dilakukan adalah *semi intensif*, di mana pada saat siang ternak di lepas bebas, sedangkan pada malam hari ternak dikandangkan, sehingga kotoran ternak yang tertampung di kandang tidak begitu banyak. *Ketiga*, masih terbatasnya peternak yang sanggup memelihara ternak dengan sistem intensif di mana ternak sepenuhnya dikandangkan dan diberi pakan *full ransum* sehingga limbah kotoran ternaknya akan tertangani dengan lebih baik.

Pemeliharaan ternak dengan pola intensif di samping membutuhkan biaya pakan yang sangat besar juga membutuhkan pengetahuan teknologi budi daya ternak yang baik. Tidak hanya teknologi yang berkaitan dengan pakan, tetapi juga teknologi yang berkaitan dengan sistem pemeliharaan lainnya. Selain itu, pola ini lebih diaplikasikan untuk usaha penggemukan ternak (*fattening*). Ketiga faktor tersebut tampaknya menjadikan pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk alami masih sangat terbatas.

Kondisi penggunaan lahan sebagai basis komoditas perkebunan yang umumnya tanaman keras (karet, sawit, dan kakao), menyebabkan pemanfaatan tenaga ternak dapat dikatakan tidak ada, kecuali di areal perkebunan tebu. Dengan berkembangnya teknologi usaha tani tebu terutama dalam pengolahan lahan yang cenderung menggunakan sistem mekanisasi, maka penggunaan tenaga ternak menjadi sangat rendah. Data menunjukkan bahwa di areal perkebunan tebu hanya 3,7% peternak yang memanfaatkan ternaknya sebagai ternak pekerja. Jenis ternak yang dimanfaatkan tenaga kerjanya adalah sapi jenis Peranakan Ongole (PO) atau jenis Brahman. Jenis-jenis sapi tersebut dimanfaatkan tenaganya sebagai hewan pembajak atau penarik gerobak.

Usaha Ternak Dilihat dari Aspek Kelembagaan

Ternak bagi sebagian masyarakat di perdesaan tidak sekedar merupakan aset dan tabungan keluarga, melainkan juga berfungsi sebagai status sosial mengingat ternak terutama ternak besar memiliki nilai finansial yang tidak sedikit. Dengan tingginya nilai finansial tersebut, maka tidak banyak rumah tangga perdesaan yang

mau dan sanggup untuk memiliki ternak besar. Dalam pengadaan ternak besar tersebut, di samping membutuhkan dana yang tidak sedikit juga harus menyiapkan tenaga kerja keluarga yang mampu untuk mengelolanya.

Bagi sebagian keluarga peternak yang menghadapi kendala tenaga kerja keluarga maka permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu *pertama*, mencari tenaga kerja diluar keluarga (tenaga kerja upahan); *kedua*, menggaduhkan ternaknya kepada orang lain. Solusi kedua tampaknya lebih banyak dilakukan oleh keluarga peternak, mengingat bahwa cara pertama biayanya tidak sedikit. Di samping itu, dalam kegiatan pemeliharaan ternak secara umum ternak yang dimiliki masih dalam skala kecil sehingga akan tidak efisien apabila dalam kegiatan budi daya ternak menggunakan tenaga upahan.

Dalam sistem gaduhan, aturan main yang diterapkan umumnya sistem bagi hasil. Dengan sistem tersebut, penggaduh mendapatkan sebagian dari hasil usaha, baik berupa hasil budi daya dalam sistem pembiakan maupun penggemukan. Apabila sistem pemeliharaan yang ditempuh adalah pembiakan, maka penggaduh akan mendapatkan sebagian hasil ternak berupa pedet/anakan ternak yang lahir seperdua atau sepertiga bagian tergantung perjanjian. Sementara, apabila sistem pemeliharaan yang dilakukan adalah penggemukan (umumnya sapi jantan) maka kenaikan nilai tambah (*daily gain*) dari berat badan ternak sebagian akan diberikan untuk penggaduh.

Realisasi menunjukkan bahwa sistem gaduhan ternak menyebar hampir di semua lokasi desa contoh di wilayah perkebunan baik di wilayah dengan komoditas basis kelapa sawit, kakao, maupun tebu. Di wilayah perkebunan kakao dan tebu, persentase penggaduh cukup tinggi (>20%), sementara di wilayah perkebunan sawit 14,29% dari responden peternak. Tingginya minat peternak untuk melakukan pemeliharaan ternak dengan sistem gaduhan mencerminkan bahwa sistem ini banyak diminati oleh masyarakat (Tabel 2).

Ada beberapa penyebab mengapa sistem gaduhan ternak tersebut tumbuh subur di perdesaan perkebunan. *Pertama*, tingginya minat masyarakat untuk melakukan budi daya ternak, tetapi masih dihadapkan pada penguasaan modal yang lemah untuk pengadaan ternak. Dengan cara menggaduh maka yang bersangkutan dapat melakukan budi daya ternak. *Kedua*, tingginya potensi wilayah sekitar responden untuk usaha pengembangan ternak seperti halnya ketersediaan hijauan pakan ternak maupun ketersediaan limbah perkebunan atau limbah lainnya yang dapat dijadikan pakan ternak. *Ketiga*, terbukanya peluang transaksi ternak (pasar) sehingga dalam usaha budi daya ternak akan mudah untuk melakukan jual beli ternak baik dalam upaya untuk mendapatkan ternak yang akan dipelihara maupun kemudahan dalam menjual ternak hasil budi daya. *Keempat*, iklim yang kondusif dalam budi daya ternak baik keamanan dari hama, penyakit, maupun aman dari pencurian ternak. Budi daya ternak baik ternak besar maupun ternak kecil pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan usaha yang dapat memberikan penghasilan baik penghasilan sampingan maupun penghasilan pokok. Dalam upaya pengembangan ternak akan lebih tepat apabila kinerjanya didasarkan pada penempatan lokasi yang tepat. Terutama didasarkan pada potensi ternak, potensi

ketersediaan sumber daya seperti ketersediaan hijauan pakan ternak, maupun sumber daya tenaga kerja.

Tabel 2. Pemanfaatan Ternak dan Hasil Ternak di Desa Patanas Berbasis Komoditas Perkebunan, 2012

No.	Keterangan	Komoditas	Responden (%)
1.	Sistem gaduhan	a. Kakao	20,00
		b. Kelapa sawit	14,29
		c. Tebu	22,22
		d. Karet	0,00
2.	Penggunaan pupuk	a. Kakao	0,00
		b. Kelapa sawit	0,00
		c. Tebu	3,70
		d. Karet	0,00
3.	Penggunaan tenaga ternak	a. Kakao	0,00
		b. Kelapa sawit	0,00
		c. Tebu	3,70
		d. Karet	0,00

Adinata (2012) mengemukakan bahwa alternatif strategi utama yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan usaha ternak besar, terutama sapi potong, adalah mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan internal peternak serta memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan skala usaha ternak sapi potong menjadi lebih maju. Di samping itu, perlu pengenalan teknologi pengolahan pakan dan bibit ternak sapi unggul yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat, menjalin usaha kemitraan bersama pemerintah dan pihak ketiga dengan memanfaatkan interaksi masyarakat perdesaan yang bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta memperkuat kelembagaan peternak sehingga peternak memiliki daya tawar yang kuat.

Di sisi lain, Pradnyani *et al.* (2014) juga mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi dalam usaha budi daya ternak besar terutama sapi potong adalah kendala ekonomi dan kendala sosial. Kendala ekonomi yaitu sulitnya peternak memperoleh kredit modal usaha, sedangkan kendala sosialnya yaitu kurang pemahannya peternak dalam melakukan budi daya sehingga peran dari Dinas Peternakan dan dinas terkait sangat diperlukan dalam upaya peningkatan hasil. Sosialisasi hendaknya dilakukan agar peternak lebih mengetahui cara budi daya yang efisien dengan hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Munculnya diversifikasi pendapatan dari sumber lain di luar sektor perkebunan sebenarnya memberi peluang lebih banyak kepada masyarakat untuk memilih usaha. Tampak sekali dengan masih terbatasnya rumah tangga di desa-desa Patanas yang berusaha di bidang budi daya ternak menunjukkan bahwa usaha ini belum mampu bersaing dengan usaha lainnya. Oleh karena itu, tantangannya adalah memberikan nilai tambah pada usaha pemeliharaan ternak terutama sapi potong. Nilai tambah sebenarnya bisa diperoleh dari pupuk kandang, baik cair maupun padat yang bisa dijadikan pendapatan yang cukup signifikan bagi rumah tangga peternak. Akan tetapi, pemanfaatannya masih sangat minim. Pemakaian pupuk organik ini sebenarnya dapat menekan biaya produksi tanaman pangan maupun tanaman perkebunan.

Belum diperoleh gambaran jelas tentang adanya program yang fokus pada usaha pengembangan ternak di desa contoh Patanas. Sementara, sistem bagi hasil (*gaduhan*) sudah berkembang terutama di areal perkebunan sawit, kakao, dan tebu. Cara ini tepat untuk membantu petani miskin yang ingin beternak, tetapi tidak memiliki modal. Kegiatan ini sebenarnya dapat ditingkatkan dengan adanya program pengembangan ternak melalui bantuan modal pinjaman berbunga ringan atau sistem dana bergulir (*revolving fund*) agar rumah tangga peternak miskin tersebut mampu memperbaiki kondisi ekonominya melalui usaha budi daya ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, K.I., A.I. Sari, dan E.T. Rahayu. 2012. Strategi Pengembangan Usaha Sapi Potong di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. *Tropical Animal Husbandry* 1(1):24–32.
- Bahri, S. dan B. Tiesnamurti. 2012. Strategi Pembangunan Peternakan Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal. *Jurnal Litbang Pertanian* 31(4):142–152.
- Bamualim, A. dan B. Tiesnamurti. 2009. Konsepsi Sistem Integrasi antara Tanaman Padi, Sawit dan Kakao dengan Ternak Sapi di Indonesia. *Dalam* A.M. Fagi, Subandriyo, dan I.W. Rusastra (Eds.). *Sistem Integrasi Ternak Tanaman: Padi-Sawit-Kakao*. Bab I. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor. hlm. 1–14.
- Barani, A.M. 2009. Partisipasi Transmigran dalam Program Integrasi Ternak Sawit di Desa Brasau. *Dalam* S. Hugeng (Ed.). *Jurnal Ketransmigrasian* 29(2):96–108.
- Daru, T.P., A. Yulianti, dan E. Widodo. 2014. Potensi Hijauan di Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Pakan Sapi Potong di Kabupaten Kutai Kertanegara. *Media Sains* 7(1).
- Diwyanto, K., B.R. Prawiradiputra, dan D. Lubis. 2002. Integrasi Tanaman-Ternak dalam Pengembangan Agribisnis yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Berkerakyatan. *Wartazoa* 12(1):1–8.
- Djajanegara, A., Ismail, dan Kartaatmadja. 2005. Teknologi dan Manajemen Usaha Berbasis Ekosistem. *Integrasi Tanaman-Ternak di Indonesia*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.

- Fitriani, I. Iskandar, dan S. Permana. 2012b. Kontribusi Usaha Ternak Sapi terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Tani Suka Mulia pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Embrio* 5(2):85–97.
- Hugeng, S. 2012. Partisipasi Transmigran dalam Program Integrasi Ternak Sawit di Desa Brasau. *Jurnal Ketransmigrasian* 29(2):96–108.
- Khuluq, A.D. 2012. Potensi Pemanfaatan Limbah Tebu sebagai Pakan Fermentasi Probiotik. *Buletin Tanaman Tembakau, Serat, dan Minyak Industri* 4(1):37–45.
- Kuswandi. 2007. Teknologi Pakan Untuk Limbah Tebu (Fraksi Serat) sebagai Pakan Ternak Ruminansia. *Wartazoa* 17(2):82–92.
- Kuswandi dan I. Inounu. 2009. Teknologi Pengayaan Pakan Sapi Terintegrasi dengan Tanaman Kakao. *Dalam* A.M. Fagi, Subandriyo, dan IW. Rusastra (Eds.). *Sistem Integrasi Ternak Tanaman Padi-Sawit-Kakao*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. hlm. 111–141.
- Lestariningsih, M., Basuki, dan Y. Endang. 2006. Peran Serta Wanita Peternak Sapi Perah dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga. *Jurnal Ekuitas* 12(1):117–137.
- Matheus, IW., A.P. Sinurat, B.P. Manurung, D.M. Sitompul, dan Azmi. 2005. Pemanfaatan Produk Fermentasi Lumpur Bungkil sebagai Bahan Pakan Sapi Potong. *Prosiding Teknologi Peternakan dan Veteriner 2005: Inovasi Teknologi Peternakan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional*, Bogor, 12–13 September 2005. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor. hlm. 153–161.
- Pasandaran, E., A. Djajanegara, K. Kariyasa, dan F. Kasryno. 2005. Kerangka Konseptual Integrasi Tanaman-Ternak di Indonesia. *Integrasi Tanaman-Ternak di Indonesia*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian. 2014. Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi. Peraturan Menteri Pertanian No: 19/Permentan/OT.140/2/2010.
- Pradnyani, N.P.R., R.P. Yusuf, dan D.A.S. Yudhari. 2014. Perhitungan Finansial Penggemukan Sapi di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata* 3(1).
- Romli, M., T. Basuki, J. Hartono, Sudjindro, dan Nurindah. 2012. Sistem Pertanian Terpadu Tebu-Ternak Mendukung Swasembada Gula dan Daging. *Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Prawiradiputra, B.R. 2009. Masih Adakah Peluang Pengembangan Integrasi Tanaman dengan Ternak di Indonesia? *Wartazoa* 19(3):143–149.
- Sumarsih, C.I., Sutrisno, B. Sulistiyanto, dan Sunarso. 2009. Peningkatan Kualitas POD Kakao Sebagai Bahan Pakan Konsentrat Melalui Teknologi Amoniasi. *Lokakarya Nasional Pengembangan Jejaring Litkaji Sistem Integrasi Tanaman Ternak*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Winarso, B. dan E. Basuno. 2002. Pengembangan Pola Integrasi Tanaman-Ternak Merupakan Bagian Upaya Mendukung Usaha Pembibitan Sapi Potong dalam Negeri. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 31(2):151–169.
- Yamin, M., Muhakka, dan A. Abrar. 2010. Kelayakan Sistem Integrasi Sapi dengan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Pembangunan Manusia* 10(1).

Zurriyati, Y. 2008. Peningkatan Pendapatan Petani Desa Masda Makmur, Rambah Samo-Riau dari Pembuatan Kompos Asal Kotoran Sapi pada Sistem Integrasi Tanaman Ternak. Prosiding Teknologi Peternakan dan Veteriner: Inovasi Teknologi Mendukung Agribisnis Peternakan Ramah Lingkungan, Bogor, 11–12 November 2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor. hlm. 254–258.

SINTESIS PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN

Adi Setiyanto

PENDAHULUAN

Jauh sebelum negeri ini merdeka, para sesepuh dan leluhur yang mendahului kita telah berpesan yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah sebagai berikut: *"Selalu kumpul sekalipun diumpamakan tidak makan¹, pasti akan serba kecukupan². Tidak boleh memutus silaturahmi. Kerja sama, gotong royong, dan persatuan harus dijaga. Janganlah kekeluargaan dan gotong-royong diganti dengan perpecahan dan persaingan. Tuntutlah ilmu di mana pun tempat sumber ilmu itu berada. Sekalipun negara lain ibaratnya hujan emas permata, janganlah merantau ke sana. Cintailah diri sendiri dan negeri ini (tanah air). Di negara lain kita akan kurus kering sekalipun kelihatannya makmur yang akan diperoleh. Tidak akan memperoleh kekayaan yang hakiki, Allah SWT yang Maha Kuasa di mana pun tempat sama. Lebih baik bekerja keras membangun negara, agar aman, tenteram, makmur, sejahtera, dan serba ada atau berkecukupan"* (Kitab Babad Tanah Jawi [Pangeran Wijil] dan Musarar [Sunan Giri Prapen]).

Makna kutipan tersebut sangatlah dalam. Kedalaman makna dari kutipan tersebut sebenarnya telah dituangkan oleh *the founding fathers* kita di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan dan merupakan salah satu visi dan misi besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di antaranya adalah tertulis: *"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"* (Pembukaan UUD 1945). Namun demikian, setelah hampir 70 puluh tahun merdeka, sudah melangkah lebih dari 69 tahun dari gerbang kemerdekaan, apakah kita sudah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur?

Proklamator, sekaligus presiden pertama dan salah satu *the founding fathers* kita mengucapkan salah satu kata-katanya yang sangat terkenal pada bulan November 1945, yaitu *"Setelah merdiko kita merdeso"* atau *"Setelah merdeka kita menata pemerintahan dan membangun mulai dari perdesaan"*. Hal ini memberikan pesan luhur bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah kesuksesan dalam membangun perdesaan.

¹ Pada sumber-sumber yang umum ditulis dan dipahami orang kebanyakan dikenal dengan istilah *mangan ora mangan asal kumpul*.

² Menggambarkan bahwa kalau hanya ingin hidup berkecukupan negeri ini memiliki sumber daya yang berlimpah dengan berusaha keras secara persatuan, kesatuan, gotong royong, dan bersamaan (*togetherness*) akan dapat mencapai aman, tenteram, makmur, sejahtera, dan serba ada (serba berkecukupan). Janganlah jadi TKI/TKW dan kalau ke luar negeri adalah untuk menuntut ilmu atau mengemban tugas negara.

Perdesaan identik dengan pertanian. Harus diakui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peran sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hingga saat ini sektor pertanian masih memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusi pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia di antaranya adalah sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap pendapatan, kontribusi dalam penyediaan pangan, pertanian sebagai penyedia bahan baku, kontribusi dalam bentuk kapital atau modal bagi sektor lainnya, dan pertanian sebagai sumber devisa. Sebagai sektor yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian di Indonesia memiliki beban yang sangat berat. Selain harus menampung angkatan kerja yang sangat besar, pertanian yang identik dengan perdesaan menghadapi rendahnya kualitas sumber daya manusia di perdesaan, makin terbatasnya sumber daya lahan, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2008 dan 2012, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 16,58% dan menurun menjadi 12,49% pada tahun 2011. Penduduk miskin yang tinggal di perdesaan pada tahun 2007 adalah 63,52% dan menurun menjadi 63,20% pada tahun 2011. Penduduk miskin tinggal di perdesaan dan bekerja pada sektor pertanian mencapai 60,12% (94,65% dari total penduduk miskin di perdesaan) pada tahun 2007 dan menurun menjadi 53,53% (84,70% dari total penduduk miskin di perdesaan) pada tahun 2011.

Secara umum, telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan dan pertanian pada tahun 2011 dibanding 2007. Namun demikian, jika dicermati secara persentase jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan meningkat, demikian pula penduduk miskin yang bekerja pada sektor pertanian maupun pada masing-masing subsektornya. Persentase penduduk miskin perdesaan yang bekerja pada sektor pertanian meningkat 7,28%, yaitu meningkat 4,56% untuk tanaman pangan, 0,36% untuk hortikultura, 1,88% untuk perkebunan, dan 0,48% untuk peternakan pada tahun 2011 dibanding tahun 2007.

Kemiskinan identik dengan rendahnya tingkat keadilan dan kemakmuran. Kesejahteraan merupakan salah satu indikator keadilan dan kemakmuran, dan pendapatan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai tingkat pendapatan perdesaan. Pada tulisan ini hanya sebagian dari indikator adil dan makmur yang bisa dibahas, dan terbatas pada salah satu subindikasinya, yaitu tingkat kesejahteraan yang diukur dari pendapatan. Pendapatan merupakan subindikator dari kemakmuran, dan distribusi pendapatan merupakan subindikator dari keadilan.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran

Analisis pendapatan rumah tangga ditujukan untuk memahami besarnya tingkat pendapatan rumah tangga dan struktur pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan total pendapatan yang diterima dari semua

kegiatan anggota rumah tangga yang bekerja. Proporsi pendapatan dari masing-masing sumber sangat bervariasi antarrumah tangga, tergantung pada aksesibilitas terhadap kesempatan-kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penguasaan sumber daya produktif setiap angkatan kerja rumah tangga. Sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan pada umumnya berasal dari lahan pertanian. Pendapatan rumah tangga perdesaan umumnya memiliki keterkaitan dengan luas tanah yang dimiliki karena pertanian merupakan usaha utama. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan perekonomian dan semakin terbukanya akses wilayah perdesaan, pendapatan keluarga dapat saja tidak lagi sepenuhnya tergantung pada luas tanah yang dimiliki sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga. Hasil penelitian Nurmanaf *et al.* (2003) menunjukkan bahwa sumber pendapatan bagi rumah tangga tani dan buruh tani mempunyai proporsi pendapatan yang bervariasi menurut waktu dari masing-masing sumber pendapatan di desa-desa yang berpredikat sebagai desa miskin, terutama pada rumah tangga buruh tani di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Peneliti lain, yaitu Art (1989), menyatakan bahwa sebagian besar rumah tangga (80%) di daerah Cidurian Jawa Barat lebih dari setengah pendapatannya diperoleh dari luar kegiatan usaha tani.

Sumber pendapatan keluarga biasanya berasal beberapa jenis kegiatan, baik sektor pertanian maupun dari luar pertanian. Selama periode 1976 hingga 1983 telah terjadi perubahan struktur pendapatan khususnya di daerah perdesaan Jawa Barat sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasahan (1988), Syukur (1988), serta Saefudin, dan Marisa (1984). Meskipun telah terjadi perubahan struktur pendapatan di daerah perdesaan, sektor pertanian masih merupakan andalan utama pendapatan rumah tangga. Hanya saja proporsi pendapatan sektor pertanian secara persentase mengalami penurunan, walaupun masih lebih besar dari sektor nonpertanian. Menurut Susilowati *et al.* (2010), tingkat pendapatan rumah tangga dibagi atas dua kelompok besar, yaitu (a) pendapatan rumah tangga yang berbasis lahan pertanian, dan (b) pendapatan rumah tangga yang tidak berbasis lahan pertanian. Pendapatan berbasis lahan dapat dirinci atas: (1) nilai produksi berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan petani, dan (2) pendapatan yang diperoleh dari kegiatan berburuh tani. Sementara itu, pendapatan yang tidak berbasis lahan dapat dirinci atas: (1) pendapatan tetap sebagai pegawai, (2) pendapatan dari kegiatan berburuh nonpertanian, (3) pendapatan dari usaha industri rumah tangga, (4) pendapatan dari usaha perdagangan, (5) pendapatan dari transfer/kiriman uang, dan (6) pendapatan dari mencari di alam bebas (menggali pasir, mencari kayu, dan sebagainya).

Menurut Nurmanaf (1989), tingkat pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk bekerja atau berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan. Hasil penelitian Syukur (1988) juga menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga perdesaan mempunyai lebih dari satu sumber pendapatan. Pada dasarnya, total pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh penguasaan sumber pendapatan yang terdiri dari sektor pertanian dan nonpertanian. Adanya perubahan atau kecenderungan yang meningkat pada pendapatan nonpadi dan adanya peningkatan proporsi tenaga kerja di luar sektor pertanian tentunya akan merubah pula struktur penguasaan sumber pendapatan. Dengan demikian, keragaman

sumber pendapatan rumah tangga di perdesaan sangat bervariasi terutama di desa-desa di Jawa.

Data dan Analisis Data

Data yang dianalisis dalam tulisan ini adalah data dan hasil penelitian Patanas periode 2007–2012 di beberapa provinsi. Provinsi lokasi penelitian, jumlah desa contoh dan jumlah rumah tangga contoh menurut tipe desa diperlihatkan dalam Tabel 1. Jumlah responden rumah tangga di masing-masing desa contoh sekitar 25–40 rumah tangga yang secara garis besar terdiri dari (a) rumah tangga petani pemilik/penggarap lahan dan (b) rumah tangga buruh tani/buruh nonpertanian. Secara total terdapat 1.238 rumah tangga contoh.

Tabel 1. Jumlah Desa Contoh dan Responden Data Patanas, 2007–2012

Tipe Desa	Jumlah Desa Menurut Provinsi								Jumlah Desa	Jumlah Rumah Tangga
	Jabar	Jateng	Jatim	Lampung	Sumut	Sulsel	Jambi	Kalbar		
1. Lahan sawah										
- Padi	3	4	3	-	2	2	-	-	14	560
2. Lahan kering										
- Sayuran	1	1	1	-	-	1	-	-	4	121
- Palawija	2	2	2	1	-	1	-	-	8	242
- Perkebunan	-	-	2	-	-	2	2	2	8	315
Jumlah	6	7	8	1	2	4	2	2	34	1.238

Tulisan ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis dinamika pendapatan rumah tangga pertanian di perdesaan dengan memanfaatkan data Patanas yang telah dikumpulkan oleh PSEKP selama tahun 2007–2012. Berdasarkan tahun dilakukan penelitian tersebut dilakukan analisis dinamika perubahan antarwaktu sesuai dengan waktu pengumpulan setiap tahun oleh PSEKP selama tahun 2007–2012, seperti disajikan pada Tabel 2. Pada periode tersebut PSEKP melakukan pengumpulan data dari desa contoh yang sama dan rumah tangga contoh yang sama pada beberapa tipe desa, yaitu desa lahan sawah berbasis padi, desa lahan kering berbasis palawija (jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah), desa lahan kering berbasis sayuran (kentang dan kubis), dan desa lahan kering berbasis tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, tebu).

Tabel 2. Perubahan Antarwaktu Data Patanas 2007–2012 Sebagai Dasar Analisis Dinamika

Tipe Desa	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Lahan sawah–padi	V			V		
2. Lahan kering–sayuran		V			V	
3. Lahan kering–palawija		V			V	
4. Lahan kering–perkebunan			V			V

Analisis pendapatan rumah tangga meliputi analisis (1) besarnya tingkat pendapatan rumah tangga; (2) distribusi pendapatan rumah tangga; dan (3) struktur pendapatan rumah tangga. Besarnya dan peningkatan pendapatan rumah tangga antarwaktu dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya daya beli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Distribusi pendapatan rumah tangga yang diukur dengan indeks Gini digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan rumah tangga sebagai akibat ketidakmerataan aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan struktur pendapatan rumah tangga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar lapangan kerja dan usaha pertanian mampu berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga.

Struktur pendapatan rumah tangga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar lapangan kerja dan usaha pertanian mampu berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Untuk menganalisis struktur pendapatan rumah tangga menurut sumbernya (pertanian dan nonpertanian) digunakan formula sebagai berikut:

$$P_m = \left[\sum_{i=1}^n X_{ki} \right] / \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} \right] \times 100\% \quad (1)$$

di mana: P_m = pangsa pendapatan rumah tangga dari sektor ke- k (pertanian) terhadap total pendapatan rumah tangga, dalam %

$\sum_{i=1}^n X_{ki}$ = jumlah pendapatan sektor ke- k (pertanian) dari seluruh rumah tangga contoh

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij}$ = total seluruh nilai variabel ke- j ($j=1,2,3,\dots,m$) dari seluruh contoh ke- i (yaitu total pendapatan berbagai sumber dari seluruh rumah tangga contoh).

Distribusi pendapatan rumah tangga yang diukur dengan indeks Gini dapat digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan rumah tangga sebagai akibat ketidakmerataan aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi. Seperti halnya analisis distribusi penguasaan lahan rumah tangga, analisis distribusi pendapatan rumah tangga dilakukan dengan menghitung indeks Gini dengan rumus sebagai berikut (Glewwe, 1986; Adams *et al.*, 1995):

$$G(y) = \frac{2}{\bar{y}} \text{Cov}(y, p(y)) \quad (2)$$

di mana: $G(y)$ = indeks gini distribusi pendapatan rumah tangga

\bar{y} = rata-rata pendapatan rumah tangga

y_i = total pendapatan rumah tangga ke- i

$p(y_i)$ = urutan pendapatan rumah tangga, yaitu $p = 1$ untuk urutan rumah tangga dengan total pendapatan terkecil dan $p = n$

untuk urutan rumah tangga dengan total pendapatan tertinggi
 n = jumlah populasi rumah tangga yang dianalisis

Nilai G berada pada selang 0 dan 1. Distribusi pendapatan rumah tangga masuk kategori ketimpangan berat apabila $G > 0,5$; kategori ketimpangan sedang apabila $0,4 < G < 0,5$; dan kategori ketimpangan ringan apabila $G < 0,4$.

DINAMIKA PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN

Pendapatan rumah tangga dalam penelitian Patanas ini dibagi berdasarkan sumber-sumbernya ke dalam dua bentuk pendapatan, yaitu: *pertama* pendapatan yang berasal dari sektor pertanian (*farm income*) atau pendapatan pertanian dan *kedua* adalah pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian (*non-farm income*) atau pendapatan nonpertanian. Untuk mengetahui dinamika pendapatan rumah tangga perdesaan yang terjadi selama dua titik waktu dilakukan perbandingan antarperiode pengumpulan, yaitu antara tahun terakhir dan tahun sebelumnya. Di samping itu, dinamika perubahan juga dilihat antaragroekosistem sehingga terlihat dinamika dari jenis sumber pendapatan rumah tangga serta perbandingan di antara responden yang sama pada agroekosistem yang berbeda-beda. Perubahan pendapatan rumah tangga antarwaktu dan menurut agroekosistem disajikan pada Tabel 3.

Secara nominal terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga baik untuk pendapatan pertanian maupun nonpertanian pada seluruh agroekosistem. Pada pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian, perubahan terbesar terjadi pada agroekosistem lahan kering sayuran dan terendah adalah agroekosistem lahan kering palawija. Pada sumber pendapatan nonpertanian perubahan pendapatan terbesar adalah pada agroekosistem lahan kering sayuran dan terkecil adalah agroekosistem lahan sawah. Secara total perubahan pendapatan terbesar terjadi pada agroekosistem lahan kering sayuran dan yang terkecil adalah pada agroekosistem lahan sawah.

Pada agroekosistem lahan sawah peningkatan pendapatan pertanian pada periode 2010 dibanding 2007 disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas usaha tani dan peningkatan harga tahun 2010 dibanding tahun 2007. Pada tahun 2010 kondisi iklim cenderung normal dengan kondisi curah hujan cenderung basah, sementara pada tahun 2007 terjadi gangguan iklim. Kondisi ini menyebabkan produktivitas tahun 2010 relatif meningkat dibanding 2007. Dari sisi harga, pada tahun 2008–2009 terjadi krisis finansial internasional dan sebagai imbasnya harga-harga pertanian meningkat pesat dibanding tahun 2007 dan peningkatan ini cenderung berlanjut hingga 2010, sehingga petani menikmati harga yang lebih tinggi dibanding tahun 2007.

Perubahan pendapatan nonpertanian pada agroekosistem lahan kering didorong oleh adanya upaya anggota rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dari luar usaha tani. Peningkatan harga-harga pada tahun 2010 sebagai imbas dari krisis finansial 2008–2009 telah mendorong peningkatan harga-harga

kebutuhan sehingga rumah tangga petani terdorong untuk mencari jenis pekerjaan yang menjadi andalan sumber pendapatan, yaitu selain berusaha tani padi di lahan sawah, terutama bagi rumah tangga petani berlahan sempit, berburuh tani dan berburuh nontani untuk bekerja di sektor lain, seperti buruh bangunan dan buruh pabrik, menjadi pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini menyebabkan kontribusi pendapatan meningkat baik pada pertanian maupun nonpertanian.

Tabel 3. Perubahan Tingkat Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Petani Desa Patanas Berdasarkan Tipe Agroekosistem, 2007–2012

Pendapatan	Lahan Sawah Padi	Lahan Kering Palawija	Lahan Kering Sayuran	Lahan Kering Perkebunan
Nilai awal (Rp Juta) ^a				
Pertanian	12,34	8,83	11,82	13,49
Nonpertanian	7,31	2,13	3,92	7,52
Total	19,65	10,96	15,73	21,01
Nilai akhir (Rp Juta) ^b				
Pertanian	22,44	11,51	30,39	32,35
Nonpertanian	12,77	11,35	9,45	17,51
Total	35,21	22,86	39,85	49,87
Perubahan nilai (%)				
Pertanian	81,83	30,41	157,21	139,86
Nonpertanian	74,65	432,36	141,46	132,83
Total	79,16	108,59	153,29	137,34
Persentase awal (%) ^a				
Pertanian	62,80	80,55	75,11	64,20
Nonpertanian	37,20	19,45	24,89	35,80
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase akhir (%) ^b				
Pertanian	63,74	50,36	76,28	64,88
Nonpertanian	36,26	49,64	23,73	35,12
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Perubahan persentase (%)				
Pertanian	0,94	-30,19	1,16	0,68
Nonpertanian	-0,94	30,19	-1,16	-0,68

Keterangan: ^a Tahun 2007 untuk lahan padi sawah, tahun 2008 untuk lahan kering palawija dan sayuran, dan tahun 2009 untuk lahan kering perkebunan

^b Tahun 2010 untuk lahan padi sawah, tahun 2011 untuk lahan kering palawija dan sayuran, dan tahun 2012 untuk lahan kering perkebunan

Pada agroekosistem lahan kering palawija secara nominal pendapatan pertanian secara nominal meningkat, namun peningkatannya lebih rendah jika dibandingkan pendapatan nonpertanian. Kontribusi pendapatan dari usaha pertanian pada rumah tangga agroekosistem ini menurun drastis. Penurunan terjadi karena produktivitas usaha tani relatif rendah dan kurang mengalami peningkatan. Kondisi iklim tahun 2011 cenderung tidak normal sementara harga hasil panen komoditas jauh menurun jika dibandingkan harga-harga tahun 2008. Di pihak lain, harga kebutuhan meningkat mendorong peningkatan kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga petani agroekosistem lahan kering berusaha bekerja di luar pertanian, seperti buruh bangunan dan buruh pabrik menjadi pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini menyebabkan kontribusi pendapatan pertanian menurun dan pendapatan nonpertanian meningkat pesat.

Pada agroekosistem lahan kering sayuran secara nominal pendapatan pertanian dan nonpertanian menunjukkan peningkatan, bahkan pendapatan dari pertanian menunjukkan perubahan peningkatan tertinggi dibanding rumah tangga agroekosistem lainnya pada 2011 dibanding 2008. Kontribusi pendapatan pertanian menunjukkan peningkatan sekali pun relatif kecil. Sumber perubahan terjadi karena adanya peningkatan produktivitas dan harga-harga komoditas. Pada kondisi iklim yang lebih baik, hasil panen rumah tangga dan harga pada 2011 relatif lebih baik jika dibandingkan 2008. Tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan tingginya risiko usaha tani sayuran mendorong rumah tangga petani sayuran tidak hanya mengandalkan pendapatan dari usaha taninya. Terjadi perubahan di mana sumber pendapatan rumah tangga meningkat karena anggota rumah tangga bekerja pada sektor nonpertanian bertambah. Perubahan ini menyebabkan pendapatan nonpertanian juga mengalami peningkatan.

Pada agroekosistem lahan kering perkebunan secara nominal pendapatan petani meningkat pada 2012 dibanding 2009. Pendapatan pertanian meningkat lebih tinggi jika dibandingkan pendapatan nonpertanian. Dari sisi kontribusi, pendapatan dari sumber pertanian meningkat sekalipun relatif kecil. Sumber peningkatan pendapatan adalah dari peningkatan produktivitas. Pada tahun 2012 kondisi iklim lebih baik dibanding tahun 2009 dan lebih mirip kondisi tahun 2010, di mana tidak terjadi gangguan iklim dan curah hujan cenderung normal. Namun demikian, harga-harga komoditas yang tadinya mengalami peningkatan akibat krisis finansial tahun 2008–2009 telah menurun drastis pada tahun 2012. Meningkatnya aktivitas perkebunan telah mendorong munculnya sumber-sumber pendapatan nonpertanian di wilayah perkebunan. Kondisi ini menyebabkan sumber pendapatan dari nonperkebunan juga meningkat. Oleh karenanya, pendapatan rumah tangga petani pada agroekosistem lahan kering perkebunan meningkat baik pada sumber pendapatan pertanian maupun nonpertanian.

Hasil analisis dinamika pendapatan rumah tangga pada berbagai agroekosistem ini menunjukkan bahwa produktivitas dan harga menjadi sumber utama peningkatan pendapatan, juga sumber utama perubahan pendapatan. Infrastruktur yang mendorong peningkatan produktivitas dan stabilisasi harga nampaknya perlu mendapatkan perhatian penting. Upaya mempertahankan lahan sawah dan meningkatkan produktivitas lahan kering merupakan masa depan

produksi pangan nasional, apabila kebijakan yang mendukung hal tersebut tidak dilakukan secara kondusif maka pertanian akan semakin ditinggalkan. Rumah tangga petani akan beralih pada sumber pendapatan nonpertanian yang memberikan insentif pendapatan lebih tinggi dan risiko lebih rendah.

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Hasil identifikasi jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan rumah tangga pada agroekosistem lahan sawah padi menunjukkan bahwa pada tahun 2007 rumah tangga petani umumnya (66%) memiliki dua (37%) hingga tiga (29%) jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Jenis pekerjaan yang menjadi andalan sumber pendapatan, yaitu berusaha tani padi di lahan sawah dan bagi rumah tangga petani berlahan sempit, berburuh tani dan berburuh nontani seperti buruh bangunan dan buruh pabrik menjadi pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan keluarga. Namun demikian, pada tahun 2010 rumah tangga petani umumnya memiliki jenis pekerjaan lebih dari tiga jenis pekerjaan (68%) dan bahkan yang memiliki lebih dari empat jenis pekerjaan mencapai 32%. Sama seperti kondisi pada tahun 2007, untuk mendapatkan tambahan pendapatan ini, anggota rumah tangga memilih pekerjaan di luar usaha tani dan bahkan di sektor nonpertanian untuk menambah pendapatan. Kontribusi pendapatan rumah tangga dari lahan sawah masih dominan dan meningkat 8,14% pada tahun 2010 dibanding 2007. Pendapatan dari usaha jasa dan buruh pertanian yang menunjukkan penurunan sekitar 6,50% dan pendapatan jasa nonpertanian meningkatkan 4,31%.

Pada agroekosistem lahan kering palawija dan sayuran pada tahun 2008 rumah tangga petani umumnya (63%) memiliki tiga (30%) hingga empat (33%) jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Pada tahun 2011 jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 76% di mana masing-masing sekitar 28% dan 48%. Jenis pekerjaan yang menjadi andalan sumber pendapatan, yaitu berusaha tani lahan kering/tegalan dan upaya bagi rumah tangga yang berlahan sempit petani melakukan diversifikasi dari jenis sumber pendapatan. Diversifikasi sumber pendapatan ini didorong oleh kegiatan sektor nonpertanian seperti buruh bangunan, pabrik, dan sebagainya yang menjadi pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan keluarga.

Pendapatan rumah tangga petani pada desa lahan kering palawija mengalami penurunan pada 2011 dibandingkan 2008. Penurunan pendapatan tidak hanya terjadi dari lahan tegalan, namun juga dari lahan sawah. Namun demikian, pendapatan dari usaha kebun dan ternak menunjukkan peningkatan. Sumber peningkatan pendapatan terjadi selain dari tanaman kebun dan ternak, juga usaha nonpertanian. Pada desa lahan kering palawija, pendapatan pertanian menurun drastis dan usaha tanaman semusim tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Berbeda dengan pendapatan rumah tangga petani pada agroekosistem lahan kering palawija, pada agroekosistem lahan kering sayuran, pendapatan pertanian

menunjukkan peningkatan. Kontribusi pendapatan dari lahan pertanian pun juga menunjukkan peningkatan. Pendapatan dari usaha pertanian tetap dominan dan sumber pendapatan selain dari komoditas yang diusahakan juga dari usaha ternak dan usaha nonpertanian. Sekalipun pendapatan dari usaha lainnya menurun, usaha dagang dan jasa nonpertanian menunjukkan juga merupakan sumber peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Sumber pendapatan rumah tangga di perdesaan berbasis agroekosistem lahan kering perkebunan juga cukup beragam. Perkembangan usaha perkebunan dan peningkatan aksesibilitas desa menjadi sumber penyebab peningkatan sumber pendapatan dari usaha nonpertanian terutama di desa Patanas di Sulawesi Selatan. Adanya jalan lintas Sulawesi menyebabkan kondisi desa sangat ramai dan aktivitas ekonomi menjadi berkembang dan semakin beragam. Masyarakat di wilayah ini menambah pendapatannya terutama dari sektor nonpertanian seperti berdagang, buka warung/toko, dan usaha transportasi. Usaha pertanian tetap menjadi sumber pendapatan masyarakatnya, namun pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan pertanian.

Secara umum, pada desa-desa Patanas perbandingan nilai total pendapatan rumahtangga agroekosistem perkebunan pada periode 2009 dan 2012 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian, persentase sumber pendapatan dari sektor pertanian dan nonpertanian pada periode tersebut relatif tidak berubah, kecuali pada desa-desa berbasis komoditas tebu. Sumber peningkatan pendapatan pertanian di wilayah ini adalah dari lahan tegalan, bukan dari lahan komoditas utama. Pada sumber pendapatan nonpertanian terjadi peningkatan dari usaha lainnya. Kontribusi sumber pendapatan ini mengalami penurunan pada tahun 2012 dibandingkan 2009.

STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha

Sumber pendapatan rumah tangga di desa-desa Patanas dapat dibedakan menjadi sumber pendapatan yang berasal dari sektor pertanian dan dari sektor nonpertanian. Desa-desa Patanas merupakan desa-desa yang berbasis padi sawah, sayuran, palawija, dan perkebunan, di mana seharusnya pertanian menjadi sumber pendapatan utama atau dominan bagi rumah tangga petani. Namun demikian, dinamika perubahan lingkungan dan pembangunan pertanian yang terjadi dapat mengakibatkan sumber pendapatan rumah tangga berubah.

Seiring dengan perubahan waktu, perubahan kondisi lingkungan strategis perdesaan aktivitas usaha dan perekonomian perdesaan berubah. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, perubahan tingkat aksesibilitas atau keterbukaan ekonomi desa, perubahan iklim, dinamika harga, dan perubahan lainnya menyebabkan usaha pertanian dan usaha komoditas utama bukan lagi menjadi sumber pendapatan utama. Aktivitas ekonomi perdesaan menjadi semakin

berkembang dan sumber pendapatan rumah tangga juga demikian. Karakteristik sumber daya lahan dan agroekosistem, letak geografis desa dan akses jalan, dan komunikasi yang semakin baik dan maju menyebabkan sumber pendapatan dari sektor pertanian menjadi tidak dominan. Sumber pendapatan yang tadinya didominasi oleh sumber pendapatan dari sektor pertanian digantikan oleh pendapatan yang bersumber dari nonpertanian. Perubahan terjadi khususnya pada agroekosistem lahan lahan kering palawija.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada agroekosistem lahan sawah padi, struktur pendapatan rumah tangga masih didominasi oleh sumber pendapatan pertanian yang berasal dari lahan sawah. Kontribusi sumber-sumber pendapatan pertanian secara total meningkat dan untuk nonpertanian menurun pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2007. Pada usaha nonpertanian hanya usaha jasa nonpertanian yang menunjukkan peningkatan kontribusinya. Diversifikasi dan integrasi tanaman dengan ternak dan ikan menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Tabel 4. Perubahan Struktur Pendapatan Pendapatan Rumah Tangga Agroekosistem Lahan Sawah Padi dan Lahan Kering Palawija, 2007–2011

No.	Sumber Pendapatan	Lahan Sawah Padi			Lahan Kering Palawija		
		2007	2010	Perubahan	2008	2011	Perubahan
1.	Pertanian						
	a. Sawah	49,19	57,33	8,14	11,83	3,99	-7,84
	b. Tegall	0,27	0,77	0,50	39,59	22,88	-16,71
	c. Pekarangan/nonmusim	0,11	0,45	0,34	7,43	0,33	-7,10
	d. Kebun	2,75	0,05	-2,70	8,17	10,52	2,35
	e. Ternak	0,89	0,45	-0,44	1,14	4,45	3,31
	f. Tambak	1,02	2,61	1,59	0,00	0,00	0,00
	g. Buruh dan jasa pertanian	8,56	2,06	-6,50	12,39	8,20	-4,20
	Pendapatan pertanian	62,80	63,74	0,94	80,55	50,36	-30,19
2.	Nonpertanian						
	a. Dagang	5,95	2,90	-3,05	2,31	13,35	11,04
	b. Jasa nonpertanian	4,59	8,90	4,31	2,72	5,71	2,98
	c. Buruh nonpertanian	5,79	4,74	-1,05	5,03	25,52	20,49
	d. Kiriman dan lainnya	20,87	19,73	-1,14	9,38	5,06	-4,32
	Pendapatan nonpertanian	37,20	36,26	-0,94	19,45	49,64	30,19
	Total Pendapatan	100,00	100,00		100,00	100,00	

Jika pada agroekosistem lahan sawah pendapatan dari komoditas utama meningkat, hal sebaliknya terjadi pada lahan kering palawija. Sumber pendapatan pertanian menurun drastis dan menjadi tidak dominan. Kontribusi sumber pendapatan dari sawah, tegal, pekarangan, dan buruh jasa pertanian menurun.

Peningkatan kontribusi terjadi pada lahan kebun dan ternak. Hal ini menunjukkan usaha komoditas tanaman semusim tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Kontribusi sumber pendapatan nonpertanian meningkat tajam, di mana usaha dagang dan buruh dan jasa nonpertanian kontribusinya meningkat. Diversifikasi usaha dan integrasi tanaman ternak dapat menjadi alternatif solusi bagi pengembangan usaha pada agroekosistem lahan kering berbasis komoditas palawija.

Usaha pertanian pada agroekosistem lahan kering sayuran dan perkebunan tetap dominan dan menjadi andalan (Tabel 5). Pada agroekosistem lahan kering sayuran, sumber pendapatan usaha pada komoditas utama tetap dominan dan menjadi andalan ekonomi rumah tangga. Kontribusi pendapatan dari usaha komoditas meningkat pada tahun 2011 dibanding tahun 2008. Peningkatan juga terjadi pada sumber pendapatan dari ternak. Pada sumber pendapatan nonpertanian, peningkatan terjadi pada usaha dagang dan buruh nonpertanian. Diversifikasi usaha ekonomi rumah tangga dan integrasi tanaman dan ternak menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Tabel 5. Perubahan Struktur Pendapatan Pendapatan Rumah Tangga Agroekosistem Lahan Kering Sayuran dan Lahan Kering Perkebunan, 2008–2012

No.	Sumber Pendapatan	Lahan Kering Sayuran			Lahan Kering Perkebunan		
		2008	2011	Perubahan	2009	2012	Perubahan
1. Pertanian							
a.	Sawah	5,35	3,43	-1,93	8,28	5,51	-2,77
b.	Tegal	40,92	53,70	12,78	6,47	11,62	5,16
c.	Pekarangan/nonmusim	8,43	0,08	-8,35	0,00	0,00	0,00
d.	Kebun	8,53	5,83	-2,70	40,64	40,63	0,00
e.	Ternak	4,30	8,85	4,55	3,60	2,66	-0,94
f.	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g.	Buruh dan jasa pertanian	7,58	4,40	-3,18	5,22	4,45	-0,76
	Pendapatan Pertanian	75,11	76,28	1,16	64,20	64,88	0,68
2. Nonpertanian							
a.	Dagang	3,95	7,70	3,75	6,06	3,47	-2,59
b.	Jasa nonpertanian	0,90	0,40	-0,50	4,26	1,58	-2,68
c.	Buruh nonpertanian	12,08	14,85	2,77	19,44	19,60	0,16
d.	Kiriman dan lainnya	7,95	0,78	-7,18	6,04	10,47	4,42
	Pendapatan nonpertanian	24,89	23,73	-1,16	35,80	35,12	-0,68
	Total Pendapatan	100,00	100,00		100,00	100,00	

Pada agroekosistem lahan kering berbasis komoditas perkebunan relatif tidak terjadi perubahan struktur pendapatan. Usaha pertanian masih dominan dan terdapat kecenderungan meningkat. Pada agroekosistem ini, sumber perubahan pendapatan terletak pada usaha komoditas tegalan dan usaha lainnya. Kontribusi usaha dari komoditas utama lahan kebun relatif tetap. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi usaha perkebunan dengan tanaman semusim dan diversifikasi usaha nonpertanian menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian.

Berdasarkan Luas Penguasaan Lahan

Analisis pada sumber-sumber dan struktur pendapatan menunjukkan bahwa proporsi pendapatan dari masing-masing sumber sangat bervariasi antarrumah tangga, tergantung pada aksesibilitas terhadap kesempatan-kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penguasaan sumber daya produktif, maupun angkatan kerja dalam rumah tangga. Selama ini sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan sering dianggap berasal dari lahan pertanian. Anggapan ini muncul karena diduga terdapat keterkaitan yang kuat antara luas tanah yang dimiliki dengan besarnya pendapatan rumah tangga petani. Tabel 6 menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi pendapatan yang bersumber dari lahan pada agroekosistem lahan sawah padi hanya terjadi pada rumah tangga dengan luas 0,50–1,00 ha pada tahun 2010 dibanding tahun 2007. Pada rumah tangga berlahan sempit dan luas dominasi sumber pendapatan dari lahan menurun dan kontribusi sumber pendapatan nonpertanian meningkat pesat khususnya pada lahan sempit atau <0,5 ha. Pada rumah tangga yang menguasai lahan sempit mencari sumber pendapatan nonpertanian merupakan strategi utama untuk memenuhi kebutuhan. Namun demikian, pada rumah tangga pemilik lahan >1,00 menunjukkan fenomena yang berbeda. Pada kelompok ini kelebihan sumber daya produktif mendorong upaya peningkatan pendapatan dengan menambah usaha nonpertanian.

Pada agroekosistem lahan kering palawija dalam periode 2008–2011 data menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki, perubahan kontribusi pendapatan nonpertanian semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha lahan kering tidak lagi dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga sehingga mereka berupuk mencari sumber pendapatan nonpertanian. Di samping itu, adanya kelebihan sumber daya produktif pada kelompok lahan luas atau >1,00 mendorong rumah tangga kelompok ini berusaha di luar pertanian sehingga perubahan kontribusi pendapatan nonpertanian pada kelompok ini adalah yang paling tinggi di antara kelompok lainnya.

Sekalipun sumber pendapatan usaha pertanian masih tetap dominan, kontribusi sumber pendapatan usaha pertanian pada agroekosistem lahan kering sayuran menunjukkan penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok lahan paling luas atau >1,00, kemudian diikuti lahan paling sempit atau <0,50 ha dan terakhir adalah pada kelompok 0,50–1,00 ha. Kelompok rumah tangga yang memiliki lahan 0,50–1,00 ha tersebut memiliki kecenderungan tetap mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga. Namun demikian, kecenderungan tersebut berbeda dengan pemilik lahan sempit dan luas.

Tabel 6. Kontribusi Pertanian terhadap Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Penguasaan Lahan, 2007–2010

Agroekosistem dan Luas Penguasaan Lahan	Pertanian	Nonpertanian	Pertanian	Nonpertanian	Pertanian	Nonpertanian
Lahan sawah padi	2007		2010		Perubahan	
<0,50	62,67	37,33	40,43	59,57	-22,23	22,23
0,50-1,00	65,26	34,74	66,05	33,95	0,79	-0,79
>1,00	71,68	28,32	64,97	35,03	-6,70	6,70
Lahan kering palawija	2008		2011		Perubahan	
<0,50	61,35	38,65	46,91	53,09	-14,44	14,44
0,50-1,00	72,36	27,64	58,45	41,55	-13,91	13,91
>1,00	78,63	21,37	48,98	51,02	-29,65	29,65
Lahan kering sayuran	2008		2011		Perubahan	
<0,50	81,91	18,10	62,58	37,43	-19,33	19,33
0,50-1,00	93,50	6,50	86,77	13,23	-6,73	6,73
>1,00	97,40	2,60	72,03	27,93	-25,37	25,33
Lahan kering perkebunan	2009		2012		Perubahan	
<0,50	38,05	61,96	39,49	60,51	1,45	-1,45
0,50-1,00	32,66	67,34	30,23	69,77	-2,44	2,44
>1,00	77,52	22,48	65,87	34,13	-11,65	11,65

Pada kelompok pemilik lahan sempit, penguasaan lahan sempit menyebabkan pada kelompok rumah tangga ini mencari pekerjaan di luar pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, pada lahan luas terjadi seperti fenomena yang terjadi pada agroekosistem lahan sawah padi dan lahan kering palawija, adanya kelebihan sumber daya produktif mendorong rumah tangga kelompok ini berusaha di luar pertanian. Berbeda dengan agroekosistem lahan sawah padi dan sama dengan agroekosistem lahan kering palawija, perubahan kontribusi pendapatan nonpertanian pada kelompok ini adalah yang paling tinggi di antara kelompok lainnya.

Agroekosistem lahan kering perkebunan menunjukkan fenomena yang berbeda karena selama ini dominasi pendapatan dari pertanian hanya pada kelompok rumah tangga yang memiliki lahan di atas 1,00 ha. Pada kelompok <0,50 ha maupun 0,50–1,00 ha sumber pendapatan pertanian tidak dominan pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 memiliki kecenderungan relatif tetap. Kontribusi sumber pendapatan dari pertanian memiliki kecenderungan meningkat untuk kelompok <0,50 ha, sedikit menurun untuk kelompok 0,50–1,00 ha dan sangat menurun untuk kelompok >1,00 ha. Rumah tangga pada kelompok <0,50 dan 0,50–1,00 ha tetap mengutamakan pertanian sebagai sumber pendapatan rumah tangga mereka karena komoditas perkebunan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan rumah

tangga, sedangkan pada kelompok lahan >1,00 memiliki kecenderungan untuk menambah aktivitas usaha mereka dengan berusaha di luar pertanian.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendapatan keluarga memiliki kecenderungan semakin tidak lagi sepenuhnya tergantung pada luas tanah yang dimiliki sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga. Terdapat indikasi bahwa usaha pertanian di wilayah desa-desa Patanas semakin tidak begitu dominan dan semakin menurun sumbangannya bagi pendapatan rumah tangga. Pada kelompok pemilik lahan sempit berupaya meningkatkan pendapatannya dari usaha nonpertanian, kecuali pada lahan kering berbasis perkebunan. Pada kelompok pemilik lahan 0,50–1,00, kecuali pada lahan kering palawija yang usaha komoditas semusimnya tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan rumah, memiliki kecenderungan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama, sedangkan pada kelompok pemilik lahan >1,00 semakin memperluas usahanya pada sektor nonpertanian. Apabila usaha komoditas dapat diandalkan maka semakin luas lahan yang dimiliki, kontribusi pendapatan pertanian semakin menurun. Fenomena ini menunjukkan terjadinya transisi ekonomi perdesaan.

DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Indeks Gini digunakan untuk menentukan apakah distribusi pendapatan petani di suatu daerah mempunyai ketimpangan ringan, sedang, atau berat. Hasil perhitungan nilai indeks Gini di desa-desa Patanas disajikan pada Tabel 7. Nilai indeks Gini berkisar 0,38–0,51, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan sedang hingga tinggi atau berat.

Ketimpangan tingkat pendapatan pertanian rumah tangga pada seluruh agroekosistem meningkat tajam, kecuali pada agroekosistem lahan kering sayuran. Pada agroekosistem ini nilai indeks Gini menurun 0,01 yang menunjukkan kecenderungan semakin meratanya tingkat distribusi pendapatan rumah tangga. Pada pendapatan total rumah tangga, ketimpangan tingkat pendapatan total rumah tangga seluruhnya menunjukkan peningkatan tajam. Sumber utama ketimpangan adalah pada kelompok pemilik lahan sempit berupaya keras memenuhi tuntutan kebutuhan rumah tangganya melalui bekerja dan berusaha sebagai buruh dan jasa nonpertanian sementara yang memiliki lahan luas semakin meningkatkan dan memperluas usahanya ke arah usaha nonpertanian untuk memanfaatkan kelebihan sumber daya produktif yang dimilikinya dan meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Peningkatan ketimpangan tingkat pendapatan secara umum dapat diartikan sebagai semakin lebarnya jarak antara golongan pendapatan tinggi dengan golongan pendapatan di bawahnya. Dalam arti yang lebih jelas yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin tetap saja miskin, sehingga upaya pembangunan perdesaan dilakukan menghasilkan output yang tidak dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat desa. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya produktif rumah tangga petani yang berpendapatan rendah melalui berbagai program, seperti

inovasi teknologi, integrasi tanaman ternak, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan keberpihakan terhadap mereka merupakan alternatif strategi dan kebijakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ini.

Tabel 7. Perubahan Nilai Indeks Gini Pendapatan Rumah Tangga Petani di Desa Penelitian Patanas, 2007–2012

No.	Keterangan	Tahun dan Nilai		Perubahan
		2007	2010	
1.	Lahan sawah padi	2007	2010	
	a. Pendapatan pertanian	0,41	0,51	0,10
	b. Pendapatan total	0,43	0,47	0,04
2.	Lahan kering palawija	2008	2011	
	a. Pendapatan pertanian	0,38	0,46	0,08
	b. Pendapatan total	0,45	0,51	0,06
3.	Lahan kering sayuran	2008	2011	
	a. Pendapatan pertanian	0,44	0,43	-0,01
	b. Pendapatan total	0,43	0,46	0,03
4.	Lahan kering perkebunan	2009	2012	
	a. Pendapatan pertanian	0,38	0,40	0,02
	b. Pendapatan total	0,40	0,46	0,06

KESIMPULAN

Usaha pertanian pada agroekosistem lahan sawah padi, lahan kering sayuran, dan lahan kering perkebunan menghasilkan tingkat pendapatan pertanian yang masih dominan bagi rumah tangga perdesaan dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan rumah tangga petani. Namun, tidak demikian halnya pada agroekosistem lahan kering palawija. Pendapatan pertanian bagi rumah tangga perdesaan pada agroekosistem lahan kering palawija semakin tidak dominan dan juga tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan.

Dalam periode 2007–2012 terjadi perubahan dan dinamika pendapatan rumah tangga perdesaan di mana sumber pendapatan semakin beragam. Di samping itu, juga terdapat kecenderungan kontribusi pendapatan usaha nonpertanian semakin meningkat.

Pada agroekosistem lahan sawah berbasis padi terjadi kecenderungan bahwa semakin sempit pemilikan lahan kontribusi pendapatan nonpertanian semakin meningkat. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada petani berlahan sempit di agroekosistem lahan kering sayuran. Namun, sebaliknya untuk agroekosistem

lainnya di mana semakin luas lahan usaha, semakin tinggi kontribusi sumber pendapatan nonpertanian.

Ketimpangan pendapatan pertanian maupun pendapatan total semakin tinggi dan menunjukkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Upaya dan hasil-hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat dinikmati secara merata oleh semua golongan atau kelompok masyarakat.

Setelah 69 tahun melangkah dari pintu gerbang kemerdekaan masih perlu perjuangan keras untuk meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat perdesaan. Peningkatan pendapatan, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya dengan fokus utama pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas sumber daya perdesaan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan infrastruktur pertanian dan perdesaan, dan pembangunan pertanian sebagai strategi utama perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Luasan lahan yang diusahakan menjadi faktor penting sehingga perlu perhatian mengamankannya termasuk di dalamnya pengembangan infrastruktur pendukung terutama bagi skala kecil dan lahan kering berbasis palawija maupun sayuran. Gejala atau fenomena transformasi ekonomi perdesaan seyogianya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Demikian pula transformasi ekonomi perdesaan seyogianya diiringi dengan industrialisasi pertanian dan upaya diversifikasi usaha, baik integrasi tanaman ternak dan antarjenis tanaman maupun usaha penciptaan nilai tambah pertanian dan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aart, S. 1989. Akses Tanah Sebagai Indikator Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Prisma No. 4. LP3ES. Jakarta.
- Adams Jr., R.H. and J.J. He. 1995. Sources of Income Inequality and Poverty in Rural Pakistan. Research Report 102. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Berita Resmi Statistik No. 56/11/Th. XI, 3 November 2008. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Berita Resmi Statistik No. 73/11/Th. XV, 5 November 2012. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Glewwe, P. 1986. The Distribution of Income in Sri Lanka in 1969-1970 and 1980-1981: A Decomposition Analysis. *Journal of Development Economics* 24(2):255-274.
- Marisa, Y. dan B. Hutabarat. 1988. Ragam Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Perdesaan Sulawesi Selatan. *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, dan C. A. Rasahan (Eds.). *Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Perdesaan menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.

- Nurmanaf, A.R., E.L. Hastuti, H. Tarigan, dan Supadi. 2003. Pemberdayaan Kelembagaan Tradisional Ketenagakerjaan Pertanian di Pedesaan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Nurmanaf, A.R. 1989. Alokasi Curahan Tenaga Kerja Rumah Tangga Pedesaan di Lampung. *Dalam* E. Pasandaran, P. Simatupang, T. Sudaryanto, A. Suryana, C.A. Rasahan, dan A. Djauhari (Eds.). Prosiding Patanas: Perkembangan Struktur Produksi Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Rasahan, C.A. 1988. Perspektif Struktur Pendapatan Masyarakat Perdesaan dalam Hubungannya dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, dan C. A. Rasahan (Eds.). Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Perdesaan menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Saefudin, Y. dan Y. Marisa. 1984. Perubahan Pendapatan dan Kesempatan Kerja. Studi Dinamika Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Susilowati, S.H., B. Hutabarat, M. Rachmat, Sugiarto, Supriyati, A.K. Zakaria, H. Supriyadi, A. Purwoto, Supadi, B. Winarso, M. Iqbal, D. Hidayat, T.B. Purwantini, R. Elizabeth, C. Muslim, T. Nurasa, M. Maulana, dan R. Aldillah. 2010. Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usaha Tani Padi. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

BAB III KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

1. Dinamika Konsumsi Pangan
(Mewa Ariani dan Hermanto):
2. Perubahan Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Sawah Berbasis Padi *(Sri Hastuti Suhartini):*
3. Dinamika Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Palawija
(Rizma Aldillah dan Tri Bastuti Purwantini):
4. Dinamika Pola dan Kergaman Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan *(Tri Bastuti Purwantini):*
5. Pola Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan: Komparasi Antartipe Agroekosistem
(Mewa Ariani dan Handewi Purwati Saliem):

DINAMIKA KONSUMSI PANGAN

Mewa Ariani dan Hermanto

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang (UU) Pangan No. 18 tahun 2012, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Dari definisi ini, cakupan pangan sangat luas, tidak hanya pangan pokok yang umumnya sumber karbohidrat, tetapi juga pangan sumber protein, vitamin, dan mineral. Tidak hanya berupa bahan baku, tetapi juga bahan tambahan pangan dan lainnya.

UU tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Ketentuan dari sisi konsumsi pangan, diamanatkan sebagai berikut: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui antara lain (1) penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan (2) pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Pangan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Setiap individu memiliki hak bebas dari rasa lapar dan kelaparan. Pangan memiliki dimensi yang sangat kompleks, tidak saja dari sisi kehidupan dan kesehatan, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, peningkatan daya saing SDM, yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa. Pangan dapat dikatakan sebagai produk budaya karena pangan merupakan hasil adaptasi aktif antara manusia/masyarakat dengan lingkungannya, sehingga perwujudan ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya dan kearifan lokal, sehingga ia dapat menjadi media dalam mengembangkan budaya dan peradaban bangsa (Suryana, 2011).

Indonesia terus berupaya untuk memantapkan ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan. Sebagai gambaran, dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau dikenal dengan MP3EI (Kemenko Bidang Perekonomian, 2011) disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia. Kebijakan ketahanan pangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip antara lain sebagai

berikut: (1) memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi; (2) pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif; (3) upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya; dan (4) diversifikasi produksi pangan, terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah.

Dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2011–2014 (Dewan Ketahanan Pangan, 2011) disebutkan bahwa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan antara lain menata pertanahan dan tata ruang wilayah, antisipasi perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi), dan meningkatkan produksi domestik (proteksi dan promosi). Pengembangan sistem distribusi pangan dilakukan dengan memperlancar sistem distribusi pangan, menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan, meningkatkan aksesibilitas atas pangan, dan menangani kerawanan pangan kronis dan transien. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dilakukan dengan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan, mendorong perilaku konsumsi pangan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, dan memfasilitasi pengembangan industri pangan UMKM.

Upaya pemantapan ketahanan pangan pada saat ini menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Para pakar pertanian dan pangan menyebutkan bahwa masalah utama ketahanan pangan adalah menyempitnya lahan pertanian terutama lahan sawah yang berdampak pada pengurangan luas panen dan produksi pangan. Menurut Sumaryanto (2009), kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan ketersediaan produksi pangan per kapita adalah (1) pertumbuhan luas panen sangat terbatas karena (a) laju perluasan lahan pertanian baru sangat rendah dan konversi lahan pertanian ke nonpertanian sulit dikendalikan, dan (b) degradasi sumber daya air dan kinerja irigasi serta turunnya tingkat kesuburan fisik dan kimia lahan pertanian; dan (2) adanya gejala kemandegan dalam pertumbuhan produktivitas. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang berdampak pada upaya peningkatan ketersediaan pangan. Jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 237,5 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49%, diperkirakan pada tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 250 juta (BPS, 2011).

Globalisasi dan liberalisasi telah mengubah gaya hidup masyarakat termasuk gaya makan. Menurut Hawkes *et al.* (tanpa tahun) ada dua langkah perubahan globalisasi dan gaya makan sebagai berikut: (1) globalisasi merubah sistem sosial termasuk peningkatan pendapatan, urbanisasi, dan penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada perubahan diet; dan (2) globalisasi yang merubah sistem pangan akan berdampak pada jumlah dan kualitas ketersediaan pangan untuk konsumsi. Kearney (2010) menyebutkan bahwa pada umumnya perubahan pola konsumsi pangan yang terjadi adalah dari pangan pokok ke arah pangan yang lebih terdiversifikasi. Selanjutnya, dikatakan bahwa perubahan konsumsi pangan pada tingkat global dan regional akan membawa konsekuensi pada pertimbangan kesehatan. Perkembangan urbanisasi, pemasaran pangan hasil industri, dan kebijakan liberalisasi perdagangan berimplikasi pada kesehatan, ditunjukkan dengan adanya masa "transisi gizi", yaitu adanya peningkatan obesitas dan penyakit kronis seperti jantung dan kanker.

Oleh karena itu, kebijakan pangan ke depan harus mempertimbangkan keterkaitan antara dua sektor utama, yaitu sektor pertanian dan sektor kesehatan. Sementara itu, Alexandratos and Bruinsma (2012) menyatakan bahwa perubahan pola makanan akan terus berlangsung dengan kecenderungan untuk mengurangi jumlah konsumsi makanan pokok seperti umbi-umbian dan sereal, yang diimbangi oleh peningkatan konsumsi produk pangan asal ternak, minyak sayur, buah-buahan, dan sayuran.

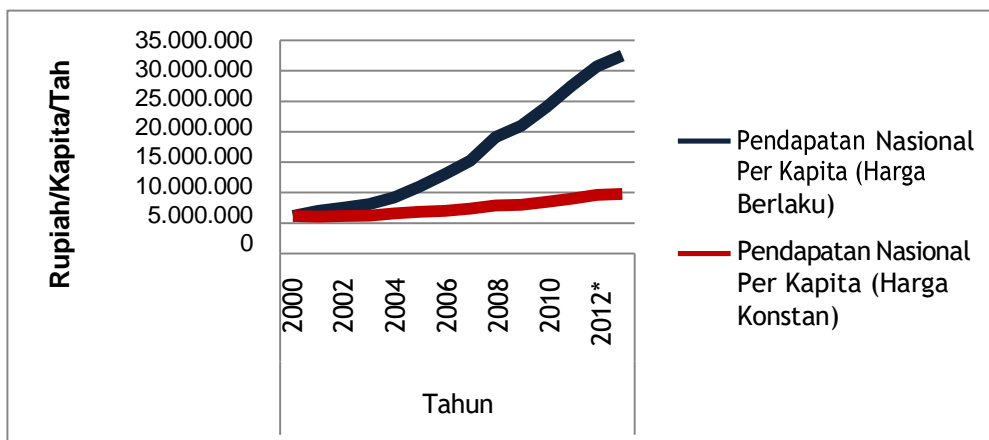
Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan pola konsumsi pangan merupakan tiga fenomena yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena ketiganya secara langsung ataupun tidak langsung saling berkaitan. Menurut Saparini (2012), tren ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin semakin lebar. Data tahun 2005 menyebutkan bahwa 40% orang berpendapatan terendah menguasai 22% pendapatan nasional, namun tahun 2008 porsi tersebut menurun hanya 19%. Sementara, pada periode yang sama 20% orang berpendapatan tertinggi justru menguasai pendapatan nasional yang semakin besar dari semula 40% menjadi 45%.

Hasil kinerja pembangunan 2004–2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut terjaga stabil. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2009 terutama disebabkan krisis ekonomi di Amerika Serikat yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil ternyata berdampak positif terhadap jumlah pengangguran terbuka, yang angkanya turun dari 10,25 juta orang pada tahun 2004 menjadi 7,24 juta orang pada tahun 2012. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran, jumlah penduduk miskin di Indonesia juga menurun dari 36,2 juta orang (2004) menjadi 29,31 juta orang (2012). Penurunan kemiskinan di desa relatif lebih cepat dibandingkan yang terjadi di kota. Pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada perubahan struktur pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan bukan pangan, yang pada akhirnya akan merubah pola konsumsi pangannya.

PERUBAHAN STRUKTUR PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Secara makro, hasil capaian kinerja pembangunan 2004–2012 antara lain pertumbuhan ekonomi cenderung membaik, yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi yang tetap tumbuh positif di tengah gejolak krisis ekonomi dunia mulai tahun 2008. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga telah meningkatkan daya beli masyarakat serta menarik investor asing dan domestik untuk berinvestasi di Indonesia. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran berperan besar pada pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut. Pendapatan per kapita Indonesia pada periode 2004–2012 meningkat lebih dari tiga kali lipat. Pada tahun 2012 pendapatan per kapita telah mencapai Rp33,340 juta per tahun seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Namun

demikian, dengan menggunakan harga konstan (untuk mengetahui angka riil), ternyata pertumbuhan pendapatan per kapita relatif stagnan dari tahun ke tahun atau ada peningkatan namun relatif kecil. Hal ini dapat diartikan bahwa sebetulnya relatif tidak terjadi peningkatan pendapatan per kapita secara riil. Peningkatan pendapatan secara nominal lebih disebabkan oleh perubahan harga barang (inflasi) bukan peningkatan volume barang dan jasa.



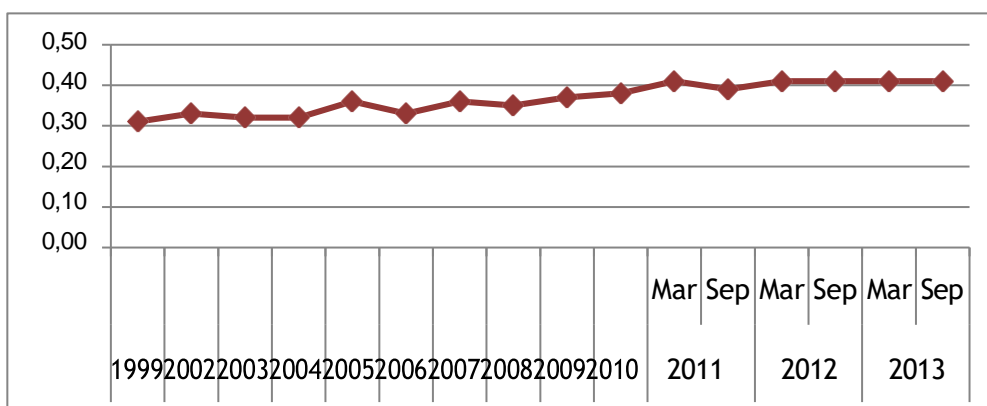
Sumber: BPS (2014a)

Gambar 1. Pendapatan Nasional per Kapita, 2000–2012

Pertumbuhan perekonomian secara agregat nasional berdampak positif pada peningkatan pengeluaran rumah tangga yang ditunjukkan dengan peningkatan secara nominal total pengeluaran rumah tangga, dari sebesar Rp137.453 per kapita pada tahun 1999 menjadi Rp703.561 per kapita pada tahun 2013. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah peningkatan pengeluaran ini dapat diartikan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat? Selama ini yang digunakan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan adalah pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran yang dinyatakan dengan persen. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, kesejahteraan masyarakat semakin rendah dan sebaliknya. Program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraaannya. Berdasarkan data pada kurun waktu tersebut, secara agregat (kota dan desa) pangsa pengeluaran pangan mengalami penurunan dari 62,9% menjadi 47,2%, atau dengan kata lain telah terjadi indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia selama periode 1999–2013 (14 tahun).

Pertanyaannya adalah apakah peningkatan kesejahteraan tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya golongan tertentu dan seberapa jauh tingkat pemerataannya? Untuk mengetahui hal tersebut, salah satu analisis yang sering digunakan adalah indeks Gini, dengan besaran nilai antara 0–1. Semakin tinggi angka indeks Gini, maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan/pengeluaran. Dengan menggunakan data pengeluaran Susenas dapat dilihat perkembangan

ketimpangan pengeluaran sebagai proksi dari ketimpangan pendapatan yang disajikan pada Gambar 2.



Sumber: BPS (2014b)

Gambar 2. Perkembangan Angka Indeks Gini di Indonesia, 1999–2013

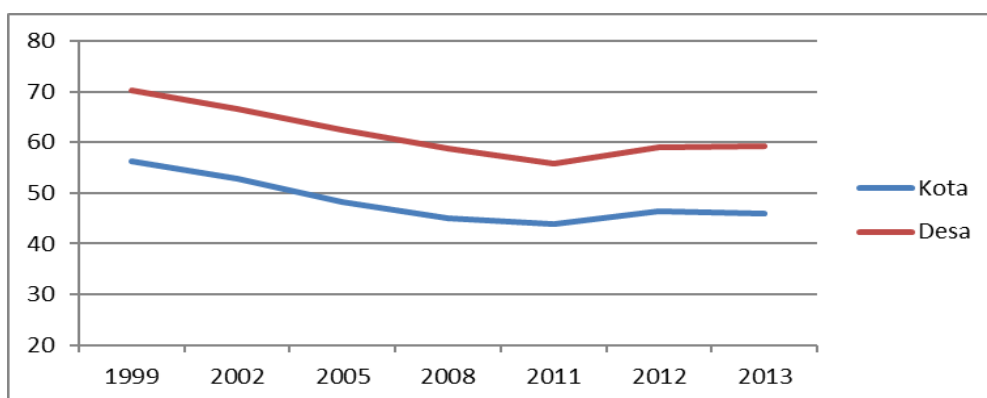
Secara agregat, telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun kesejahteraan tersebut tidak dinikmati oleh seluruh rumah tangga yang ditunjukkan dengan indeks Gini yang meningkat, dari 0,308 pada tahun 1999 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Ketimpangan pengeluaran/pendapatan ini menunjukkan masyarakat kaya semakin kaya, dan masyarakat miskin semakin miskin, atau jurang yang kaya dan yang miskin semakin melebar.

Yang menarik, walaupun ketimpangan pendapatan semakin tinggi, namun berdasarkan data BPS, indeks kebahagiaan penduduk Indonesia pada tahun 2013 berada pada level 65,11 (penduduk cukup bahagia dalam menjalani kehidupannya) dan hanya 25–50% penduduk yang merasa kurang bahagia dan sisanya termasuk kategori bahagia dan sangat bahagia. Indeks kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang diukur secara tertimbang dan mencakup indikator kepuasan terhadap 10 domain kehidupan yang esensial secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan (kepuasan terhadap pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan, dan kondisi keamanan). Penduduk kota, level kebahagiaannya mencapai 65,92 lebih tinggi dari warga perdesaan maupun suburban di level 64,32.

Kesejahteraan masyarakat kota lebih baik daripada masyarakat desa, namun selama kurun waktu 1999–2013 pangsa pengeluaran pangan di kedua wilayah tersebut mengalami penurunan (Gambar 3). Dengan demikian, dapat diartikan di kedua wilayah ini terjadi peningkatan kesejahteraan. Menurut Djauhari (2013) lebih sejahteranya masyarakat di kota dibandingkan dengan di desa menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi secara luas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih bias pada masyarakat perkotaan. Kondisi ini dapat dilihat sebagai kasus di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan negara

Indonesia dan sekaligus sebagai pusat bisnis, Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai infrastruktur yang cukup memadai, dan tersedia lapangan kerja yang relatif terbuka. Keadaan ini mendorong terjadinya urbanisasi ke Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta juga relatif tinggi, yang ditandai di antaranya oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta yang pada tahun 2011 mencapai 6,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional (6,5%).

Mengingat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding masyarakat perkotaan, maka agar ketahanan pangan masyarakat di perdesaan semakin mantap pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan atau program terutama untuk wilayah perdesaan. Pada umumnya masyarakat perdesaan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu reorientasi kebijakan/program pemerintah dengan penekanan pada pembangunan sektor pertanian agar mampu menghasilkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh petani. Pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga diharapkan mampu mengerem laju urbanisasi dan mengurangi jumlah penduduk miskin, sekaligus upaya untuk meningkatkan pemeratan pendapatan.



Sumber: BPS (2005a, 2009a, 2011a, 2012a, 2013a)

Gambar 3. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan, 1999–2013 (%)

Kalau dilihat dari nilai penurunan pangsa pengeluaran pangan selama periode 1999–2013, penurunan di wilayah perkotaan dan perdesaan relatif sama. Penurunan pangsa pengeluaran pangan di kota sebesar 10,3%, sedangkan di desa sebesar 11% selama periode 1999–2013. Kondisi ini memperkuat argumentasi tentang pentingnya untuk melaksanakan reorientasi kebijakan atau program yang memprioritaskan pembangunan perekonomian di perdesaan.

Bila dikaitkan dengan konsep ketahanan pangan rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Soekirman (2000), yaitu proporsi pengeluaran pangan $\geq 60\%$ dapat dikategorikan rawan pangan dan sebaliknya, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan $< 60\%$ dikategorikan tahan pangan, maka secara umum rumah tangga di perkotaan termasuk pada kategori tahan pangan. Sementara itu, rumah

tangga di perdesaan juga termasuk tahan pangan, namun karena pangasanya masih sekitar 59,2% maka rumah tangga tersebut perlu dilakukan pemantauan agar tidak berubah menjadi rawan pangan.

Secara garis besar, kebutuhan rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu kebutuhan pangan dan bukan pangan. Dengan demikian, pada tingkat pendapatan tertentu rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara alamiah, kebutuhan pangan akan mencapai titik jenuh pada tingkat pendapatan tertentu, sementara kebutuhan nonpangan termasuk kualitas pangan dapat dikatakan tidak memiliki titik jenuh. Hukum Working menyatakan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bermacam jenis pengeluaran bervariasi sesuai dengan tingkat pendapatan, ukuran keluarga dan tabungan. Selanjutnya, dikatakan oleh Pakpahan (2012) bahwa proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk pangan cenderung menurun secara aritmetik sejalan dengan peningkatan pendapatan yang bergerak secara geometrik. Artinya, semakin kaya suatu rumah tangga makin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan.

BPS mengelompokkan pengeluaran rumah tangga menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pangan dan kelompok bukan pangan. Kelompok pangan terdiri dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, minuman yang mengandung alkohol, serta tembakau dan sirih. Sementara itu, kelompok bukan pangan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara.

Perubahan proporsi pengeluaran pangan dan bukan pangan menurut kelompok disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Pada tahun 1999, baik di kota maupun di desa, pengeluaran rumah tangga terbesar adalah untuk kelompok padi-padian. Bahkan, pengeluaran padi-padian di desa mencapai 22,1%. Hal ini adalah wajar karena dalam komponen padi-padian terdapat pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar rumah tangga yaitu beras, selain jagung dan terigu. Sebagian besar masyarakat mengonsumsi beras sebagai pangan pokok tunggal atau utama dan umumnya beras ini diolah sendiri oleh ibu rumah tangga. Namun, setelah 14 tahun kemudian, terjadi perubahan yang mendasar dalam pola pengeluaran, yaitu dari dominan kelompok padi-padian ke kelompok makanan jadi. Makanan yang termasuk kelompok makanan jadi adalah roti tawar, roti manis, kue basah, makanan gorengan, bubur kacang hijau, gado-gado/ketoprak/pecel, nasi campur/rames, nasi goreng, nasi putih, lontong/ketupat sayur, soto/gule, makanan ringan anak2/kripik, ikan (goreng/presto /bakar) dan makanan jadi lainnya. Dari sejumlah jenis makanan jadi, pengeluaran terbesar adalah untuk pembelian nasi campur/rames, kemudian diikuti dengan mi (goreng/rebus), makanan ringan untuk anak-anak/keripik dan makanan gorengan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pola memasak rumah tangga juga berubah; kalau dulu dimasak sendiri oleh ibu rumah tangga (*home made*), namun akhir-akhir ini berubah ke arah pangan yang lebih praktis yaitu dengan cara membeli.

Tabel 1. Pangsa Pengeluaran Beberapa Kelompok Pangan Menurut Wilayah di Indonesia, 1999–2013 (%)

Wilayah /Tahun	Padi-Padian	Umbi-Umbian	Daging/Telur/Susu	Ikan	Sayuran	Buah	Makanan Jadi
Kota							
1999	11,8	0,5	6,2	4,8	5,3	2,1	11,4
2002	8,6	0,5	6,9	4,5	1,8	2,9	11,2
2005	6,5	0,4	6,0	4,1	3,5	2,6	11,8
2008	6,7	0,3	5,3	3,3	3,2	2,2	12,7
2009	6,1	0,3	5,5	3,6	1,4	2,0	14,0
2010	6,2	0,3	5,6	3,7	1,3	2,4	14,2
2011	5,3	0,3	5,0	3,5	3,4	2,0	14,9
2012	6,8	0,2	5,3	3,6	3,1	2,4	14,0
2013	5,9	0,3	5,2	3,4	3,6	2,2	14,4
Desa							
1999	22,1	1,1	4,3	6,4	7,3	2,1	7,7
2002	18,0	0,9	5,0	6,1	2,4	2,8	7,6
2005	14,4	1,1	5,1	6,0	5,4	3,0	8,3
2008	14,3	0,8	4,4	5,0	5,4	2,4	9,5
2009	13,3	0,8	4,6	5,4	1,8	2,1	10,5
2010	13,1	0,8	4,9	5,4	1,8	2,7	10,5
2011	11,1	0,9	4,4	5,6	5,9	2,4	11,8
2012	13,2	0,8	4,5	5,3	5,0	2,6	10,6
2013	12,4	0,8	4,5	5,2	5,9	2,5	10,7

Sumber: BPS (2005a, 2009a, 2011a, 2012a, 2013a)

Perubahan pola memasak ini diduga berkaitan erat dengan adanya fakta bahwa jumlah perempuan yang bekerja dari tahun ke tahun terus meningkat. BPS (2007) menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan selama Februari 2006–Februari 2007 mencapai 2,12 juta orang, yang dominan bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Pada waktu yang sama, peningkatan partisipasi untuk laki-laki hanya 287 ribu. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mendorong ibu rumah tangga untuk ikut bekerja membantu suami. Dampaknya, adalah berkurangnya waktu yang tersedia untuk menyiapkan kebutuhan keluarga. Banyaknya wanita yang bekerja mengakibatkan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga sehari-hari diperoleh melalui pembelian dari restoran atau warung makan. Wanita sebagai ibu rumah tangga dan juga berprofesi sebagai pekerja di luar rumah akan mencari pramuwisma untuk membantu menyiapkan makanan bagi keluarganya. Namun, dengan sulitnya mencari pramuwisma menyebabkan makanan siap saji menjadi menu utama sehari-hari di rumah. Banyak masyarakat mengonsumsi makanan siap saji terutama pada saat mereka bekerja di luar rumah.

Peluang ini telah ditangkap dengan baik oleh sektor industri atau pelaku bisnis pangan yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya restoran atau warteg yang menjual aneka makanan cepat saji dalam berbagai bentuk, ukuran, dan tingkatan harga. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2012), jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang pangan di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, jumlah UKM bidang pangan berjumlah sekitar 12 juta unit. Belum lagi, dengan maraknya waralaba atau *franchise* yang menjual makanan cepat saji dari luar negeri yang dapat dijumpai di berbagai daerah termasuk di perdesaan. Sampai saat ini, jumlah gerai salah satu waralaba internasional yang menjual ayam goreng sudah melebihi dari ketentuan batasan maksimum yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (maksimum 450 gerai). Adanya faktor pendorong dari rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dan faktor penarik dengan mudahnya mendapatkan aneka makanan jadi dengan segala rasa, ukuran, dan harga, telah merubah gaya makan seseorang atau rumah tangga.

Pingali (2004) dalam makalahnya yang berjudul "*Westernization of Asian Diets and the Transformation of Food Systems: Implications for Research and Policy*" menyatakan bahwa terjadi perubahan pola makan di Asia termasuk Indonesia sebagai interaksi faktor *supply* dan *demand*. Perubahan permintaan pangan disebabkan oleh peningkatan pendapatan sehingga menyebabkan perubahan jumlah dan jenis pangan, urbanisasi yang berdampak pada kebutuhan pola makan yang baru dan umumnya dari perubahan gaya hidup. Dari aspek ketersediaan, faktor utama yang berpengaruh pada aspek ketersediaan adalah pemusatan integrasi globalisasi ekonomi yang merupakan keterkaitan antara produksi secara lokal dan ketersediaan pangan, liberalisasi investasi asing melalui peranan korporasi multinasional, serta pengurangan biaya transportasi dan pelabuhan. Perubahan yang terjadi ditunjukkan oleh (1) peningkatan ketersediaan pangan yang berkualitas; (2) peningkatan pangsa dari daging, susu, dan pangan hewani lainnya dalam pola konsumsi pangan sehari-hari, sebaliknya konsumsi beras per kapita menurun; dan (3) transisi pola makan di perkotaan yang ditunjukkan dengan peningkatan konsumsi pangan "kota" yang merupakan resultansi konsumsi dari berbagai jenis "*western-style foods*". Pada masyarakat berpendapatan rendah transisi pola makan terjadi ke arah makanan jadi sebagai akibat peningkatan pendapatan dan aktivitas.

Hasil beberapa kajian yang dituangkan dalam makalah tersebut juga mengungkapkan bahwa di daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi banyak wanita yang bekerja di luar rumah. Hal ini secara nyata menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi wanita dalam bekerja pada sektor jasa, yang berdampak pada peningkatan permintaan *non-traditional "fast food"* di banyak negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan ketersediaan pangan, dan peningkatan partisipasi wanita yang bekerja berdampak pada perubahan gaya makan yang ditunjukkan oleh perubahan pangsa pengeluaran pangan menurut kelompoknya.

Pada kasus di Indonesia, data Susenas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pangsa pengeluaran pangan. Selain terjadinya pergeseran dominasi

kelompok padi-padian ke makanan jadi, juga terjadi penurunan pangsa pengeluaran untuk umbi-umbian, serta penurunan pangsa kelompok pangan hewani dan sayuran/buah. Dari kecenderungan ini dapat diartikan bahwa telah terjadi pergeseran pola permintaan pangan rumah tangga, namun kemungkinan peningkatan pangsa pengeluaran untuk kelompok makanan jadi utamanya bukan disebabkan oleh peningkatan volume dan jenis pangan yang dikonsumsi, melainkan lebih banyak ditentukan oleh faktor peningkatan harga. Makanan jadi tentu saja harganya lebih mahal dibandingkan dengan makanan yang sama dimasak di rumah karena ada faktor jasa dari pembeli bahan baku dan bahan bantu, pengolah, dan penjual makanan.

Peningkatan pangsa pengeluaran makanan jadi perlu menjadi perhatian semua pihak terutama terkait dengan aspek kesehatan karena makanan olahan cenderung menimbulkan penyakit degeneratif seperti diabetes, darah tinggi, stroke, dan jantung koroner. Mercola (2014) menyebutkan bahwa makanan jadi merupakan hasil dari proses kimia yang dimasak dengan menggunakan banyak bumbu-bumbu yang mengandung bahan tambahan pangan termasuk bahan pengawet. Makanan jadi umumnya tinggi gula atau fruktosa (dalam bentuk sirup), banyak bumbu artifisial (warna, tekstur, dll.), zat pengawet, tinggi lemak dengan penggunaan minyak goreng/keju/mentega, rendah zat gizi dan serat. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap industri pangan terutama pangan yang dihasilkan oleh rumah tangga dan industri kecil agar pangan yang diproduksi adalah pangan yang menyetatkan masyarakat.

Selain pangan, rumah tangga juga mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan bukan pangan, seperti perumahan, pakaian, transportasi dan kebutuhan lainnya seperti tercantum pada Tabel 2. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, perubahan gaya hidup dan gaya makan, juga berdampak pada perubahan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pangan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dicerminkan dengan peningkatan pangsa pengeluaran bukan pangan namun perubahan untuk setiap kelompok bukan pangan belum tentu sama. Pangsa pengeluaran untuk kelompok perumahan dan fasilitas serta aneka barang dan jasa paling besar dibandingkan dengan kelompok lainnya baik di kota maupun di desa. Pangsa dari kelompok tersebut di kota lebih dari 20%, sedangkan di desa sekitar 16%. Pengeluaran bukan pangan dari kelompok yang lain relatif tetap, hanya pengeluaran pakaian yang cenderung menurun.

Tingginya pengeluaran kelompok perumahan dan fasilitas serta aneka barang dan jasa ini adalah logis karena kedua kelompok tersebut termasuk kebutuhan primer rumah tangga, sehingga semua orang berusaha untuk memenuhinya. Sebagai gambaran, jenis pengeluaran perumahan dan fasilitas antara lain adalah sewa/kontrak rumah, listrik, air (PAM), minyak tanah, rekening telepon, pulsa HP, benda pos, warnet, internet, dan lainnya. Untuk barang dan jasa seperti sabun mandi, sabun cuci, surat kabar, kesehatan, pendidikan (biaya sekolah/kursus), bahan bakar kendaraan, transpor/angkot, dan lainnya. Pengeluaran paling besar untuk kelompok perumahan dan fasilitas adalah perkiraan sewa rumah sendiri (Rp96.419 di kota; Rp33.932 di desa).

Tabel 2. Pangsa Pengeluaran Beberapa Kelompok Nonpangan Menurut Wilayah di Indonesia, 1999–2013 (%)

Wilayah/ Tahun	Perumahan & Fasilitas	Barang & Jasa	Pakaian	Barang Tahan Lama	Pajak & Asuransi	Pesta & Upacara
Kota						
1999	20,2	13,8	5,0	2,3	1,2	1,4
2002	21,0	14,7	5,0	3,9	1,0	1,5
2005	21,5	18,7	4,6	4,4	1,2	1,5
2008	23,2	19,4	3,3	6,2	1,6	1,5
2009	22,3	20,1	3,2	5,8	1,8	1,2
2010	23,0	18,8	3,3	5,1	2,0	1,3
2011	22,2	20,0	2,0	7,8	2,0	1,5
2012	23,7	19,3	1,6	5,2	1,7	1,9
2013	22,3	20,1	2,2	5,9	2,0	1,6
Desa						
1999	11,4	7,4	5,5	3,5	0,5	1,5
2002	13,2	8,3	5,5	4,4	0,5	1,6
2005	15,3	10,2	5,0	4,9	0,7	1,3
2008	15,3	13,5	3,6	6,7	0,8	1,5
2009	16,1	13,3	3,5	6,0	0,9	1,6
2010	16,2	13,6	3,6	5,2	0,9	1,4
2011	16,0	14,4	2,1	7,0	1,0	1,5
2012	16,5	15,3	1,9	5,0	1,1	1,2
2013	16,5	15,7	1,8	4,4	1,1	1,3

Sumber: BPS (2005a, 2009a, 2011a, 2012a, 2013a)

Hal yang menarik adalah pengeluaran untuk pembelian pulsa HP atau nomor perdana di wilayah kota menduduki tempat kedua, sedangkan di desa di peringkat ketiga. Peningkatan porsi pengeluaran untuk pembelian pulsa HP ini paling signifikan dibandingkan jenis pengeluaran lainnya. Pengeluaran yang besar untuk pembelian pulsa HP dan nomor perdana merupakan perubahan budaya pada masyarakat yang menunjukkan peningkatan kebutuhan akan komunikasi di samping dalam rangka mengikuti tren. Menurut Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) jumlah pelanggan seluler Indonesia per tahun 2011 telah mencapai lebih dari 240 juta pelanggan, naik 60 juta pelanggan dibanding tahun 2010. Angka ini mendekati jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 258 juta penduduk pada Desember 2010. Budaya memiliki lebih dari satu buah HP juga semakin meningkat. Bank Dunia telah membuat laporan bahwa jumlah ponsel di dunia akan segera melebihi jumlah penduduk. Pada saat ini, jumlah sambungan ponsel di seluruh dunia lebih dari 6 miliar, sedangkan jumlah total manusia adalah 7 miliar (Saptoadi, 2012).

Sementara itu, di antara jenis pengeluaran dalam kelompok aneka barang dan jasa adalah biaya untuk sekolah (SPP, BP3, POMG) untuk di kota, sedangkan di desa adalah pengeluaran untuk pembelian bensin. Data yang menunjukkan tingginya biaya untuk sekolah ini kontradiktif dengan tujuan program sekolah gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah sudah lama melaksanakan program wajib belajar 12 tahun sebagai implementasi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Itu artinya anak-anak usia SD di semua wilayah Indonesia harus sekolah hingga jenjang SMP tanpa dibebani dengan beragam pungutan dari pihak sekolah. Bentuk program pendidikan yang penting adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS yang dimulai sejak tahun 2005 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan perluasan akses dan partisipasi sekolah bagi masyarakat. Tujuan program ini adalah: (a) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); (b) menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, dan (c) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Pengeluaran bensin yang besar di perdesaan terkait dengan semakin banyaknya sepeda motor sebagai alat transportasi yang mudah, cepat, dan biaya murah. Pembelian sepeda motor meningkat tajam, selain karena kebutuhan juga kemudahan untuk memperolehnya (tunai dan kredit). Sementara, kenaikan jumlah mobil mencapai 3 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, peningkatan jumlah motor mencapai hampir lima kali lipat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 1999. Hal ini juga didukung paling tingginya peningkatan porsi pengeluaran untuk STNK bermotor pada kelompok pajak dan asuransi.

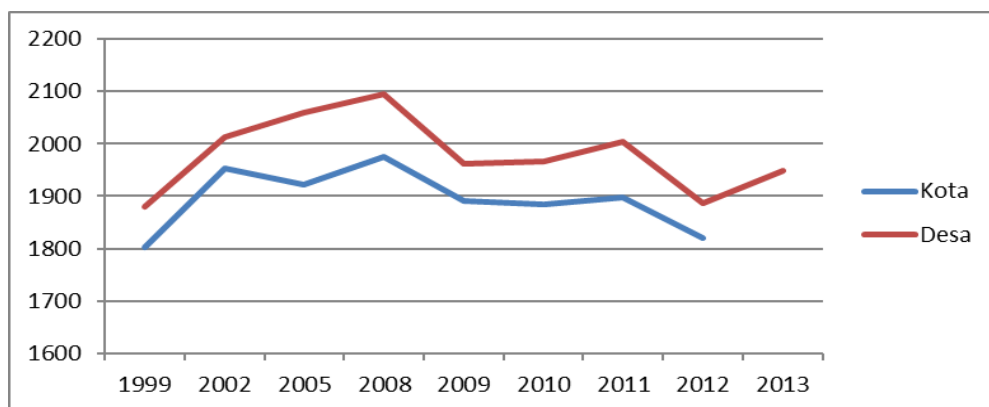
PERUBAHAN POLA KONSUMSI PANGAN

Konsumsi pangan adalah informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang (keluarga atau rumah tangga) pada waktu tertentu. Secara umum jenis zat gizi yang sering dianalisis adalah konsumsi energi dan protein. Kedua zat gizi makro ini tidak hanya digunakan sebagai ukuran ketahanan pangan akan tetapi juga ukuran kesejahteraan masyarakat. Dengan pertimbangan hal tersebut, analisis zat gizi yang dilakukan oleh BPS hanya untuk kedua zat gizi tersebut.

Kebutuhan energi umumnya diperoleh dari konsumsi makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, sedangkan kebutuhan protein diperoleh dari konsumsi makanan yang berasal dari hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu (protein hewani) serta berasal dari beragam pangan nabati (protein nabati). Di Indonesia setiap empat tahun diadakan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) yang salah satu rekomendasinya adalah menetapkan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan

Angka Kecukupan Protein (AKP) untuk rata-rata Indonesia dan kelompok umur. Rekomendasi WNPG VIII yang dilaksanakan tahun 2004 adalah AKE dan AKP untuk rata-rata penduduk Indonesia, masing-masing 2.000 kkal/kapita/hari dan 52 gram/kapita/hari. Sementara itu, pada bulan November 2012, dilaksanakan WNPG X yang menetapkan AKE sebesar 2.200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Akan tetapi, sampai saat ini analisis yang dilakukan oleh para pakar pangan dan gizi masih mengacu pada hasil WNPG VIII karena hasil WNPG X masih dalam taraf sosialisasi ke pengguna.

Selama kurun waktu 1999–2013 tingkat konsumsi energi baik di kota maupun di desa berfluktuasi, namun cenderung menurun (Gambar 3). Demikian pula situasi konsumsi protein juga berfluktuasi namun cenderung meningkat (Gambar 4). Bila mengacu pada patokan hasil WNPG tahun 2004, tingkat konsumsi rata-rata masyarakat untuk energi baru mencapai sekitar 95% dari angka kecukupannya (2.000 kkal/kapita/hari). Tingkat konsumsi energi yang lebih dari 95% ini masih dapat dianggap cukup dan memenuhi kebutuhan tubuh manusia sesuai dengan klasifikasi tingkat kecukupan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan (1996) (*dalam* Badan Ketahanan Pangan, 2006). Dalam klasifikasi tersebut, tingkat kecukupan energi antara 90–119% termasuk kategori normal. Kondisi berbeda untuk protein, konsumsi protein mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut dengan capaian konsumsi melebihi dari anjuran. Rata-rata konsumsi protein sudah di atas 52 gram/kapita/hari baik di kota maupun di desa, dan konsumsi protein di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Pangsa konsumsi protein hewani juga terus meningkat yang dapat diartikan kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin membaik (Tabel 3).

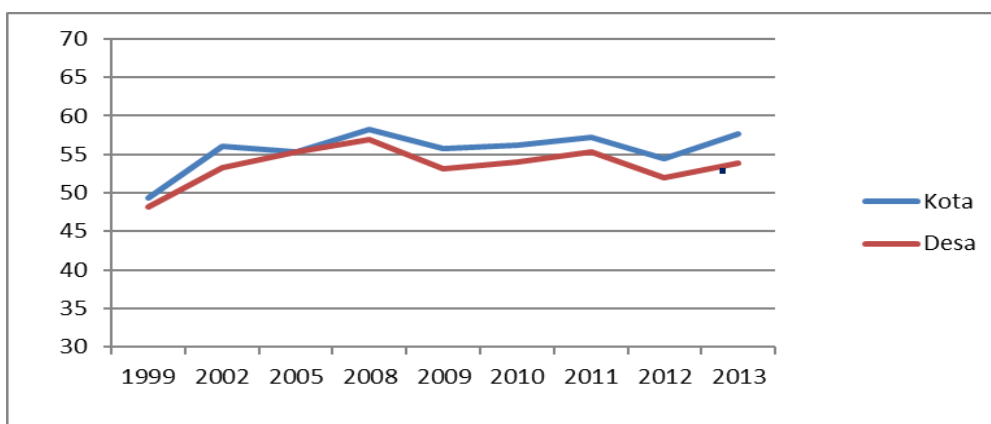


Sumber: BPS (2005b, 2009b, 2011b, 2012b, 2013b)

Gambar 3. Perkembangan Konsumsi Energi di Indonesia, 1999–2013

Banyak faktor yang memengaruhi konsumsi pangan. Menurut Hattas (2011), faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi di antaranya adalah: (1) *Tingkat pendapatan masyarakat*. Tingkat pendapatan dapat digunakan untuk dua tujuan yaitu konsumsi dan tabungan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan memengaruhi pola konsumsi. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang,

biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula; (2) *Selera konsumen*. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan memengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya; (3) *Harga barang*. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan, sebaliknya jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan; (4) *Tingkat pendidikan masyarakat*. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan memengaruhi terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya; (5) *Jumlah keluarga*. Besar kecilnya jumlah keluarga akan memengaruhi pola konsumsinya; dan (6) *Lingkungan*, keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan akan memengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat.



Sumber: BPS (2005b, 2009b, 2011b, 2012b, 2013b)

Gambar 4. Perkembangan Konsumsi Protein di Indonesia, 1999–2013

Pola konsumsi pangan yang umum adalah terpenuhinya konsumsi energi dahulu, baru pemenuhan zat gizi yang lain seperti protein dan vitamin/mineral. Hal ini dikarenakan pola pangan pokok masyarakat yang dikonsumsi dalam jumlah relatif banyak adalah pangan sumber energi seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu. Situasi ini juga selaras dengan hukum Bennet, yaitu peningkatan pendapatan akan mengakibatkan individu cenderung meningkatkan kualitas konsumsi pangannya dengan harga yang lebih mahal per unit gizinya. Pada tingkat pendapatan rendah, permintaan terhadap pangan diutamakan pada pangan yang padat energi yang berasal dari karbohidrat. Apabila pendapatan meningkat, pola konsumsi pangan akan makin beragam dan umumnya akan terjadi peningkatan konsumsi pangan yang lebih bernilai gizi tinggi (Soekirman, 2000).

Namun, data Susenas tidak menunjukkan pola konsumsi yang umum tersebut, di mana justru kebutuhan protein dapat dipenuhi, sedangkan kebutuhan energi masih belum sesuai anjuran. Dengan melakukan analisis harga energi dan protein, yaitu dengan membagi pengeluaran pangan (setelah dikurangi pengeluaran

untuk tembakau dan rokok) dengan tingkat konsumsi energi/protein dapat diketahui berapa harga per satuan kalori untuk energi dan per gram untuk protein.

Pada Tabel 3 terlihat harga energi dan protein terus meningkat yang diduga sejalan dengan kenaikan harga pangannya. Harga energi dan protein di perkotaan hampir satu setengah kali lebih besar dibandingkan di perdesaan. Bila hal tersebut dikaitkan dengan harga energi/protein, juga tidak menunjukkan kebenaran karena harga energi per kkal jauh lebih murah dibandingkan dengan protein. Sebagai gambaran, harga energi pada tahun 2013 di perkotaan hanya Rp192,3/kkal dan di perdesaan sebesar Rp132,2/kkal. Sementara itu, harga per gram protein di perkotaan pada tahun 2013 mencapai Rp6.371,1; sedangkan di perdesaan sebesar Rp4.791,6, dalam arti harga protein mencapai hampir 25–33 kali lebih mahal dari harga energi. Dengan demikian penyebab “anomali” data konsumsi energi dan protein tersebut bukan karena harga pangan, namun diduga terkait dengan kurang validnya data energi dari makanan jadi. BPS melakukan pencacahan data untuk makanan jadi dalam bentuk porsi dan harganya, yang selanjutnya dari masing-masing jenis makanan jadi dikonversi ke energi dan protein. Sebagian besar dalam kelompok makanan jadi adalah pangan sumber karbohidrat seperti nasi rames, soto, mi goreng, gorengan, dan lainnya. Karena ukuran porsi sangat beragam antarwilayah, sementara dalam Daftar Komposisi Bahan Makanan yang memuat konversi energi/protein hanya memasukkan satu satuan (porsi) maka faktor konversi dari makanan jadi ke energi yang diduga kurang valid.

Konsumsi pangan masyarakat selain dalam bentuk energi dan protein juga dapat dilihat dari kualitas konsumsi pangannya dengan menggunakan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (*dietary score*) atau skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100), yang berarti semakin tinggi skor semakin terdiversifikasi pangan yang disediakan atau dikonsumsi. Oleh karena itu, indikator PPH sering digunakan sebagai ukuran tingkat diversifikasi produksi/konsumsi pangan.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan melalui berbagai kebijakan dan program. Pada tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Sasaran dalam Perpres tersebut adalah tercapainya skor PPH rata-rata nasional sebesar 95 pada tahun 2015. Sementara itu, sasaran skor PPH di setiap wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) mengacu pada sasaran nasional dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan potensi sumber daya pangan lokal. Kemudian target tersebut dijabarkan dalam bentuk tahunan seperti pada Tabel 4.

Tabel 3. Perkembangan Pangsa Protein Hewani dan Harga Energi/Protein Menurut Wilayah di Indonesia, 1999–2013

Wilayah/ Tahun	Pangsa Protein Hewani (%)	Harga Energi (Rp/Kalori)	Harga Protein (Rp/Gram)
Kota			
1999	20,4	42,5	1.554,5
2002	27,1	69,9	2.439,1
2005	28,9	77,6	2.697,4
2008	30,2	101,9	3.452,6
2009	30,2	119,8	4.067,4
2010	31,9	140,2	4.700,6
2011	32,0	158,5	5.259,4
2012	33,0	180,3	6.121,9
2013	33,5	192,3	6.371,1
Desa			
1999	16,6	16,5	642,8
2002	19,2	49,8	1.761,2
2005	22,1	53,5	1.945,0
2008	23,2	71,1	2.616,4
2009	23,0	84,5	3.121,3
2010	24,5	99,3	3.615,5
2011	25,5	112,4	4.074,1
2012	24,8	125,3	4.551,6
2013	26,6	132,3	4.791,6

Sumber: BPS (2005b, 2009b, 2011b, 2012b, 2013b), diolah

Tabel 4. Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia, 1999–2013: Harapan dan Kenyataan

Tahun	Harapan (Target)	Kota	Desa
1999	ta	68,5	64,4
2002	72,6	80,5	72,3
2005	77,7	80,8	77,6
2008	82,9	83,0	80,5
2009	85,0	78,2	73,3
2010	86,4	88,0	83,5
2011	88,1	87,3	83,7
2012	89,9	86,3	80,5
2013	91,5	84,0	78,4

Sumber: BKP (2008, 2013, 2014)

Keterangan: ta = Tidak diperoleh data

Strategi untuk mencapai hal tersebut seperti yang dicantumkan dalam Perpres adalah dengan melakukan (1) internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan (2) pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui dua cara, yaitu (a) advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat dan (b) pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Sementara itu, pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan dengan (a) memfasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal dan (b) advokasi, sosialisasi, dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah (Kementerian Pertanian) menetapkan Gerakan Percepatan Diversifikasi Pangan yang salah satu aksinya adalah gerakan *one day no rice*. Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) juga melaksanakan kebijakan pangan secara masif dan kontinyu seperti menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pengembangan model pangan pokok lokal (MP3L) dan lainnya.

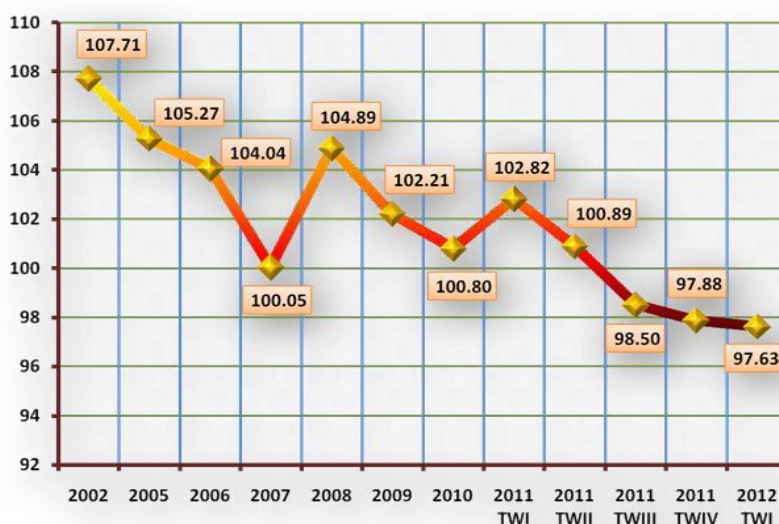
Upaya pemerintah untuk mempercepat diversifikasi konsumsi pangan masyarakat telah menunjukkan keberhasilannya. Selama tahun 1999–2010 skor PPH menunjukkan kenaikan secara bertahap, namun tampaknya mulai tahun 2011 skor PPH mulai penurunan. Pada Tabel 4 juga terlihat capaian skor PPH yang menjadi target pemerintah hanya terjadi sampai tahun 2008, dan tahun-tahun berikutnya capaian skor PPH menjauh dari skor yang diharapkan. Pola pangan masyarakat masih belum seimbang, tidak sesuai dari yang diharapkan. Hal ini terjadi tidak hanya pada masyarakat perkotaan namun juga pada masyarakat perdesaan (Tabel 5). Di kedua wilayah ini karakteristik pola pangan relatif sama, yaitu pangan dari kelompok padi-padian dan minyak-lemak melebihi dari yang dianjurkan, sebaliknya untuk kelompok pangan yang lain masih jauh dari yang dianjurkan (Tabel 5). Secara spesifik, pola konsumsi pangan masyarakat kota lebih baik dibandingkan dengan perdesaan, yang ditunjukkan dengan lebih tingginya skor PPH. Konsumsi pangan hewani, sayur-buah dan kacang-kacangan di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Khusus untuk beras yang merupakan bagian dari kelompok padi-padian, konsumsinya sudah cenderung menurun seperti pada Gambar 5.

Merubah konsumsi pangan memang tidaklah mudah karena merubah konsumsi pangan berarti merubah pola kebiasaan makan yang sudah turun temurun. Dengan demikian, untuk keberhasilan merubah konsumsi pangan ke arah PPH memang dibutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan masyarakat. Lambatnya keberhasilan diversifikasi pangan juga diakibatkan ketidakkonsistenan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

Tabel 5. Pola Pangan Masyarakat Kota dan Desa, 2013 (gram/kapita/hari)

Kelompok Pangan	Anjuran	Kenyataan		Kesenjangan	
		Kota	Desa	Kota	Desa
Padi-padian	275	285,7	306,3	+10,7	+31,3
Umbi-umbian	100	24,0	40,5	(76,0)	(59,5)
Pangan hewani	150	109,5	87,5	(40,5)	(62,5)
Kacang-kacangan	35	26,1	20,5	(8,9)	(15,0)
Sayur+buah	250	239,8	237,9	(10,2)	(12,1)
Gula	30	23,2	27,8	(6,8)	(2,2)
Minyak+lemak	20	26,5	25,4	+6,5	+5,4

Sumber: BKP (2013)



Sumber: BKP (2013)

Gambar 5. Perkembangan Konsumsi Beras, 2002–2012 (kg/kap/tahun)

Hendayana dan Ariani (2013) mengidentifikasi adanya tiga paradoks kebijakan yang tidak mendukung upaya diversifikasi pangan yaitu (1) kebijakan produksi beras versus kebijakan produksi umbi-umbian; (2) kebijakan diversifikasi konsumsi pangan versus kebijakan raskin; dan (3) kebijakan pengembangan pangan lokal versus kebijakan impor tepung terigu. Hasil analisis yang dilakukan oleh Ariani (2013) memperlihatkan beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan lambatnya pencapaian diversifikasi konsumsi pangan, yaitu (1) kesenjangan mutu gizi pangan antara masyarakat desa dan kota; (2) penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (3) lambatnya perkembangan, penyebaran, penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; (4) masih kurangnya sinergi untuk mendorong dan memberikan insentif bagi dunia

usaha dan masyarakat dalam mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan (5) masih kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan pengetahuan untuk meningkatkan aksesibilitas pada pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Seperti telah disampaikan bahwa banyak faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan seseorang atau masyarakat. Secara umum, selain faktor daya beli, pengetahuan pangan dan gizi, budaya juga faktor ketersediaan pangan yang ada di sekitar wilayahnya. Cerminan dari faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari tingkat konsumsinya seperti pada Tabel 6 dan 7 yang menggambarkan perkembangan konsumsi per kapita untuk beberapa jenis bahan pangan utama sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk daerah perkotaan dan perdesaan selama periode tahun 2002–2013.

Tabel 6. Perkembangan Konsumsi Beberapa Pangan di Perkotaan Indonesia, 2002–2013

Jenis Pangan	2002	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beras	111,4	97,0	98,3	96,2	94,5	97,2	92,6	92,5
Jagung	0,8	0,5	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7
Terigu	10,6	9,9	12,6	11,7	11,6	12,0	10,8	11,2
Ubi kayu	6,8	9,7	9,1	7,1	6,8	7,3	5,9	5,4
Ubi jalar	2,3	1,8	1,6	1,5	1,2	1,5	0,9	1,1
D. ruminansia	2,5	2,6	2,5	2,3	2,5	2,8	4,6	2,6
D. unggas	5,5	5,5	5,6	5,4	6,0	6,1	5,9	6,7
Telur	7,1	7,6	7,6	7,4	8,2	7,9	8,0	8,3
Susu	2,2	2,3	3,1	2,9	2,9	2,9	2,2	3,2
Ikan	17,6	18,4	18,0	16,8	17,9	18,5	17,2	19,2
Minyak sawit	5,0	5,3	6,9	7,0	6,9	7,0	8,3	8,3
Kedelai	8,2	8,6	8,8	8,3	7,9	8,6	8,0	8,8
Gula pasir	9,5	9,1	8,0	7,6	7,3	6,8	5,6	7,9
Sayur	49,4	50,1	53,0	47,5	46,8	46,9	45,6	55,0
Buah	30,0	32,5	32,9	24,9	29,2	24,4	26,1	32,6

Sumber: BKP (2008, 2013, dan 2014)

Dalam perkembangannya, tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat terutama berbasis umbi-umbian relatif kecil dan cenderung menurun. Kondisi ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, akan tetapi juga di perdesaan. Di samping itu, Gambar 5 juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan konsumsi beras per kapita secara nasional. Sementara itu, tingkat konsumsi terigu termasuk produk olahannya (mi, aneka roti/kue) mencapai sekitar 10 kg/kapita/tahun dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Padahal, hampir 100% gandum sebagai bahan baku terigu merupakan produk impor, yang tentu saja akan menguras devisa negara. Dengan demikian terjadi perubahan pola pangan pokok dari berbasis pangan lokal ke pangan impor.

Tabel 7. Perkembangan Konsumsi Beberapa Pangan di Perdesaan Indonesia, 2002–2013

Jenis Pangan	2002	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beras	118,8	112,4	111,0	107,8	106,7	108,4	102,6	100,2
Jagung	5,5	5,4	4,8	3,6	3,3	2,5	3,2	2,6
Terigu	6,7	7,1	10,0	9,0	9,2	9,9	9,0	9,0
Ubi kayu	17,3	19,8	16,5	11,9	11,4	12,8	8,7	8,1
Ubi jalar	3,3	5,8	3,8	3,2	3,5	4,5	3,9	4,0
D. ruminansia	0,9	1,1	1,0	0,9	1,0	1,2	1,0	1,0
D. unggas	2,2	2,9	2,9	2,5	3,1	3,5	2,9	3,4
Telur	4,3	4,9	5,2	5,4	6,3	6,3	6,0	6,2
Susu	0,6	0,7	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,4
Ikan	16,5	18,8	18,8	17,4	18,4	19,4	18,0	19,8
Minyak sawit	3,8	4,3	5,9	6,1	6,0	6,2	6,7	7,9
Kedelai	6,2	7,1	6,6	6,1	6,2	6,5	6,2	6,8
Gula pasir	9,0	8,7	8,8	8,2	8,0	7,9	7,4	9,3
Sayur	46,3	51,9	59,5	51,8	51,6	50,6	49,3	58,9
Buah	25,1	30,9	30,9	21,3	26,6	22,0	24,4	28,0

Sumber: BKP (2008, 2013, 2014)

APTINDO (2013) menyampaikan bahwa konsumsi terigu nasional meningkat setiap tahunnya, yaitu 7,06% pada tahun 2012 dan 7,12% pada tahun 2011. Terdapat 200 industri besar/modern yang menggunakan bahan baku terigu yang menyerap 34% konsumsi terigu nasional untuk menghasilkan mi instan, mi kering, *snack & biscuit*, dan *cake & bakery*. Sementara itu, terdapat 30.000 UKM yang menyerap 66% terigu nasional menghasilkan mi kering, mi basah, kue kering, *snack & biscuit*, jajanan pasar, martabak, cakwe, kerupuk, gorengan, dan lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian dan pangan lokal lainnya tampaknya tidak hanya disajikan dalam bentuk utuh/langsung akan tetapi juga harus melalui proses pengolahan yang berbasis industri, misalnya melalui pembuatan tepung umbi-umbian dan pangan lokal lainnya yang mempunyai nilai gizi dan nilai guna tidak kalah dengan tepung terigu. Melalui tepung akan dapat berinovasi untuk menghasilkan berbagai produk olahan pangan dengan bahan baku umbi-umbian dan pangan lokal lainnya.

Untuk jenis pangan hewani, tingkat konsumsi yang paling besar adalah untuk komoditas ikan yang dihasilkan dari dalam negeri melalui penangkapan dan budi daya. Pemerintah terus menggalakkan budi daya ikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Di sisi lain, upaya peningkatan konsumsi ikan juga dilakukan melalui gerakan yang disebut Gemarikan (Gerakan Mengonsumsi Ikan) yang dilaksanakan di berbagai daerah terutama pada wilayah yang tingkat konsumsi ikannya masih rendah. Telur merupakan pangan produk ternak yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena ketersediaannya yang mencukupi dan harganya relatif murah dibandingkan produk pangan asal ternak lainnya. Sayuran dan buah-

buah merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun demikian, tingkat konsumsi kedua jenis pangan ini masih rendah dibandingkan dengan rekomendasi dari FAO yaitu konsumsi sayuran ideal sebesar 91,25 kg/kapita/tahun dan buah sebesar 73 kg/kapita/tahun.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada perubahan struktur pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan bukan pangan, yang pada akhirnya akan merubah pola konsumsi pangannya. Data makro menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan di kedua wilayah ini secara ekonomi kebutuhan pangan sudah tidak terlalu membebani pengeluaran rumah tangga.

Telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pola pengeluaran untuk bahan pangan, yaitu dari dominan kelompok padi-padian ke kelompok makanan jadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus membayar per satuan unit kalori dan protein yang semakin tinggi.

Tingkat konsumsi energi baik di kota maupun di desa berfluktuasi, namun cenderung menurun. Demikian pula situasi konsumsi protein juga berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masyarakat umumnya masih menghadapi risiko terhadap terjadinya kerawanan pangan yang semakin meningkat.

Dinamika skor PPH menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan secara bertahap. Namun mulai tahun 2011, skor PPH mulai menurun. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat cenderung menurun, yang berarti bahwa kualitas konsumsi masyarakat semakin menjauh dari kondisi ideal.

Tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat terutama konsumsi beras dan umbi-umbian cenderung menurun. Sementara itu, tingkat konsumsi terigu relatif stabil dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin tergantung kepada sumber energi dari pangan eks impor.

Konsumsi energi yang cenderung turun dan keragaman konsumsi pangan yang semakin menjauhi kondisi ideal mengindikasikan bahwa upaya peningkatan gizi masyarakat belum cukup berhasil. Terkait dengan hal tersebut pemerintah perlu melakukan perluasan dan percepatan program diversifikasi pangan menjadi suatu gerakan nasional untuk meningkatkan keragaman konsumsi dan peningkatan kualitas gizi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal, serta mengurangi ketergantungan pada pangan eks impor. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan produksi, promosi, dan pengolahan pangan lokal. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya program bantuan pangan pokok berbasis sumber daya lokal untuk masyarakat miskin. Program ini dapat diintegrasikan dengan bantuan Raskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandratos, N. and J. Bruinsma. 2012. World Agriculture Towards 2030/2050. The 2012 Revision. ESA Working Paper No. 12-03. Agricultural Development Economics Division Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Anonim. 2013. Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012. Jakarta
- Ariani, M. 2013. Dinamika Konsumsi pangan Masyarakat. Bahan Presentasi di Kementerian Perdagangan. Jakarta. Tidak Dipublikasikan.
- [Aptindo] Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia. 2013. Overview Industri Tepung Terigu Nasional Indonesia. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005a. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 1. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005b. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 3. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Propinsi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Indonesia. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 1. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 3. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Propinsi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011a. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 1. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011b. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 3. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Propinsi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012a. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 1. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012b. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 3. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Propinsi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013a. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 1. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013b. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 3. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Propinsi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Produk Domestik Bruto. www.bps.go.id (12 Mei 2014)
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. Indikator Konsumsi Terpilih. www.bps.go.id (12 Mei 2014).
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2008. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2013. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2014. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Kementerian Pertanian. Jakarta.

- Djauhari, A. 2013. Analisis Struktur Pengeluaran Rumahtangga Mendukung Diversifikasi Konsumsi Pangan. *Dalam* M. Ariani, K. Suradisastra, N.S. Saad, R. Hendayana, H. Soeparno, dan E. Pasandaran (Eds.). *Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian*. IAARD Press. Jakarta. hlm. 204-215.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2003. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series 916. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO. Geneva. <http://www.fao.org/docrep/005/ac911e/ac911e05.htm> (10 Mei 2014).
- Hawkes, C., M. Chopra, and S. Friel. Tanpa Tahun. Globalization, Trade, and the Nutrition Transition. <http://www.globalhealthequity.ca/electroniclibrary/Globalization.Trade.andtheNNutritionTransition.pdf>.
- Hendayana, R. dan M. Ariani. 2013. Paradoks Keberhasilan Diversifikasi Pangan Kasus: Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Dalam* M. Ariani, K. Suradisastra, N.S. Saad, R. Hendayana, H. Soeparno, dan E. Pasandaran (Eds.). *Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian*. IAARD Press. Jakarta. hlm. 246-263.
- Kearney, J. 2010. Food Consumption Trends and Drivers. *Philosophical Transactions of The Royal Society*. Royal Society Publishing. <http://rsth.royalsocietypublishing.org> (12 Juni 2013).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2012. UKM Bidang Pangan. <http://www.depkop.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=466:kemenkop-7941-persen-ukm-pangan> (28 Oktober 2012).
- Mercola. 2014. 9 Ways That Eating Processed Food Made the World Sick and Fat. <http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/12/9-dangers-processed-foods.aspx> (30 Juni 2014).
- Pingali, P. 2004. Westernization of Asian Diets and the Transformation of Food Systems: Implications for Research and Policy. ESA Working Paper No. 04-17. September. Agricultural and Development Economics Division. The Food and Agriculture Organization of the United Nations. www.fao.org/es/esa.
- Pakpahan, A. 2012. Pembangunan Sebagai Pemerdekaan, Pemikiran untuk Membalik Arus Sejarah Pembangunan Nasional. Penerbit Gapperindo. Jakarta.
- Soekirman. 2000. Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sumaryanto. 2009. Diversifikasi Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan. Makalah disajikan dalam Seminar Memperingati Hari Pangan Sedunia, 1 Oktober 2009, Jakarta.
- Suryana, A. 2011. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Jakarta.
- Saptoadi, S. 2012. Dunia Akan Mempunyai Lebih Banyak Ponsel daripada Manusia. Tekno Media News. (On-line) <http://www.teknajurnal.com/2012/01/18/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-mendekati-jumlah-penduduk-indonesia> (28 Oktober 2012).
- Saparini, H. 2012. Kemiskinan Krisis Pangan dan strategi Pembangunan. *Dalam* F. Wahono *et al.* (Eds.). *Ekonomi Politik Pangan. Kembali ke Basis: dari Ketergantungan ke Kedaulatan*. Bina Desa. Indie Book Corner. Yogyakarta.

PERUBAHAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PERDESAAN PADA DESA SAWAH BERBASIS PADI

Sri Hastuti Suhartini

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga, salah satu indikator yang digunakan adalah struktur pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah relatif dibanding rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang rendah (BPS, 1996; Rachman, 2001).

Konsumsi atau permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh harga komoditas itu sendiri, harga komoditas lain yang bersifat substitusi atau komplementer, tingkat pendapatan, jumlah dan komposisi umur penduduk serta selera konsumen terhadap barang yang diminta. Setiap rumah tangga atau kelompok rumah tangga memiliki pola atau struktur konsumsi dan pengeluaran yang berbeda. Pola konsumsi dan pengeluaran umumnya berbeda antaragroekosistem, antarkelompok pendapatan, antaretnis atau suku dan antarwaktu (Arifin dan Simatupang, 1988; Suryana *et al.*, 1988; Rachman dan Wahida, 1998).

Masalah pangan lebih banyak dijumpai di perdesaan karena kehidupan di perdesaan mayoritas berada dalam garis kemiskinan. Masalah pangan yang lebih mudah diidentifikasi adalah dilihat dari konsumsi gizi utama yaitu karbohidrat dan protein. Masalah gizi tidak terlepas dari masalah makanan karena masalah gizi timbul sebagai akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi dalam makanan. Salah satu masalah gizi yang sering dijumpai khususnya di perdesaan adalah kurang energi protein (KEP). Oleh karena itu, tingkat konsumsi atau kecukupan energi dan protein sering digunakan juga sebagai tingkat kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan dikatakan semakin baik apabila konsumsi energi dan protein semakin meningkat sampai melewati kecukupan kalori dan protein per kapita per hari (BPS, 2009).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konsumsi rumah tangga petani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada perubahan struktur pengeluaran pangan dan nonpangan, perubahan tingkat partisipasi dan tingkat konsumsi pangan, perubahan tingkat konsumsi energi dan protein.

METODE ANALISIS

Data yang digunakan untuk menganalisis perubahan pola konsumsi rumah tangga adalah data Panel Petani Nasional (Patanas) tahun 2007 dan 2010 yang dikumpulkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Lokasi penelitian meliputi lima provinsi, yaitu tiga provinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) dan dua provinsi di luar Jawa (Sulawesi Selatan, Sumatera Utara), yang terdiri dari 14 desa contoh (Tabel 1). Pengumpulan data pengeluaran dan konsumsi melalui survei rumah tangga yang melibatkan 25 rumah tangga contoh untuk setiap desa sehingga total responden 350 rumah tangga.

Tabel 1. Sebaran Desa Contoh Patanas Berbasis Padi Sawah Menurut Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, 2007 dan 2010

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1.	Sumut	Batu Bara	Lima Puluh	Kwala Gunung
		Serdang Bedagai	Perbaungan	Lidah Tanah
2.	Jabar	Indramayu	Lelea	Tugu
		Subang	Cipunegara	Simpar
		Karawang	Kutawaluya	Sindangsari
3.	Jateng	Cilacap	Majenang	Padangsari
		Klaten	Karang Dowo	Demangan
		Sragen	Karang Malang	Mojorejo
		Pati	Jakenan	Tambah Mulyo
3.	Jatim	Jember	Jombang	Padomasan
		Banyuwangi	Genteng	Kaligundo
		Lamongan	Sekaran	Sungegeneng
4.	Sulsel	Sidrap	Watang Pulu	Carawali
		Luwu	Lamasi	Salujambu

Sumber: Irawan *et al.* (2007), Susilowati *et al.* (2010)

Data yang dianalisis adalah data pengeluaran pangan (pangan sumber karbohidrat, pangan hewani, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak+lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya dan makanan/minuman jadi) dengan referensi waktu seminggu yang lalu dan pengeluaran bukan pangan (bahan bakar, listrik dan air, komunikasi dan telekomunikasi, pendidikan anak, perawatan kesehatan, sandang dan pengeluaran lainnya) dengan referensi satu bulan yang lalu atau satu tahun yang lalu. Selanjutnya, dari data pengeluaran pangan tersebut dikonversi ke zat gizi energi dan protein dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk tabel-tabel berdasarkan daerah dan kelompok konsumsi (pangan dan nonpangan). Analisis

konsumsi pangan rumah tangga meliputi struktur pengeluaran pangan dan nonpangan, tingkat partisipasi dan konsumsi pangan, serta keragaman sumber gizi rumah tangga.

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA

Karakteristik rumah tangga untuk memberikan gambaran ketersediaan tenaga kerja rumah tangga. Dalam tulisan ini, karakteristik rumah tangga terdiri dari umur dan tingkat pendidikan kepala keluarga serta jumlah anggota rumah tangga (JART). Dinamika kepala keluarga dan anggota rumah tangga (ART) tahun 2007–2010 di desa penelitian menurut golongan umur ditampilkan pada Tabel 2.

Kepala keluarga rata-rata berusia 45,6 tahun pada tahun 2007 dan 48,5 tahun pada tahun 2010. Kelompok umur kepala keluarga tersebut tergolong dalam usia produktif. Pada tahun 2010 umur kepala keluarga tertua adalah di Provinsi Jawa Timur 52,7 tahun dan termuda di Sumatera Utara 45,2 tahun. Tingkat pendidikan kepala keluarga termasuk rendah, rata-rata 7,6 tahun pada tahun 2007 dan 7,3 tahun pada tahun 2010 atau setara dengan kelas satu SMP.

ART tahun 2007 dan 2010 di desa penelitian masih didominasi oleh ART berusia 15–65 tahun yaitu kelompok umur produktif kategori angkatan kerja yang siap masuk pasar tenaga kerja. Pada tahun 2007 ART usia 15–65 tahun mencapai 65% dengan kisaran 57–77% dan 69% dengan kisaran 62–77% pada tahun 2010.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga cenderung menurun, 4,7 orang pada tahun 2007 dan 4,4 orang pada tahun 2010. Penurunan jumlah anggota rumah tangga disebabkan antara lain karena anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang migrasi.

Tabel 2. Dinamika Karakteristik Rumah Tangga Patanas pada Lahan Sawah Berbasis Padi di Perdesaan Jawa dan Luar Jawa, 2007 dan 2010

Uraian	Jabar		Jateng		Jatim		Sumut		Sulsel		Rata-rata	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Kepala Keluarga												
- Umur (th)	46,4	46,6	49,3	52,1	48,7	52,7	42,6	45,2	43,4	47,7	45,6	48,5
- Pendidikan (th)	6,0	6,1	7,9	7,7	7,2	6,8	7,5	6,9	8,6	8,1	7,6	7,3
JART (%)												
- <15 tahun	26,1	20,7	21,7	19,0	26,5	20,7	39,4	37,9	40,8	34,7	33,0	28,8
- 15–65 tahun	71,7	77,4	76,6	77,0	70,6	72,7	58,6	61,7	57,4	63,3	64,8	68,5
- >65 tahun	2,1	1,9	2,2	4,0	2,9	6,7	2,0	0,9	1,9	2,0	2,2	2,7
Total JART (jiwa)	3,8	3,5	4,5	4,5	4,6	4,2	5,0	4,7	5,3	4,9	4,7	4,4

PERUBAHAN STRUKTUR PENGELUARAN PANGAN DAN NONPANGAN

Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga perdesaan adalah tingkat pendapatan total maupun pendapatan per kapita. Secara garis besar, kebutuhan rumah tangga dikelompokkan dalam dua kategori yaitu kebutuhan pangan dan kebutuhan nonpangan. Pada kondisi pendapatan terbatas, masyarakat lebih dahulu mementingkan kebutuhan konsumsi pangan. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan menurun. Dengan demikian, besaran pendapatan (yang diproksi dari pengeluaran total) yang dibelanjakan untuk pangan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan berarti semakin kurang sejahtera rumah tangga yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin kecil pangsa pengeluaran pangan maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera.

Pangsa pengeluaran pangan dan pengeluaran total per kapita per bulan di desa penelitian pada tahun 2007 dan 2010 disajikan pada Tabel 3. Pendapatan yang diproksi dari pengeluaran secara absolut rata-rata meningkat. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak mencerminkan kenaikan secara riil karena kenaikan pengeluaran tersebut juga dipengaruhi oleh inflasi antara lain kenaikan harga baik pangan maupun nonpangan. Namun demikian, jika pengeluaran sebagai proksi pendapatan digunakan sebagai indikator kesejahteraan maka tingkat kesejahteraan rumah tangga petani berbasis padi meningkat.

Pangsa pengeluaran pangan secara agregat dan pada semua lokasi penelitian menunjukkan peningkatan. Bila mengacu hukum Engel berarti kondisi tahun 2010 tidak lebih baik dibanding kondisi tahun 2007. Hukum Engel mengatakan bahwa proporsi pangan rumah tangga akan semakin kecil sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan. Hasil analisis Rachman dan Ariani (2014) mendapatkan bahwa pada rumah tangga desa Patanas di semua agroekosistem mengalami kecenderungan yang sama, yaitu pangsa pengeluaran pangan meningkat dari waktu ke waktu. Sementara, hasil analisis secara agregat dengan menggunakan data Susenas di provinsi penelitian tanpa membedakan agroekosistem menunjukkan pangsa pengeluaran pangan yang semakin kecil dari waktu ke waktu.

Peningkatan pangsa pengeluaran pangan bukan berarti kesejahteraannya menurun, dilihat dari tingkat pendapatannya justru sebaliknya kesejahteraan rumah tangga tersebut mengalami perbaikan. Pada kasus rumah tangga di daerah penelitian Patanas diduga masih mempunyai pendapatan yang rendah, di mana pada umumnya tingkat konsumsinya juga masih belum sesuai dengan anjuran. Kenaikan pendapatan justru digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, yang berarti pengeluaran untuk pangan akan masih terus bertambah. Hal inilah mengapa perubahan pangsa pengeluaran pangan selama tiga tahun masih menunjukkan kenaikan.

Bila dibandingkan dengan data nasional (BPS, 2008) pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di daerah penelitian lebih besar (data BPS 50,17%), namun bila dibandingkan dengan rata-rata pangsa pengeluaran pangan di perdesaan masih lebih kecil (data BPS 68,67%), berarti kesejahteraan rumah tangga rata-rata di

daerah penelitian relatif lebih baik dibandingkan rata-rata perdesaan nasional. Analisis data Susenas antarwaktu menunjukkan bahwa rata-rata pangsa pengeluaran pangan di kota relatif lebih rendah dibandingkan di perdesaan (Ariani dan Purwantini, 2007; Purwantini dan Ariani, 2008).

Tabel 3. Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Patanas pada Lahan Sawah Berbasis Padi di Perdesaan Jawa dan Luar Jawa, 2007 dan 2010

Provinsi/Kabupaten	Pengeluaran Pangan (%)		Pengeluaran Total (Rp/Kap/Bulan)	
	2007	2010	2007	2010
A. Jawa Barat				
1. Indramayu	44,24	54,26	376.790	497.950
2. Subang	44,63	54,37	406.833	495.171
3. Karawang	48,37	68,47	265.925	374.867
B. Jawa Tengah				
1. Cilacap	42,54	60,53	223.223	297.749
2. Klaten	40,24	58,01	342.296	343.658
3. Sragen	45,40	53,56	279.234	369.370
4. Pati	45,68	56,72	248.735	346.598
C. Jawa Timur				
1. Banyuwangi	35,77	51,42	280.934	397.489
2. Lamongan	45,39	52,43	290.487	394.110
3. Jember	44,57	55,25	281.503	359.171
Jawa	43,65	56,23	299.596	387.613
A. Sumatera Utara				
1. Asahan	52,82	60,33	254.563	390.821
2. Serdang Bedagai	49,48	53,82	458.589	444.520
B. Sulsel				
1. Luwu	44,00	61,75	227.677	325.502
2. Sidrap	46,30	55,18	343.312	517.245
Luar Jawa	48,32	57,29	321.035	419.522
Rataan	46,07	56,78	310.316	403.568

Mengacu pada pengelompokan pangan oleh BPS dalam publikasi data Susenas, maka pengeluaran pangan dibedakan menjadi sebelas kelompok pangan. Pengelompokan tersebut, yaitu sumber karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian), pangan hewani, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lain seperti mi instan, kerupuk, makanan dan minuman jadi, serta tembakau dan rokok.

Distribusi pangsa pengeluaran pangan menurut kelompok pangan tidak berbeda antara kondisi tahun 2007 dan 2010 (Tabel 4). Pengeluaran pangan dominan adalah untuk pangan sumber karbohidrat. Hal ini karena pangan sumber karbohidrat merupakan pangan pokok yang dikonsumsi dalam jumlah relatif banyak sehingga pengeluarannya juga besar.

Tabel 4. Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Kelompok Pangan pada Rumah Tangga di Perdesaan Patanas Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010 (%)

Kelompok Pangan	Jabar		Jateng		Jatim		Sumut		Sulsel	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Sumber karbohidrat	26,1	22,2	28,4	22,6	30,7	22,6	27,3	23,1	29,6	22,5
Pangan hewani	17,7	19,0	14,9	15,4	16,0	19,8	18,1	19,6	18,3	24,3
Sayur-sayuran	9,7	15,1	9,8	15,2	8,2	10,9	9,9	13,6	11,3	13,4
Kacang-kacangan	5,0	4,8	6,3	7,6	5,1	5,0	5,0	5,0	3,3	3,2
Buah-buahan	4,1	4,0	3,7	6,1	2,7	7,6	3,5	5,7	3,4	4,4
Minyak dan lemak	3,9	4,9	5,1	5,4	5,7	6,1	4,5	5,1	3,6	4,1
Bahan minuman	5,5	7,2	7,2	7,0	6,2	7,0	6,8	7,0	6,6	7,4
Bumbu-bumbuan	2,6	3,7	2,8	2,5	10,8	3,3	4,3	2,9	3,0	3,0
Konsumsi lain	4,4	3,8	3,7	4,9	3,5	4,8	3,5	4,2	3,5	4,6
Makanan & minuman jadi	6,8	4,7	5,2	3,9	2,6	5,5	5,3	4,5	5,8	4,6
Tembakau dan sirih	14,3	10,4	12,9	9,6	8,5	7,5	12,0	9,2	11,7	8,5

Pangsa pengeluaran terbesar kedua adalah untuk konsumsi pangan hewani, jenis pangan ini biasanya relatif mahal harganya dibandingkan dengan jenis pangan lainnya sehingga meskipun dikonsumsi dalam jumlah relatif kecil tetapi karena harganya mahal maka nilai pengeluarannya rata-rata lebih besar. Untuk kasus di Sulawesi Selatan, pada tahun 2010 pangsa pengeluaran pangan hewani lebih besar dibandingkan pangsa pengeluaran pangan sumber karbohidrat.

Pada semua lokasi penelitian, pangsa pengeluaran untuk kelompok pangan sumber karbohidrat menurun, sedangkan pangsa pengeluaran pangan untuk kelompok sayuran meningkat cukup tinggi. Sementara itu, pangsa pengeluaran untuk buah-buahan di sebagian besar lokasi juga mengalami peningkatan. Pangsa pengeluaran tembakau dan rokok relatif besar di semua lokasi penelitian, namun demikian kecenderungannya menurun.

Pengeluaran nonpangan terbesar adalah untuk bahan bakar termasuk bahan bakar untuk memasak, kendaraan, dan penerangan. Pangsa pengeluaran ini pada tahun 2010 lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007. Pangsa pengeluaran nonpangan lainnya yang relatif besar adalah untuk pendidikan dan kesehatan (Tabel 5).

Tabel 5. Pangsa Pengeluaran Nonpangan Menurut Kelompok Nonpangan pada Rumah Tangga di Perdesaan Patanas Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010

Kelompok	Jabar		Jateng		Jatim		Sumut		Sulsel	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Bahan bakar	29,42	29,96	25,40	30,57	25,74	30,06	26,38	27,56	25,34	23,43
Komunikasi	4,09	4,96	3,42	3,38	3,79	4,07	4,05	5,73	6,43	10,35
Pendidikan	26,55	26,64	27,24	22,85	25,67	11,54	26,23	24,04	28,32	31,90
Kesehatan	10,18	11,36	13,06	10,29	12,80	17,99	12,04	15,72	9,20	12,85
Sandang	7,16	9,57	6,87	6,38	7,03	8,24	7,92	8,99	9,02	7,02
Pengeluaran lain	22,60	17,51	24,01	26,53	24,97	28,10	23,38	17,96	21,69	14,45
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pengeluaran untuk pendidikan mencakup pembayaran SPP, buku pelajaran dan tulis, transpor, jajan, sewa/kontrak rumah, seragam, kursus termasuk kiriman anak sekolah dan keperluan lainnya terkait dengan kegiatan sekolah. Pangsa pengeluaran untuk pendidikan cukup besar, namun di sebagian wilayah pangasanya lebih kecil dibandingkan kondisi tahun 2007. Penurunan ini terkait dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dan sekolah gratis sampai tingkat SMP. Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pendidikan pada umumnya kualitas sumber daya manusia semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa petani padi telah menyadari bahwa pendidikan adalah unsur penting yang dimungkinkan sebagai sarana untuk merubah kehidupan seseorang.

PERUBAHAN TINGKAT PARTISIPASI DAN TINGKAT KONSUMSI PANGAN

Selain struktur pengeluaran, analisis konsumsi juga mencakup tingkat partisipasi konsumsi yang dinyatakan dalam persen dan tingkat konsumsi pangan dengan satuan kg/kapita/tahun (Tabel 6 dan Tabel 7). Tingkat partisipasi konsumsi pangan menunjukkan proporsi rumah tangga yang mengkonsumsi jenis pangan tertentu terhadap total populasi rumah tangga yang diamati. Jenis pangan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pangan sumber karbohidrat yang sebagian besar merupakan pangan pokok, sumber protein (hewani maupun nabati), sumber lemak, dan sumber vitamin/mineral. Tabel 6 menunjukkan tingkat partisipasi konsumsi pangan antardua waktu pengamatan.

Tingkat partisipasi konsumsi beras di lokasi penelitian mencapai 100%, hal ini terkait dengan pola pangan pokok utama yaitu beras. Sebagai wilayah pertanian dengan agroekosistem sawah dan dominan ditanami padi, maka beras relatif tersedia. Walaupun tidak semua rumah tangga mengusahakan tanaman padi, umumnya beras berasal dari membeli atau hasil panen (bawon) dan menjadikan

beras sebagai makanan pokok. Beras sebagai sumber karbohidrat utama sekaligus merupakan pangan sumber protein.

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga Patanas di Perdesaan Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010

Jenis Pangan	Jabar		Jateng		Jatim		Sumut		Sulsel	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Sumber Karbohidrat										
- Beras	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Jagung	4,0	0,0	8,0	1,3	20,0	9,2	6,0	2,5	20,0	6,3
- Ubi kayu	9,3	13,3	17,0	14,4	14,7	7,5	26,0	6,3	16,0	5,0
- Ubi jalar	4,0	3,3	2,0	2,5	1,3	4,2	2,0	6,3	8,0	3,8
- Mi instan	82,7	69,2	72,0	72,5	84,0	68,3	82,0	58,8	82,0	68,8
- Gula	96,0	85,0	92,0	92,5	100,0	91,7	96,0	96,3	100,0	92,5
Sumber Protein Hewani										
- Daging sapi	12,0	5,0	42,0	5,0	33,3	5,0	32,0	5,0	22,0	3,8
- Daging ayam	5,3	0,8	4,0	4,4	4,0	1,7	2,0	2,5	14,0	5,0
- Ikan	90,7	95,8	92,0	78,8	93,3	88,3	98,0	95,0	96,0	90,0
- Telur	88,0	81,7	78,0	68,1	82,7	67,5	80,0	67,5	78,0	52,5
- Susu	41,3	39,2	43,0	33,8	32,0	32,5	44,0	32,5	60,0	33,8
Sumber Protein Nabati										
- Tahu	76,0	57,5	79,0	68,1	80,0	77,5	88,0	47,5	54,0	46,3
- Tempe	74,7	85,0	80,0	85,0	88,0	80,8	90,0	60,0	78,0	68,8
Sumber Lemak										
- Minyak goreng	94,7	98,3	92,0	93,1	98,7	90,8	98,0	91,3	98,0	86,3
Sumber Vitamin dan Mineral										
- Bayam	40,0	46,7	62,0	45,6	60,0	52,5	58,0	50,0	60,0	51,3
- Kangkung	54,7	52,5	54,0	47,5	49,3	62,5	78,0	66,3	52,0	70,0
- Kubis	6,7	7,5	23,0	25,6	17,3	23,3	14,0	20,0	28,0	22,5
- Pepaya	17,3	7,5	9,0	3,1	5,3	9,2	6,0	7,5	6,0	15,0
- Jeruk	76,0	35,8	66,0	31,3	58,7	29,2	76,0	45,0	30,0	11,3
- Pisang	37,3	37,5	51,0	41,9	32,0	51,7	46,0	25,0	44,0	53,8

Pangan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi lainnya adalah gula pasir. Tingkat partisipasi gula pasir di semua wilayah cukup tinggi. Konsumsi gula biasanya sebagai pemanis dalam minuman, tidak ada pola yang jelas antardua titik waktu, sebagian meningkat dan sebagian menurun. Hal yang menarik adalah tingkat partisipasi mi instan. Tingkat partisipasi konsumsi mi instan mencapai antara 58–84%, hampir menyamai beras. Pengendalian konsumsi mi instan perlu dilakukan

karena bahan baku mi instan adalah gandum yang hampir 100% harus diimpor dari luar negeri.

Tingkat partisipasi pangan hewani cenderung menurun terutama untuk daging sapi, daging ayam, telur, dan susu. Penurunan antara lain karena perbedaan metode antara penelitian tahun 2007 dan 2010. Untuk memperoleh data konsumsi khususnya pangan hewani pada tahun 2007 dengan cara *recall* satu bulan terakhir, sementara pada tahun 2010 dilakukan dilakukan *recall* seminggu terakhir sehingga peluang untuk mengkonsumsi seminggu terakhir relatif kecil. Oleh karena itu, tingkat partisipasi pangan hewani pada tahun 2010 rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2007.

Partisipasi konsumsi ikan dan telur paling tinggi di antara pangan hewani yang lain dan kecenderungan ini berlaku untuk semua wilayah. Hal ini terkait dengan harga pangan di mana harga telur dan ikan paling murah dibandingkan dengan daging sapi atau ayam. Selain itu, telur juga mudah diperoleh di pasaran dan mudah diolah sehingga rumah tangga lebih memilih telur dibandingkan pangan hewani yang lain. Tingginya tingkat partisipasi dan konsumsi pangan hewani ini sebagai penyumbang utama tingginya tingkat konsumsi protein pada semua rumah tangga.

Tingkat partisipasi belum mencerminkan kuantitas pangan yang dikonsumsi, untuk itu perlu dilihat kuantitas pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Tingkat konsumsi beberapa pangan penting rumah tangga contoh dapat dilihat pada Tabel 7. Rataan tingkat konsumsi beras di perdesaan Patanas cenderung meningkat, yaitu dari 104 kg/kapita/tahun pada tahun 2007 menjadi 113 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Tingginya konsumsi beras ini karena pola konsumsi pangan pokok tunggal sehingga beras sebagai pangan pokok utama, selain itu sebagai daerah produsen padi maka ketersediaan pangan tersebut cukup karena sebagian besar adalah dari hasil panen sendiri. Walaupun demikian, besaran konsumsi beras tahun 2010 tersebut lebih rendah dibandingkan data nasional. Konsumsi beras rata-rata nasional di wilayah perdesaan 114,44 kg/kapita/tahun (Susenas, 2008). Untuk mengurangi konsumsi beras, dapat dilakukan diversifikasi pangan pokok nonberas seperti jagung dan umbi-umbian.

Mi instan banyak dikonsumsi masyarakat perdesaan, selain itu tingkat konsumsi mi instan cukup besar rata-rata 4–5 kg/kap/tahun. Hal ini perlu diwaspadai agar konsumsi jenis pangan tersebut tidak terus meningkat karena pangan tersebut berbahan baku terigu yang berasal dari impor. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengembangan produk sejenis yang berbahan baku lokal seperti umbi-umbian dan sebagainya.

Pangan hewani yang banyak dikonsumsi adalah ikan dan telur, mengingat harga pangan tersebut relatif terjangkau masyarakat. Tingkat konsumsi ikan tertinggi ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Tingginya konsumsi ikan tersebut antara lain karena potensi dan ketersediaan pangan tersebut besar.

Tabel 7. Tingkat Konsumsi Beberapa Pangan Penting pada Rumah Tangga Patanas di Perdesaan Bertipe Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010 (kg/kap/tahun)

Jenis Pangan	Jabar		Jateng		Jatim		Sumut		Sulsel	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Beras	119,2	128,2	94,1	97,3	108,0	108,0	101,9	118,8	95,1	114,4
Jagung	0,2	0,0	0,4	0,1	2,5	1,0	0,6	0,3	3,9	2,3
Ubi kayu	1,6	2,9	2,0	4,5	1,0	0,9	4,1	1,9	3,1	1,2
Ubi jalar	0,4	0,7	1,4	0,5	0,1	0,5	1,0	2,5	0,8	0,7
Mi instan	5,7	5,2	2,8	3,9	9,2	4,1	4,1	3,2	3,2	5,1
Gula	7,0	9,9	9,7	9,6	10,3	10,8	11,8	12,0	10,2	13,0
Daging sapi	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	0,2	0,5
Daging ayam	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3
Ikan	17,4	16,0	12,8	8,0	12,8	18,7	29,5	26,5	28,8	36,0
Telur	7,8	12,7	7,9	5,5	3,8	5,9	15,4	6,3	17,3	12,3
Susu	1,5	2,0	0,8	1,5	2,8	1,9	3,1	1,5	0,8	1,2
Tahu	4,3	2,3	5,5	2,4	7,0	5,1	9,5	1,1	2,0	2,6
Tempe	6,7	7,1	8,1	4,8	8,9	7,4	8,5	2,3	6,3	5,4
Minyak goreng	8,1	13,1	7,2	11,7	9,6	11,0	10,9	15,5	7,7	10,0
Bayam	4,1	7,0	6,4	4,0	5,6	3,5	9,8	3,2	10,5	3,3
Kangkung	10,4	8,1	5,7	4,6	3,9	4,2	25,5	4,6	5,1	4,8
Kubis	2,0	1,1	1,3	1,8	1,4	1,5	1,5	1,4	2,3	1,9
Pepaya	5,4	1,5	1,3	0,7	0,4	2,2	0,5	1,0	0,3	3,2
Jeruk	8,5	5,1	2,7	3,9	5,3	4,1	6,3	6,8	1,1	1,3
Pisang	4,8	11,3	4,6	12,8	2,5	14,5	6,7	5,8	4,3	18,0

Sumber protein nabati yang sudah meluas dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu tahu dan tempe, sudah dikonsumsi oleh masyarakat di Jawa dan luar Jawa. Sementara, untuk sumber vitamin dan mineral yang menonjol adalah pisang yang tingkat konsumsinya relatif besar karena buah ini tidak tergantung musim dan relatif tersedia di lokasi dengan harga terjangkau.

PERUBAHAN TINGKAT KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

Pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang semula dalam bentuk jenis pangan dikonversi ke dalam bentuk energi dan protein. Energi dan protein sering digunakan sebagai indikator kerawan pangan rumah tangga atau penduduk karena kedua jenis ini sangat penting peranannya dalam kualitas sumber daya manusia. Tingkat kecukupan energi dan protein yang anjuran telah ditetapkan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Dengan memperhatikan bahwa penelitian dilaksanakan pada tahun 2007–2012, maka acuan anjuran yang

digunakan adalah hasil WNPV VII tahun 2007, yaitu 2.000 kkal/kapita/hari untuk energi dan 52 gram/kapita/hari untuk protein.

Kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi oleh individu atau rumah tangga akan mencerminkan tingkat konsumsi energi dan protein yang bersangkutan. Pangan pokok biasanya merupakan sumber karbohidrat sekaligus sebagai sumber protein. Tingkat konsumsi energi dan protein dan dinamika perubahannya antara tahun 2007 dan 2010 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Tingkat Konsumsi Energi dan Protein pada Rumah Tangga Patanas di Perdesaan Bertipe Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010

Provinsi/Kabupaten	Energi (kkal/kap/hr)		Pangsa Energi Padi-Padian (%)		Protein (gr/kap/hr)		Pangsa Protein Hewani (%)	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
A. Jawa Barat	2.217	2.028	65,7	67,5	56,06	65,59	37,2	44,8
1. Indramayu	1.595	1.893	68,8	65,8	57,03	63,58	33,4	48,0
2. Subang	2.856	1.966	41,1	66,6	51,19	51,74	49,3	42,5
3. Karawang	2.201	2.224	87,2	70,1	55,97	81,45	29,2	43,9
B. Jawa Tengah	1.453	1.543	68,8	68,9	55,24	43,82	38,3	38,3
1. Cilacap	1.291	1.561	71,3	67,5	57,56	38,56	48,2	32,0
2. Klaten	1.507	1.633	71,8	67,4	55,79	41,89	43,4	33,0
3. Sragen	1.762	1.452	60,1	69,0	69,67	54,10	23,2	55,0
4. Pati	1.251	1.526	71,9	71,6	37,93	40,74	38,5	33,2
C. Jawa Timur	1.526	1.682	71,9	65,5	42,03	50,56	28,9	38,9
1. Banyuwangi	1.742	2.019	74,2	62,8	51,77	68,33	27,7	45,8
2. Lamongan	1.347	1.352	71,0	70,9	36,44	37,06	34,9	39,5
3. Jember	1.488	1.675	70,5	62,7	37,87	46,30	24,3	31,4
D. Sumatera Utara	1.680	1.691	60,4	72,2	36,25	45,39	23,1	35,8
1. Asahan	1.305	1.565	73,4	68,8	33,81	41,64	26,4	33,4
2. Serdang Bedagai	2.055	1.817	47,5	75,6	38,61	49,14	20,3	38,2
E. Sulawesi Selatan	1.632	1.970	57,4	61,2	37,14	41,69	24,0	24,5
1. Luwu	1.730	2.128	57,7	62,5	36,88	44,62	27,4	28,3
2. Sidrap	1.533	1.813	57,0	60,0	37,77	38,76	20,7	20,1
Rataan	1.701	1.783	64,8	67,0	45,34	55,91	37,6	41,4

Secara agregat rata-rata tingkat konsumsi energi pada tahun 2007 adalah 1.701 kkal/kapita/hari, yang meningkat menjadi 1.783 kkal/kapita/hari pada tahun 2010. Besarnya energi tersebut lebih rendah dari kecukupan yang dianjurkan menurut WNPV. Hal ini juga berlaku pada sebagian besar wilayah penelitian, konsumsi energi lebih tinggi dari 2.000 kkal/kapita/hari hanya terjadi di lokasi penelitian Provinsi Jawa Barat. Pangsa energi dari padi-padian >50%, yaitu

meningkat dari 64,8% pada tahun 2007 menjadi 67% pada tahun 2010. Menurut PPH, pangsa energi dari padi-padian maksimal 50%, sehingga konsumsi padi-padian perlu dikurangi.

Tingkat konsumsi protein tahun 2010 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2007, yaitu meningkat dari 45,34 gram/kapita/hari menjadi 55,91 gram/kapita/hari. Rata-rata konsumsi protein tahun 2010 di atas angka kecukupan gizi yang direkomendasikan WNPG (52 gram/kap/hari). Pangsa protein hewani meningkat dari 37,6% pada tahun 2007 menjadi 41,4% pada tahun 2010. Hasil penelitian Rachman dan Ariani (2014) mendapatkan bahwa sumbangan konsumsi protein terbesar berasal dari pangan sumber karbohidrat kemudian diikuti dari protein pangan hewani.

KESIMPULAN

Hasil analisis data mikro Patanas 2007 dan 2010 menunjukkan bahwa rata-rata agregat pangsa pengeluaran pangan mengalami peningkatan. Peningkatan pangsa pengeluaran pangan tersebut bukan berarti kesejahteraan yang menurun akan tetapi peningkatan pendapatan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Pangsa pengeluaran pangan dominan untuk pangan sumber karbohidrat. Tingkat partisipasi konsumsi beras di lokasi penelitian mencapai 100%. Tingginya tingkat partisipasi konsumsi beras ini terkait dengan pola pangan pokok tunggal, yaitu beras sebagai makanan pokok utama. Secara agregat rata-rata konsumsi energi di perdesaan lahan sawah berbasis padi lebih rendah dari yang dianjurkan, sedangkan konsumsi protein sudah di atas standar kecukupan.

Implikasinya dari penelitian ini adalah perlu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi pangan baik kuantitas maupun kualitas terutama untuk mencukupi kebutuhan energi. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dapat dilakukan melalui diversifikasi pangan sehingga diharapkan mutu pangan sesuai dengan PPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. dan T.B. Purwantini. 2007. Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Pasca Krisis Ekonomi di Provinsi Jawa Barat [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(10\)%20soca-mewa%20ariani%20dkk\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(10)%20soca-mewa%20ariani%20dkk(1).pdf) (13 Agustus 2014).
- Arifin, M. dan P. Simatupang. 1988. Pola Konsumsi dan Kecukupan Kalori dan Protein di Perdesaan Sumatera Barat. Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Pedesaan menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- [BPS] Biro Pusat Statistik. 1996. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku I. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Susenas. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku I. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2008. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku I. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2009. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Indikator Kesejahteraan Rakyat. 2009. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Irawan, B., P. Simatupang, R. Kustiari, Sugiarto, Supadi, J.F. Sinuraya, M. Iqbal, M.Ariani, V Darwis, R. Eliizabeth, Sunarsih, C. Muslim, T.B. Purwantini, dan T. Nurasa. 2007. Panel Petani Nasional (Patanas) Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Laporan Penelitian. Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Purwantini, T.B. dan M. Ariani. 2008. Pola Konsumsi Pangan pada Rumah Tangga Petani Padi. Seminar Nasional: Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, Tantangan dan Peluang Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani, Bogor, 19 November 2008. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachman, H.P.S. dan Wahida. 1998. Dinamika Pola Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga serta Prospek Permintaan Pangan dalam Dinamika Ekonomi Pedesaan: Perubahan Struktur Pendapatan, Ketenagakerjaan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga. Kerja sama Puslit Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.
- Rachman, H.P.S. 2001. Kajian Pola Konsumsi dan Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rachman, H.P.S. dan M. Ariani. 2015. Pola Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan: Komparasi Antartipe Agroekosistem. Prosiding Patanas 2015. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Suryana, A., B. Rachman, P.U. Hadi. 1988. Pola Pengeluaran untuk Konsumsi di Perdesaan Jawa Barat. Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Perdesaan menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Susilowati, S.H., B. Hutabarat, M. Rachmat, A. Purwoto, Sugiarto, Supriyati, Supadi, A.K. Zakaria, B. Winarso, H. Supriadi, T.B. Purwantini, R. Elizabeth, D. Hidayat, T. Nurasa, C. Muslim, M. Maulana, M. Iqbal, dan R. Aldillah. 2010. Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

DINAMIKA KONSUMSI RUMAH TANGGA PERDESAAN PADA AGROEKOSISTEM LAHAN KERING BERBASIS PALAWIJA

Rizma Aldillah dan Tri Bastuti Purwantini

PENDAHULUAN

Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan (Nurhadi, 2000). Konsumsi pangan sebagai kebutuhan utama penduduk, karena pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga penduduk atau rumah tangga akan berusaha untuk mencapai terwujudnya ketahanan pangan penduduk atau rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga menurut Khomsan (2008) diwujudkan oleh kemampuan penduduknya dalam mengakses dan mengonsumsi makanan sesuai syarat gizi untuk mencapai derajat hidup sehat. Oleh karena itu, konsumsi pangan yang baik adalah tidak sekedar jumlah yang cukup, tetapi juga memenuhi kecukupan standar gizi yang diperlukan, di Indonesia standar kecukupan dapat mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) yang dirilis dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) sesuai dengan masa dikeluarkannya angka AKG tersebut. Mengingat data analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah tahun 2008 dan 2011, maka AKG lebih relevan mengacu hasil WNPG IX tahun 2008.

Masalah pangan lebih banyak dijumpai di perdesaan karena kehidupan di perdesaan mayoritas berada dalam garis kemiskinan. Sementara itu, masalah pangan yang lebih mudah diidentifikasi adalah dilihat dari konsumsi gizinya. Selama ini zat gizi yang sering digunakan sebagai indikator kecukupan gizi adalah konsumsi dari energi dan protein karena kekurangan kedua zat gizi makro tersebut masih merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Selain cukup, konsumsi gizi tersebut juga harus seimbang dan beragam (Hardinsyah *et al.*, 2014).

Dengan demikian, perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa (Bappenas, 2011). Dalam kehidupan, manusia tidak hanya memerlukan konsumsi pangan, tetapi juga nonpangan. Oleh karena itu, dalam menentukan garis kemiskinan, BPS (2012) menggunakan pengeluaran minimum untuk kebutuhan pangan dan nonpangan. Kajian Mauludiyani dan Ariani (2014) menggunakan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator kesejahteraan, semakin tinggi pendapatan maka pangsa pengeluaran pangan semakin kecil.

Kemampuan daya beli masyarakat yang menurun akan memengaruhi pola konsumsi rumah tangga di perdesaan (Yudaningrum, 2011). Pada tingkat pengeluaran rendah, peningkatan pengeluaran masih meningkatkan konsumsi beras dengan proporsi yang semakin menurun, tetapi pada tingkat pengeluaran tinggi terjadi penurunan konsumsi beras dengan proporsi yang semakin meningkat (Marwanti, 2002). Setiap rumah tangga atau kelompok rumah tangga memiliki pola

atau struktur konsumsi dan pengeluaran yang berbeda. Pola konsumsi dan pengeluaran umumnya berbeda antaragroekosistem, antarkelompok pendapatan, antaretnis atau suku, dan antarwaktu (Rachman dan Wahida, 1998; Arifin dan Simatupang, 1988; Suryana *et al.*, 1988).

Tulisan ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dinamika konsumsi pangan rumah tangga perdesaan pada tipe desa lahan kering berbasis palawija. Secara khusus penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat dan partisipasi konsumsi; (2) menganalisis pangan konsumsi energi dan protein; dan (3) menganalisis dinamika keragaman konsumsi pangan rumah tangga perdesaan pada desa lahan kering berbasis palawija.

METODE ANALISIS

Penelitian Patanas merupakan penelitian panel, maka survei dilakukan pada lokasi dan rumah tangga yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada agroekosistem lahan kering berbasis palawija, sehingga dapat dianalisis dinamikanya pada periode 2008–2011. Lokasi survei berdasarkan agroekosistem lahan kering dengan komoditas basis (kombas) palawija meliputi (1) desa kombas jagung meliputi tiga desa, yaitu Desa Bumiayu (Kabupaten Blitar), Desa Resongo (Kabupaten Probolinggo), dan Desa Balleangin (Kabupaten Bulukumba); (2) desa kombas kacang tanah, meliputi Desa Mekarsari (Kabupaten Garut) dan Desa Ngelo (Kabupaten Wonogiri); (3) desa kombas Kedelai, diwakili Desa Sindang Mekar (Kabupaten Garut); dan (4) desa kombas ubi kayu terdiri dari dua desa, yaitu Desa Caturkarya (Kabupaten Tulangbawang) dan Desa Telogosari (Kabupaten Pati).

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data konsumsi yang merupakan bagian dari data Panel Petani Nasional (Patanas) yang dikumpulkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) tahun 2008 dan 2011, dengan fokus kajian di agroekosistem lahan kering berbasis palawija. Data yang digunakan adalah data pengeluaran dan konsumsi pangan: pangan sumber karbohidrat, pangan hewani, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak+lemak (termasuk biji berminyak), bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, dan makanan/minuman jadi dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Data konsumsi pangan tersebut dikonversi ke zat gizi energi dan protein dengan mengacu Daftar Komposisi Bahan Makanan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan (2005). Dalam perhitungan ini belum memperhitungkan konsumsi pangan dalam bentuk masakan matang, mengingat konversi dari jenis makanan tersebut sangat bervariasi baik jenis maupun porsi atau kuantitas dari jenis makanan tersebut.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis melalui tabel-tabel analisis dan grafik. Untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga berdasarkan aspek kuantitas, data dianalisis menggunakan pendekatan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang terdiri dari Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP). Standar kecukupan berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional

Pangan dan Gizi (WKNPG) IX tahun 2008 adalah 2.000 kkal/kapita/hari untuk AKE dan 52 gram/kapita/hari untuk AKP.

Untuk menghitung Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan acuan susunan Pola Pangan Harapan Nasional. Analisis yang mengacu PPH dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi pangan berdasarkan aspek kualitas. Dasar penghitungan skor PPH menggunakan angka kecukupan energi 2.000 kkal. PPH merupakan konsep gizi beragam dan seimbang yang didasarkan pada konsep Triguna Makanan. Keseimbangan jumlah antarkelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi (Triguna Makanan yang Beragam dan Bergizi Seimbang). PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi sembilan kelompok pangan, yaitu kelompok (a) padi-padian, (b) umbi-umbian, (c) pangan hewani, (d) minyak dan lemak, (e) buah dan biji berminyak, (f) kacang-kacangan, (g) gula, (h) sayuran dan buah-buahan, (i) lain-lain. Setiap kelompok pangan diberi bobot, kriteria, dan besarnya bobot seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

No.	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan				Skor PPH
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Padi ² an	275	1.000	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi ² an	100	120	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan hewani	150	240	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan lemak	20	200	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/biji berminyak	10	60	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang ² an	35	100	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	30	100	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan buah	250	120	6,0	5,0	30,0
9.	Lain-lain	-	60	3,0	0,0	0,0
Jumlah		870	2.000	100,0	-	100,0

Sumber: Harmonisasi PPH Nasional PPKP-BKP dan GMSK-IPB (2002) *dalam* BKP (2013)

Keterangan:

- % AKG (kolom 5) = $\frac{\text{kolom 4}}{1000 \text{ kkal}} \times 100\%$

- Skor pangan = (kolom 7). Hasil perkalian dari masing-masing kelompok pangan dijumlahkan sehingga diperoleh total skor 100.

- Penetapan rating atau bobot (kolom 6)

$$W = \frac{\sum Y}{AK}$$

di mana: W = nilai skor PPH

Y = skor PPH kelompok pangan

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA

Komponen lengkap pengeluaran dan pendapatan rumah tangga harus mencakup unsur pendapatan dan pengeluaran bersama serta masing-masing anggota rumah tangga (ART). Dengan demikian, jumlah ART berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran per kapita, semakin besar jumlah ART, maka pengeluaran per kapita semakin kecil. Hal yang sama untuk konsumsi pangan per kapita dalam rumah tangga yang bersangkutan. Jumlah ART di lokasi contoh pada tahun 2011 rata-rata 4,12, terdapat penurunan jumlah ART, tahun 2008 jumlah ART sebesar 4,18 (Tabel 2). Hal ini karena sebagian ART responden sudah memisahkan dari keluarganya karena meninggal atau menikah. Secara umum jumlah ART tergolong sedang, artinya sesuai dengan target program Keluarga Berencana (KB), yakni keluarga kecil keluarga harapan.

Tabel 2. Karakteristik Rumah Tangga Perdesaan Patanas di Desa Lahan Kering menurut Wilayah Komoditas Basis, 2008–2011

Uraian	Jagung		Kacang Tanah		Kedelai		Ubi Kayu		Rata-Rata	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
Jumlah Anggota RT (orang)										
- Total	3,99	3,85	4,53	4,47	4,72	4,50	3,80	3,93	4,18	4,12
- < 15 tahun	1,14	0,94	1,39	1,41	1,91	1,60	1,04	1,09	1,28	1,19
- 15–65 tahun	2,71	2,79	3,01	2,89	2,75	2,80	2,61	2,65	2,77	2,79
- > 65 tahun	0,15	0,12	0,13	0,16	0,06	0,10	0,16	0,20	0,13	0,15
Umur (tahun)										
- Kepala keluarga	42,0	43,2	46,6	49,2	43,3	44,1	43,9	45,8	43,8	45,5
- Istri	34,6	36,9	40,1	40,7	37,3	38,8	34,7	35,5	36,4	37,8
Pendidikan (tahun)										
- Kepala keluarga	5,8	4,5	6,6	6,5	7,5	6,5	6,8	6,8	6,5	5,8
- Istri	5,3	4,9	6,3	4,9	7,0	6,43	6,3	5,6	6,0	5,3

Dari sisi usia, kepala keluarga rata-rata berusia 45,3 tahun, sedangkan rata-rata usia istri yaitu 37,1 tahun. Usia tersebut tergolong masih produktif, demikian halnya rata-rata ART sebagian besar berusia produktif. Pada tahun 2008 jumlah rata-rata ART usia produktif sekitar 66%, meningkat menjadi 68% pada tahun 2011. Sumber daya manusia (SDM) ini merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, dengan asumsi bahwa kelompok umur produktif mudah menerima pembaharuan dibanding kelompok lanjut usia (Rachman dan Supriyati, 2004), sehingga potensi peningkatan kesejahteraan rumah tangga perdesaan dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, tingkat pendidikan mereka tergolong rendah, pendidikan rata-rata kepala keluarga dan istri tamat sekolah dasar (SD), walaupun bervariasi antarlokasi (Tabel 2). Kualitas SDM yang rendah ini biasanya

akan lebih sulit menerima pembaharuan dalam adopsi teknologi. Bila dikaitkan dengan ketahanan pangan rumah tangga, maka istri dominan dalam penyiapan konsumsi pangan rumah tangga. Oleh karena itu, tingkat pendidikan istri akan berpengaruh terhadap perilaku dalam penyajian konsumsi dalam rumah tangga terutama konsumsi pangan, karena istri umumnya yang menyiapkan makanan untuk keluarganya, sehingga akan berdampak pada kuantitas maupun kualitas pangan yang dikonsumsi.

DINAMIKA KONSUMSI PANGAN

Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi, terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi (BPS, 2014).

Analisis konsumsi pangan mencakup tingkat partisipasi konsumsi dan tingkat konsumsi pangan. Tingkat partisipasi konsumsi merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang mengonsumsi suatu pangan tertentu terhadap total populasi yang dikaji yang dinyatakan dalam persen. Sementara, tingkat konsumsi pangan merupakan jumlah komoditas pangan yang dikonsumsi suatu rumah tangga dengan satuan kg/kapita/tahun. Dalam analisis di sini hanya mencakup beberapa jenis pangan yang dominan sering dikonsumsi oleh rumah tangga contoh.

Tingkat Partisipasi Konsumsi Pangan

Tingkat partisipasi konsumsi pangan di suatu desa penting untuk diketahui karena dapat memberikan informasi sejauh mana suatu komoditas pangan tersebut banyak diakses oleh penduduk atau rumah tangga. Hasil kajian Soedjana (2013) menunjukkan bahwa partisipasi konsumsi dapat digunakan sebagai alat ukur status ketahanan pangan di suatu daerah tertentu atau nasional. Pengukuran kinerja konsumsi komoditas pangan lebih sesuai bila menggunakan total penduduk sebagai denominator konsumsi per kapita per tahun. Namun, untuk komoditas pangan yang memiliki angka partisipasi konsumsi jauh di bawah 100%, khususnya di bawah 50%, sebaiknya menggunakan kluster konsumennya sebagai denominator sehingga tidak terjadi bias dalam menghitung tingkat konsumsi per kapita per tahun. Melalui pendekatan partisipasi konsumsi akan diketahui tingkat konsumsi efektif suatu komoditas oleh kluster pengonsumsinya, di mana denominator yang digunakan adalah populasi penduduk yang berada pada kluster pengonsumsi saja, bukan total penduduk. Namun demikian, hasil penelitian ini menggunakan denominator dari

total sampel yang diteliti. Secara rinci tingkat partisipasi konsumsi beberapa jenis pangan penting disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Patanas di Desa Lahan Kering menurut Komoditas Basis, 2008–2011 (%)

Uraian	Jagung		Kacang Tanah		Kedelai		Ubi Kayu		Rata-Rata		Perubahan
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011	
<u>Pangan sumber karbohidrat</u>											
Beras	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Jagung	90	49	36	0	19	3	21	8	50	20	-30
Ubi kayu	34	15	52	3	19	27	72	6	45	11	-34
Ubi jalar	19	9	19	0	0	10	42	0	22	4	-17
Mi instan	97	56	84	81	94	83	89	45	91	64	-27
Gula pasir	100	95	97	73	100	93	100	81	99	86	-13
<u>Pangan sumber protein</u>											
Daging sapi	49	1	52	3	69	7	44	8	51	4	-47
Daging ayam	1	1	0	9	3	0	4	5	2	4	2
Ikan	99	88	94	95	100	90	96	80	97	88	-9
Telur	89	57	98	77	100	83	95	72	94	69	-25
Susu	27	14	48	42	75	50	44	31	43	30	-13
Tahu	74	46	91	69	100	60	91	61	86	57	-29
Tempe	71	46	98	80	97	50	98	88	88	65	-23
<u>Pangan sumber lemak</u>											
Minyak goreng	98	98	98	100	100	97	96	89	98	96	-2
<u>Pangan sumber vitamin dan mineral</u>											
Bayam	51	16	95	56	69	23	79	48	71	35	-36
Kangkung	62	23	69	55	91	60	72	52	70	43	-27
Kubis	53	10	69	11	47	40	72	16	61	15	-46
Pepaya	52	14	39	8	38	27	61	22	49	16	-33
Jeruk	71	5	83	30	88	33	79	22	78	19	-59
Pisang	92	32	86	53	84	50	77	28	86	39	-55

Partisipasi konsumsi rata-rata tahun 2008 yang di atas 65%, yaitu beras, mi instan, gula, ikan, telur, tahu, tempe, minyak goreng, bayam, jeruk, dan pisang. Kemudian, tahun 2011 partisipasi komoditas beberapa bahan makanan di atas 65% menurun hanya menjadi lima macam, yaitu beras, gula, telur, ikan, tempe dan minyak goreng. Dari 20 jenis bahan makanan, rata-rata partisipasi konsumsi dengan angka di atas 65% hanya sebanyak 8 jenis atau sekitar 40%. Dengan indikator

tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi pangan penduduk desa lahan kering berbasis palawija belum beragam.

Secara agregat maupun masing-masing desa komoditas basis palawija menunjukkan bahwa tingkat partisipasi konsumsi beras di lokasi contoh mencapai 100%. Seluruh rumah tangga mengonsumsi beras sebagai makanan pokok utama, sebagian besar rumah tangga tidak mengusahakan tanaman padi, tetapi umumnya mereka memperoleh dari membeli. Beras sebagai sumber karbohidrat utama merupakan pangan sumber karbohidrat yang sekaligus merupakan pangan sumber energi. Selain beras, beberapa pangan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi adalah gula pasir. Hampir di semua desa tingkat partisipasi konsumsi gula cukup tinggi. Konsumsi gula ini biasanya sebagai pemanis dalam minuman atau campuran pembuatan kue. Namun demikian, rata-rata di semua lokasi partisipasi konsumsi gula menurun. Penurunan ini antara lain disebabkan karena kesadaran masyarakat yang semakin baik akan kesehatan. Sebagian responden yg tidak mengonsumsi gula pasir menggantinya dengan produk gula lain seperti gula merah atau bahan minuman pabrikan seperti kopi kemasan atau kopi instan yang sudah mengandung gula.

Partisipasi konsumsi mi instan bervariasi antarlokasi. Secara agregat partisipasi konsumsi untuk pangan tersebut masih cukup tinggi, walaupun cenderung menurun. Tingginya partisipasi pangan ini karena pangan tersebut praktis untuk diolah dan relatif murah terjangkau di kalangan masyarakat luas termasuk di perdesaan, sehingga pangan tersebut disenangi terutama pada kalangan anak muda dan anak-anak. Sementara jenis pangan sumber karbohidrat lain yang sebelumnya juga menjadi pangan pokok di beberapa desa tergeser oleh beras, yang ditunjukkan oleh partisipasi konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya seperti jagung dan ubi kayu relatif kecil. Kasus di desa basis jagung, pada tahun 2008 partisipasi konsumsi jagung mencapai 90% menurun menjadi 46%, di desa ini jagung merupakan pangan pokok kedua setelah beras, biasanya penduduk mengonsumsi jagung dicampur dengan beras, sebagian besar jagung diperoleh dari hasil sendiri. Jenis jagung yang dikonsumsi biasanya adalah jenis komposit atau jagung lokal. Dengan semakin berkembangnya jagung hibrida, sebagian petani mengalihkan mengusahakan jagung hibrida, karena dari sisi pendapatan relatif lebih tinggi dibanding, mengusahakan jagung komposit atau jagung lokal, sehingga produksi jagung yang ditujukan untuk konsumsi semakin berkurang.

Konsumsi ubi kayu secara agregat juga menurun. Umumnya ubi kayu bukan merupakan pangan pokok di desa contoh, sekalipun desa tersebut dengan komoditas basis utama ubi kayu, namun ubi kayu terbatas hanya sebagai makanan selingan. Selain itu, ubi kayu yang diusahakan oleh petani desa contoh pada umumnya adalah jenis ubi kayu yang digunakan sebagai bahan baku industri tapioka (rasa pahit), bukan jenis ubi kayu yang biasa digunakan sebagai pangan pokok (rasa tidak pahit). Di lokasi lain seperti Desa Bumi Ayu (basis jagung) dan Desa Ngelo (basis kacang tanah) masih dijumpai sebagian masyarakatnya mengonsumsi pangan pokok dari produk ubi kayu (tiwul), namun kecenderungannya semakin meninggalkan pangan tersebut dan biasanya terbatas dikonsumsi oleh kaum dewasa. Hal yang sama untuk ubi jalar, jenis pangan ini

bukan merupakan pangan pokok, tetapi sebagai makanan ringan atau selingan. Partisipasi konsumsi ubi jalar relatif kecil dan cenderung menurun. Gambaran ini searah dengan potret nasional (Purwantini dan Saliem, 2011).

Untuk mendukung program diversifikasi pangan antara lain dilakukan dengan pengurangan konsumsi beras dan lebih memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di lokasi. Kajian yang dilakukan Saliem (2002) di Kawasan Indonesia bagian Timur menguatkan fenomena yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Pergeseran pola konsumsi pangan pokok ini juga terjadi karena kebijakan awal Pemerintah Indonesia yang bias ke beras. Implikasi dari temuan di atas, perlu kebijakan untuk melestarikan pangan lokal yang sebenarnya sudah membudaya di beberapa desa contoh. Hal ini juga dapat disarankan untuk desa lain yang masih atau pernah mengonsumsi pangan lokal (jagung dan atau umbi-umbian) sebagai pangan pokoknya.

Tingkat partisipasi pangan hewani secara agregat menurun, kecuali tingkat partisipasi konsumsi daging ayam meningkat. Hal ini antara lain karena pendapatan rumah tangga meningkat, sehingga pengeluaran untuk pangan hewani juga meningkat implikasi peningkatan pendapatan dibelanjakan untuk pangan yang lebih berkualitas dengan harga relatif mahal. Partisipasi konsumsi untuk pangan hewani yang dominan adalah telur ayam dan ikan (termasuk produk olahannya), walaupun partisipasi konsumsi kedua pangan tersebut menurun (Tabel 3).

Sumber protein nabati utama yang dikonsumsi rumah tangga di desa penelitian adalah tempe dan tahu. Kedua jenis pangan tersebut mendominasi pola konsumsi protein nabati, walaupun selama 2008–2011 partisipasi kedua jenis pangan tersebut menurun. Beras, selain sebagai sumber karbohidrat/energi sebenarnya juga sebagai sumber protein nabati, mengingat kandungan protein beras relatif tinggi (Depkes, 2005). Selain dikonsumsi dalam jumlah relatif besar, partisipasi konsumsinya juga tinggi (100%). Untuk jenis pangan sayur dan buah yang merupakan sumber vitamin dan mineral, hanya tingkat partisipasi yang tinggi hanya terjadi pada beberapa jenis sayur dan buah. Secara agregat partisipasi konsumsi buah dan sayur menurun selama 2008–2011, yang terjadi untuk hampir semua jenis buah dan sayur yang dikonsumsi.

Tingkat Konsumsi Pangan

Partisipasi konsumsi pangan belum mencerminkan kuantitas konsumsi pangan. Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Persyaratan kecukupan untuk mencapai keberlanjutan konsumsi pangan adalah adanya aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan. Aksesibilitas ini tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dengan demikian, data konsumsi pangan secara riil dapat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan dalam rumah tangga. Perkembangan tingkat konsumsi pangan tersebut secara implisit juga merefleksikan tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat terhadap

pangan. Baliwati (2004) mengemukakan bahwa perilaku konsumsi pangan merupakan perwujudan dari kebiasaan makan yang tumbuh berkembang dalam proses sosialisasi keluarga.

Tabel 4 menyajikan perkembangan rata-rata tingkat konsumsi beberapa jenis pangan menurut kelompok pangan yang relatif sering dikonsumsi oleh rumah tangga contoh dalam dua titik waktu (2008 dan 2011). Untuk sumber karbohidrat, beras merupakan pangan pokok utama. Secara agregat konsumsi beras meningkat dari 91,8 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 dan 101,1 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Sementara, hasil kajian (Kemendag, 2013) berdasarkan data Susenas 2011 menunjukkan bahwa konsumsi beras masyarakat perdesaan di Indonesia rata-rata mencapai 96 kg/kapita/tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi beras di desa penelitian pada tahun 2011 lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Di sisi lain, konsumsi beras di desa penelitian cenderung meningkat, sementara secara agregat nasional konsumsi beras per kapita cenderung menurun. Dengan demikian, fenomena peningkatan konsumsi beras per kapita perlu diwaspadai, perlu kebijakan dan sosialisasi pentingnya mengurangi konsumsi beras.

Pangan sumber karbohidrat lain seperti jagung dan umbi-umbian merupakan pangan lokal yang semakin banyak ditinggalkan. Tampak bahwa hasil produksi pertanian yang diproduksi rumah tangga berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan pokok. Di desa komoditas basis jagung, yakni di Desa Bumiayu, Resongo dan Balleangin, komoditas jagung merupakan pangan lokal utama setelah beras. Tampak bahwa konsumsi jagung relatif tinggi di desa komoditas basis jagung, yakni 41,65 kg/kapita/tahun pada tahun 2008, yang menurun menjadi 25,7 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Penurunan tingkat konsumsi jagung selain karena tingkat partisipasi konsumsi yang rendah, kuantitas asupan juga berkurang. Konsumsi jagung sebagian disubstitusi oleh beras. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi beras. Hal yang sama untuk tingkat konsumsi ubi kayu antarlokasi contoh beragam, sebagian meningkat dan sebagian menurun (Tabel 4), namun rata-rata cenderung menurun, sedangkan konsumsi ubi jalar menunjukkan peningkatan secara agregat. Sementara itu, tingkat konsumsi gula pasir secara agregat rata-rata relatif stabil, di desa dengan komoditas basis jagung yang mengalami peningkatan, dari 11,56 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 meningkat menjadi 12,5 kg/kapita/tahun. Rata-rata konsumsi gula pasir di desa tersebut tertinggi di antara desa komoditas basis lainnya (Tabel 4).

Hasil temuan menunjukkan bahwa konsumsi mi instan meningkat dari 3,1 kg/Kapita/tahun meningkat menjadi 4,2 kg/kapita/hari atau dari rata-rata 39 bungkus menjadi 52 bungkus. Temuan ini searah dengan kondisi rata-rata nasional yang cenderung meningkat. Data World Instant Noodles Association (WINA) juga memberi konfirmasi bahwa konsumsi mi instan masyarakat Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, konsumsi mi instan masyarakat Indonesia sudah mencapai 14,9 miliar bungkus, atau mengalami peningkatan sebesar 1 miliar bungkus bila dibandingkan dengan konsumsi pada tahun 2009. Itu artinya, secara rata-rata setiap orang Indonesia mengonsumsi sekitar 60–61 bungkus atau 5,1 kg/kapita/tahun mi instan pada tahun 2013. Tingginya angka konsumsi mi instan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai negara

pengonsumsi mi instan terbesar di dunia setelah Cina, yang konsumsinya mencapai 46,2 miliar bungkus.

Tabel 4. Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Patanas di Desa Lahan Kering menurut Komoditas Basis, 2008–2011 (kg/kap/thn)

Jenis Pangan	Komoditas Basis									
	Jagung		Kacang Tanah		Kedelai		Ubi Kayu		Rata-Rata	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
<u>Sumber karbohidrat</u>										
- Beras	69,4	94,5	90,4	89,9	102,1	103,0	94,7	94,1	91,8	101,1
- Jagung	41,7	25,7	0,7	0	1,0	0,2	0,3	1,37	16,8	8,1
- Ubi kayu	2,6	4,6	6,8	0,8	1,5	5,7	7,7	1,0	3,5	3,1
- Ubi jalar	0,2	2,3	0,2	0	0	1,5	3,3	0	0,9	1,1
- Mi instan	2,3	3,5	1,8	4,6	4,8	5,6	4,3	2,2	3,1	4,2
- Gula	11,6	12,5	6,4	6,8	6,1	5,4	9,6	7,8	9,7	9,3
<u>Sumber protein</u>										
- Daging sapi	0,2	0,1	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2
- Daging ayam	0,1	0,0	0	0,2	0,0	0	0,2	0,2	0,1	0,1
- Ikan	9,5	16,5	3,5	8,5	6,3	12,3	13,1	7,7	8,3	11,7
- Telur	4,2	5,4	2,3	4,9	5,7	5,5	6,9	3,4	4,5	4,8
- Susu	0,4	0,3	0,3	1,2	0,8	1,1	3,0	1,0	1,0	0,8
- Tahu	1,6	1,9	2,1	2,2	3,1	1,1	2,8	1,0	2,2	1,7
- Tempe	1,6	2,6	4,9	3,3	4,9	1,1	4,7	3,5	3,6	2,8
<u>Sumber vitamin dan mineral</u>										
- Bayam	2,73	1,06	9,10	3,01	8,36	1,13	3,19	2,90	5,27	2,02
- Kangkung	3,15	1,52	3,47	2,68	8,06	2,59	3,20	3,95	3,90	2,54
- Kubis	3,41	2,14	2,00	0,68	3,62	5,08	4,02	1,18	3,21	1,92
- Pepaya	4,56	3,56	1,51	0,91	10,13	4,42	3,95	6,50	4,35	3,67
- Jeruk	1,24	0,38	2,51	2,28	4,34	3,99	3,61	3,21	2,54	2,03
- Pisang	10,76	10,8	5,74	15,3	13,05	12,2	9,52	8,61	9,44	11,65

Tingkat konsumsi pangan hewani yang meliputi daging sapi, daging ayam, telur dan ikan, beragam antardesa, namun secara agregat pada umumnya menurun kecuali konsumsi ikan. Rumah tangga cenderung membelanjakan pangan yang murah harganya dan mudah diperoleh, tanpa memperhatikan kualitas pangan yang memiliki kandungan protein yang baik bagi pertumbuhan gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Khusus untuk konsumsi daging sapi, sangat jarang dikonsumsi rumah tangga. Menurut Ilham (2001), hal tersebut dikarenakan (1) daging sapi merupakan komoditas pangan yang bersifat *high income elastic*, di mana peningkatan konsumsinya hanya bersifat responsif pada golongan

berpendapatan tinggi, sehingga belum memungkinkan bagi seluruh penduduk untuk berkesempatan mengonsumsi daging sapi; (2) para peternak pemelihara sapi dan masyarakat pedesaan umumnya, walaupun memelihara dan memiliki ternak sapi, tidak untuk dikonsumsi keluarga, sementara kebutuhan asupan protein hewani didominasi dari ikan dan pangan substitusi lainnya, seperti ayam kampung; (3) secara kultural dan kondisi ekonomi rumah tangga pedesaan, fenomena diversifikasi pangan sumber protein hewani ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi, sehingga tidak mudah untuk menjadikan daging sapi sebagai kebutuhan primer (barang normal). Dengan demikian, kesempatan mengonsumsi daging sapi hanya dilakukan pada saat hari besar keagamaan.

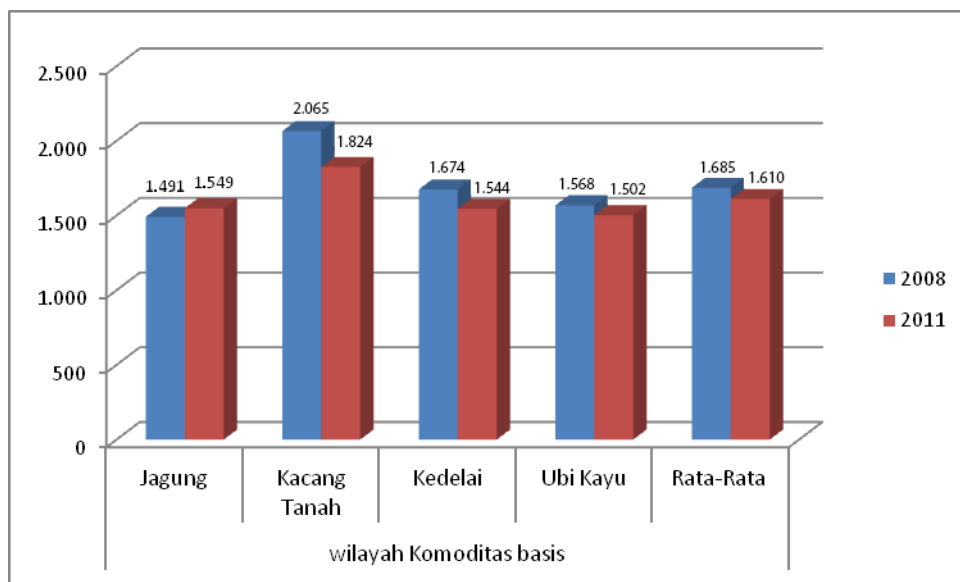
Tingkat konsumsi sayuran dan buah rata-rata juga menurun, kecuali tingkat konsumsi pisang. Kondisi ini berbeda antardesa (Tabel 4). Biasanya pola konsumsi sayuran juga dipengaruhi dengan ketersediaan jenis pangan tersebut di sekitar desa di mana mereka tinggal dan kebiasaan masing-masing rumah tangga. Jenis sayuran seperti daun katuk, daun kelor, daun pakis dan sebagainya yang tidak dianalisis di tulisan ini merupakan jenis sayuran yang relatif sering dikonsumsi di beberapa desa contoh, namun tidak umum di desa contoh lainnya. Menurunnya tingkat konsumsi beberapa jenis bahan makanan tersebut di daerah lahan kering berbasis palawija karena penurunan tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2008 pangsa pengeluaran pangan di desa lahan kering berbasis sayuran jauh lebih baik dibandingkan di desa yang berbasis palawija, sebaliknya selama tiga tahun kondisi kesejahteraan di desa berbasis palawija cenderung menurun (Purwoto *et al.*, 2011).

DINAMIKA KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi (Ariani, 2010). Kekurangan energi dan protein merupakan masalah gizi utama (terutama pada balita) yang banyak ditemukan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Konsumsi energi dihitung berdasarkan konversi dari pangan yang dikonsumsi. Kinerja konsumsi energi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, tampak bahwa rata-rata rumah tangga di lokasi contoh belum dapat memenuhi kecukupan kuantitas konsumsi pangan. Hal ini diindikasikan dengan masih rendahnya konsumsi energi rumah tangga yang masih belum mencapai standar kecukupan yang dianjurkan (2.000 kkal/kapita/hari).

Tingkat konsumsi energi pada rumah tangga berbasis kacang tanah relatif terbaik dibanding di desa basis komoditas lainnya. Di desa tersebut pada tahun 2008 konsumsi energi rumah tangga sudah mencapai 2.065 kkal/kapita/hari, namun pada tahun 2011 menurun menjadi 1.824 kkal/kapita/hari (sekitar 91% dari TKE). Sementara, tingkat kecukupan energi (TKE) di desa penelitian berkisar 74–103% tahun 2008 dan 75–91% atau rata-rata 84% (2008) menurun menjadi 80%. Bila mengacu pengelompokan tingkat kerawanan pangan (Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2006), yaitu sangat rawan pangan jika tingkat konsumsi energi

(TKE) \leq 70%, rawan pangan dengan TKE 71–89%, dan tahan pangan jika TKE \geq 90%, maka rata-rata rumah tangga di desa penelitian tergolong rawan pangan, kecuali rumah tangga di desa berbasis kacang tanah yang termasuk kategori tahan pangan.



Gambar 1. Perubahan Tingkat Konsumsi Energi Rumah Tangga Perdesaan Patanas di Desa Lahan Kering menurut Komoditas Basis, 2008–2011 (kcal/kapita/hari)

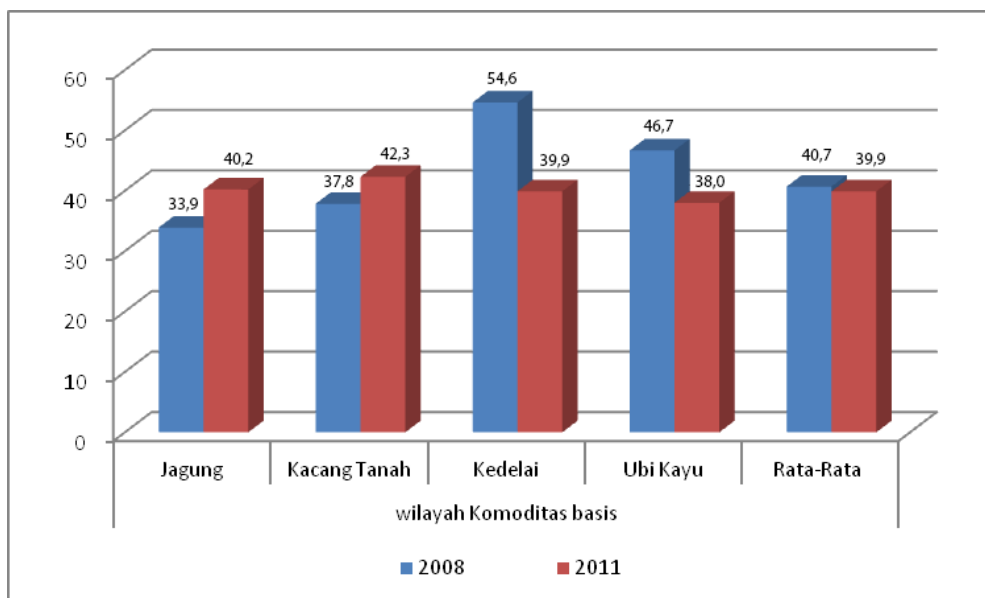
Bila dilihat dari komponen jenis pangan yang berkontribusi dalam konsumsi energi rumah tangga di lokasi contoh, maka kelompok pangan serealia mendominasi yang berkontribusi dalam pola konsumsi energi rumah tangga di seluruh desa contoh. Selama 2008–2011 kontribusi kelompok serealia (beras, jagung, dan terigu) makin meningkat, sementara menurut Hardinsyah *et al.* (2014) hasil analisis tingkat nasional dari data Susenas 2002–2011 menunjukkan bahwa kontribusi energi untuk pangan serealia semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi energi rumah tangga di desa contoh sangat tergantung pada asupan dari pangan serealia, terutama beras. Standar ideal kontribusi konsumsi energi dari serealia sekitar 50%. Kontribusi energi dari pangan umbi-umbian menurun, kecuali di desa basis kedelai, meningkat dari 0,3% menjadi 1,5%. Secara rinci kontribusi masing-masing kelompok pangan terhadap total konsumsi energi rumah tangga menurut tipe desa disajikan pada Tabel 5. Secara umum perubahan signifikan terdapat pada konsumsi serealia yang meningkat tajam rata-rata untuk seluruh lokasi dari 55,9% menjadi 65,7% atau meningkat sekitar 10%. Hal ini kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang ingin menurunkan konsumsi serealia utama "beras". Fenomena ini disebabkan karena semakin mudahnya akses terhadap beras, termasuk adanya pengadaan raskin.

Protein merupakan zat gizi penting untuk pertumbuhan dan penggantian sel yang rusak. Protein dapat dibedakan menjadi protein hewani (berasal dari pangan

hewani) dan protein nabati (berasal dari tanaman dan atau hasil olahannya). Secara agregat desa konsumsi protein rata-rata masih di bawah tingkat kecukupan yang dianjurkan. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan kondisi rata-rata nasional perdesaan, yang sebagian besar sudah mencapai standar kecukupan.

Tabel 5. Perubahan Pangsa Konsumsi Energi Rumah Tangga menurut Kelompok Pangan di Perdesaan Patanas di Desa Lahan Kering menurut Komoditas Basis, 2008–2011 (%)

Kelompok Pangan	Jagung		Kacang Tanah		Kedelai		Ubi kayu		Rata-rata	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
1. Serealia	51,2	67,1	49,0	56,5	68,3	72,1	65,5	72,8	55,9	65,7
2. Umbi ² an	25,3	5,6	33,2	17,2	0,3	1,5	2,3	0,2	19,5	7,5
3. Pangan hewani	2,2	2,7	1,3	2,9	8,5	3,4	3,5	2,9	3,0	2,9
4. Minyak dan lemak	11,2	17,0	8,4	15,3	14,2	17,9	17,2	16,8	12,0	16,6
5. Biji berminyak	2,7	1,1	2,7	1,9	1,6	0,8	2,5	0,9	2,5	1,3
6. Kacang ² an	2,2	2,8	2,4	2,1	2,3	0,9	2,7	1,8	2,4	2,1
7. Gula	0,9	1,0	0,5	0,6	0,8	0,5	0,9	0,6	0,8	0,7
8. Sayuran	1,9	0,8	1,5	0,9	1,6	0,9	2,5	2,1	1,9	1,1
9. Buah	1,6	1,7	0,7	2,0	2,1	1,8	1,9	1,8	1,5	1,8
10. Lainnya	0,7	0,3	0,2	0,7	0,4	0,3	1,1	0,2	0,6	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Gambar 2. Perubahan Tingkat Konsumsi Protein Rumah Tangga Perdesaan Patanas di Desa Lahan Kering Menurut Komoditas Basis, 2008–2011 (kkal/kapita/hari)

Selama 2008–2011 konsumsi protein menurun relatif kecil dari 40,6 gram menurun menjadi 39,9 gram atau turun sekitar 1,9%. Bila dilihat untuk masing-masing tipe desa, tampak bahwa desa dengan basis kedelai sudah mencapai standar kecukupan (54,6 gram) pada tahun 2008, namun pada tahun 2011 menurun menjadi rata-rata 39,9% atau sekitar 27%. Penurunan yang cukup besar tersebut terjadi karena adanya perubahan pola makan. Dengan konsumsi beras yang cukup tinggi, maka beras dapat sebagai sumber energi (kalori) dan protein sekaligus, mengingat kandungan protein dalam beras cukup tinggi dibanding komoditas pangan lainnya, yakni sebesar 7 gram protein dalam 100 gram beras (Hardinsyah *et al.*, 2014). Selain beras, konsumsi protein utama rumah tangga di lokasi contoh adalah berasal dari tahu dan tempe. Pangan ini umumnya relatif sering dikonsumsi dengan jumlah cukup, selain murah dan mudah diperoleh di perdesaan.

Beberapa hasil kajian (Harper *et al.*, 1985; Setiawan, 2009) menunjukkan bahwa proporsi bahan makanan yang biasa di konsumsi di Indonesia serta negara-negara Asia lainnya memperlihatkan bahwa kebanyakan penduduk mengonsumsi protein yang berasal dari nabati atau tumbuhan. Hal ini wajar mengingat pangan sumber protein nabati relatif lebih murah dibanding pangan hewani. Pangan hewani yang relatif sering dikonsumsi adalah ikan dan hasil olahannya, biasanya berupa ikan pindang (“cue”) atau ikan kering/asin. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak geografis. Biasanya yang lebih dekat pantai cenderung banyak mengonsumsi ikan laut dan hasil olahannya, sebaliknya rumah tangga contoh umumnya mengonsumsi ikan segar maupun awetan.

DINAMIKA KERAGAMAN KONSUMSI PANGAN

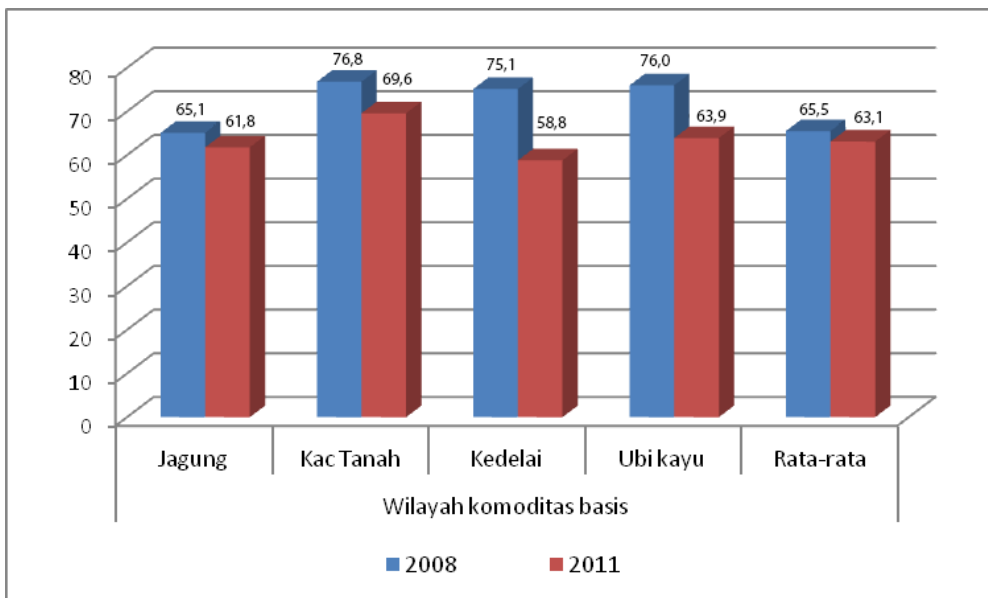
Pemenuhan kebutuhan pangan secara sederhana ditunjukkan oleh ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, berimbang, bermutu, dan aman. Secara kuantitas dapat dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein yang telah dibahas di bab sebelumnya. Sementara itu, secara kualitas pemenuhan kebutuhan pangan dapat didekati dengan skor PPH.

PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa (Depkes, 2009). Bila pola konsumsi pangan sudah mendekati skor nilai PPH ideal (skor PPH = 100), setidaknya sudah memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi yang dianjurkan. Selain itu, menurut Hardinsyah *et al.* (2014), PPH dapat dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan dari segi keragaman dan mutu gizi penyediaan dan konsumsi pangan.

Berdasarkan kontribusi energi masing-masing kelompok pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga contoh, maka dapat disusun skor PPH rata-rata untuk rumah tangga contoh masing-masing desa komoditas basis. Nilai skor rata-

rata rumah tangga di masing-masing desa komoditas basis dapat diilustrasikan pada Gambar 3. Pada tahun 2008 skor PPH berkisar 65,1 pada rumah tangga di desa berbasis jagung dan tertinggi di desa berbasis kacang tanah dengan skor PPH 76,8. Kondisi berbeda pada tahun 2011, skor PPH terendah di desa berbasis kedelai (nilai skor PPH 58,8) dan tertinggi berbasis kacang tanah dengan nilai skor 69,6.

Tampak bahwa rata-rata skor PPH di lokasi contoh menurun dari 65,5 pada tahun 2008, menurun menjadi 63,1 pada tahun 2011. Nilai skor tersebut lebih rendah dibanding rata-rata nasional pada tahun yang sama. Secara umum dapat dikemukakan bahwa skor PPH di seluruh desa contoh menurun selama 2008–2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan rumah tangga contoh semakin menurun. Menurunnya skor PPH antara lain karena tingkat konsumsi sereal semakin tinggi melebihi standar yang dianjurkan. Dalam bahasan sebelumnya disebutkan bahwa sumber energi utama dominan berasal dari pangan sumber karbohidrat terutama beras. Temuan ini searah dengan kondisi tingkat nasional. Beberapa kajian (Rachman dan Purwantini, 2014; Ariningsih, 2009 dan Rachman, 2014) menunjukkan bahwa pola pangan masyarakat Indonesia masih dominan pada pangan sumber karbohidrat, sedangkan sumber protein utamanya masih dominan protein nabati.



Gambar 3. Perubahan Skor PPH Rumah Tangga Perdesaan Patanas di Desa Lahan Kering menurut Komoditas Basis, 2008–2011

Berdasarkan fenomena tersebut, tidak ada pola yang jelas terjadinya perubahan dari nilai skor PPH, begitu pula bila dikaitkan dengan tingkat konsumsi energi, Namun, kasus di desa berbasis kacang tanah ada kecenderungan bahwa tingginya tingkat konsumsi energi juga berpengaruh terhadap tingginya nilai skor PPH, namun tidak selalu berlaku untuk desa lainnya. Sebagai ilustrasi, tingkat konsumsi energi pada rumah tangga di desa ubi kayu lebih rendah dibanding

dengan rumah tangga di desa berbasis kedelai, tetapi nilai skor PPH sebaliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsumsi pangan sudah tercukupi secara kuantitas belum tentu secara kualitas lebih baik, karena konsumsi pangan yang berkualitas biasanya secara kuantitas juga mencukupi. Seperti yang dikemukakan Hardinsyah *et al.* (2014), bahwa konsumsi pangan yang berkualitas adalah konsumsi pangan yang beraneka ragam, memenuhi kecukupan gizi, dan dikonsumsi secara proporsional (berimbang). Lebih lanjut dikemukakan bahwa secara nasional masih terdapat masalah ketimpangan dan ketidakseimbangan konsumsi pangan penduduk Indonesia, walaupun program perbaikan konsumsi pangan telah lama dilakukan pemerintah Indonesia.

Untuk melihat kesenjangan dari masing-masing kelompok pangan mana yang masih perlu ditingkatkan dan diturunkan, perlu dibandingkan antara konsumsi riil dan konsumsi harapan sesuai standar anjuran berdasarkan kontribusi terhadap konsumsi energi, tanda negatif berarti masih ada defisit untuk energi pada kelompok pangan tersebut, dan sebaliknya. Tabel 6 menyajikan kesenjangan kontribusi (% AKG) konsumsi pangan aktual dan harapan pada rumah tangga perdesaan lahan kering berbasis palawija. Tampak masih adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan konsumsi pangan pada rumah tangga di perdesaan lahan kering berbasis palawija.

Tabel 6. Kesenjangan Kontribusi (% AKG) Konsumsi Pangan Riil dan Harapan pada Rumah Tangga Perdesaan Lahan Kering Berbasis Palawija, 2008–2011 (%)

Kelompok Pangan	Komoditas Basis									
	Jagung		Kacang Tanah		Kedelai		Ubi kayu		Rata-Rata	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
1.Padi ² an	1,2	17,1	-1,0	6,5	18,3	22,1	15,5	22,8	5,9	15,7
2.Umbi ² an	19,3	-0,4	27,2	11,2	-5,8	-4,5	-3,7	-5,8	13,5	1,5
3.Pangan hewani	-9,8	-9,3	-10,7	-9,1	-3,5	-8,6	-8,5	-9,1	-9,0	-9,1
4.Minyak dan lemak	1,2	7,0	-1,6	5,3	4,2	7,9	7,2	6,8	2,0	6,6
5.Buah/biji berminyak	-0,3	-1,9	-0,3	-1,1	-1,4	-2,2	-0,5	-2,1	-0,5	-1,7
6.Kacang ² an	-2,8	-2,2	-2,6	-2,9	-2,7	-4,1	-2,3	-3,2	-2,6	-3,0
7.Gula	-4,1	-4,0	-4,5	-4,4	-4,2	-4,5	-4,1	-4,4	-4,2	-4,3
8.Sayur dan buah	-2,4	-3,6	-1,7	-3,2	-2,4	-3,3	-1,7	-2,1	-2,7	-3,1
9.Lain-lain	-2,3	-2,7	-2,8	-2,3	-2,7	-2,7	-1,9	-2,8	-2,4	-2,6

Indikasi tersebut antara lain ditandai dengan (1) masih tingginya konsumsi sereal terutama beras, rata-rata terdapat kelebihan konsumsi 5,9% pada tahun 2008 dan 15,7% pada tahun 2011; (2) masih rendahnya konsumsi pangan hewani, rata-rata defisit 9%, selama 2008–2011 defisit energi dari pangan tersebut relatif tidak berubah, namun untuk rumah tangga di desa berbasis kedelai dan ubi kayu, defisitnya makin besar karena pangan hewani relatif mahal harganya; (3) masih rendahnya konsumsi sayur dan buah; dan 4) masih tingginya konsumsi lemak dan

minyak dan konsumsi lemak/minyak cenderung makin berlebih. Kelebihan dan defisit kontribusi energi menunjukkan kesenjangan konsumsi energi.

Rata-rata konsumsi sayur relatif sering dibanding buah, sehingga peluang untuk meningkatkan konsumsi buah relatif besar, namun terkendala karena harga buah relatif mahal dan umumnya bersifat musiman. Dengan demikian, disarankan untuk mengonsumsi buah seperti pisang dan pepaya yang tidak tergantung pada musim serta relatif mudah diakses. Sementara, untuk meningkatkan konsumsi sayur dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk budi daya tanaman sayuran. Oleh karena itu, jenis sayur yang mudah dibudidayakan seperti bayam, daun ubi kayu, kacang panjang dan sebagainya diharapkan dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi sayur sehari-hari.

KESIMPULAN

Konsumsi pangan pada rumah tangga di desa berbasis palawija secara umum masih belum mencukupi kebutuhan standar minimal dilihat dari konsumsi energi dan proteinnya. Konsumsi beras masih cukup tinggi dan cenderung meningkat selama 2008–2011. Menurunnya tingkat konsumsi pangan dan belum tercapainya standar kecukupan energi dan protein tidak semata-mata karena turunnya kesejahteraan, namun lebih diartikan bahwa sebagian besar pendapatannya masih digunakan untuk belanja pangan.

Selain dari sisi kuantitas kurang, secara kualitas konsumsi pangan juga masih belum memenuhi standar gizi yang dianjurkan. Hal tersebut tampak dari indikator skor PPH yang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Walaupun antartipe desa berbeda, secara rata-rata keragaman pangan di desa lahan kering berbasis palawija masih rendah (skor PPH <70). Konsumsi energi dari beberapa kelompok pangan sereal lebih (terutama berasal dari beras), sebaliknya untuk pangan hewani, buah, dan sayur masih rendah. Oleh karena itu, kelompok pangan sereal perlu dikurangi. Hal ini juga mendukung program Pemerintah dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan mengarah ke diversifikasi pangan. Dengan demikian, perlu ditingkatkan lagi konsumsi pangan lokal yang sebelumnya pernah eksis di beberapa desa contoh dan perlu digalakkan lagi, antara lain dengan sosialisasi terhadap para ibu rumah tangga melalui "dasa wisma" yang umumnya sudah terbentuk di perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. 2010. Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan. *Gizi Indonesia* 33(1):20–28.
- Arifin, M. dan P. Simatupang. 1988. Pola Konsumsi dan Kecukupan Kalori dan Protein di Perdesaan Sumatera Barat. *Dalam* Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Perdesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.

- Ariningsih, E. 2009. Konsumsi dan Kecukupan Energi dan Protein Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia: Analisis Data Susenas 1999, 2002, dan 2005. *Dalam* K. Suradisastira, Y. Yusdja, dan A.R. Nurmanaf (Eds.). *Prosiding Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. hlm. 233–247.
- Baliwati, Y.F. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. *Rencana Aksi Pangan dan Gizi 2011–2016*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Buku I. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. *Konsep Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga*. http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=05 (27 Juni 2015)
- [Depkes] Departemen Kesehatan. 2005. *Data Komposisi Bahan Makanan*. Departemen Kesehatan. Jakarta.
- [Depkes] Departemen Kesehatan. 2009. *Sistem Kesehatan Nasional*. Departemen Kesehatan. Jakarta.
- Hardinsyah, G.K. Rana, M. Ariani, dan Anggita. 2014. Analisis Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan. *Dalam* M. Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster*. LIPI Press. Jakarta. hlm. 551–573.
- Harper, J.L., B.J. Deaton, and J.A. Driskel. 1985. *Food, Nutrition and Agriculture: A Text*. UI Press. Jakarta.
- Ilham, N. 2001. *Analisis Penawaran dan Permintaan Daging Sapi di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Khomsan, A. 2008. *Rawan Pangan, Rawan Gizi*. *Harian Kompas*, 16 Januari 2008. <http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Rawan%20Pangan.pdf> (14 April 2010).
- Mauludiyani, A.V.R. dan M. Ariani. 2014. *Dinamika Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Indonesia*. *Dalam* M. Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster*. LIPI Press. Jakarta. hlm. 623–636.
- Rachman, H.P.S. dan T.B. Purwantini. 2014. *Dinamika Konsumsi Beras dan Prospeknya bagi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Status Gizi Rumahtangga di Indonesia*. *Dalam* *Ekonomi Perberasan Indonesia*. PERHEPI. Jakarta.
- Rachman, H.P.S. dan Supriyati. 2004. *Pola Konsumsi dan Pengeluaran Rumahtangga: Kasus Rumahtangga di Pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan*. *Agro-Ekonomika* 2(34):17–44.
- Marwanti, S. 2002. *Pola Pengeluaran Untuk Konsumsi Pangan Gizi Penduduk Indonesia (Analisis Data Susenas 1999)*. *Carakatani XVII Nomor 2*, Oktober 2002.
- Nurhadi, S. 2000. *Pengantar Ekonomi*. UI Press. Jakarta.
- Purwantini, T. B dan H. P. Saliem. 2011. *Peningkatan Partisipasi dan Konsumsi Ubi Jalar: Langkah Strategis Pengembangan Diversifikasi Pangan*. *Dalam* *Prosiding Era Baru Pembangunan Pertanian: Strategi Mengatasi Masalah Pangan, Bioenergi dan*

Perubahan Iklim. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. hlm 129–149

- Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan. 2006. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan. Jakarta.
- Purwoto, A., IW. Rusastra, B. Winarso, T.B. Purwanti, A.K. Zakaria, T. Nurasa, D. Hidayat, C. Muslim, dan C.R. Adawiyah. 2011. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Desa Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachman, H.P.S. 2014. Perkembangan Konsumsi Pangan Tinjauan dari Aspek Sosial Ekonomi. *Dalam* M. Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster. LIPI Press. Jakarta. hlm. 493–408.
- Rachman, H.P.S dan Wahida. 1998. Dinamika Pola Pengeluaran Dan Konsumsi Rumah tangga Serta Prospek Permintaan Pangan dalam Dinamika Ekonomi Perdesaan: Perubahan Struktur Pendapatan, Ketenagakerjaan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga. Kerjasama Puslit Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.
- Rachman, H.P.S. 2001. Kajian Pola Konsumsi dan Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia. Disertasi. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soedjana, T.D. 2013. Partisipasi Konsumsi Sebagai Alat Ukur Status Ketahanan Pangan Daging. *Wartazoa* 23(4):166–175.
- Suryana, A., B. Rachman, dan P.U. Hadi. 1988. Pola Pengeluaran Untuk Konsumsi di Perdesaan Jawa Barat. *Dalam* Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Perdesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Yudaningrum, W.A. 2011. Analisis Hubungan Proporsi Pengeluaran dan Konsumsi Pangan dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Kulon Progo. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

DINAMIKA POLA DAN KERAGAMAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PERDESAAN PADA AGROEKOSISTEM LAHAN KERING BERBASIS PERKEBUNAN

Tri Bastuti Purwantini

PENDAHULUAN

Banyak kemajuan telah dicapai dalam pembangunan pangan dan gizi di Indonesia, di antaranya meliputi perbaikan gizi masyarakat dan aksesibilitas pangan (Bappenas, 2011). Menurut Khomsan (2008), ketahanan pangan rumah tangga diwujudkan oleh kemampuan penduduknya mengakses dan mengonsumsi makanan sesuai syarat gizi untuk mencapai derajat hidup sehat.

Sementara itu, pangan dapat dikatakan sebagai produk budaya karena pangan merupakan hasil adaptasi aktif antara manusia/masyarakat dengan lingkungannya, sehingga perwujudan ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya dan kearifan lokal, sehingga ia dapat menjadi media dalam mengembangkan budaya dan peradaban bangsa (Bappenas, 2011). Tercapainya ketahanan pangan wilayah tidak menjamin tercapainya ketahanan pangan rumah tangga (Purwantini *et al.*, 2005). Hasil kajian Rachman dan Supriyati (2004) menunjukkan bahwa pola konsumsi pengeluaran rumah tangga berbeda antaragroekosistem. Di antara faktor yang berpengaruh adalah luas penguasaan lahan dan pendapatan, namun secara umum pola konsumsi pangan hampir sama antaragroekosistem.

Dalam Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan (Pasal 59) disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui (a) penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; (b) penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan (c) pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman. Perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa (Bappenas, 2011).

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap penduduk tidak hanya berhubungan dengan konsumsi pangan, melainkan juga memerlukan konsumsi nonpangan, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, dan keperluan rumah tangga lainnya. Bila pengeluaran sebagai proksi pendapatan, secara ekonomi pangsa pengeluaran pangan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan penduduk. Menurut Hukum Engel, semakin tinggi pengeluaran rumah tangga maka pangsa pengeluaran untuk pangan akan semakin kecil, dengan asumsi selera rumah tangga tetap. Bila

pendapatan (proksi pengeluaran) dijadikan indikator kesejahteraan, maka semakin sejahtera rumah tangga, pangsa pengeluaran untuk pangan akan semakin kecil. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin menganalisis dinamika pola konsumsi pangan dan nonpangan rumah tangga, tingkat konsumsi energi dan protein, serta melihat keragaman konsumsi pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran

Pembangunan yang telah dilakukan secara berkesinambungan akan berdampak terhadap perubahan ekonomi perdesaan yang berkontribusi pada perubahan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan (Purwoto *et al.*, 2011). Lebih lanjut dikemukakan bahwa sasaran akhir pembangunan pertanian dan perdesaan adalah kesejahteraan petani. Kondisi ini dapat dicerminkan melalui indikator langsung dan tidak langsung. Indikator langsung dari sisi konsumsi dicerminkan dari pangsa pengeluaran pangan dan kecukupan pangan dan gizi.

Setiap rumah tangga atau kelompok rumah tangga memiliki pola atau struktur konsumsi dan pengeluaran yang berbeda. Sehubungan dengan itu, rumah tangga akan mengalokasikan pengeluaran pangan dan nonpangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dalam pengambilan keputusan rumah tangga, alokasi pengeluaran untuk kebutuhan komoditas yang akan dikonsumsi dibatasi oleh tingkat pendapatan yang dimiliki rumah tangga (Rachman dan Supriyati, 2004). Hukum Engel mengemukakan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka pangsa pengeluaran pangan cenderung meningkat, dengan asumsi bahwa selera tetap. Namun demikian, beberapa data empiris (Susilowati *et al.*, 2010) menunjukkan bahwa selera masyarakat cenderung berubah dengan meningkatnya pendapatan, sehingga pada kondisi tertentu peningkatan pendapatan masih dialokasikan untuk pengeluaran pangan atau untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Konsumsi pangan penting bagi setiap orang untuk mewujudkan tubuh yang sehat, cerdas, dan kuat. Warsilah (2014), mengungkapkan bahwa untuk menjaga kesehatan dan mengoptimalkan kecerdasan serta produktivitas penduduk perlu diwujudkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi semua orang sepanjang waktu sesuai dengan potensi yang ada. Menurut Hardinsyah *et al.* (2014), untuk mengevaluasi konsumsi pangan dapat dilakukan melalui dua aspek, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif dapat dinilai dari pemenuhan kebutuhan pangan dari pemenuhan kebutuhan energi dan proteinnya. Untuk itu, nilai kecukupan energi dapat dicerminkan dari capaian terhadap Angka Kecukupan Energi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang mengacu pada standar kecukupan berdasarkan rekomendasi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VII tahun 2004.

Secara kualitatif, konsumsi pangan harus seimbang, beragam, dan aman dikonsumsi. Seimbang dalam arti memenuhi gizi seimbang, terpenuhi untuk

tenaga/energi, zat pengatur dalam hal ini capaian kecukupan protein dan zat pengatur (vitamin dan mineral). Kebutuhan akan semua zat gizi yang diperlukan tubuh tidak dapat terpenuhi oleh satu jenis pangan saja, oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan pangan harus ditunjukkan oleh ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, berimbang, bermutu, dan aman. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan dari segi keragaman dan mutu gizi penyediaan dan konsumsi pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH). Kajian Hardinsyah *et al.* (2014) menunjukkan bahwa gambaran kuantitas dan kualitas konsumsi pangan nasional dan wilayah belum menunjukkan pencapaian terhadap standar kecukupan gizi yang dianjurkan. Hal ini terlihat dari rendahnya konsumsi energi, protein, serta mutu konsumsi pangan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan yang masih jauh di bawah standar ideal (100). Dengan kerangka pikir di atas, tulisan ini mencoba mendeskripsikan pola pengeluaran dan konsumsi pangan rumah tangga di perdesaan lahan kering berbasis perkebunan, ditinjau dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, dikaitkan dengan capaian kecukupan gizi dan keragaman konsumsi pangan, sehingga diharapkan dengan mengetahui kinerja konsumsi rumah tangga, akan lebih cepat penanganan dalam perbaikan konsumsi rumah tangga tersebut.

Data dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data konsumsi yang merupakan bagian dari data Panel Petani Nasional (Patanas) yang dikumpulkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) tahun 2009 dan 2012, dengan fokus kajian di agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan. Lokasi contoh terdiri dari 8 desa yang menyebar di 7 kabupaten yang tercakup dalam 4 provinsi (Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur).

Data yang digunakan adalah data pengeluaran dan konsumsi pangan: pangan sumber karbohidrat, pangan hewani, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak+lemak (termasuk biji berminyak), bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, dan makanan/minuman jadi dengan referensi waktu seminggu yang lalu dan pengeluaran bukan pangan yang terdiri dari bahan bakar, listrik dan air, komunikasi dan telekomunikasi, pendidikan anak, perawatan kesehatan, sandang, dan pengeluaran lainnya dengan referensi satu bulan yang lalu atau satu tahun yang lalu. Data konsumsi pangan tersebut dikonversi ke zat gizi energi dan protein dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan (2005).

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitik melalui tabel-tabel analisis dan grafik. Untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga berdasarkan aspek kuantitas, data dianalisis menggunakan pendekatan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang terdiri dari Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP). Standar kecukupan berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VII tahun 2004 adalah 2.000 kkal/kapita/hari untuk AKE dan 52 gram/kapita/hari untuk AKP.

Untuk menghitung Pola Pangan Harapan digunakan acuan susunan Pola Pangan Harapan Nasional. Analisis yang mengacu PPH dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi pangan berdasarkan aspek kualitas. Dasar penghitungan skor PPH menggunakan angka kecukupan energi 2.000 kkal. PPH merupakan konsep gizi beragam dan seimbang yang didasarkan pada konsep Triguna Makanan. Keseimbangan jumlah antarkelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi (Triguna Makanan yang Beragam, dan Bergizi Seimbang). PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi sembilan kelompok pangan, yaitu kelompok (a) padi-padian, (b) umbi-umbian, (c) pangan hewani, (d) minyak dan lemak, (e) buah dan biji berminyak, (f) kacang-kacangan, (g) gula, (h) sayuran dan buah-buahan, (i) lain-lain. Setiap kelompok pangan diberi bobot, kriteria, dan besarnya bobot seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

No.	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan				Skor PPH
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Padi-padian	275	1.000	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	100	120	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan hewani	150	240	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan lemak	20	200	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/biji berminyak	10	60	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	35	100	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	30	100	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan buah	250	120	6,0	5,0	30,0
9.	Lain-lain	-	60	3,0	0,0	0,0
Jumlah			2.000	100,0	-	100,0

Sumber: Harmonisasi PPH Nasional PPKP-BKP dan GMSK-IPB (2002) dalam BKP (2013)

Keterangan:

- % AKG (kolom 5) = $\frac{\text{kolom 4}}{1.000 \text{ kkal}} \times 100 \%$

- Skor pangan (kolom 8) = (kolom 7). Hasil perkalian dari masing-masing kelompok pangan dijumlahkan sehingga diperoleh total skor 100.

- Penetapan rating atau bobot (kolom 7)

$$W = \frac{\sum Y}{AK}$$

di mana: W = nilai skor PPH

Y = skor PPH kelompok pangan

PENGELUARAN PANGAN DAN NONPANGAN

Informasi tentang struktur pengeluaran rumah tangga diperlukan untuk melihat sejauh mana rumah tangga tersebut mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi. Kebutuhan konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu konsumsi pangan dan bukan pangan. Dengan demikian, pada tingkat pendapatan tertentu, rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Secara alamiah kuantitas pangan yang dibutuhkan seseorang akan mencapai titik jenuh, sementara kebutuhan bukan pangan, termasuk kualitas pangan tidak terbatas dengan cara yang sama. Oleh karena itu, besaran pendapatan (yang diproksi dengan pengeluaran total) yang dibelanjakan untuk pangan dari suatu rumah tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Pengeluaran pangan >60% menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tergolong miskin (Mauludiyani dan Ariani, 2014). Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengeluaran rumah tangga cenderung mengalami perubahan pada jangka waktu tertentu. Kajian Purwantini *et al.* (2005) yang menggunakan pangsa pengeluaran pangan sebagai salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan bahwa semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga berarti semakin tidak tahan pangan

Pada Tabel 2 disajikan pangsa pengeluaran pangan di desa Patanas pada dua titik waktu (2009 dan 2012). Terlihat bahwa pangsa pengeluaran pangan secara agregat menurun, walau sangat kecil (1%). Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan secara agregat meningkat. Hampir seluruh desa contoh menunjukkan hal demikian, kecuali kasus di Desa Matra Manunggal (Kabupaten Muaro Jambi) yang menunjukkan pola yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan sebagian besar masih diperuntukkan untuk belanja pangan. Selain itu, karena preferensi rumah tangga berpengaruh dalam memilih dan mengonsumsi pangan, baik kuantitas maupun kualitas tidak semata-mata hanya pertimbangan pendapatan, tetapi juga selera dan sosial budaya setempat.

Dari sisi pendapatan/pengeluaran total secara absolut rata-rata meningkat (Tabel 3). Demikian halnya secara riil setara beras, pada umumnya meningkat, dengan laju peningkatan bervariasi antardesa (5–49%), sedangkan antarwilayah basis komoditas berkisar 13–19%. Secara agregat selama 2009–2012 pengeluaran total meningkat 37,4%, sedangkan secara riil rata-rata hanya meningkat 5,2%. Ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan rumah tangga tidak bisa mengimbangi naiknya inflasi.

Bila dilihat perkembangan pangsa pengeluaran pangan antarwilayah basis komoditas maka di wilayah basis kelapa sawit rata-rata paling tinggi, sementara total pengeluaran juga paling besar dibanding wilayah basis komoditas karet, kakao dan tebu. Fenomena yang ditemukan di wilayah basis kelapa sawit berlawanan dengan hukum Engel, ini disebabkan karena kondisi sosial masyarakat yang masih konsumtif dalam konsumsi pangan (terutama untuk makanan/minuman jadi) dan kurangnya pengetahuan tentang gizi pangan terutama bagi ibu rumah tangga dalam

menyiapkan dan menyajikan makanan keluarga. Namun, secara agregat menunjukkan bahwa selama 2009–2012 kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian menunjukkan perbaikan, baik dilihat dari sisi peningkatan pengeluaran total riil maupun dari sisi pangsa pengeluaran pangan.

Tabel 2. Perubahan Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Patanas di Lahan Kering Perkebunan, 2009–2012

Komoditas Basis/Desa	Pangsa Pengeluaran Pangan (%)		
	2009	2012	Perubahan (%)
<u>Karet</u>			
1. Penerokan	63,99	62,50	-2,3
2. Semoncol	66,61	64,37	-3,4
Subtotal	65,17	63,36	-2,8
<u>Kakao</u>			
1. Pinrang	67,33	62,75	-6,8
2. Luwu	60,83	60,72	-0,2
Subtotal	62,27	61,29	-1,6
<u>Kelapa sawit</u>			
1. Matra Manunggal	62,49	67,63	8,2
2. Hibun	68,08	62,34	-8,4
Subtotal	65,16	65,01	-0,2
<u>Tebu</u>			
1. Rejosari	63,17	61,26	-3,0
2. Kebonan	61,10	63,29	3,6
Subtotal	62,26	62,07	-0,3
Rataan	63,81	63,16	-1,0

Struktur pengeluaran pangan menurut kelompok pangan disajikan pada Tabel 4. Tampak bahwa selama 2009–2012 terjadi pergeseran nilai pangsa antarkelompok pangan. Pangan sumber karbohidrat yang sebagian besar merupakan pangan pokok, pada umumnya secara konsisten pengeluaran kelompok tersebut menurun. Pengecualian terjadi di wilayah basis tebu di mana pangsa pengeluaran pangan sumber karbohidrat meningkat. Secara agregat dapat dikatakan bahwa pengeluaran pangan dominan adalah untuk pangan sumber karbohidrat. Hal ini wajar mengingat pangan tersebut umumnya merupakan pangan pokok yang dikonsumsi dalam jumlah relatif banyak, sehingga pengeluarannya juga besar.

Pangsa terbesar kedua adalah pengeluaran untuk konsumsi pangan hewani, yang secara agregat meningkat 17%. Demikian pula halnya di masing-masing wilayah basis komoditas pengeluaran untuk konsumsi pangan hewani menunjukkan

peningkatan. Jenis pangan tersebut biasanya mempunyai harga relatif mahal dibandingkan dengan pangan lainnya sehingga walaupun dikonsumsi dalam jumlah relatif kecil, nilai pengeluarannya rata-rata lebih besar karena harganya yang mahal. Bahkan, pangsa pengeluaran pangan hewani lebih besar dibanding rata-rata pengeluaran pangan sumber karbohidrat pada tahun 2012, kecuali di wilayah basis tebu pangsa pengeluaran untuk pangan hewani relatif lebih kecil dibanding pangsa pengeluaran untuk pangan sumber karbohidrat. Meningkatnya pangsa pengeluaran untuk pangan hewani searah dengan kondisi makro nasional seperti yang ditunjukkan dalam kajian Mauludyani dan Ariani (2012) dengan menggunakan data Susenas 1999–2010, bahwa pengeluaran pangan sumber protein hewani mengalami peningkatan di perdesaan, namun mengalami penurunan di perkotaan.

Tabel 3. Perubahan Pengeluaran Rumah Tangga Patanas di Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan, 2009–2012

Basis Komoditas/ Desa	Pengeluaran Total (Rp/kap/bulan)			Pengeluaran Total (kg setara beras) ^a		
	2009	2012	Perubahan (%)	2009	2012	Perubahan (%)
<u>Karet</u>						
1. Penerokan	404.488	571.494	41,3	62,2	67,2	8,0
2. Semoncol	331.697	484.697	46,1	47,4	60,6	27,9
Subtotal	368.093	528.095	43,5	54,8	63,9	16,6
<u>Kakao</u>						
1. Pinrang	173.290	260.089	50,1	38,5	37,2	-3,5
2. Luwu	580.321	653.114	12,5	116,1	93,3	-19,6
Subtotal	381.893	459.089	20,2	77,3	65,2	-15,6
<u>Kelapa Sawit</u>						
1. Matra Manunggal	485.544	717.609	47,8	80,9	79,7	-1,5
2. Hibun	507.766	764.053	50,5	72,5	95,5	31,7
Subtotal	495.914	739.877	49,2	76,7	87,6	14,2
<u>Tebu</u>						
1. Rejosari	395.455	568.087	43,7	79,1	71,0	-10,2
2. Kebonan	307.255	383.124	24,7	59,1	47,9	-18,9
Subtotal	351.355	475.605	35,4	69,1	59,5	-14,0
Rataan wilayah basis perkebunan	397.780	546.715	37,4	66,9	70,3	5,2

Keterangan: ^a Modus harga beras di masing-masing desa contoh

Pengeluaran untuk kelompok pangan sayuran dan buah secara agregat sedikit mengalami pergeseran dan cenderung meningkat selama 2009–2012, sementara pangsa pengeluaran untuk bumbu-bumbu menurun tajam. Seperti diketahui bahwa keperluan bumbu-bumbu relatif tetap dan harga juga tidak

Tabel 4. Dinamika Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Kelompok Pangan di Perdesaan Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan, 2009 dan 2012

Kelompok Pangan	Komoditas Basis/Pangsa terhadap Total Pengeluaran (%)														
	Karet			Kakao			Sawit			Tebu			Rataan		
	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)
1. Sumber karbohidrat	27,5	20,5	-34,0	21,0	21,1	0,7	20,2	17,4	-15,9	22,4	23,7	5,8	22,6	20,3	-11,2
2. Pangan hewani	19,6	26,1	24,6	24,6	27,9	12,0	23,4	29,2	20,1	14,1	15,5	8,8	20,7	25,2	17,6
3. Sayur-sayuran	11,3	13,6	16,6	9,2	9,4	1,7	14,2	12,0	-19,2	11,1	12,0	7,4	11,7	11,8	1,4
4. Kacang-kacangan	2,7	3,3	16,3	2,4	2,3	-4,7	2,1	2,6	19,8	7,4	5,7	-29,7	3,5	3,4	-2,9
5. Buah-buahan	3,8	5,3	28,4	4,3	3,8	-11,8	5,2	5,3	1,5	5,4	4,8	-11,2	4,7	4,9	4,3
6. Minyak dan lemak	5,4	4,5	-20,9	4,1	3,7	-13,2	3,6	3,7	4,3	5,0	4,5	-11,9	4,5	4,1	-9,9
7. Bahan minuman	7,8	7,2	-8,4	6,6	6,4	-2,3	6,3	5,0	-24,7	8,8	7,1	-23,1	7,2	6,3	-14,9
8. Bumbu-bumbuan	3,5	2,0	-72,1	3,7	2,5	-46,8	1,9	1,6	-15,9	2,8	2,3	-22,7	2,9	2,1	-41,3
9. Konsumsi pangan lain	4,8	4,8	1,7	4,9	4,9	-0,2	3,3	2,6	-25,2	6,0	5,6	-7,7	4,6	4,3	-7,7
10. Makanan dan minuman jadi	4,0	3,8	-4,7	7,2	7,2	-0,6	5,3	5,6	6,0	4,7	6,4	25,9	5,3	5,7	6,2
11. Tembakau dan sirih	9,5	8,9	-6,7	12,0	10,7	-11,6	14,6	14,8	1,5	12,4	12,5	0,8	12,3	12,0	-2,3
Total	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	

signifikan meningkat, sedangkan pengeluaran pangan lainnya meningkat, sehingga pangsa pengeluaran untuk bumbu menurun. Secara keseluruhan lokasi contoh, pangsa pengeluaran untuk rokok dan tembakau atau sejenisnya masih cukup tinggi, walaupun secara agregat pangsa pengeluaran pangan kelompok tersebut cenderung menurun, sementara yang dijumpai di wilayah basis kelapa sawit dan tebu masih menunjukkan peningkatan, walaupun kecil. Kondisi ini terjadi terutama karena semakin mahalnya harga rokok dan sejenisnya, sedangkan volume atau rokok/tembakau relatif tidak berkurang.

Pengeluaran untuk makanan jadi semakin meningkat, yang ditunjukkan oleh semakin tingginya pangsa pengeluaran pangan tersebut. Kondisi ini searah dengan data makro (Mauludyani dan Ariani, 2014). Pola hidup dan pola konsumsi masyarakat sudah bergeser, menurut Mauludyani dan Ariani (2014), hal ini didukung oleh tumbuhnya sektor informal yang menjual berbagai jenis makanan/minuman jadi dengan harga yang terjangkau dan mudah diperoleh. Selain itu, banyaknya wanita yang bekerja menyebabkan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga sehari-hari diperoleh melalui pembelian dari restoran/warung makan.

Pengeluaran nonpangan meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan. Peningkatan ini bervariasi antardesa contoh dan kelompok nonpangan (Tabel 5). Pengeluaran nonpangan yang utama antara lain adalah untuk bahan bakar, dalam hal ini adalah bahan bakar untuk memasak, untuk kendaraan, maupun untuk penerangan. Pengeluaran untuk kelompok tersebut mencapai sekitar 20,8% pada tahun 2012. Proporsi ini lebih kecil dibanding dengan kondisi pada tahun 2009 (26,6%). Pangsa pengeluaran nonpangan yang relatif besar lainnya adalah untuk pendidikan dan kesehatan.

Secara rinci, tampak bahwa rataan pangsa pengeluaran untuk pendidikan cukup besar dan pangasanya pada tahun 2012 lebih besar dibanding kondisi 2009. Walaupun terdapat keringanan biaya dengan sekolah gratis untuk sekolah dasar sampai tingkat SMP, namun biaya pendukung seperti transpor dan uang saku anak relatif besar. Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam kualitas sumber daya manusia, di mana semakin tinggi pendidikan pada umumnya kualitas sumber daya manusia akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa para rumah tangga contoh telah menyadari bahwa pendidikan adalah unsur penting yang dimungkinkan sebagai sarana untuk merubah kehidupan seseorang.

Peningkatan pengeluaran untuk komunikasi semakin tinggi, terutama untuk pengeluaran pulsa HP dan nomor perdana. Dengan semakin berkembangnya komunikasi dan media sosial melalui HP, terjadi perubahan budaya masyarakat yang cenderung mengikuti tren, sehingga kebutuhan akan komunikasi tersebut semakin tinggi yang konsekuensinya biaya juga semakin besar.

Tabel 5. Dinamika Pangsa Pengeluaran Nonpangan Menurut Kelompok Pengeluaran di Perdesaan Lahan Kering Berbasis Perkebunan, 2009 dan 2012

Lokasi/ Komoditas Basis	Tahun	Pangsa Pengeluaran Nonpangan (%)							Pengeluaran Nonpangan (Rp000)
		Bahan Bakar	Komu- nikasi	Pendi- dikan	Kese- hatan	San- dang	Sosial	Lain- nya	
1. Karet	2009	26,9	4,3	31,9	16,2	12,5	5,4	2,9	1.538,4
	2012	23,3	8,8	33,6	12,7	9,9	6,8	13,0	2.322,1
	Perub (%)	-13,5	106,3	5,1	-21,5	-20,7	27,0	350,0	50,9
2. Kakao	2009	22,2	11,8	31,6	14,5	10,1	6,1	3,6	1.729,1
	2012	15,5	6,2	43,1	11,6	12,2	6,0	5,3	2.132,6
	Perub (%)	-30,1	-47,2	36,5	-19,9	20,8	-2,6	46,2	23,3
3. Kelapa sawit	2009	28,1	4,9	23,4	17,4	13,7	3,8	8,7	2.073,3
	2012	19,7	10,0	32,7	17,8	11,8	1,6	6,4	3.106,4
	Perub (%)	-30,1	106,6	39,6	2,2	-13,7	-57,3	-26,9	49,8
4. Tebu	2009	29,1	4,1	12,0	19,8	10,5	20,3	4,3	1.591,0
	2012	24,6	7,0	23,7	8,0	12,6	17,5	6,6	2.164,5
	Perub (%)	-15,3	70,6	98,3	-59,7	19,8	-13,7	53,9	36,0
Rataan	2009	26,6	6,3	24,8	17,0	11,7	8,6	5,1	1.727,6
	2012	20,8	8,2	33,2	12,9	11,6	7,5	5,8	2.417,2
	Perub (%)	-21,8	29,6	34,1	-23,8	-1,3	-12,6	15,4	39,9

TINGKAT PARTISIPASI KONSUMSI PANGAN

Tingkat partisipasi konsumsi pangan menunjukkan proporsi rumah tangga yang mengonsumsi jenis pangan tertentu terhadap total populasi rumah tangga yang diamati. Jenis pangan dominan yang dianalisis dalam tulisan ini adalah pangan sumber karbohidrat yang sebagian besar merupakan pangan pokok, sumber protein (hewani maupun nabati), sumber lemak dan sumber vitamin/mineral. Tabel 6 menunjukkan tingkat partisipasi konsumsi pangan antardua waktu pengamatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi konsumsi beras di lokasi contoh mencapai 100%. Tingginya tingkat partisipasi konsumsi beras ini terkait dengan pola pangan pokok tunggal yaitu beras sebagai makanan pokok utama. Walaupun demikian, sebagian besar rumah tangga tidak mengusahakan tanaman padi. Beras yang dikonsumsi umumnya berasal dari membeli. Beras sebagai sumber karbohidrat utama merupakan pangan sumber karbohidrat yang sekaligus merupakan pangan sumber energi. Selain beras, beberapa pangan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi adalah gula pasir. Hampir di semua wilayah

tingkat partisipasi konsumsi gula cukup tinggi. Konsumsi gula ini biasanya sebagai pemanis dalam minuman atau campuran pembuatan kue. Tidak ada pola yang jelas antardua titik waktu pengamatan di mana sebagian meningkat, namun sebagian menurun.

Tabel 6. Rataan Tingkat Partisipasi Konsumsi Beberapa Jenis Pangan Penting pada Rumah Tangga di Lahan Kering Berbasis Perkebunan, 2009 dan 2012 (%)

Jenis Pangan	Komoditas Basis											
	Karet			Kakao			Sawit			Tebu		
	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)
<u>Sumber karbohidrat</u>												
Beras	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Jagung	8,8	5,0	-75,0	11,3	7,6	-48,2	2,7	1,4	-94,9	88,8	72,5	-22,4
Ubi kayu	11,3	18,7	39,8	13,8	22,8	39,6	1,3	17,8	92,5	20,0	15,0	-33,3
Ubi jalar	8,8	7,5	-16,7	1,3	6,3	80,2	0,0	9,6	100,0	0,0	6,2	100,0
Miinstan	86,3	92,5	6,8	86,3	84,8	-1,7	73,3	72,6	-1,0	80,0	70,0	-14,3
Gula pasir	100,0	98,7	-1,3	91,3	93,7	2,6	93,3	95,9	2,7	96,3	95,0	-1,3
<u>Sumber protein</u>												
Daging sapi	1,3	5,0	75,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,1	67,6	7,5	10,0	25,0
Daging ayam	1,3	1,2	-4,2	0,0	1,3	100,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,2	-108,3
Ikan	92,5	95,0	2,6	95,0	98,7	3,7	85,3	94,5	9,7	86,3	96,2	10,3
Telur	75,0	91,2	17,8	71,3	77,2	7,7	81,3	79,4	-2,4	70,0	78,7	11,1
Susu	48,8	57,5	15,2	33,8	41,8	19,2	33,3	49,3	32,4	27,5	33,7	18,4
Tahu	58,8	65,0	9,6	33,8	38,0	11,1	45,3	65,7	31,0	85,0	93,7	9,3
Tempe	62,5	78,7	20,6	47,5	55,7	14,7	48,0	65,7	26,9	90,0	92,5	2,7
<u>Sumber lemak</u>												
M. goreng	100,0	98,7	-1,3	90,0	96,2	6,4	94,7	98,6	4,0	95,0	100,0	5,0
<u>Sumber vitamin dan mineral</u>												
Bayam	36,3	41,2	12,0	51,3	48,1	-6,5	66,7	65,7	-1,5	51,3	68,7	25,4
Kangkung	68,8	71,2	3,4	27,5	30,4	9,5	61,3	45,2	-35,7	17,5	32,5	46,2
Kubis	21,3	30,0	29,2	17,5	31,7	44,7	18,7	20,5	8,9	31,3	31,2	-0,2
Pepaya	2,5	7,5	66,7	16,3	21,5	24,4	6,7	11,0	39,1	37,5	12,5	-200,0
Jeruk	23,8	37,5	36,7	7,5	11,4	34,2	30,7	50,7	39,5	22,5	20,0	-12,5
Pisang	36,3	31,2	-16,2	71,3	51,9	-37,3	22,7	20,6	-10,3	47,5	27,5	-72,7

Partisipasi konsumsi mi instan bervariasi antarlokasi, namun secara agregat partisipasi konsumsi untuk pangan tersebut masih cukup tinggi. Tingginya partisipasi pangan ini terjadi karena pangan tersebut praktis untuk diolah dan relatif murah dan terjangkau di kalangan masyarakat luas termasuk di perdesaan,

sehingga pangan tersebut disenangi. Sementara itu, jenis pangan sumber karbohidrat lain yang sebelumnya juga menjadi pangan pokok di beberapa wilayah tergeser oleh beras, yang ditunjukkan oleh partisipasi konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya seperti jagung dan ubikayu yang relatif kecil. Pergeseran pola konsumsi pangan pokok ini terjadi juga karena kebijakan awal Pemerintah Indonesia yang bias ke beras. Temuan ini banyak ditemukan di Kawasan Indonesia bagian Timur, seperti banyak diulas dalam kajian Saliem (2002). Akan tetapi, di wilayah karet dan kakao partisipasi konsumsi ubi kayu meningkat, meskipun bukan sebagai pangan pokok, melainkan hanya sebagai makanan selingan. Walaupun demikian, dengan mengonsumsi pangan karbohidrat selain beras diharapkan konsumsi beras dapat dikurangi sehingga dapat mendukung program diversifikasi pangan.

Tingkat partisipasi konsumsi pangan sumber karbohidrat tersebut menunjukkan bahwa beras memang sudah menjadi pola pangan pokok dominan dan cenderung bersifat tunggal, kecuali yang ditemukan di wilayah basis tebu (Jawa Timur). Sebagian rumah tangga di wilayah ini masih mengonsumsi campuran beras dan jagung karena di wilayah ini sebagian besar merupakan etnis Madura. Selama ini budaya mengonsumsi jagung merupakan kebiasaan, namun semakin bergeser ke beras. Oleh karena itu, diversifikasi pangan pokok nonberas relatif tidak ditemukan di wilayah basis komoditas lainnya dan bila dikembangkan relatif sulit karena masyarakat sudah terbiasa mengonsumsi pangan pokok beras, sehingga perlu proses panjang untuk menerapkannya. Tingkat partisipasi pangan hewani sebagian meningkat dan sebagian menurun. Hal yang menarik adalah tingkat partisipasi konsumsi daging ayam yang meningkat cukup signifikan. Hal ini antara lain merupakan implikasi dari peningkatan pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan yang lebih berkualitas dengan harga yang relatif mahal.

TINGKAT KONSUMSI PANGAN

Tingkat partisipasi belum mencerminkan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Untuk itu, perlu dilihat kuantitas pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Keragaan tingkat konsumsi beberapa jenis pangan penting rumah tangga contoh dapat dilihat pada Tabel 7. Rataan tingkat konsumsi beras rumah tangga di desa contoh rata-rata menurun selama 2009–2012, kecuali di wilayah basis tebu relatif tetap, yang awalnya 87,5kg/kapita/tahun menjadi 87,8 kg/kapita/tahun.

Di wilayah basis komoditas tebu terjadi pergeseran pola pangan pokok, khususnya konsumsi jagung tingkat partisipasi konsumsi menurun diikuti dengan tingkat konsumsi rata-rata juga menurun, sementara tingkat konsumsi beras meningkat. Ini mengindikasikan bahwa terjadi pergeseran pola konsumsi pangan yang semula mengonsumsi pangan campuran beras dan jagung menjadi pola pangan tunggal beras. Ini dilakukan karena harga beras jagung dan beras relatif kecil perbedaannya. Sebagai gambaran, harga pasar beras jagung pada tahun 2012 Rp5.500/kg–Rp6.000/kg, sedangkan beras Rp7.000/kg–Rp8.000/kg. Selain itu, dari sisi kepraktisan beras lebih mudah dan cepat memasaknya. Walaupun demikian, hasil kajian Rachman (2014) dan Rachman dan Purwanti (2014) mengungkapkan

bahwa di tingkat agregat nasional di wilayah perdesaan masih relatif lebih beragam pangan pokoknya dibanding di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional maupun daerah untuk meningkatkan diversifikasi pangan, dengan mengembangkan pangan lokal tersebut. Usaha untuk melestarikan budaya dan kebiasaan makan pangan lokal perlu disosialisasikan terutama bagi kalangan muda di perdesaan.

Tabel 7. Rataan Tingkat Konsumsi Beberapa Jenis Pangan Penting pada Rumah Tangga di Lahan Kering Berbasis Perkebunan, 2009 dan 2012 (kg/kapita/tahun)

Jenis Pangan	Komoditas Basis											
	Karet			Kakao			Kelapa sawit			Tebu		
	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)	2009	2012	Perub (%)
<u>Sumber karbohidrat</u>												
Beras	120,5	88,5	-36,1	111,0	91,2	-21,7	114,6	111,9	-2,5	87,5	87,9	0,5
Jagung	2,0	0,3	-515,6	2,0	0,3	-548,4	0,6	0,1	-611,1	39,5	21,0	-88,2
Ubi kayu	3,2	3,9	16,1	2,0	3,8	46,9	0,2	3,2	93,5	6,0	3,5	-72,0
Ubi jalar	1,4	1,7	13,8	0,1	0,8	85,5	0,0	2,5	100,0	0,0	1,4	100,0
Mi instan	6,6	6,8	2,8	6,2	6,8	7,7	5,5	5,6	1,4	5,6	5,1	-9,6
Gula pasir	15,3	11,7	-30,5	10,8	10,2	-5,9	14,2	12,7	-11,3	15,1	12,4	-21,2
<u>Sumber protein</u>												
Daging sapi	0,1	0,2	61,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	80,6	0,7	0,5	-32,0
Daging ayam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-166,7
Ikan	15,0	18,8	20,3	38,0	34,0	-11,8	17,2	21,7	20,7	11,0	10,1	-8,1
Telur	5,3	6,9	22,6	6,0	7,4	17,8	7,2	7,3	0,4	6,3	8,2	23,0
Susu	1,7	2,4	30,8	1,5	1,7	11,4	2,9	3,7	22,6	1,4	2,3	37,8
Tahu	1,3	1,7	23,4	0,9	1,1	11,4	1,3	2,2	40,4	4,2	3,7	-11,5
Tempe	1,9	2,5	23,3	1,7	1,7	4,0	2,7	3,3	19,6	7,1	5,8	-22,5
<u>Sumber lemak</u>												
M. goreng	14,0	11,7	-20,4	10,0	8,9	-12,4	11,9	13,3		11,9	12,3	3,2
<u>Sumber vitamin dan mineral</u>												
Bayam	2,0	2,7	23,3	4,4	4,1	-8,1	9,8	5,9	-66,3	6,4	4,4	-45,6
Kangkung	5,0	4,6	-9,6	2,0	2,5	21,9	8,9	4,6	-93,5	2,1	1,5	-37,5
Kubis	2,3	3,0	22,7	2,5	3,5	29,9	2,9	2,5	-19,2	3,7	2,4	-53,9
Pepaya	0,9	0,9	-3,4	7,3	5,9	-23,0	2,4	2,4	0,4	16,2	2,7	-503,0
Jeruk	3,0	4,8	38,7	1,2	0,8	-36,9	4,5	8,4	46,7	3,7	2,8	-33,9
Pisang	14,2	11,1	-27,8	27,2	15,0	-81,0	8,1	5,7	-40,7	23,1	7,7	-199,7

Konsumsi pangan hewani, seperti daging ayam, cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena selain mudah diperoleh, harga pangan tersebut relatif murah dan terjangkau oleh kalangan masyarakat luas, khususnya di perdesaan. Sementara itu,

tingkat konsumsi telur di wilayah karet dan kakao meningkat, sedangkan di wilayah kelapa sawit dan tebu menurun.

Perubahan pola pangan tersebut terkait dengan peningkatan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga lebih leluasa untuk memilih pangan yang dibeli/dikonsumsi. Tempe dan tahu adalah jenis pangan sumber protein nabati yang sudah meluas dikonsumsi oleh masyarakat, tidak hanya oleh rumah tangga di Jawa (dalam hal ini wilayah komoditas tebu), tetapi juga di luar Jawa (wilayah basis karet, kakao, dan kelapa sawit). Walaupun secara rata-rata tingkat konsumsi di Jawa relatif lebih tinggi dibanding dengan di luar Jawa, selama 2009–2012 konsumsi produk pangan tersebut cenderung meningkat. Sementara itu, sumber vitamin dan mineral yang menonjol adalah pisang yang tingkat konsumsinya relatif besar karena jenis buah ini tidak tergantung musim dan relatif tersedia di lokasi.

KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

Konsumsi energi diperoleh dari asupan pangan. Energi dalam satuan kkal diperlukan sebagai zat tenaga. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan pada WNPG VII tahun 2004 adalah 2.000 kkal/kapita/hari untuk energi dan 52 gram/kapita/hari pada tingkat konsumsi, sedangkan pada tingkat persediaan sebesar 2.200 kkal/kapita/hari (energi) dan 57 gram/kapita/hari (protein). Sementara, AKG yang direkomendasikan dalam WNPG X yang juga disebut AKG 2012 (Kartono *et al.*, 2012) memberikan standar kecukupan yang lebih tinggi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa AKG 2012 lebih digunakan untuk perencanaan konsumsi dan penyediaan pangan nasional, penilaian konsumsi pangan secara agregatif (makro) tingkat nasional, serta penetapan komponen gizi dalam perumusan garis kemiskinan dan upah minimum dengan penyesuaian pada tingkat aktivitas. AKG tidak digunakan untuk menilai pemenuhan kecukupan gizi seseorang. Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tingkat konsumsi untuk penilaian konsumsi energi dan protein penduduk secara agregatif (makro) adalah 2.150 kkal dan 57 gram protein per kapita per hari, sementara pada tingkat persediaan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari (energi) dan 63 gram/kapita/hari (protein). Namun, AKG 2012 dapat digunakan sebagai acuan untuk pendekatan penilaian kecukupan rata-rata penduduk suatu wilayah/agroekosistem.

Rataan konsumsi energi pada rumah tangga contoh disajikan pada Tabel 8. Secara agregat konsumsi energi menurun dari 1.684 kkal/kapita/hari menjadi 1.530 kkal/kapita/hari atau menurun sekitar 9%. Besaran konsumsi energi tersebut masih di bawah AKG dan lebih kecil dari rata-rata nasional tahun 2012 yang mencapai 1.994 kkal (Kartono *et al.*, 2012). Selain rendah, tingkat konsumsi energi selama 2009–2012 juga menurun. Hal ini perlu diwaspadai agar konsumsi energi tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai standar kecukupan sesuai anjuran. Selama ini konsumsi energi hanya dihitung berdasarkan konsumsi pangan dalam arti bahan pangan yang dikonsumsi, sedangkan konsumsi makanan jadi belum diperhitungkan mengingat sulitnya mengonversi makanan jadi menjadi bahan pangan

pembentuknya dan juga bervariasi makanan jadi antarlokasi. Dengan demikian, apabila makanan jadi dapat diperhitungkan, maka peluang peningkatan konsumsi energi semakin besar.

Tabel 8. Rataan Konsumsi Energi pada Rumah Tangga di Lahan Kering Berbasis Perkebunan, 2009 dan 2012

Basis Komoditas/ Desa	Energi (kkal/kapita/hari)			Tingkat Kecukupan Energi (%)	
	2009	2012	Perubahan (%)	2009	2012
<u>Karet</u>	<u>1.785</u>	<u>1.443</u>	<u>-19,16</u>	<u>89,3</u>	<u>72,2</u>
1. Panerokan	1.842	1.497	-18,72	92,1	74,9
2. Semoncol	1.729	1.389	-19,62	86,5	69,5
<u>Kakao</u>	<u>1.642</u>	<u>1.428</u>	<u>-13,04</u>	<u>82,1</u>	<u>71,4</u>
1. Pakeng	1.297	1.370	5,59	64,9	68,5
2. Bakti	1.971	1.485	-24,63	98,6	74,3
<u>Kelapa Sawit</u>	<u>1.706</u>	<u>1.763</u>	<u>3,37</u>	<u>85,3</u>	<u>88,2</u>
1. Matra Manunggal	1.747	1.900	8,78	87,4	95,0
2. Hibun	1.659	1.61	-2,65	83,0	80,8
<u>Tebu</u>	<u>1.602</u>	<u>1.504</u>	<u>-6,11</u>	<u>80,1</u>	<u>75,2</u>
1. Rejosari	1.438	1.235	-14,12	71,9	61,8
2. Kebonan	1.766	1.774	0,41	88,3	88,7
Rataan	1.684	1.530	-9,12	84,2	76,5

Sama halnya dengan konsumsi energi, tingkat konsumsi protein rumah tangga di desa contoh juga masih di bawah AKG (52 gram/kapita/hari) (Tabel 9). Hanya rumah tangga di wilayah berbasis kelapa sawit yang sudah mencapai AKP pada tahun 2012, walaupun tiga tahun sebelumnya masih di bawah AKG. Walaupun demikian, secara agregat konsumsi protein meningkat, kecuali di wilayah berbasis karet serta Desa Bakti (basis kakao) yang mengalami penurunan konsumsi protein. Pada umumnya konsumsi protein masih didominasi oleh protein nabati. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan untuk perbaikan pola dan tingkat konsumsi pangan penduduk di desa contoh, baik kuantitas maupun kualitas.

Kondisi yang memprihatinkan ditemukan di Desa Pakeng (basis komoditas kakao), yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi masih jauh di bawah standar kecukupan yang dianjurkan, baik tahun 2009 maupun 2012 relatif tetap. Menurut Hardinsyah *et al.* (2014), konsumsi energi rata-rata kurang dari 1.400 kkal/kapita/hari mengindikasikan bahwa penduduk tersebut rawan pangan. Dengan demikian, rumah tangga di lokasi contoh di atas dapat dikatakan mendekati rawan pangan sehingga diperlukan upaya khusus untuk perbaikan pola konsumsi di wilayah tersebut. Wilayah dengan basis komoditas kakao, Desa Pakeng, tidak memperlihatkan pertanian kakao pada umumnya mengingat kakao di desa ini bukan

lagi menjadi andalan mata pencaharian penduduk setempat. Penurunan signifikan konsumsi energi ditemukan pada wilayah basis karet, baik di Desa Semoncol maupun Penerokan, terutama yang dijumpai di Desa Bakti (basis kakao) dan Desa Semoncol (Sanggau). Penyebab utama penurunan konsumsi energi tersebut adalah penurunan konsumsi beras yang tidak diimbangi dengan substitusi pangan sumber karbohidrat lainnya. Implikasi kondisi tersebut tentunya akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia karena dengan kondisi asupan gizi kurang akan memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat setempat yang akhirnya akan memengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 9. Rataan Konsumsi Protein pada Rumah Tangga di Lahan Kering Berbasis Perkebunan, 2009–2012 (gram/kapita/hari)

Basis Komoditas/ Kabupaten	Protein (gram/kapita/hari)		
	2009	2009	Perubahan (%)
<u>Karet</u>	<u>44,20</u>	<u>43,18</u>	<u>-4,16</u>
1. Penerokan	49,88	47,96	-3,85
2. Semoncol	38,52	38,41	-0,29
<u>Kakao</u>	<u>45,06</u>	<u>45,92</u>	<u>1,91</u>
1. Pakeng	31,21	35,61	14,10
2. Bakti	58,23	55,97	-3,88
<u>Kelapa sawit</u>	<u>50,97</u>	<u>54,18</u>	<u>6,30</u>
1. Matra Manunggal	53,20	54,98	3,35
2. Hibun	48,43	53,30	10,06
<u>Tebu</u>	<u>45,06</u>	<u>45,92</u>	<u>1,91</u>
1. Rejosari	53,59	54,20	1,14
2. Kebonan	38,82	42,10	8,45
Rataan	46,54	47,72	2,54

Secara agregat tingkat konsumsi protein selama 2009-2012 meningkat 2,54 persen, namun meningkatnya konsumsi protein tersebut masih belum mencapai angka kecukupan protein yang dianjurkan. Secara wilayah basis komoditas rata-rata meningkat kecuali di wilayah dengan basis tanaman karet, baik yang dijumpai di Desa Penerokan maupun Desa Semoncol. Rendahnya konsumsi protein ini karena pola konsumsi pangan rumah tangga masih belum memerhatikan jenis pangan yang berkualitas.

Bila dilihat secara agregat tingkat konsumsi energi rata-rata menurun, namun bila dilihat pangsa energi dari berbagai kelompok pangan relatif tidak berbeda. Secara rinci pangsa konsumsi energi menurut kelompok pangan di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 10. Tampak selama 2009–2012 tidak ada perubahan yang signifikan untuk semua kelompok pangan dan proporsi energi dari kelompok padi-padian dan umbi-umbian, sedangkan pangsa energi dari pangan hewani relatif tetap.

Tabel 10. Rataan Pangsa Konsumsi Energi menurut Kelompok Pangan per Kapita per Hari pada Rumah Tangga di Lahan Kering Berbasis Perkebunan, 2009–2012

Kelompok Pangan	Karet		Kakao		Kelapa Sawit		Tebu	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
1. Padi-padian	58,5	58,1	58,6	60,3	63,5	61,2	55,1	60,1
2. Umbi-umbian	0,2	3,8	0,8	8,3	0,1	3,5	0,4	0,9
3. Pangan hewani	5,6	6,9	8,7	5,0	7,4	8,8	4,4	4,9
4. Minyak dan lemak	16,0	18,7	13,9	13,4	11,8	16,7	16,6	17,2
5. Buah/biji berminyak	2,9	4,5	2,3	2,4	1,2	2,2	1,4	1,4
6. Kacang-kacangan	7,3	3,1	7,0	4,6	6,1	3,5	6,4	4,9
7. Gula	6,1	0,8	4,8	1,0	5,7	0,7	5,9	7,6
8. Sayur dan buah	1,3	1,6	1,9	1,7	1,5	1,7	1,5	1,8
9. Lain-lain	2,0	2,5	1,9	3,3	2,6	1,7	8,3	1,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

KECUKUPAN GIZI DAN MUTU KONSUMSI PANGAN

Agar hidup sehat diperlukan asupan pangan dan gizi yang cukup. Untuk melihat kualitas konsumsi pangan yang merupakan cerminan dari indikator ketahanan pangan rumah tangga antara lain dapat didekati dengan membandingkan antara konsumsi aktual dengan struktur kecukupan energi ideal. Sebagai acuan pembanding digunakan susunan kecukupan AKG nasional (BKP, 2013).

Berdasarkan tingkat energi yang dikonsumsi rumah tangga contoh, dapat digambarkan sejauh mana capaian kecukupan energi pada rumah tangga tersebut. Untuk itu, dengan melihat selisih tingkat energi yang dikonsumsi dengan standar kecukupan energi yang direkomendasikan WNPG VII tahun 2004 dapat ditunjukkan sejauh mana capaian tingkat kecukupan energi yang dikonsumsi rumah tangga yang bersangkutan. Tabel 11 menyajikan capaian konsumsi energi dibanding standar kecukupan energi.

Beberapa hal dapat dijelaskan dari Tabel 11. *Pertama*, kelompok pangan yang melebihi standar kecukupan baik secara agregat maupun untuk masing-masing lokasi adalah kelompok padi-padian dan minyak/lemak, sementara program pemerintah untuk mendukung diversifikasi pangan justru mengurangi pangan kelompok padi-padian. Oleh karena itu, kelebihan konsumsi pangan dalam kelompok tersebut perlu dikurangi. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pola konsumsi pangan yang baik. *Kedua*, beberapa kelompok pangan yang masih defisit dan perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian, pangan hewani, dan sayur serta buah. Peluang untuk meningkatkan ketiga kelompok pangan tersebut terbuka

lebar. Hasil kajian di Kabupaten Pacitan (Purwantini dan Saptana, 2014) menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Rumah Pangan Lestari (RPL) dapat menyumbang untuk konsumsi pangan dan berdampak positif terhadap peningkatan PPH rumah tangga di kawasan tersebut. Terkait hal ini peluang yang cukup besar adalah mengusahakan umbi-umbian dan sayuran. Selain itu, usaha ikan tawar di lahan pekarangan juga mempunyai prospek cukup baik, begitu pula untuk usaha ternak unggas (ayam kampung/buras). *Ketiga*, konsumsi gula hanya dihitung dari konsumsi gula pasir dan gula merah, sementara pada umumnya rumah tangga juga mengonsumsi makanan yang mengandung gula, seperti yang terdapat pada makanan (kue) atau minum jadi. Oleh karena itu, konsumsi gula tidak disarankan untuk ditingkatkan meskipun masih kurang dari standar kecukupan.

Tabel 11. Kesenjangan Kontribusi Konsumsi Pangan Aktual dan Harapan pada Rumah Tangga di Lahan Kering Berbasis Perkebunan, 2009–2012 (% AKG)

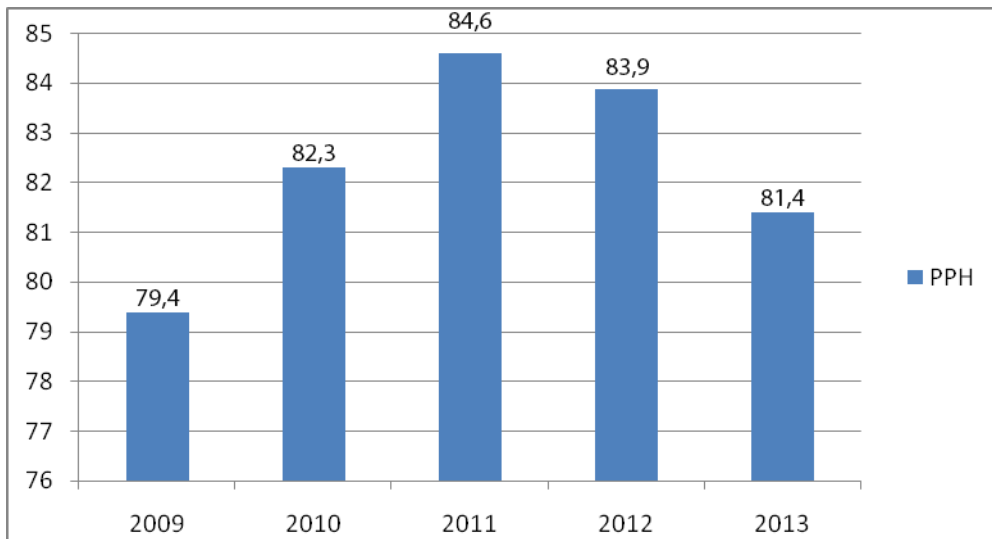
Kelompok Pangan	Ideal	Karet		Kakao		Sawit		Tebu		Rataan	
		2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
1. Padi-padian	50,0	17,6	15,8	19,9	18,5	17,5	15,9	7,7	11,3	15,7	14,4
2. Umbi-umbian	6,0	-5,4	-4,8	-5,7	-5,2	-5,9	-5,2	-3,1	-1,9	-5,0	-3,9
3. Pangan hewani	12,0	-8,2	-6,9	-7,9	-6,5	-4,8	-4,0	-8,3	-6,9	-7,3	-5,4
4. Minyak dan lemak	10,0	8,8	9,0	4,6	5,3	6,7	7,4	7,8	9,6	7,0	8,1
5. Buah/biji berminyak	3,0	-0,2	-0,6	0,3	-1,6	-0,8	-1,6	3,3	-1,4	0,6	-1,6
6. Kacang-kacangan	5,0	-3,9	-3,7	-3,5	-2,4	-3,7	-3,4	-0,4	-2,0	-2,9	-2,7
7. Gula	5,0	-4,1	-4,1	-4,1	-4,0	-4,1	-4,2	-3,9	-4,1	-4,1	-4,1
8. Sayur dan buah	6,0	-2,3	-2,4	-1,0	-1,8	-2,2	-2,6	-0,4	-2,6	-1,5	-2,5
9. Lain-lain	3,0	-2,3	-2,3	-2,6	-2,3	-2,6	-2,3	-2,7	-2,1	-2,5	-2,2
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Pola konsumsi yang baik tidak hanya kuantitas yang cukup, tetapi juga harus memenuhi kualitas yang baik atau seimbang. Pendekatan PPH dapat digunakan untuk menganalisis keragaman pangan yang dikonsumsi. Dengan demikian, pola konsumsi pangan selain beragam juga harus seimbang. Menurut Hardinsyah *et al.* (2014), konsumsi pangan seimbang adalah memenuhi keseimbangan antara fungsi dan gizi pangan itu sendiri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pangan yang dikonsumsi secara kualitas harus memenuhi gizi seimbang, yakni sumber zat tenaga (karbohidrat dan lemak), zat pembangun (protein), dan zat pengatur (vitamin, mineral, dan air). Ketiga fungsi tersebut harus seimbang dan memiliki bobot yang sama masing-masing 33,3%.

Skor PPH maksimal (ideal) adalah 100. Secara nasional PPH tahun 2009 mencapai 79,4; meningkat sampai tahun 2011, selanjutnya menurun tahun 2013 menjadi 81,4. Berfluktuasinya skor PPH tersebut disebabkan kualitas konsumsi pangan masyarakat kurang mempertimbangkan gizi seimbang, sehingga pangsa energi untuk masing-masing kelompok pangan berubah. Kajian Hardinsyah *et al.* (2012) menunjukkan bahwa skor PPH di wilayah perdesaan lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. Ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi penduduk di kota lebih baik dibanding di perdesaan, yang berimplikasi bahwa perhatian dan penekanan pembangunan seyogianya lebih diarahkan untuk penduduk di wilayah perdesaan.

Gambaran kondisi mutu pangan rumah tangga yang diolah dari data Susenas 2009–2012 (BKP, 2013), yang dicerminkan dari nilai skor PPH, dapat dilihat pada Gambar 1; sementara gambaran kondisi mutu pangan rumah tangga di wilayah penelitian ditunjukkan pada Gambar 2. Rata-rata skor PPH di lokasi contoh lebih rendah dibanding data nasional, baik kondisi tahun 2009 maupun tahun 2012.

Selama 2009–2012 skor PPH secara agregat wilayah cenderung menurun dari 68,5 menjadi 67,4. Nilai skor PPH tersebut mencerminkan kualitas pangan yang rendah dan kurang beragam karena pangsa energi hanya terkonsentrasi di beberapa kelompok pangan tertentu seperti padi-padian, sementara untuk sayur dan buah masih jauh di bawah skor ideal.

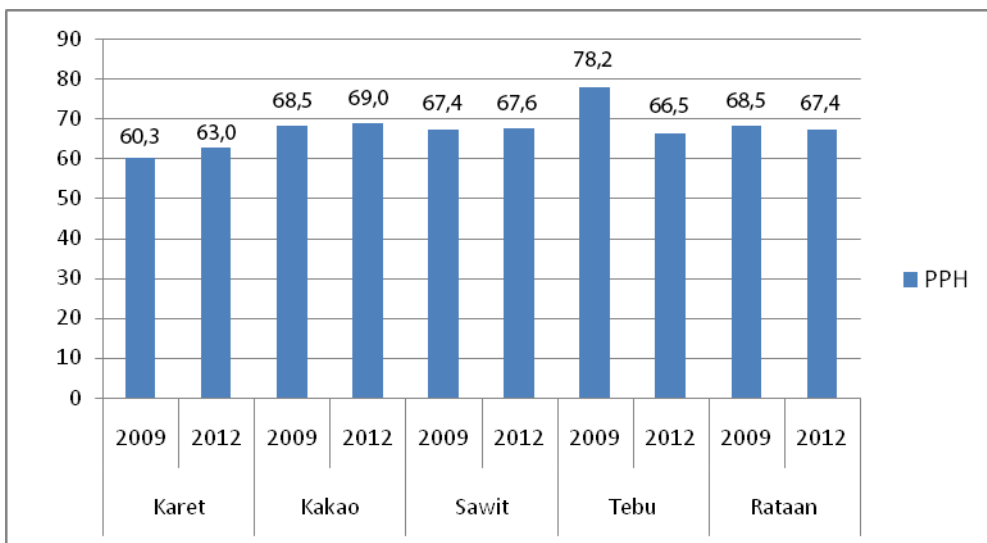


Sumber: BKP (2013), diolah

Gambar 1. Perkembangan PPH Nasional, 2009–2012

Bila dicermati untuk masing-masing wilayah contoh menurut basis komoditas, ternyata hanya di wilayah basis tebu yang mengalami penurunan cukup tajam (sekitar 14%) selama 2009–2012, sementara di wilayah basis kelapa sawit skor PPH-nya relatif tetap. Sebaliknya, kondisi di wilayah basis karet dan kakao menunjukkan hasil perhitungan skor PPH yang meningkat. Ini mengindikasikan

bahwa konsumsi pangan di kedua wilayah tersebut semakin membaik. Peningkatan skor PPH ternyata tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan pendapatan rumah tangga. Hubungan yang searah positif antara peningkatan/penurunan pendapatan riil terhadap peningkatan/penurunan nilai skor PPH ditemukan di wilayah karet dan tebu, sementara yang berlawanan adalah di wilayah kakao, di mana nilai skor PPH meningkat sekitar 1%, walaupun pendapatan riil menurun. Meningkatnya skor PPH ini terutama karena meningkatnya pangsa energi dari umbi-umbian dan menurunnya pangsa energi dari gula. Sementara itu, di wilayah berbasis kelapa sawit, nilai skor PPH relatif tetap, yang berarti peningkatan pendapatan rumah tangga tidak dialokasikan untuk belanja dan mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam. Hal ini juga tercermin dari pangsa pengeluaran pangan yang relatif tetap.



Gambar 2. Perkembangan Skor PPH Rumah Tangga Contoh di Desa Patanas, 2009-2012

Secara agregat, meningkatnya pendapatan rumah tangga tidak selalu digunakan untuk memperbaiki pola konsumsinya. Ketidaktahuan tentang gizi adalah salah satu penyebabnya. Selain itu, juga belanja untuk rokok dan sejenisnya meningkat yang tidak berkontribusi terhadap konsumsi energi rumah tangga. Indikasi penurunan kualitas konsumsi, selain tingkat kecukupan energi rendah, juga keragaman konsumsi kurang baik, demikian juga tidak seimbangnya antarzat gizi yang dikonsumsi. Sayur dan buah merupakan pangan sumber vitamin dan mineral sebagai zat pengatur, kekurangan zat tersebut tentunya akan mengganggu kesehatan. Skor PPH untuk kelompok pangan tersebut sangat jauh dibanding skor anjuran (Lampiran 1). Oleh karena itu, peningkatan pangan tersebut sangat diharapkan dan peluang pengembangannya masih terbuka luas, antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan atau di lahan sekitar kebun, mengingat selama ini petani sudah mengusahakan tanaman sayuran di sekitar kebunnya, terutama untuk kebun kakao dan tebu.

Konsumsi pangan hewani juga masih kurang. Untuk meningkatkan skor PPH jenis pangan ini, maka konsumsi pangan hewani juga harus ditingkatkan. Pangan hewani memiliki bobot skor sekitar 25, sehingga dengan sedikit peningkatan konsumsi jenis pangan ini akan mengungkit besaran nilai skor PPH. Selain itu, kualitas pangan ini juga memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia.

Pengembangan dan pemeliharaan ayam kampung dan kelinci merupakan alternatif untuk membantu penyediaan pangan hewani. Apabila ketersediaan air di wilayah setempat memungkinkan untuk budi daya kolam ikan, maka usaha budi daya ikan air tawar seperti lele atau lainnya dapat menjadi solusi untuk penyediaan pangan hewani keluarga, bahkan bila berlebih produksinya bisa menjadi tambahan pendapatan rumah tangga.

Kelompok pangan lain yang konsumsinya rendah dan perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian, padahal jenis pangan ini sangat mudah diusahakan dan berpeluang sebagai substitusi beras sebagai pangan sumber karbohidrat. Di beberapa desa contoh juga banyak ditemukan pangan lokal, seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar, talas, dan sebagainya; namun pangan lokal ini pemanfaatannya masih kurang. Hal yang menarik di sini adalah kelompok kacang-kacangan yang pada tahun 2009 sudah mencapai standar kecukupan, namun kondisi 2012 justru mengalami penurunan dan berada di bawah standar kecukupan. Penyebab hal ini antara lain karena konsumsi pangan yang lain relatif meningkat, sementara kacang-kacangan relatif tetap, atau bahkan menurun seperti yang dijumpai di wilayah basis tebu. Secara umum dapat disarankan bahwa pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah perlu dipacu baik dari sisi produksi (ketersediaan) maupun konsumsinya. Selain penyediaan yang cukup untuk jenis pangan tersebut, juga harus mudah diakses oleh seluruh rumah tangga di wilayah kajian, sehingga dapat merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk meningkatkan skor PPH.

KESIMPULAN

Secara agregat selama 2009–2012, pengeluaran total rumah tangga secara nominal meningkat 37%, namun pengeluaran riil setara kilogram beras hanya meningkat sekitar 5%. Sementara, pangsa pengeluaran pangan relatif tetap dan tergolong tinggi (>60%) yang mengindikasikan rentannya ketahanan pangan rumah tangga yang mengarah ke rawan pangan.

Pangsa pengeluaran kelompok pangan pokok (sumber karbohidrat) cukup besar, namun cenderung menurun, dari 23% (2009) menjadi 20% (2012). Sebaliknya, pangsa pengeluaran pangan hewani meningkat, namun hal ini belum mengindikasikan perbaikan pola konsumsi. Sementara itu, pangsa pengeluaran pangan jenis sayuran dan buah-buahan umumnya relatif tetap.

Struktur pengeluaran nonpangan terbesar adalah pengeluaran untuk BBM, yang selama 2009–2012 menurun 26,6% menjadi 20,8%. Pangsa pengeluaran untuk pendidikan merupakan terbesar kedua pada tahun 2009 (24,8%), yang

kemudian naik menjadi 33,2% pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2012 pangsa pengeluaran untuk pendidikan adalah yang terbesar. Selanjutnya, pengeluaran lain-lain yang meliputi sumbangan hajat/sosial, pajak kendaraan, dan lain-lain.

Tingkat partisipasi konsumsi beras di semua lokasi 100%, yang berarti seluruh rumah tangga masih mengandalkan beras sebagai pangan pokoknya. Konsumsi pangan pokok umumnya masih bertumpu pada beras, walaupun tingkat konsumsi pangan tersebut cenderung menurun, terkecuali di wilayah basis kelapa sawit dan tebu yang tingkat konsumsinya meningkat. Meningkatnya konsumsi beras di wilayah basis tebu, diikuti dengan menurunnya konsumsi jagung, dikhawatirkan mengancam diversifikasi pangan, yang semula pola konsumsi "beras+jagung" masih eksis, lambat laun akan tergeser, sementara program percepatan diversifikasi pangan ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan kearifan lokal yang ada harus terus digalakkan.

Selama 2009–2012 konsumsi energi dan protein menurun, sementara peningkatan pendapatan tidak selalu digunakan untuk perbaikan pola konsumsi pangan. Tingkat konsumsi energi dan protein masih di bawah standar tingkat kecukupan yang direkomendasikan WKNPG 2004. Mutu pangan rumah tangga contoh mengalami penurunan yang ditandai oleh menurunnya nilai skor PPH dari 68,5 (2009) menjadi 67,4 (2012), masih jauh di atas rata-rata nasional pada tahun yang sama. Secara umum dapat disarankan bahwa pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah perlu dipacu bak dari sisi produksi (persediaan) maupun konsumsinya serta kemudahan akses terhadap pangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2013. Pedoman Analisis Konsumsi Pangan Mandiri di Wilayah P2KP. <http://pusat-pkpp.bkp.pertanian.go.id/downlot.php?file=PEDOMAN%20ANALISIS%20PANGAN.pdf>. (27 Januari 2015).
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Rencana Aksi Pangan dan Gizi 2011–2016. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Departemen Kesehatan. 2005. Data Komposisi Bahan Makanan. Departemen Kesehatan. Jakarta.
- Hardinsyah, G.K. Rana, M. Ariani, dan Anggita. 2014. Analisis Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan. *Dalam* M. Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster. LIPI Press. Jakarta. hlm. 551–573.
- Kartono, D., Hardinsyah, A.B. Jahari, A. Sulaeman, M. Astuti, M. Soekatri, dan H. Riyadi. 2014. Angka Kecukupan Gizi 2012 untuk Orang Indonesia. *Dalam* M. Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster. LIPI Press. Jakarta. hlm. 207–226.

- Khomsan, A. 2008. Rawan Pangan, Rawan Gizi. *Harian Kompas*, 16 Januari 2008. <http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Rawan%20Pangan.pdf> (14 April 2010).
- Mauludiyani, A.V.R. dan M. Ariani. 2014. Dinamika Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Indonesia. *Dalam* M.Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster*. LIPI Press. Jakarta. hlm. 623–636.
- Purwanti, T.B. dan Saptana. 2014. Strategi dan Prospek Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk Mendukung Kemandirian dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Dalam* M. Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster*. LIPI Press. Jakarta. hlm. 715–738.
- Purwanti, T.B., H.P.S. Rachman, dan Y. Marisa. 2005. Analisis Ketahanan Pangan Regional dan Rumah Tangga (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara). *Dalam* E. Jamal, D.K. Sadra, dan Saptana (Eds.). *Monograph No. 26. Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Wilayah sebagai Basis Ketahanan Pangan Nasional*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. hlm. 49–69.
- Purwoto, A, IW. Rusastra, B. Winarso, T.B. Purwanti, A.K. Zakaria, T. Nurasa, D. Hidayat, C. Muslim, dan C.R. Adawiyah. 2011. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija. *Laporan Penelitian*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachman, H.P.S. 2014. Perkembangan Konsumsi Pangan Tinjauan dari Aspek Sosial Ekonomi *Dalam* M.Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster*. LIPI Press. Jakarta. hlm. 493-408.
- Rachman, H.P.S. dan T.B. Purwanti. 2014. Dinamika Konsumsi Beras dan Prospeknya bagi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Status Gizi Rumahtangga di Indonesia. *Dalam* *Ekonomi Perberasan Indonesia*. Perhepi. Jakarta.
- Rachman, H.P.S. dan Supriyati. 2004. Pola Konsumsi dan Pengeluaran Rumahtangga: Kasus Rumahtangga di Pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. *Agro-Ekonomika* 2(34):17-44.
- Saliem, H.P. 2002. Analisis Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* 20(2):64-91.
- Susilowati, S.H, B. Hutabarat, M. Rachmat, A. Purwoto, Sugiarto, Supriyati, Supadi, A.K. Zakaria, B. Winarso, H. Supriyadi, T.B. Purwanti, R. Elizabeth, D. Hidayat, T. Nurasa, C. Muslim, M. Maulana, M. Iqbal, dan R. Aldillah. 2010. Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi. *Laporan Hasil Penelitian*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Warsilah, H. 2014. Peran *Food Habits* Masyarakat di Perdesaan Pesisir dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Keseimbangan Gizi. *Dalam* M.Yudiarti, E. Soekatri, S. Muslimatun, Purwanto, M. Ariani, Hardinsyah, Y. Egayanti, dan L.B. Kardono (Eds.). *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Presentasi dan Poster*. LIPI Press. Jakarta. hlm. 655-676.

Lampiran 1. Perkembangan Nilai dan Rincian Kelompok Pangan Penyusun Skor PPH Menurut Wilayah di Lahan Kering Berbasis Tanaman Karet, Kakao, Kelapa Sawit, dan Tebu, 2009–2012

Kelompok Pangan	Skor PPH									
	Karet		Kakao		Kelapa Sawit		Tebu		Rataar	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
1. Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Umbi-umbian	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	1,5	2,1	0,5	1,0
3. Pangan hewani	7,6	10,1	8,2	10,9	14,3	16,1	7,4	10,2	9,3	13,2
4. Minyak dan lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Buah/biji berminyak	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,8	1,0	0,7
6. Kacang-kacangan	2,1	2,7	3,0	5,2	2,6	3,2	9,2	6,1	4,2	4,6
7. Gula	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
8. Sayur dan buah	18,4	18,0	25,2	21,3	18,9	16,8	28,1	16,9	22,5	17,5
9. Lain-lan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total skor PPH	59,9	62,8	68,0	69,0	67,3	67,6	77,7	66,5	68,0	67,4
Perubahan skor PPH (%)	5,0		1,5		0,4		-14,4		-0,8	

POLA PENGELUARAN DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PERDESAAN: KOMPARASI ANTARTIPE AGROEKOSISTEM

Mewa Ariani dan Handewi Purwati

PENDAHULUAN

Berbicara terkait pangan tidak ada habisnya selama manusia masih membutuhkan pangan karena pangan merupakan hak asasi manusia. Terkait dengan hal ini, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan memantapkan ketahanan pangan agar kebutuhan pangan masyarakatnya dapat terpenuhi. Konsep pangan merupakan konsep eksistensi dan fungsionalisasi manusia dalam kehidupannya. Menurut Ariani (2015), fungsi pangan dapat berbeda-beda, seperti fungsi fisiologis/biologis agar manusia sehat; fungsi sosial/komunikasi; fungsi budaya sebagai identitas budaya atau ciri daerah/etnik; fungsi religi terkait dengan keyakinan, upacara khusus; fungsi ekonomi terkait pendapatan masyarakat dan harga pangan; fungsi politis terkait dengan kekuatan/kekuasaan; serta fungsi kelestarian dan lingkungan hidup. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mapandin (2006) untuk kasus rumah tangga di Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa ubi jalar sebagai makanan pokok memiliki nilai budaya. Rumah tangga menggunakan ubi jalar sebagai simbol nilai untuk komunikasi, religi, persahabatan, nilai ekonomi, dan sebagai tradisi.

Banyak faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga. Menurut Hattas (2011), faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi, di antaranya (1) *Tingkat pendapatan masyarakat*. Tingkat pendapatan dapat digunakan untuk dua tujuan, yaitu konsumsi dan tabungan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan memengaruhi pola konsumsi. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula. (2) *Selera konsumen*. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan memengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. (3) *Harga barang*. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga suatu barang mengalami penurunan maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan. (4) *Tingkat pendidikan masyarakat*. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan memengaruhi terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya. (5) *Jumlah keluarga*. Besar kecilnya jumlah keluarga akan memengaruhi pola konsumsinya. (6) *Lingkungan*. Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan akan memengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat.

Mapandin (2006) dari hasil penelitiannya di Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya menyimpulkan bahwa faktor sosial budaya berhubungan kuat dengan konsumsi makanan pokok masyarakat (kontribusi energi dan pola makan makanan pokok). Sumaryanto (2014) mengatakan bahwa urbanisasi sebagai bagian dari

kemajuan yang ditunjukkan dengan perkembangan penduduk perkotaan dan perkembangan struktur perekonomian. Penduduk perkotaan pada tahun 2010 mencapai 49,6% dan diprediksi menjadi 66,6% tahun 2035. Dampak dari urbanisasi adalah perubahan konsumsi pangan pada masyarakat perkotaan menjadi ke arah "westernisasi diet", dominan mengonsumsi makanan jadi dan makanan cepat saji, lebih berdiversifikasi (ke pangan impor), konsumsi protein hewani, sayur dan buah-buahan, dan lebih sensitif terhadap pasar internasional. Menurut Pakpahan (2012), di saat terjadi perubahan, dalam hal ini globalisasi, maka masyarakat juga melakukan perubahan dengan konsumsi pangannya.

Berkaitan dengan usaha tani, pola pengeluaran dan konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan lahan sawah atau lahan kering, tipologi usaha tani, dan lainnya. Hasil analisis yang dilakukan oleh Aryani *et al.* (2014) menunjukkan bahwa tipologi lahan yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan produktivitas sehingga akan berdampak pada pendapatan dan konsumsi. Hasil penelitian Susilowati *et al.* (2009) memperlihatkan bahwa pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga berkisar 61–65%; terendah di wilayah agroekosistem komoditas basis kakao dan tertinggi di agroekosistem karet. Dengan memperhatikan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis perbedaan pola pengeluaran dan pola konsumsi pangan rumah tangga di berbagai tipe agroekosistem (padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan).

METODE ANALISIS

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data Panel Petani Nasional (Patanas) yang dikumpulkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), yaitu data panel rumah tangga dengan selang waktu tiga tahun, masing-masing untuk data panel rumah tangga di agroekosistem sawah (2007–2010), agroekosistem lahan kering berbasis sayuran dan palawija (2008–2011), dan agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan (2009–2012).

Lokasi penelitian meliputi wilayah Jawa dan Luar Jawa yang secara detail adalah sebagai berikut: (a) agroekosistem padi di 4 provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara) dengan total responden sekitar 300 rumah tangga petani; (b) agroekosistem palawija di 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung) dengan total responden sekitar 242 rumah tangga; (c) agroekosistem sayuran di 4 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan) dengan total responden sekitar 121 rumah tangga; serta (d) agroekosistem perkebunan di empat provinsi (Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan). Di setiap provinsi dipilih 1-4 desa dengan jumlah responden sekitar 25-32 rumah tangga petani.

Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif, tabulasi, dan kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah korelasi antara konsumsi energi atau protein dengan luasan penguasaan lahan. Hasil penelitian Hardono (2012) menunjukkan bahwa luas garapan pada rumah tangga tidak miskin lebih luas dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam

analisis ini tingkat pendapatan rumah tangga diproksi dengan luas penguasaan lahan kemudian dilakukan analisis korelasi antara penguasaan lahan dengan tingkat konsumsi energi dan protein. Agar analisis lebih lengkap juga dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi energi dan protein dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C = a_0 + a_1 Y + a_2 JART + a_3 EW + a_4 D_1 + a_5 D_2 + e$$

di mana: C = konsumsi energi (atau protein)
 Y = pendapatan rumah tangga
 EW = pendidikan istri
 D_1 = dummy sumber pendapatan: 1 = sumber pendapatan dari pertanian, 0 = nonpertanian
 D_2 = dummy agroekosistem: 1 = padi, 0 = bukan padi (palawija, sayuran, perkebunan)

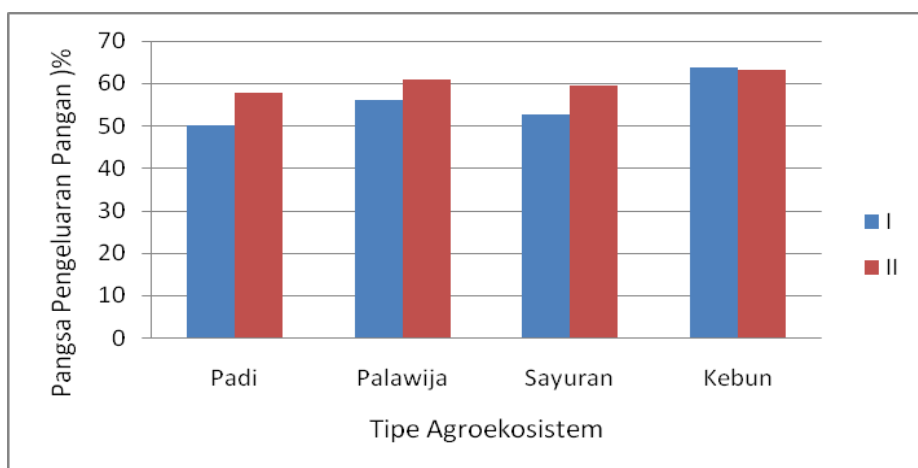
POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Seperti pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk agregat makro, kuesioner untuk Patanas (tingkat mikro) mengikuti kuesioner Susenas baik jenis komoditas, pegelompokan, maupun metode wawancaranya. Pengeluaran rumah tangga di setiap tipe agroekosistem dibedakan antara pengeluaran untuk pangan seperti untuk padi-padian, umbi-umbian, dan sebagainya, serta pengeluaran bukan pangan/makanan (untuk perumahan, kesehatan, dan sebagainya).

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah besaran pangsa pengeluaran untuk pangan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran untuk pangan dikatakan semakin sejahtera walaupun dalam nominal dapat juga pengeluaran untuk pangan bertambah, namun penambahannya masih lebih kecil dibandingkan dengan penambahan pengeluaran untuk bukan pangan. Dengan memperhatikan kondisi awal pangsa pengeluaran pangan yang paling kecil adalah pada rumah tangga padi, yaitu sekitar 50,1%, kemudian diikuti oleh tipe agroekosistem sayuran dan palawija, maka jika pengeluaran sebagai proksi pendapatan dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan pada rumah tangga berbasis padi lebih sejahtera dibandingkan dengan yang lain. Selama ini ada anggapan bahwa usaha di sektor perkebunan lebih menguntungkan daripada usaha di tanaman pangan. Gambar 1 menunjukkan kebalikannya karena proporsi pengeluaran pangan pada rumah tangga basis perkebunan yang paling tinggi (63,8%), padahal komoditas perkebunan yang diusahakan berbasis ekspor (kelapa sawit, karet, kakao, dan tebu). Hal ini diduga disebabkan oleh komoditas yang diusahakan sudah berumur tua sehingga produksi/hasil tanaman tidak maksimal, apalagi kalau tanaman tanpa perawatan misalnya tidak diberi pupuk dan disemprot (apabila ada hama/penyakit).

Seperti yang sering sudah dikenal, terkait hubungan antara konsumsi dan pendapatan seperti dalam hukum Engel, bahwa elastisitas pendapatan dari

makanan adalah inelastis, dalam arti setiap peningkatan pendapatan 1% maka permintaan makanan akan tumbuh kurang dari 1%. Dengan kata lain, terdapat kecenderungan masyarakat yang mengonsumsi pangan yang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Fenomena ini mengindikasikan bahwa proporsi pengeluaran pangan dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan, dalam arti semakin rendah proporsi pengeluaran maka rumah tangga tersebut dapat dikatakan kesejahteraannya semakin membaik. Berdasarkan hal tersebut dan data pada Gambar 1 dapat dikatakan bahwa rumah tangga di empat tipe agroekosistem tersebut justru bertambah miskin karena pangsa pengeluaran pangannya semakin tinggi. Pada kasus rumah tangga di daerah penelitian Patanas diduga masih mempunyai pendapatan yang rendah, di mana pada umumnya tingkat konsumsi pangannya juga masih belum sesuai dengan anjuran. Kenaikan pendapatan justru digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti pengeluaran untuk pangan akan masih terus bertambah. Hal inilah mengapa perubahan pangsa pengeluaran pangan selama tiga tahun masih menunjukkan kenaikan.



Keterangan: I = 2007 (padi), 2008 (palawija dan sayuran), 2009 (perkebunan)
 II = 2010 (padi), 2011 (palawija dan sayuran), 2012 (perkebunan)

Gambar 1. Perubahan Pangsa Pengeluaran Pangan (%)

Kasus pada rumah tangga desa Patanas ini tampaknya harus dianalisis dengan menggunakan data Susenas 2007-2013. Hasil analisis secara agregat dengan menggunakan data Susenas di provinsi penelitian tanpa membedakan agroekosistem menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan yang semakin kecil dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pangsa pengeluaran pangan di Provinsi Sumatra Utara yang menjadi salah satu lokasi penelitian untuk agroekosistem padi dari 60,8% tahun 2007 menjadi 55,4% pada tahun 2013 (Tabel 1). Sebaliknya, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga pada agroekosistem padi pada tahun 2007 sebesar 50,3% menjadi 57,9%. Peningkatan pangsa pengeluaran pangan bukan berarti kesejahteraannya menurun, diduga justru sebaliknya kesejahteraan rumah tangga tersebut mengalami perbaikan.

Tabel 1. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan di Perdesaan, 2007–2013 (%)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera Utara	60,8	62,3	63,2	53,5	56,0	57,5	55,4
Jambi	57,2	57,2	60,0	56,3	55,3	54,0	55,3
Lampung	57,7	58,5	56,6	53,4	53,4	54,8	54,8
Jawa Barat	59,6	59,0	59,3	52,3	48,9	52,3	51,2
Jawa Tengah	55,6	56,5	56,0	51,8	49,5	52,3	50,4
Jawa Timur	54,6	55,3	55,3	52,2	50,5	51,2	50,2
Kalimantan Barat	64,0	62,7	63,9	56,4	53,3	57,3	54,6
Sulawesi Selatan	59,2	59,5	57,1	53,1	51,4	51,8	50,5
Indonesia	58,3	58,7	58,6	51,4	49,4	51,1	50,7

Sumber: BPS (2007–2013)

Pengeluaran pangan dibedakan menjadi sebelas kelompok pangan, yaitu padi-padian dan umbi-umbian, pangan hewani, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lain seperti mi instan, kerupuk makanan dan minuman jadi, serta tembakau dan rokok. Pengelompokan ini mengikuti kelompok yang digunakan oleh BPS dalam publikasi data Susenas

Pengeluaran terbesar pada kelompok pangan adalah untuk pembelian makanan pokok yang termasuk pada kelompok padi-padian dan umbi-umbian, diikuti dengan pengeluaran pangan hewani dan sayuran atau tembakau/rokok. Arah proporsi pengeluaran ini adalah sama antaragroekosistem. Menarik dari kasus ini bahwa rumah tangga di empat agroekosistem ini masih tipikal rumah tangga di perdesaan yang umumnya mengonsumsi makanan yang dimasak di rumah. Hal ini terlihat dari besaran pangsa untuk pengeluaran padi-padian dan umbi-umbian yang tinggi sebaliknya untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi yang rendah (Tabel 2). Kecenderungan pola ini adalah sama dengan rumah tangga dengan data Susenas yang ada di perdesaan. Pada periode 2008–2012 pangsa pengeluaran untuk padi-padian antara 13–14%, dan makanan/minuman jadi antara 9,5–10,6%. Berbeda dengan di perkotaan, pada kurun waktu yang sama pangsa pengeluaran untuk padi-padian hanya sekitar 5–6%, namun untuk makanan/minuman jadi mencapai 12–14% (Ariani dan Hermanto, 2014). Hasil analisis yang dilakukan Kasryno (2013) menunjukkan pengeluaran untuk makanan jadi sudah jauh lebih besar dari pengeluaran untuk makanan pokok sereal dan umbi-umbian. Bahkan, pengeluaran untuk makanan jadi pada tiga tahun terakhir ini sudah mencapai dua kali pengeluaran untuk sereal dan umbi-umbian.

Selama tiga tahun telah terjadi perubahan pangsa pengeluaran pangan walaupun besaran perubahan tidaklah sama antarkelompok pangan dan antartipe agroekosistem. Perubahan signifikan adalah penurunan pangsa untuk padi-padian dan umbi-umbian. Kecenderungan ini dapat dimaknai dua hal, yaitu sebagai cerminan keberhasilan program diversifikasi konsumsi pangan sehingga pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari padi-padian dan

umbi-umbian atau masyarakat sudah mengurangi pangan berbasis karbohidrat. Di sisi lain, maknanya adalah akibat adanya ketidakseimbangan perubahan harga pangan antara sumber karbohidrat dengan pangan jenis lainnya. Beras sebagai pangan pokok yang banyak dikonsumsi rumah tangga yang termasuk dalam kelompok padi-padian, pemerintah melakukan intervensi harga apabila beras mengalami peningkatan yang dapat mengganggu konsumen. Seperti kasus melambungnya harga beras pada bulan Februari–Maret 2015 mencapai sekitar Rp10.000/kg, Bulog melakukan operasi pasar dan percepatan raskin dengan jumlah yang signifikan (Heriawan, 2015). Sementara itu, kenaikan harga pangan yang lain pemerintah tidak selalu melakukan stabilisasi harga. Inilah diduga juga memengaruhi perubahan pangsa pengeluaran pangan terutama padi-padian dengan kelompok pangan yang lain.

Tabel 2. Perubahan Pengeluaran Pangan Menurut Kelompoknya di Empat Tipe Agroekosistem, 2007–2012

Kelompok Pangan	Padi		Palawija		Sayuran		Perkebunan	
	2007	2010	2008	2011	2008	2011	2009	2012
Padi ² an & Umbi ² an	28,6	23,5	29,5	27,5	28,0	25,6	22,6	20,3
Pangan Hewani	17,3	19,2	14,3	15,9	16,6	16,7	20,7	25,2
Sayuran	10,0	13,5	11,4	11,1	10,6	9,6	11,7	11,8
Kacang ² an	5,1	5,1	5,8	4,7	5,7	4,9	3,5	3,4
Buah ² an	3,6	5,3	3,7	4,3	4,2	4,6	4,7	4,9
Minyak & Lemak	4,6	5,0	6,9	5,7	6,0	5,8	4,5	4,1
Bahan Minuman	6,9	6,9	7,1	7,6	7,5	8,3	7,2	6,3
Bumbu ² an	2,8	2,7	4,0	4,2	2,8	3,3	2,9	2,1
Konsumsi lain	3,5	3,9	4,8	4,5	3,6	3,6	4,6	4,3
Makanan/Minuman jadi	5,5	5,0	4,6	3,3	5,6	7,3	5,3	5,7
Tembakau & rokok	12,1	10,0	8,0	11,2	9,5	10,4	12,3	12,0

Pangsa pengeluaran untuk pembelian pangan hewani di lokasi Patanas relatif tinggi. Hal ini dikarenakan jenis pangan hewani yang dikonsumsi banyak yang berasal dari sungai seperti berbagai jenis ikan yang tidak dibeli oleh rumah tangga tersebut. Seperti pada umumnya rumah tangga di perdesaan, rumah tangga di lokasi ini juga banyak memelihara ayam kampung atau ayam buras yang menghasilkan telur. Kedua jenis ini tidak hanya sebagai investasi rumah tangga, namun juga sebagai sumber pangan rumah tangga yang sewaktu-waktu siap untuk dikonsumsi.

Pola pengeluaran rumah tangga untuk bukan pangan adalah sama dengan pengeluaran pangan yang ditunjukkan dengan kecenderungan yang sama untuk semua agroekosistem. Pengeluaran terbesar adalah untuk pendidikan anak diikuti dengan bahan bakar listrik dan air (Tabel 3). Pengeluaran untuk pendidikan

mencakup pembayaran SPP, buku pelajaran dan tulis, transpor, jajan, sewa/kontrak rumah, seragam, kursus termasuk kiriman anak sekolah, dan keperluan lainnya terkait dengan kegiatan sekolah. Pertanyaannya adalah mengapa pengeluaran untuk pendidikan ini masih besar, padahal pemerintah memberi bantuan pendidikan seperti keringanan SPP dan lainnya yang termasuk dalam program biaya operasional sekolah (BOS). Kalaupun SPP anak sekolah dibantu oleh pemerintah, diduga biaya besar ini terkait dengan transpor anak dan biaya kiriman/sewa rumah. Kalaupun demikian, diduga anak-anak tersebut umumnya menempuh jenjang pendidikan di atas SD. Umumnya sekolah tingkat SD masih berada di sekitar desa, namun untuk pendidikan setara SMP dan SMA umumnya lebih jauh dari tempat tinggal seperti berada di ibu kota kecamatan. Dari kasus besaran biaya pendidikan ini menunjukkan bahwa orangtua memperhatikan pendidikan anaknya sehingga mereka mengorbankan dana untuk alokasi hal tersebut.

Tabel 3. Perubahan Pengeluaran Bukan Pangan Menurut Kelompoknya di Empat Tipe Agroekosistem, 2007–2012

Kelompok Pangan	Padi		Palawija		Sayuran		Perkebunan	
	2007	2010	2008	2011	2008	2011	2009	2012
Bahan bakar, Listrik, dan Air	26,3	24,1	30,7	25,0	24,2	19,9	26,6	20,8
Komunikasi & Telekomunikasi	4,4	5,1	7,5	4,9	11,0	5,7	6,3	8,2
Pendidikan Anak	28,7	25,2	15,6	24,5	24,9	29,1	24,8	33,2
Perawatan Kesehatan	13,1	17,8	13,7	16,5	17,2	18,6	17,0	12,9
Sandang	8,6	8,1	12,9	7,7	9,0	9,5	11,7	11,6
Pengeluaran lain	6,0	6,6	3,4	4,2	1,7	3,7	4,0	3,9
Perbaikan rumah	2,5	1,3	2,8	1,9	1,9	1,3	1,1	2,0
Sosial, undangan hajatan, dll.	10,3	11,83	13,4	15,3	10,1	12,4	8,6	7,5

Menarik untuk disimak adalah pengeluaran untuk komunikasi dan telekomunikasi pada rumah tangga ini masih rendah dalam arti penggunaan HP masih relatif sedikit. Hal ini berbeda dengan fenomena dengan menggunakan data Susenas. Hasil analisis dengan menggunakan data Susenas tahun 1999 dan 2010 yang dilakukan oleh Mauludyani dan Ariani (2012), perubahan di antara kelompok bukan pangan yang menonjol peningkatannya adalah pengeluaran untuk pembelian pulsa HP dan nomor perdana, serta untuk bensin dan biaya STNK. Tingginya pengeluaran untuk kegiatan sosial dan undangan hajatan ini juga menunjukkan bahwa kehidupan sosial di masyarakat masih kuat seperti gotong royong, saling mengunjungi, dan membantu apabila ada tetangga yang hajatan. Kegiatan ini bagian dari aksi sosial yang harus dipelihara dan modal sosial yang baik untuk membangun ketahanan pangan dan pertanian.

POLA KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

Pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang semula dalam bentuk jenis pangan dikonversi ke dalam bentuk energi dan protein. Kedua zat gizi ini sering digunakan sebagai indikator kerawanan pangan rumah tangga atau penduduk karena kedua jenis ini sangat penting peranannya dalam kualitas sumber daya manusia. Tingkat kecukupan energi dan protein anjuran telah ditetapkan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Dengan memperhatikan penelitian dilaksanakan pada tahun 2007–2012 maka acuan anjuran yang digunakan adalah hasil dari WNPG VIII, yaitu 2.000 kkal/kapita/hari untuk energi dan 52 gram/kapita/hari untuk protein.

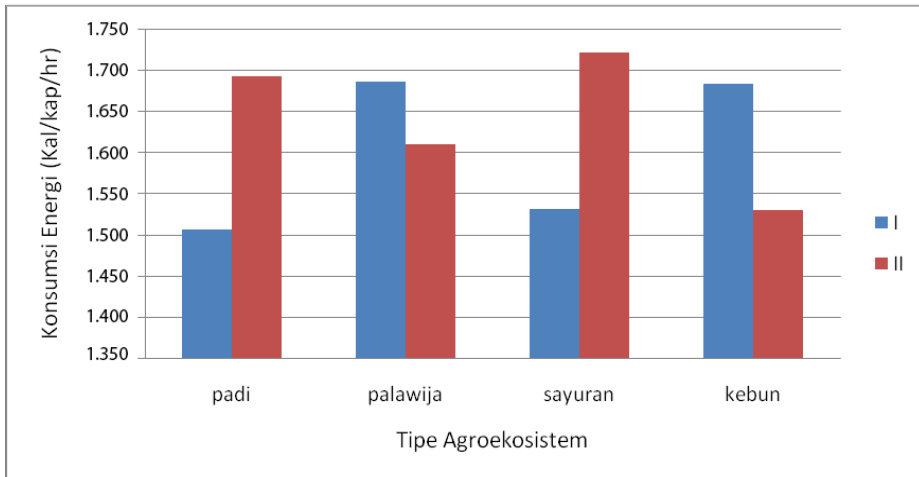
Tingkat konsumsi energi pada tahun 2007–2008 paling tinggi sebesar 1.684 kkal/kapita/hari pada rumah tangga perkebunan, sedangkan paling rendah 1.506/kapita/hari pada rumah tangga padi. Selama tiga tahun (2010–2011) telah terjadi peningkatan konsumsi energi pada rumah tangga padi dan sayuran, sebaliknya terjadi penurunan pada rumah tangga palawija dan perkebunan. Hasil analisis yang dilakukan oleh Hardono (2012) menunjukkan bahwa terjadi penurunan konsumsi energi pada rumah tangga petani baik yang miskin maupun yang tidak miskin, namun penurunan konsumsi energi pada rumah tangga miskin lebih tajam dibanding rumah tangga tidak miskin.

Selama kurun waktu 2007–2011 tingkat konsumsi energi di empat tipe agroekosistem masih belum memenuhi anjuran. Tingkat konsumsi hanya mencapai sekitar 77–86% dari anjuran (Gambar 2). Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan (2006) melakukan pegelompokan tingkat kerawanan pangan, yaitu sangat rawan pangan jika tingkat konsumsi energi (TKE) $\leq 70\%$, rawan pangan dengan TKE 71–89%, dan tahan pangan jika TKE $\geq 90\%$. Dengan mengacu pada klasifikasi tersebut maka rumah tangga di empat agroekosistem termasuk kelompok rawan pangan. Hal inilah yang memungkinkan mengapa kenaikan proporsi pengeluaran pangan bukan berarti tingkat kesejahteraannya menurun. Posisi rumah tangga masih dalam kategori rawan pangan sehingga kenaikan pendapatan masih digunakan untuk memenuhi kecukupan konsumsinya dalam hal ini untuk konsumsi energi.

Keragaman perubahan konsumsi protein berbeda dengan konsumsi energi. Tingkat konsumsi energi masih belum memenuhi kebutuhan yang dianjurkan untuk semua rumah tangga. Namun, untuk protein rumah tangga basis padi dan sayuran (tahun 2011) telah melampaui anjuran (52 gram/kapita/hari) seperti terlihat pada Gambar 3. Di antara tipe agroekosistem tersebut, konsumsi protein pada rumah tangga palawija paling rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang lain. Rendahnya konsumsi protein ini diduga terkait dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh petani.

Pada Tabel 4 dan Tabel 5 disajikan perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein dengan menggunakan data Susenas pada rumah tangga di perdesaan pada provinsi yang sama dengan lokasi penelitian. Tujuan menyajikan data ini adalah untuk membandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Berdasarkan data Susenas, tingkat konsumsi energi dan protein cenderung menurun selama periode 2007–2013. Kecenderungan ini agak berbeda dengan hasil

penelitian, tidak semua rumah tangga konsumsi energi dan proteinnya menurun. Hal ini menambah keyakinan bahwa pola konsumsi makanan baik kuantitas maupun kualitas dapat berubah-ubah dan berbeda antarrumah tangga bahkan individu. Bahkan dalam individu atau rumah tangga yang sama juga berbeda setiap harinya. Hal inilah yang mengakibatkan menganalisis data konsumsi pangan rumah tangga merupakan objek penelitian yang menarik

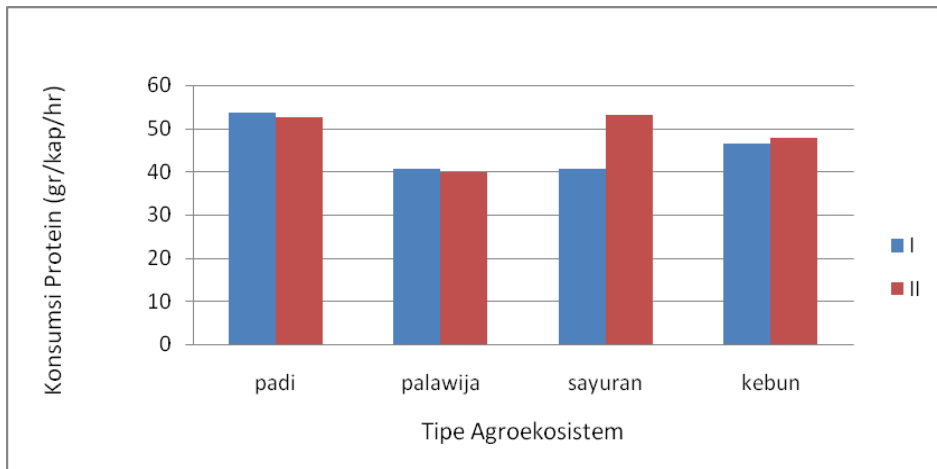


Keterangan:

I = 2007 (padi), 2008 (palawija/sayuran), 2009 (Perkebunan)

II = 2010 (padi), 2011 (palawija/sayuran), 2012 (Perkebunan)

Gambar 2. Perubahan Konsumsi Energi di Desa Patanas Menurut Tipe Agroekosistem, 2007–2012



Keterangan:

I = 2007 (padi), 2008 (palawija/sayuran), 2009 (Perkebunan)

II = 2010 (padi), 2011 (palawija/sayuran), 2012 (Perkebunan)

Gambar 3. Perubahan Konsumsi Protein di Desa Patanas Menurut Tipe Agroekosistem, 2007–2012

Tabel 4. Perubahan Konsumsi Energi di Perdesaan, 2007–2013

Provinsi	Energi (kkal/kapita/hari)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumut	2.070	2.075	1.922	1.971	1.994	1.892	1.849
Jambi	2.075	2.058	1.904	1.928	1.960	1.895	1.776
Lampung	2.121	2.170	1.946	1.954	1.967	1.881	1.825
Jawa Barat	2.029	2.086	1.963	1.930	1.979	1.816	1.854
Jawa Tengah	1.925	1.983	1.861	1.835	1.894	1.806	1.821
Jawa Timur	1.931	1.956	1.857	1.844	1.887	1.806	1.795
Kalbar	2.057	2.010	1.926	1.917	1.961	1.841	1.848
Sulsel	2.095	2.129	2.006	2.056	2.079	1.957	1.922
Indonesia	2.015	2.038	1.928	1.926	1.952	1.853	1.843

Sumber: BPS (2007–2013)

Tabel 5. Perubahan Konsumsi Protein di Perdesaan, 2007–2013

Provinsi	Protein (gram/kapita/hari)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumut	58,5	60,1	55,0	57,1	57,6	54,2	53,4
Jambi	57,1	56,2	51,5	52,6	54,6	52,1	49,3
Lampung	57,1	57,6	51,5	52,8	52,8	51,0	49,1
Jawa Barat	59,4	59,5	56,1	56,2	58,2	52,5	53,5
Jawa Tengah	55,9	55,8	51,5	51,3	53,4	51,2	51,7
Jawa Timur	55,9	55,3	52,7	52,5	54,2	51,8	52,0
Kalimantan Barat	57,5	55,8	53,0	53,6	55,9	51,7	52,7
Sulawesi Barat	60,1	62,0	57,5	60,0	60,8	57,8	55,2
Indonesia	57,7	57,5	54,4	55,0	56,3	53,1	53,1

Sumber: BPS (2007–2013)

Hampir setiap jenis pangan mengandung energi dan protein, namun demikian pangan sumber karbohidrat yang mempunyai kandungan energi yang tinggi. Seperti pada Tabel 6, pangsa energi yang tertinggi adalah berasal dari padi-padian dan umbi-umbian. Pada kelompok pangan ini adalah pangan sumber karbohidrat walaupun demikian tampaknya pangsa energi dari kelompok ini sangat dominan. Pada kelompok ini diduga yang dominan dikonsumsi oleh rumah tangga adalah beras sebagai pangan pokok. Hal ini juga dapat dilihat dari pangsa protein pada kelompok padi-padian dan umbi-umbian karena kandungan beras tidak hanya sebagai sumber energi, namun juga sumber protein (Tabel 7).

Analisis konsumsi energi dan protein dilanjutkan dengan melakukan uji korelasi antara luas penguasaan lahan dengan tingkat konsumsi energi dan protein, serta analisis regresi linier berganda untuk mengetahui secara lebih lengkap faktor-

faktor yang memengaruhi konsumsi energi dan protein. Penguasaan lahan sebagai proksi tingkat pendapatan rumah tangga dan pendapatan berhubungan erat dengan tingkat konsumsi energi dan protein. Hasil penelitian banyak peneliti menghasilkan bahwa faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan salah satunya adalah tingkat pendapatan rumah tangga atau individu. Sebagai contoh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamid *et al.* (2013), faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga adalah pendapatan per kapita, pendidikan ibu rumah tangga, dan *dummy* tempat tinggal. Menurut Mufidah (2012), pola konsumsi pada keluarga di Surabaya disebabkan faktor lingkungan baik itu dari tingkat pendapatan, pendidikan, pengalaman, status sosial, serta dari adanya sikap gengsi agar kedudukannya di dalam masyarakat bisa disejajarkan dengan yang lainnya.

Tabel 6. Perubahan Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan di Desa Patanas menurut Agroekosistem, 2007–2012 (kkal/kapita/hari)

Kelompok Pangan	Padi		Palawija		Sayuran		Perkebunan	
	2007	2010	2008	2011	2008	2011	2009	2012
Padi ² an dan umbi ² an	71,2	69,7	75,4	73,1	73,0	67,3	66,6	66,4
Pangan hewani	4,6	4,3	3,0	2,9	3,2	4,4	4,7	6,6
Sayuran	2,2	1,4	1,9	1,1	2,1	1,9	2,1	1,8
Kacang ² an	3,9	2,4	2,4	2,1	3,4	2,3	2,1	2,3
Buah ² an	1,1	1,8	1,5	1,8	1,4	1,9	2,4	1,7
Minyak dan lemak	15,3	18,8	14,5	17,9	15,6	20,5	20,6	19,5
Bahan minuman	1,0	0,9	0,8	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0
Bumbu ² an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsumsi lain	0,5	3,9	4,8	4,5	3,6	3,6	4,6	4,3
Makanan/minuman jadi	0,3	5,0	4,6	3,3	5,6	7,3	5,3	5,7

Hasil analisis korelasi penguasaan lahan dengan konsumsi energi, serta penguasaan lahan dengan konsumsi protein menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut memang ada korelasi, namun hal tersebut tidak pada semua agroekosistem dan tidak konsisten untuk waktu yang berlainan. Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan pola seperti hal tersebut. Pada rumah tangga padi, korelasi antara penguasaan lahan dan konsumsi energi dan protein adalah nyata, namun hanya untuk tahun 2010. Korelasi antara kedua variabel konsisten pada rumah tangga basis perkebunan. Dari temuan ini diduga konsumsi energi dan protein yang dikonsumsi oleh rumah tangga tidak seluruhnya berasal dari pembelian (kecuali pada rumah tangga perkebunan yang memang tidak menghasilkan pangan secara langsung), namun juga dari produksi sendiri. Hal ini sangat terlihat terjadi pada rumah tangga yang menghasilkan pangan yang dapat langsung dikonsumsi seperti padi, palawija, dan sayuran. Inilah fakta bahwa konsumsi pangan dipengaruhi juga ketersediaan pangan tingkat rumah tangga.

Tabel 7. Perubahan Konsumsi Protein Menurut Kelompok Pangan di Desa Patanas menurut Agroekosistem, 2007–2012

Kelompok Pangan	Padi		Palawija		Sayuran		Perkebunan	
	2007	2010	2008	2011	2008	2011	2009	2012
Padi ² an dan umbi ² an	36,9	42,5	47,9	52,4	52,0	41,8	45,5	40,3
Pangan hewani	46,0	43,5	34,1	34,2	30,3	44,8	38,3	46,1
Sayuran	4,6	3,5	5,7	3,1	5,1	4,0	5,8	4,3
Kacang ² an	10,3	7,6	9,2	7,4	10,2	6,5	6,8	6,7
Buah ² an	0,4	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	0,6
Minyak dan lemak	0,9	1,3	1,6	1,3	1,2	1,2	1,9	1,1
Bahan minuman	0,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3
Bumbu ² an	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Konsumsi lain	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4
Makanan/minuman jadi	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,5	0,1	0,3

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi energi dan protein dilakukan analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda, seperti pada Tabel 9. Selain pendapatan, faktor yang memengaruhi konsumsi energi dan protein adalah jumlah anggota rumah tangga (JART), sumber pendapatan (apakah dari sektor pertanian atau bukan pertanian), serta agroekosistem. Tingkat konsumsi energi dan protein meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga dan pada rumah tangga basis padi akan lebih tinggi daripada rumah tangga basis palawija, sayuran, dan perkebunan. Sebaliknya, tingkat konsumsi energi dan protein akan turun seiring dengan kenaikan JART dan pada rumah tangga yang sumber pendapatannya dari pertanian.

Tabel 8. Korelasi antara Luas Penguasaan Lahan dan Tingkat Konsumsi Energi/Protein di Desa Patanas, 2007–2012

Tipe Agroekosistem	Tahun	Konsumsi Energi	Konsumsi Protein
Padi	2007	0,1017	0,0388
	2010	0,2473*	0,1302*
Palawija	2008	0,0372	0,5038
	2011	0,2245*	0,2380*
Sayuran	2008	-0,1070	0,0452
	2011	0,1588	0,2481*
Perkebunan	2009	0,2252*	0,2344*
	2012	0,1325*	0,0966

Keterangan: * Nyata pada taraf 5%

Tabel 9. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konsumsi Energi dan Protein di Desa Patanas

Zat Gizi	Variabel
Energi	$0,0017 Y^* - 115,3 JART^* - 161,3 D_1^* + 98,8 D_2^{**}$
Protein	$0,0001 Y^* - 3,729 JART^* - 0,7385 D_1^{**} + 6,571 D_2^{**}$

Keterangan: * nyata pada taraf 1% dan ** nyata pada taraf 5%

PERUBAHAN TINGKAT DAN PARTISIPASI KONSUMSI PANGAN

Selain struktur pengeluaran serta tingkat konsumsi energi dan protein, analisis konsumsi juga mencakup tingkat partisipasi konsumsi yang dinyatakan dalam persen (%) dan tingkat konsumsi pangan dengan satuan kg/kapita/tahun (Tabel 10 dan Tabel 11). Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, tingkat partisipasi konsumsi pangan rumah tangga di semua agroekosistem mencapai 100%, dalam arti semua rumah tangga mengonsumsi beras sebagai pangan sumber karbohidrat atau pangan pokok. Kecenderungan tersebut adalah konsisten, tidak ada perubahan selama tiga tahun periode penelitian.

Tabel 10. Perubahan Tingkat Partisipasi Konsumsi Pangan di Desa Patanas, 2007–2012

Kelompok Pangan	Padi		Palawija		Sayuran		Perkebunan	
	2007	2010	2008	2011	2008	2011	2009	2012
Beras	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jagung	11,2	3,6	50,0	20,4	43,0	22,3	28,3	22,1
Ubi kayu	15,6	10,2	45,5	11,6	52,1	4,1	11,8	18,6
Ubi jalar	3,2	3,8	21,9	4,4	45,5	3,3	2,5	7,4
Mi instan	83,3	69,8	91,3	70,2	89,3	73,6	81,6	80,1
Gula	96,3	91,3	99,2	88,0	96,7	91,7	95,2	95,8
Daging sapi	29,7	4,8	51,2	4,4	72,7	5,8	2,5	4,8
Daging ayam	5,5	2,9	1,7	4,4	5,0	0,8	1,0	1,0
Ikan	93,4	88,4	97,1	90,7	97,5	95,0	89,8	96,2
Telur	81,6	68,6	94,2	72,0	93,4	71,1	74,3	81,7
Susu	43,2	34,5	43,0	32,0	56,2	31,4	35,9	45,5
Tahu	76,1	61,8	86,0	59,6	92,6	74,4	55,9	65,7
Tempe	81,6	78,4	88,0	67,6	88,4	78,5	62,2	73,4
Minyak goreng	95,7	92,5	97,9	98,7	99,2	100,0	94,9	98,4
Bayam	56,2	48,8	71,5	36,4	71,1	29,8	51,1	55,8
Kangkung	55,9	57,7	69,8	44,4	55,4	30,6	43,5	44,9
Kubis	17,9	20,0	60,7	16,0	91,7	71,1	22,2	28,5
Pepaya	8,9	7,7	48,8	16,4	47,9	9,9	15,9	13,1
Jeruk	62,8	30,9	78,1	20,4	90,9	21,5	21,0	29,5
Pisang	42,4	42,3	86,0	40,9	88,4	58,7	44,8	33,0

Tabel 11. Perubahan Tingkat Konsumsi Pangan di Desa Patanas, 2007–2012

Kelompok Pangan	Padi		Palawija		Sayuran		Perkebunan	
	2007	2010	2008	2011	2008	2011	2009	2012
Beras	103,9	115,5	91,8	101,1	106,2	107,6	108,3	94,5
Jagung	1,3	0,4	16,8	8,1	14,1	7,0	11,2	5,6
Ubi kayu	2,0	2,6	3,5	3,1	3,7	1,3	2,9	3,6
Ubi jalar	0,8	0,9	0,9	1,1	3,8	0,7	0,4	1,6
Mi instan	3,7	4,3	3,1	4,2	2,6	3,6	6,0	6,1
Gula	9,7	11,1	9,7	9,3	10,6	12,1	13,8	11,8
Daging sapi	0,4	0,4	2,4	0,2	0,7	1,2	0,2	0,3
Daging ayam	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Ikan	18,5	19,1	8,8	12,3	12,8	13,3	20,3	21,1
Telur	9,2	8,3	4,8	5,2	4,3	8,6	6,2	7,4
Susu	1,7	1,5	0,7	1,0	0,9	1,2	1,8	2,5
Tahu	4,1	2,5	2,4	1,8	2,4	2,8	1,9	2,2
Tempe	6,3	4,9	4,1	2,9	3,7	3,5	3,3	3,3
Minyak goreng	8,3	11,7	8,3	11,2	8,7	13,4	12,0	11,5
Bayam	6,8	4,5	5,9	2,2	4,4	2,4	5,6	4,2
Kangkung	7,2	5,4	4,2	2,7	2,7	3,0	4,4	3,3
Kubis	1,7	1,6	3,4	2,0	12,6	19,6	2,9	2,9
Pepaya	1,7	1,7	4,6	4,0	3,2	2,6	6,8	3,0
Jeruk	4,8	4,3	2,7	2,3	3,5	2,9	3,1	4,1
Pisang	4,5	12,7	10,0	13,0	6,4	14,5	18,3	10,0

Justru penurunan tingkat partisipasi dalam kurun waktu tersebut pada pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar (Tabel 10). Tingkat partisipasi konsumsi mi instan mencapai antara 70–83%, hampir menyamai beras apabila tidak dilakukan pengendalian konsumsi. Pengendalian dilakukan karena bahan baku mi instan adalah gandum yang hampir 100% harus diimpor dari luar negeri.

Menurut Aptindo (2014), impor terigu pada tahun 2012 sebesar 6.250.490 ton menjadi 6.720.509 ton. Menurut Hermanto (2013), pada akhir-akhir ini telah terjadi penurunan konsumsi pangan sumber karbohidrat yang berbasis pada sumber daya lokal, seperti beras dan umbi-umbian digantikan oleh terigu sebagai sumber karbohidrat yang berasal dari impor pangan. Hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan (2012) terhadap perubahan pola konsumsi pangan pokok dalam rentan waktu 1954–2010 selaras dengan kecenderungan yang telah diungkap sebelumnya. Pada tahun 1954 rumah tangga yang mengonsumsi beras sekitar 53,5%, ubi kayu sebesar 22,6%, dan jagung 18,9%. Namun, pada tahun 2010 pangsa nonberas (ubi kayu, jagung, dan umbi-umbi lainnya) hampir tidak ada

diganti oleh terigu naik 500% dalam waktu 30 tahun. Hal ini berarti tingkat konsumsi pangan lokal tergantikan oleh pangan internasional (berbasis terigu).

Untuk pangan hewani, partisipasi telur dan susu paling tinggi di antara pangan hewani yang lain dan kecenderungan ini berlaku untuk semua agroekosistem. Hal ini terkait dengan harga pangan di mana harga telur paling murah dibandingkan dengan daging sapi atau ayam. Selain itu juga, telur mudah diperoleh di pasaran dan mudah diolah sehingga rumah tangga lebih memilih telur dibandingkan pangan hewani yang lain. Tingginya tingkat partisipasi dan konsumsi pangan hewani ini sebagai penyumbang utama tingginya tingkat konsumsi protein pada semua rumah tangga.

KESIMPULAN

Dengan melakukan penelitian dua titik waktu (periode tiga tahun) pada rumah tangga dengan agroekosistem padi, palawija, sayuran, dan perkebunan terlihat proporsi pangan cenderung meningkat. Peningkatan ini dimaknai bukan kesejahteraan yang menurun, akan tetapi peningkatan pendapatan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun konsumsi energi dan protein ada yang meningkat, tingkat konsumsi energi dan protein (pada rumah tangga basis palawija dan perkebunan) masih belum memenuhi standar kecukupan yang dianjurkan. Penguasaan lahan sebagai proksi pendapatan tidak selalu berkorelasi nyata dengan konsumsi energi dan protein, kecuali pada rumah tangga basis perkebunan. Dengan demikian, sebagian pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang menghasilkan pangan secara langsung berasal dari produksi sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi energi dan protein adalah pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, sumber pendapatan, dan agroekosistem. Tingkat partisipasi dan konsumsi untuk beras paling tinggi, sedangkan untuk pangan lokal menurun secara drastis.

Berdasarkan temuan ini maka upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga pada semua agroekosistem menjadi penting untuk dapat hidup sehat dan produktif. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara di antaranya meningkatkan keuntungan dari usaha pertanian melalui bantuan sarana produksi dan pendampingan teknologi. Diversifikasi usaha di antara kegiatan di sektor pertanian dan di luar pertanian sesuai dengan peminatan dan keterampilan. Ketersediaan kesempatan kerja dan penciptaan tenaga kerja oleh pemerintah/pemerintah daerah dan usaha sendiri. Peningkatan kesadaran kepada semua anggota rumah tangga akan pentingnya makanan yang cukup, bergizi seimbang, dan beragam untuk kesehatan dan produktivitas, serta jaminan kualitas hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- [Aptindo] Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia. 2014. Overview Industri Tepung Terigu Nasional. [http://www.aptindo.or.id/pdfs/Updateoverview11 Juli 2014.pdf](http://www.aptindo.or.id/pdfs/Updateoverview11%20Juli%202014.pdf). (14 Juli 2014).
- Ariani, M. dan Hermanto. 2014. Perubahan Struktur Pengeluaran dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga: Analisis Data Susenas. Makalah Belum Dipublikasikan.
- Ariani, M. 2015. Strategi Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan TA 2014 dan Sinkronisasi Persiapan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota TA 2015 Wilayah Timur.
- Aryani, D., S. Oktarina, dan H. Malini. 2014. Pola Usaha Tani, Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Lahan Rawa Lebak di Sumatra Selatan. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014, Palembang, 26–27 September 2014.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2012. Road Map Diversifikasi Pangan. Edisi 2. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Hardono, G.S. 2012. Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Beberapa Provinsi. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hamid, Y., B. Setiawan, S. Suhartini. 2013. Analisis Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur). *Agrise* 13(3):175–190.
- Hattas, Z. 2011. Pola Konsumsi Masyarakat. <http://ekonkop.blogspot.com/2011/11/pola-konsumsi-masyarakat.html> (4 Januari 2014).
- Hermanto. 2013. Diversifikasi Pangan menuju Kemandirian Pangan: Pemikiran untuk Implementasi Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan. *Dalam* M. Ariani, K. Suradisatra, N.S. Saad, R. Hendrayana, H. Soeparno, dan E. Pasandaran (Eds.). *Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pertanian, Kementerian Pertanian. Bogor. hlm. 167–180.
- Heriawan, R. 2015. Melambungnya Harga Beras dan Solusi Pengendaliannya– Pengantar. Disampaikan pada Focus Group Discussion, Bogor, 2 Maret 2015. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Kasryno, F. 2013. Politik Revitalisasi Pertanian dan Dampak Pelaksanaannya. *Dalam* M. Ariani, K. Suradisatra, N.S. Saad, R. Hendrayana, H. Soeparno, E. Pasandaran (Eds.). *Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta. hlm. 11–51.
- Mapandi, W.Y. 2006. Hubungan Faktor-Faktor Sosial Budaya dengan Konsumsi Makanan Pokok Rumah Tangga pada Masyarakat di Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mauludyani, A.V.R. dan M. Ariani. 2012. Dinamika Struktur Pengeluaran Rumah Tangga. Makalah Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi X, Jakarta, 20 November. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Mufidah, N.L. 2012. Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif Pemanfaatan *Foodcourt* oleh Keluarga. *BioKultur* 13(2):157–178.

- Pakpahan, A. 2012. Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pemikiran untuk Membalik Arus Sejarah Pembangunan Nasional. Penerbit Gapperindo. Jakarta.
- Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan. 2006. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sumaryanto. 2014. Implikasi Urbanisasi terhadap Masa Depan Kemandirian dan Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Rutin Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2 April 2014, Bogor.
- Susilowati, S.H., P.U. Hadi, Sugiarto, Supriyati, W.K. Sejati, Supadi, A.K. Zakaria, T.B. Purwantini, D. Hidayat, dan M. Maulana. 2009. Panel Petani Nasional (Patanas): Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

BAB IV BENARKAH PETANI KITA SEMAKIN SEJAHTERA?

1. Dinamika Nilai Tukar Petani: Perubahan 2003–2013
(Sri Hastuti Suhartini dan I Wayan Rusastra):
2. Nilai Tukar Usaha Tani Palawija: Jagung, Kedelai, dan Ubi kayu
(Muchjidin Rachmat dan Sri Nuryanti):
3. Dinamika Kemiskinan Rumah Tangga
(Tri Bastuti Purwantini dan I Wayan Rusastra):
4. Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan Lahan Kering Perkebunan
(Adi Setiyanto):
5. Dinamika Kemiskinan Rumah Tangga dan Hubungannya dengan Penguasaan Lahan pada Berbagai Ekosistem
(Sri Hery Susilowati):

DINAMIKA NILAI TUKAR PETANI: PERUBAHAN 2003–2013

Sri Hastuti Suhartini dan I Wayan Rusastra

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah penduduk dan proporsi rumah tangga pertanian yang sangat besar, maka peningkatan kesejahteraan petani menjadi perhatian pemerintah.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani di Indonesia. NTP merupakan perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Hubungan NTP dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang dari angka NTP. Apabila harga barang atau produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari produksi pertanian juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisipendapatan. Sejauh mana pertambahan pendapatan petani ini dapat menyejahterakan petani dan keluarganya, sangat tergantung dari berapa besar selisih/margin pendapatan petani yang dipakai untuk konsumsi/kebutuhan pokoknya (*subsistence*).

Tingkat kesejahteraan petani secara utuh dapat dilihat dari sisi yang lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. *Kedua*, pengeluaran untuk produksi/budi daya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani. Perkembangan harga barang kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi ditunjukkan oleh indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Dengan membandingkan perkembangan harga It dengan Ib dalam satu parameter, yaitu NTP maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan kata lain, NTP menunjukkan pula daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa konsumsi.

NTP sebagai suatu indikator perkembangan harga bermanfaat, antara lain (a) Dari nilai It dapat dilihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani. Indeks It tersebut digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. (b) Dari nilai Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. (c) NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan nilai NTP setidaknya dapat diperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan petani. (d) Angka NTP juga menunjukkan tingkat daya saing (*competitiveness*) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini, upaya spesialisasi produk dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah perkembangan kesejahteraan petani Indonesia selama 10 tahun terakhir? Tulisan ini secara umum bertujuan menganalisis dinamika nilai tukar petani di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk (1) menganalisis perkembangan nilai tukar petani nasional dan wilayah; (2) menganalisis perkembangan faktor pembentuk nilai tukar, yaitu indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani; dan (3) kinerja dan perspektif kebijakan dalam rangka meningkatkan nilai tukar dan kesejahteraan petani.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran dan Pendekatan

Konsep NTP dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Pengukuran NTP dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut (Rosidi, 2007):

$$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$$

di mana:

- NTP = nilai tukar petani
- It = indeks harga yang diterima petani
- Ib = indeks harga yang dibayar petani

Rumus yang digunakan pada penghitungan indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah formula indeks Laspeyres yang dikembangkan (*modified Laspeyres indices*).

NTP merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP, yaitu

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Data dan Analisis Data

Tulisan ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS deret waktu tahun 2003–2013, untuk aspek tertentu hanya menganalisis beberapa tahun. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan tabel-tabel dan grafik. Untuk mempertajam pembahasan, tulisan ini menggunakan pendekatan wilayah. Mengingat perkembangan wilayah dan provinsi berbeda-beda maka pembahasan NTP dan faktor pembentuknya dilakukan untuk tingkat nasional, provinsi dan wilayah/pulau. Segmentasi waktu dilakukan berdasarkan periode kepemimpinan atau Renstra, yaitu tahun 2003–2008, 2009–2013, dan 2003–2013.

DINAMIKA NILAI TUKAR PETANI

Perkembangan Nilai Tukar Petani

NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada Tabel 1 diuraikan perkembangan NTP di tingkat nasional tahun 2003–2013. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, NTP Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan data NTP sejak tahun 2010–2013 mempunyai nilai lebih dari 100. Hal ini berarti bahwa petani mengalami surplus, yakni harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami kenaikan lebih tinggi dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Diharapkan ke depan, tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat seiring dengan dilakukannya penguatan perekonomian perdesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.

Selama periode 2003–2013, NTP mengalami pertumbuhan sebesar 0,29% per tahun. Apabila dibandingkan pertumbuhan NTP antarperiode, maka pertumbuhan terbesar pada periode tahun 2009–2013, yaitu 0,78% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan pada periode tahun 2003–2008 hanya 0,04% per tahun.

Tabel 1. Perkembangan nilai tukar petani nasional, 2003–2013 (2007=100)

Tahun	Nilai Tukar Petani	Pertumbuhan/tahun (%)
2003	99,78	
2004	96,06	-3,87
2005	94,48	-1,67
2006	96,13	1,72
2007	100,00	3,87
2008	100,15	0,15
2009	99,86	-0,29
2010	101,77	1,87
2011	104,58	2,69
2012	104,13	-0,43
2013	102,97	-1,13
Rata-rata	99,99	0,29
Tren 2009–2013		0,78
Tren 2003–2008		0,04

Sumber: BPS (2003-2013), diolah

Pada Tabel 2 dapat dilihat perkembangan NTP antarwilayah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Data agregat nasional menunjukkan kenaikan NTP dari

100,2 pada tahun 2008 menjadi 103,0 pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 2,81%.

Tabel 2. Perkembangan NTP per Wilayah di Indonesia, 2008–2013 (2007=100)

Wilayah	2008	2013	Perkembangan (%)
Sumatera	101,8	103,3	1,47
Jawa	99,8	108,6	8,83
Bali + Nusa Tenggara	98,5	100,2	1,74
Kalimantan	100,3	99,2	-1,12
Sulawesi	101,8	102,6	0,76
Maluku + Papua	101,9	101,5	-0,47
Indonesia	100,2	103,0	2,81

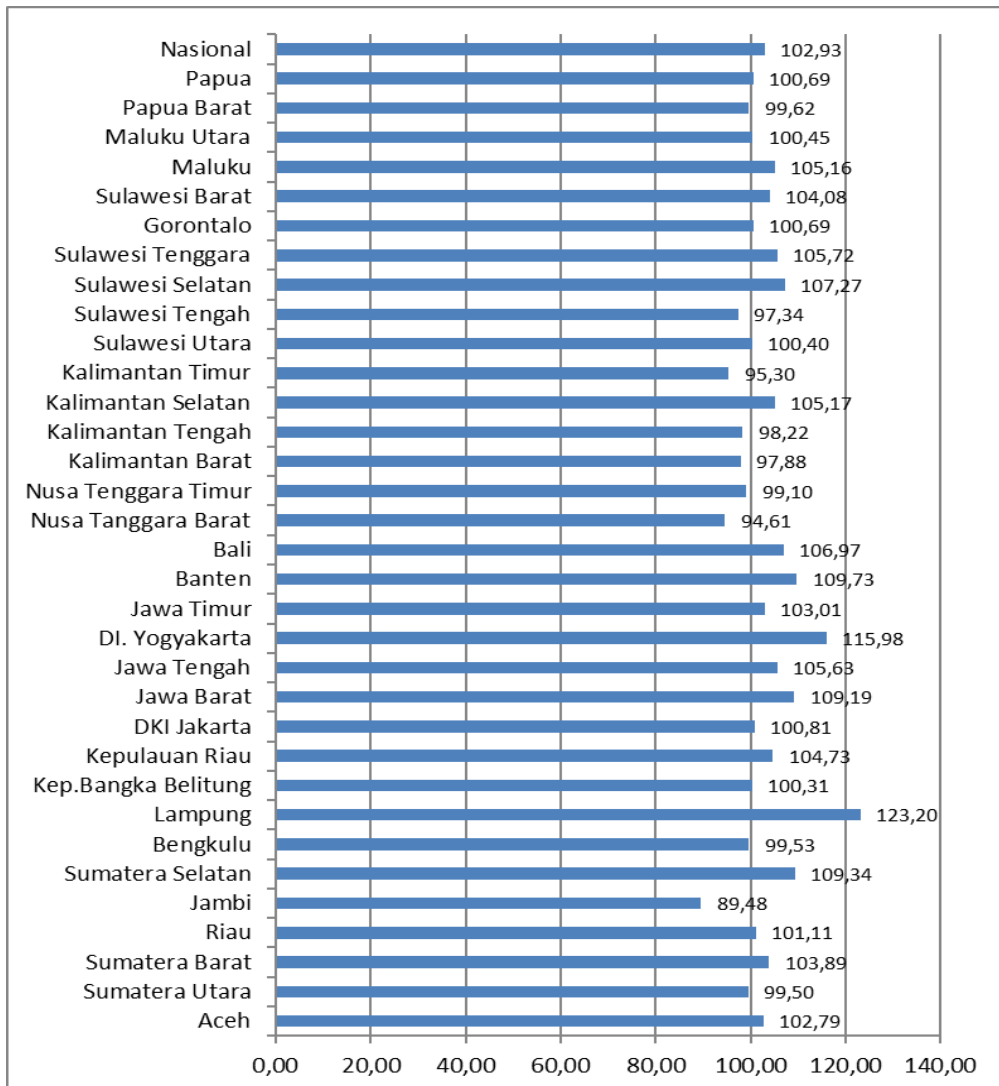
Sumber: BPS (2003, 2013), diolah

Pada periode 2008–2013 tersebut sebagian besar wilayah mengalami kenaikan NTP, kecuali di wilayah Kalimantan serta wilayah Maluku dan Papua mengalami penurunan NTP masing-masing sebesar 1,12% dan 0,47%. Wilayah dengan pertumbuhan NTP terbesar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah wilayah Jawa dengan pertumbuhan 8,83% di atas rata-rata pertumbuhan NTP nasional. Untuk wilayah lainnya, kecuali Kalimantan serta Maluku dan Papua, tingkat pertumbuhannya relatif kecil, yaitu sekitar 1%.

Data agregat nasional tahun 2013 menunjukkan NTP Indonesia sebesar 102,93%, dan pada sebagian besar provinsi mempunyai NTP lebih besar dari 100% (Gambar 1). Provinsi dengan NTP terbesar adalah Lampung dan DI Yogyakarta masing-masing sebesar 123% dan 116%. Pada tahun yang sama NTP Provinsi Jambi dan Nusa Tenggara relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu masing-masing 89,48% dan 94,61%.

Dinamika NTP nasional bulanan periode 2008 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 3. Pertumbuhan NTP relatif besar terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, berkisar antara 3,01% sampai 4,59%. Pada bulan Juli sampai dengan September dan bulan Desember, pertumbuhan NTP lebih kecil berkisar antara 0,24% sampai 1,75%.

Hasil perhitungan NTP oleh BPS dengan menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa NTP rata-rata tahun 2010–2014 (sampai dengan bulan Mei 2014) mencapai 103,78 (Tabel 4). NTP rata-rata tahun 2010–2014 tertinggi adalah pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 106,52, diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat (105,72), subsektor peternakan (102,49) dan NTP terendah pada subsektor tanaman pangan (100,39). NTP tahun 2010–2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,70%. Pada periode tersebut NTP tanaman pangan, tanaman hortikultura dan peternakan mengalami pertumbuhan positif masing-masing 0,65%, 1,45% dan 0,31%, sedangkan NTP tanaman perkebunan rakyat mengalami pertumbuhan negatif -0,62%.



Sumber: BPS (2013), diolah

Gambar 1. Nilai Tukar Petani per Provinsi di Indonesia, 2013 (2007=100)

Permasalahan rendahnya NTP antara lain disebabkan oleh (1) skala usaha budi daya pertanian yang relatif kecil; (2) harga komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) pembangunan infrastruktur yang belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi; (4) aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah (5) daya saing komoditas pertanian relatif rendah; (6) laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan

produksi komoditas pertanian; (7) dari sisi biaya produksi, laju pertumbuhan harga/biaya obat-obatan dan penambahan barang modal tinggi dibandingkan laju pertumbuhan harga komoditas pertanian.

Tabel 3. Dinamika NTP nasional bulanan, 2008 dan 2013 (2007=100)

Bulan	2008	2013	Perkembangan (%)
Januari	100,69	103,83	3,12
Februari	100,59	103,62	3,01
Maret	98,79	103,32	4,59
April	99,05	103,26	4,26
Mei	100,17	103,55	3,38
Juni	100,64	103,76	3,10
Juli	101,71	102,81	1,08
Agustus	102,00	102,24	0,24
September	101,69	102,47	0,77
Oktober	99,20	102,99	3,82
November	98,36	103,04	4,76
Desember	98,99	100,73	1,75

Sumber: BPS (2008, 2013), diolah

Tabel 4. Perkembangan Nilai Tukar Petani per Subsektor di Indonesia, 2008–2014 (2007=100)

No.	Tahun	Nilai Tukar Petani				
		Total	Tanaman Pangan	Tanaman Hortikultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan
1.	2008	100,14	97,07	99,71	109,56	101,09
2.	2009	99,85	95,08	103,38	103,80	104,79
3.	2010	101,77	97,78	107,60	104,07	104,10
4.	2011	104,58	102,82	108,95	107,29	101,22
5.	2012	105,24	104,70	109,03	105,91	101,33
6.	2013	104,92	104,62	108,35	104,13	102,05
7.	2014 ^a	104,36	100,63	108,63	105,31	102,88
	Rataan	103,78	100,39	106,52	105,72	102,49
	Pertumbuhan (%)	0,70	0,65	1,45	-0,62	0,31

Sumber: BPS (2008-2014), diolah

Keterangan: ^a NTP 2014 sampai dengan bulan Mei 2014

Dinamika Faktor Pembentuk NTP

Faktor pembentuk NTP terdiri dari indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Selama kurun waktu 2003–2013, indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani mengalami peningkatan dengan laju sedikit lebih besar pada indeks harga yang diterima petani (Tabel 5).

Tabel 5. Perkembangan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di Indonesia, 2003–2013 (2007=100)

Tahun	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)		Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	
	Nilai	Pertumbuhan Tahun (%)	Nilai	Pertumbuhan Tahun (%)
2003	69,33		69,49	
2004	70,30	1,38	73,19	5,06
2005	75,97	7,47	80,50	9,08
2006	88,41	14,07	91,95	12,45
2007	100,00	11,59	100,00	8,05
2008	112,35	11,00	112,19	10,86
2009	119,72	6,15	119,89	6,42
2010	128,62	6,92	126,37	5,13
2011	138,90	7,40	132,81	4,85
2012	140,62	1,23	135,08	1,68
2013	143,49	2,00	139,34	3,06
Rata-rata	107,97	6,92	107,34	6,66
Tren 2009–2013		4,68		3,84
Tren 2003–2008		9,10		9,10

Sumber: BPS (2003-2013), diolah

Indeks harga yang diterima petani meningkat rata-rata 6,92% per tahun, sedangkan indeks harga yang dibayar petani meningkat rata-rata 6,66% per tahun. Kenaikan It maupun Ib terbesar terjadi pada periode 2003–2008. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, terjadi pertumbuhan positif baik pada indeks harga yang diterima petani maupun indeks harga yang dibayar petani. Pertumbuhan positif terjadi bulan Januari sampai dengan November, sedangkan pada bulan Desember indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar mengalami penurunan (Tabel 6).

Dalam konteks peningkatan NTP upaya yang dapat dilakukan petani adalah mencapai efisiensi ekonomi semaksimal mungkin melalui perbaikan efisiensi teknis dan optimalisasi realokasi sumber daya (efisiensi alokatif) didukung oleh kebijakan insentif harga output sehingga diperoleh tingkat pendapatan yang memadai.

Tingkat pencapaian efisiensi beberapa komoditas pertanian relatif bervariasi (Saptana, 2012) yaitu 0,50–0,85 (efisiensi teknis), 0,45–0,70 (efisiensi alokatif) dan 0,35–0,60 untuk efisiensi ekonomi. Dengan mempertimbangkan nilai efisiensi lebih besar dari 0,70 sebagai kategori tingkat efisiensi tinggi, maka dapat dinyatakan bahwa nilai efisiensi berada pada kategori rendah sampai sedang. Jadi, masih terdapat ruang untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan pendapatan (serta pada akhirnya NTP) pertanian nasional melalui perbaikan efisiensi usaha tani.

Tabel 6. Dinamika Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Nasional Bulanan, 2008 dan 2013 (2007=100)

Bulan	It			Ib		
	2008	2013	Perkembangan (%)	2008	2013	Perkembangan (%)
Januari	106,10	143,63	35,37	105,39	138,35	31,27
Februari	107,04	143,98	34,51	106,44	138,98	30,57
Maret	106,17	144,25	35,87	107,50	139,65	29,90
April	107,12	144,35	34,76	108,18	139,83	29,26
Mei	109,61	144,78	32,08	109,45	139,85	27,78
Juni	113,52	145,49	28,16	112,80	140,25	24,33
Juli	116,51	148,02	27,04	114,56	144,02	25,71
Agustus	117,49	148,68	26,55	115,18	145,45	26,28
September	118,02	149,09	26,32	116,05	145,52	25,40
Oktober	115,74	150,18	29,76	116,68	145,84	24,99
November	114,86	150,49	31,02	116,77	146,07	25,09
Desember	116,06	109,01	-6,08	117,25	108,23	-7,70

Sumber: BPS (2008, 2013), diolah

Terdapat sejumlah instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam menekan inefisiensi teknis usaha tani (Saptana, 2012), yaitu (a) meningkatkan luas lahan garapan; (b) meningkatkan sumber-sumber pendapatan baik pertanian maupun non pertanian; (c) meningkatkan pendidikan formal dan pengalaman usaha tani kepala keluarga tani; (d) meningkatkan pengetahuan teknis budi daya; (e) meningkatkan akses petani ke pasar input dan output pertanian; (f) meningkatkan partisipasi petani dalam kegiatan kelompok tani; dan (g) memperbaiki penanganan aspek panen dan pascapanen komoditas pertanian.

Pada tataran yang lebih luas, beberapa instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dalam perspektif meningkatkan nilai tukar dan kesejahteraan petani adalah (a) meningkatkan kapasitas produksi pertanian melalui pengembangan teknologi, revitalisasi, optimalisasi, dan pengembangan sumber daya lahan; (b) pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas yang mencakup irigasi, jalan usaha tani dan

perdesaan, perlistrikan, dan telekomunikasi, dan lain-lain; (c) penguatan pelaksanaan subsidi sarana produksi dan pengembangan insentif harga bagi petani dalam perspektif stabilisasi harga sehingga dimungkinkan pelaksanaan optimalisasi alokasi sumber daya dalam usaha tani; (d) revitalisasi program dan pelaksanaan penyuluhan dalam meningkatkan kemampuan manajemen petani sehingga kemampuannya dalam perbaikan efisiensi usaha tani meningkat; dan (e) perbaikan struktur dan efisiensi pemasaran input dan produk pertanian nasional sehingga mampu menekan biaya dan meningkatkan nilai jual yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani.

KINERJA DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN

Kebijakan peningkatan kesejahteraan petani memiliki dimensi yang kompleks. Kesejahteraan merupakan resultante dari sejumlah keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup kebijakan subsidi harga sarana produksi utama, kebijakan stabilisasi harga produksi pada tingkat yang memberikan insentif yang memadai bagi petani, dan kebijakan peningkatan produksi dan produk komoditas pertanian. Keberhasilan kebijakan subsidi input, stabilisasi harga output, dan peningkatan produksi membutuhkan prasyarat dan kebijakan pendukung yang relevan agar mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Perbaikan tingkat kesejahteraan petani juga membutuhkan dukungan tingkat dan stabilitas harga komoditas pangan dan nonpangan yang dibutuhkan petani dalam mendukung daya beli dan tingkat kesejahteraan rumah-tangganya. NTP sebagai indikator daya beli dan tingkat kesejahteraan merupakan rasio indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Di samping mengukur tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu, NTP juga merefleksikan fluktuabilitas harga komoditas pertanian yang diterima petani, harga komoditas yang dikonsumsi, harga sarana yang digunakan untuk produksi (BPS, 2003).

Kebijakan Subsidi Harga Input

Kebijakan sarana produksi utama yang diterapkan pemerintah selama ini adalah benih dan pupuk. Benih dan pupuk memegang peranan penting dalam struktur biaya produksi dan merupakan faktor utama penentu peningkatan produksi komoditas pertanian. Ketersediaan dan akses petani terhadap benih dan pupuk pada tingkat kebutuhan yang tepat dan harga terjangkau daya beli akan menentukan tingkat keberhasilan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Bahasan ini menampilkan kinerja dan perspektif implementasi kebijakan kedua input utama ini dalam rangka mensukseskan peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Ketersediaan dan akses benih berkualitas memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produksi komoditas pertanian, sehingga tetap perlu dalam kendali kebijakan pemerintah (Kariyasa, 2007). Kebijakan subsidi benih dinilai belum efektif yang ditunjukkan oleh harga benih yang tetap tinggi,

kualitas benih yang tidak sesuai, dan tingkat partisipasi penggunaan benih berlabel yang masih perlu ditingkatkan. Reorientasi kebijakan perlu mempertimbangkan modus pemberian subsidi benih menurut komoditas dan pola distribusinya sehingga tujuan penggunaan benih berkualitas dapat tercapai maksimal. Alternatif mekanisme penyaluran benih bersubsidi yang ditawarkan adalah (a) harga jual ditetapkan pemerintah; dan (b) harga jual berdasarkan mekanisme pasar. Pada kedua alternatif tersebut, penyaluran benih dapat tetap terbuka, sehingga tidak terjadi dualisme pasar akibat adanya perbedaan harga, seperti yang terjadi pada pasar pupuk.

Mayrowani (2008) mengemukakan pentingnya konsolidasi kebijakan pusat-daerah terkait dengan kebijakan implementasi subsidi benih jagung. Dibutuhkan reorientasi pendekatan *top-down* ke pendekatan yang lebih moderat dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkah laku petani yang bersifat spesifik. Reorientasi pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan teknis di lapangan, sehingga target penyaluran benih dapat dicapai dengan baik. Perlu dipertimbangkan harmonisasi kebijakan dengan mempertimbangkan basis kebijakan apakah langsung ke petani (pendekatan pusat) atau berbasis kelompok tani (pendekatan daerah) dengan sasaran keberlanjutan adopsi teknologi benih pascakebijakan subsidi. Dinyatakan bahwa dampak kebijakan subsidi benih terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani bersifat variatif tergantung pada sejumlah faktor, yaitu ketepatan waktu/mutu/jumlah benih yang diterima petani, perubahan cuaca dan kekeringan, teknologi budi daya dan penerapan jagung hibrida, dan pembatasan skala usaha petani penerima subsidi, yaitu satu hektar lahan garapan.

Pupuk, seperti halnya benih, memiliki peranan strategis dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui intervensi dan fasilitasi kebijakan terkait aspek teknis pemupukan, penyediaan dan distribusi, serta stabilisasi kebijakan harga melalui subsidi. Kebijakan pemupukan yang dinilai sudah komprehensif (penetapan kebutuhan, harga eceran tertinggi/HET, besaran subsidi, dan sistem distribusinya), ternyata belum mampu menjamin ketersediaan dan akses petani terhadap sarana produksi utama ini. Dalam konteks ini dibutuhkan revitalisasi kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang mencakup aspek teknis, manajemen, dan regulasi (Rachman, 2009). Revitalisasi aspek teknis mencakup sosialisasi pemupukan berimbang (organik dan anorganik) spesifik lokasi, dan mempercepat pengembangan pupuk organik *in situ* melalui pelatihan pembuatan pupuk organik dan dekomposer *in situ*. Aspek manajemen mencakup sosialisasi penyaluran sistem tertutup, pilot proyek penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu kendali (*smart card*), koordinasi lintas sektor dan pusat-daerah dalam implementasi kebijakan, dan mengedepankan peran penyalur Lini IV dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Revitalisasi regulasi agar mempertimbangkan peran RDKK sebagai basis perencanaan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, dan pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi diberikan sanksi pidana sejalan dengan semangat ketentuan Perpres No. 77 Tahun 2005.

Kebijakan subsidi pupuk memiliki keterkaitan dengan kebijakan proteksi harga (kebijakan HPP). Bahkan kebijakan pupuk tertentu (urea) dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan pemupukan berimbang antarpupuk anorganik dan/atau menaikkan penggunaan pupuk organik. Penelitian Kariyasa (2007) menunjukkan bahwa pengurangan subsidi pupuk urea (peningkatan HET urea) secara makro memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan pupuk dan kinerja ekonomi padi. Terdapat empat manfaat jika HET pupuk urea dikoreksi sesuai dengan HPP gabah, yaitu (a) menghindari penggunaan pupuk urea berlebih, sehingga berpeluang peningkatan penggunaan pupuk anorganik lainnya (TSP dan/atau KCI) secara lebih berimbang; (b) aplikasi pemupukan berimbang akan mendorong peningkatan produksi beras nasional melalui perbaikan produktivitas dan rendemen gabah ke beras; (c) relaksasi politik anggaran melalui pengalihan dana pembangunan untuk perbaikan kapasitas produksi, penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi peningkatan efisiensi dan kesejahteraan petani; dan (d) petani akan termotivasi dalam pemanfaatan pupuk organik ramah lingkungan sehingga akan semakin memantapkan keberlanjutan usaha tani padi.

Pergeseran paradigma protektif menuju paradigma pasar memerlukan sistem distribusi yang handal dan terpercaya dalam jangka panjang. Penyaluran pupuk bersubsidi perlu penanganan secara tuntas untuk meningkatkan produksi pangan, pendapatan, dan kesejahteraan petani produsen. Beberapa model yang perlu dipertimbangkan adalah uji coba *smart card* dan/atau sistem subsidi pupuk langsung yang dikomplemen dengan hubungan jangka panjang antara produsen dan distributor dalam kerangka *relationship marketing* (Sudjono, 2011). Uji coba *smart card* merupakan upaya untuk membangun sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berbasis data dan teknologi informasi. Sistem subsidi pupuk langsung diarahkan untuk memastikan bahwa margin perbedaan harga antara pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi sampai ke tangan yang berhak.

Dalam sistem distribusi berbasis *relationship marketing*, terdapat beberapa langkah penting dalam pemilihan distributor yang tepat (Hollensen, 2010 *dalam* Sudjono *loc.cit.*), yaitu (a) melakukan seleksi distributor potensial dengan kriteria kinerja baik dan dapat menjadi partner yang saling mendukung bagi produsen; (b) distributor dengan horizon pikiran jangka panjang, siap melakukan investasi dan hubungan yang terbuka, serta mampu membangun pasar; (c) distributor adalah partner jangka panjang, bukan alat jangka pendek untuk menembus pasar; (d) produsen harus mendukung upaya menembus pasar dengan dana, sumber daya manusia, dan konsep pemasaran yang jelas; (e) produsen harus memegang kendali dalam pemasaran, dan distributor diharapkan dapat melakukan adaptasi terhadap strategi yang telah disepakati; (f) distributor harus mampu menyediakan data yang terperinci tentang pasar dan kinerja keuangan; dan (g) produsen perlu membangun kelembagaan jaringan antardistributor dengan sasaran percepatan transfer gagasan dan pengalaman untuk meningkatkan konsistensi dan kinerja strategi pemasaran bersama.

Kebijakan Stabilisasi Harga Output

Berkaitan dengan kebijakan dan stabilisasi harga output pertanian beberapa aspek yang patut dipertimbangkan adalah (a) kinerja dan prospektif harga pembelian pemerintah gabah dan beras; (b) kebijakan antisipatif implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah multikualitas gabah dan beras; (c) antisipasi penerapan dan pembelajaran kebijakan subsidi ekspor beras dalam merespon peluang ekspor ke depan; dan (d) antisipasi dampak kebijakan harga gabah dan beras dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras telah dilakukan sejak tahun 2000, dengan dinamika justifikasi dan sasaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi beras dalam perspektif mendukung ekonomi pertanian, perdesaan, dan nasional (Suryana *et al.*, 2015). Pada awal penerapannya sasaran kebijakan HPP adalah untuk meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan ekonomi perdesaan. Pada sepuluh tahun perkembangannya (2000–2010), sasaran kebijakan HPP diperluas dengan cakupan peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional. Sejak tahun 2011, fokus kebijakan HPP ini adalah menjaga stabilitas perekonomian nasional, dengan justifikasi dan sasaran untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global.

Hasil evaluasi kebijakan HPP gabah periode 2004–2006 (dalam rentang sepuluh tahun awal pelaksanaannya) memberikan beberapa informasi menarik untuk perspektif ke depan (Simatupang *et al.*, 2005a; Simatupang *et al.*, 2005b), yaitu (a) dibutuhkan optimalisasi dan pemantapan pelaksanaan HPP gabah dan beras untuk mendorong adopsi teknologi, peningkatan produktivitas, areal tanam padi, dan mencegah alih-fungsi lahan; (b) pemantapan rumusan skenario harga relatif antara GKP, GKG, dan beras sebagai dasar acuan untuk memastikan efektivitas pembelian harga dasar GKP dalam mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani padi; dan (c) penetapan HPP gabah dan beras diharapkan tetap dapat mengantisipasi perubahan faktor eksternal (misalnya kenaikan harga BBM), dan dapat mempertahankan tingkat profitabilitas usaha tani pada tingkat yang wajar dan mendukung kesejahteraan petani.

Dalam memenuhi tuntutan konsumen atas kebutuhan beras berkualitas sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dibutuhkan reorientasi menuju penerapan HPP multikualitas. Penerapan HPP multikualitas diharapkan dapat berperan dalam mendorong peningkatan produksi dan kualitas gabah dan beras serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani padi. Beberapa dampak antisipatif dengan penerapan kebijakan HPP multikualitas (Maulana, 2012), di antaranya adalah (a) dapat meningkatkan produksi gabah berkualitas sebagai bahan baku beras dengan kualitas premium; (b) dapat meningkatkan keuntungan petani secara signifikan dibandingkan dengan HPP tunggal kualitas medium seperti yang berlaku selama ini; (c) mampu mendorong pedagang dan penggilingan (RMU) untuk meningkatkan produksi beras berkualitas melalui perbaikan proses penggilingan, revitalisasi RMU, dan adanya insentif menghasilkan beras kualitas premium. Kebijakan HPP multikualitas ini dapat diterapkan melalui payung hukum

Inpres perberasan yang memberikan mandat kepada Bulog dalam pengadaan gabah dan beras dengan kelompok kualitas medium dan premium. Kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan perkembangan pasar beras berkualitas, dan juga dikomplemen dengan sosialisasi tabel rafaksi sebagai pedoman baku penentuan kualitas bagi petani dan pedagang dalam transaksi jual-beli gabah dan beras (Maulana dan Rachman, 2011).

Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan produksi padi dengan upaya khusus yang dilakukan pemerintah saat ini, patut dipertimbangkan peluang dan kebijakan antisipatif ekspor beras. Keberhasilan peningkatan produksi beras dapat berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional, namun juga berpotensi negatif bagi petani produsen. Kelebihan produksi akan menguatkan ketahanan pangan melalui eliminasi risiko impor dengan tingkat instabilitas yang relatif tinggi. Kelebihan produksi juga dapat menekan harga beras dalam negeri dan mengurangi insentif petani, sehingga akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan peningkatan produksi padi. Solusinya adalah ekspor beras, dengan pilihan beras kualitas medium atau kualitas premium. Menurut Sawit (2009) pilihan kualitas ini menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Pencegahan penurunan harga gabah melalui ekspor beras kualitas medium akan membutuhkan subsidi ekspor sebesar US\$200/ton, sehingga dengan target ekspor setengah juta ton saja maka total subsidi ekspor yang dibutuhkan akan mencapai US\$100 juta (Rp1.200 miliar); (b) keputusan ekspor dan subsidi ekspor beras medium nampaknya sulit diterima DPR dan masyarakat luas, sehingga lebih realistis memberi subsidi penduduk dalam negeri; dan (c) Pemerintah dapat mempertimbangkan ekspor beras aromatik dan/atau beras kualitas premium lainnya dengan mengacu pada disparitas harga beras tersebut di pasar dalam dan luar negeri. Kebijakan ekspor beras aromatik dan premium ini sejalan dengan upaya penerapan HPP multikualitas untuk mendorong peningkatan produksi beras berkualitas secara bertahap, sejalan dengan peningkatan kebutuhan domestik dan peluang ekspor.

Kebijakan HPP gabah dan beras dinilai tetap relevan dan dinilai efektif sebagai instrumen insentif bagi petani, referensi harga, dan stabilisasi pasokan dan harga gabah dan beras. Penerapan kebijakan HPP gabah dan beras yang dikomplemen dengan kebijakan pendukungnya berdampak positif terhadap stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen (Suryana *et al.*, 2014). Dalam periode 2002–2014 harga beras relatif sangat stabil, dengan rataan CV/variasi harga bulanan 4,48, yang dinilai jauh lebih rendah dibandingkan dengan CV harga komoditas pangan lainnya seperti gula pasir, daging sapi, dan cabai merah yang tidak mendapatkan perlindungan kebijakan harga yang komprehensif. Keberhasilan implementasi kebijakan HPP gabah dan beras ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan kebijakan pendukungnya yang mencakup (a) pembelian gabah dan beras petani sesuai harga pembelian yang ditetapkan pemerintah; (b) pengelolaan stok gabah dan beras pembelian dari petani yang mencakup penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusiannya; (c) pengisolasian pasar beras domestik dari gejolak harga internasional melalui penerapan kebijakan impor yang tepat dan kondusif; (d) pengaturan distribusi beras domestik, termasuk untuk keperluan jaminan sosial dan

keadaan darurat; dan (e) dukungan pembiayaan dan politik anggaran yang tepat dan transparan.

Kebijakan Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani

Peningkatan produksi pada tingkat yang menguntungkan petani tidak terlepas dari upaya mengeksplorasi peluang peningkatan produktivitas dan optimalisasi alokasi sarana produksi secara efektif dan efisien. Peluang peningkatan produktivitas akan dimungkinkan pada tingkat efisiensi teknis dan potensi teknologi tertentu. Optimalisasi penggunaan input akan dimungkinkan pada tingkat efisiensi alokatif tertentu dengan dukungan stabilitas harga input dan output yang kondusif. Hasil tinjauan yang dilakukan Saptana (2012) terhadap beberapa komoditas pangan di Indonesia menunjukkan kisaran efisiensi teknis 0,50–0,85, efisiensi alokatif 0,45–0,70, dan efisiensi ekonomi 0,35–0,60. Dengan mempertimbangkan nilai di atas 0,70 sebagai katagori efisiensi tinggi, maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar komoditas pangan Indonesia memiliki tingkat efisiensi rendah dan moderat. Jadi masih banyak peluang yang dapat dilakukan dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui perbaikan efisiensi teknis dan optimalisasi penggunaan sarana produksi.

Beberapa upaya yang dapat dipertimbangkan dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui perbaikan efisiensi usaha tani pangan (Saptana, 2012) adalah (a) meningkatkan skala usaha serta tingkat dan keragaman sumber pendapatan (pertanian dan nonpertanian); (b) meningkatkan pendidikan, pelatihan, pengalaman usaha tani, dan partisipasi keterlibatan petani dalam kelompok tani; (c) meningkatkan ketersediaan dan akses petani terhadap pasar input dan output pertanian; (d) pemantapan penanganan kegiatan panen, pascapanen, dan pengembangan produk pertanian. Patut disadari bahwa keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh sejumlah kebijakan pendukung seperti peningkatan dan perbaikan kapasitas produksi pertanian (teknologi dan sumber daya lahan), infrastruktur fisik dan kelembagaan pertanian dan perdesaan, struktur dan efisiensi pemasaran komoditas dan produk pertanian pangan. Melalui perbaikan kapasitas produksi, infrastruktur, dan efisiensi pemasaran maka peluang dan akselerasi peningkatan produksi dan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan efisiensi akan semakin terbuka.

Dalam perspektif pengembangan nilai tukar atau kesejahteraan petani, peningkatan produksi dan pendapatan petani perlu dikomplemen dengan kebijakan terkait dengan pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan daya beli petani dapat dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga melalui penurunan harga atau biaya terkait produk konsumsi (pangan dan nonpangan) serta sarana produksi dan barang modal kebutuhan usaha tani. Beberapa kebijakan terkait dengan pengurangan beban pengeluaran konsumsi rumah tangga petani (Rachmat, 2013), di antaranya adalah beras murah untuk rakyat miskin (Raskin), program wajib belajar dan bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat/kecelakaan kerja/hari tua/pensiun/persalinan/kematian, program rumah murah, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah yang sejalan dengan pengurangan

beban biaya produksi usaha tani adalah subsidi benih, pupuk, bunga kredit program, di samping kebijakan stabilisasi harga pangan strategis. Dinyatakan bahwa kebijakan yang bersifat prorakyat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagian besar relevan untuk memperbaiki nilai tukar petani.

KESIMPULAN

Secara nasional NTP menunjukkan kecenderungan meningkat yang artinya bahwa petani cenderung mengalami surplus karena kenaikan harga produk yang dijual petani lebih besar dibanding kenaikan harga barang konsumsi yang dibeli petani. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

NTP rata-rata tahun 2010–2014 tertinggi adalah pada subsektor tanaman hortikultura, diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan NTP terendah pada subsektor tanaman pangan. Selama kurun waktu 2003–2013, indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani mengalami peningkatan dengan laju sedikit lebih besar pada indeks harga yang diterima petani.

Instrumen kebijakan untuk meningkatkan NTP antara lain kebijakan subsidi harga input, kebijakan stabilisasi harga output dan kebijakan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan NTP dapat dilakukan melalui perbaikan efisiensi usaha tani, yang akan meningkatkan tingkat produktivitas dan pendapatan pertanian nasional. Secara umum kebijakan harga (gabah dan beras) yang diterapkan sesuai dengan variasi desain dan sasarannya mempunyai dampak positif terhadap upaya peningkatan produksi padi dan stabilitas pasokan dan harga gabah/beras. Dalam konteks peningkatan NTP dan kesejahteraan petani maka pemantapan dan penguatan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan harga output dalam mendukung stabilitas peningkatan produksi dan harga menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2003–2013. Nilai Tukar Petani. Subdirektorat Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Kariyasa, K. 2007. Usulan Kebijakan Pola Pemberian dan Pendistribusian Benih Bersubsidi. Analisis Kebijakan Pertanian 5(4):304-319.
- Kariyasa, K. 2007. Usulan HET Pupuk Berdasarkan Tingkat Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah. Analisis Kebijakan Pertanian 5(1):72-85.
- Maulana, M. dan B. Rachman. 2011. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Bulog. Analisis Kebijakan Pertanian 9(4):331-347.

- Maulana, M. 2012. Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah dan Beras di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* 10(3):211-223.
- Mayrowani, H. 2008. Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung: Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian* 6(3):256-271.
- Rachman, B. 2009. Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. *Analisis Kebijakan Pertanian* 7(2):131-146.
- Rachmat, M. 2013. Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 31(2):111-122.
- Saptana. 2012. Konsep Efisiensi Usaha Tani Pangan dan Implikasinya Bagi Peningkatan Produktivitas. *Forum Agro Ekonomi* 30(2):109-128.
- Sawit, M.H. 2009. Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah Diterapkan di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* 7(3):231-247.
- Simatupang, P., S. Mardianto, dan M. Maulana. 2005a. Evaluasi Kebijakan Harga Gabah 2004. *Analisis Kebijakan Pertanian* 3(1):1-11.
- Simatupang, P., S. Mardianto, K. Kariyasa, dan M. Maulana. 2005b. Evaluasi Pelaksanaan Harga Gabah Pembelian Pemerintah Tahun 2005 dan Perspektif Penyesuaiannya Tahun 2006. *Analisis Kebijakan Pertanian* 3(3):187-200.
- Sudjono, S. 2011. Sistem Distribusi Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kapada Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 9(4):313-330.
- Suryana, A., B. Rachman, dan M.D. Hartono. 2014. Pengembangan Inovasi Pertanian 7(4):155-168.
- Rosidi, A. 2007. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan Petani. Makalah Pertemuan dan Diskusi Terbatas Mengenai —Nilai Tukar Petani (NTP)‖, Bogor, 15 Maret 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

NILAI TUKAR USAHA TANI PALAWIJA: JAGUNG, KEDELAI, DAN UBI KAYU

Muchjidin Rachmat dan Sri Nuryanti

PENDAHULUAN

Penyediaan pangan merupakan prioritas utama pembangunan pertanian. Komoditas pangan prioritas tersebut antara lain yang utama adalah padi dan palawija. Dalam periode tahun 2010–2014 salah satu target utama pembangunan pertanian adalah pencapaian swasembada pangan (Kementan, 2010), target pencapaian ini terus berlanjut dan bahkan menjadi prioritas pembangunan pertanian periode tahun 2014–2019. Komoditas palawija utama adalah jagung, kedelai, dan ubi kayu. Komoditas palawija berperan penting sebagai bahan pangan, bahan pakan, dan bahan baku industri pangan dan nonpangan. Sejalan dengan itu, upaya peningkatan produksi pangan termasuk palawija terus dilakukan melalui berbagai program peningkatan produksi, perluasan areal pertanaman, peningkatan produktivitas, dan penerapan kebijakan insentif.

Salah satu faktor yang memengaruhi kelangsungan usaha tani adalah besaran nilai pendapatan dan daya beli pendapatan usaha tani. Salah satu alat ukur daya beli yang juga biasa digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Pada tingkat mikro usaha tani nilai tukar petani yang dimaksud adalah nilai tukar pendapatan usaha tani yang menggambarkan kekuatan daya beli pendapatan usaha tani relatif terhadap faktor yang memengaruhi usaha tani tersebut. Nilai tukar pendapatan usaha tani tersebut juga menggambarkan tingkat profitabilitas dari usaha tani komoditas. Nilai tukar usaha tani yang meningkat akan mendorong keghairahan petani dalam berusaha tani.

Makalah ini akan membahas tentang nilai tukar usaha tani palawija, yaitu jagung, kedelai, dan ubi kayu sebagai bagian dari analisis penelitian Patanas. Analisis nilai tukar usaha tani didasarkan kepada data analisis usaha tani palawija jagung, kedelai, dan ubi kayu hasil penelitian Patanas yang dilakukan pada tahun 2008 dan tahun 2011 di lima desa dan kabupaten contoh di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran dan Pendekatan Analisis

Kemampuan daya saing produk pertanian dapat diukur dengan nilai tukar petani (NTP). Dalam konsep makro, BPS mendefinisikan NTP sebagai perbandingan antara harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani. Dengan demikian, NTP menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap

produk yang dibeli/dibayar petani, yaitu produk/barang konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani maka semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Walaupun tidak sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani (Rachmat, 2013; Simatupang dan Maulana, 2008), sebagai alat ukur daya beli, NTP sering kali digunakan sebagai salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum, nilai tukar mempunyai arti yang luas dan dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu (1) nilai tukar barter (*barter terms of trade*), (2) nilai tukar faktorial (*factorial terms of trade*), (3) nilai tukar pendapatan (*income terms of trade*), dan (4) nilai tukar petani (*farmer terms of trade*) (Simatupang, 1992; Simatupang dan Isdiyoso, 1992; Rachmat *et al.*, 2000; Rachmat, 2013; Supriyati *et al.*, 2000).

Nilai tukar barter mengacu kepada rasio harga suatu komoditas (pertanian) tertentu terhadap produk nonpertanian. Dengan definisi tersebut, peningkatan nilai tukar mengindikasikan semakin kuatnya daya tukar harga komoditas pertanian terhadap barang yang dipertukarkan. Konsep nilai tukar faktorial merupakan pengembangan dari konsep nilai tukar barter, yaitu dengan memasukkan pengaruh perubahan teknologi (produktivitas). Nilai tukar faktorial pertanian didefinisikan sebagai rasio antara harga pertanian terhadap harga nonpertanian dikalikan dengan produktivitas pertanian (nilai tukar faktorial tunggal) dan produktivitas nonpertanian (nilai tukar faktorial ganda). Perkalian antara harga dengan produktivitas pada suatu unit tertentu merupakan besaran pendapatan sehingga nilai tukar faktorial mengindikasikan nilai tukar pendapatan pertanian terhadap pendapatan nonpertanian.

Konsep nilai tukar penerimaan merupakan pengembangan dari konsep nilai tukar faktorial. Nilai tukar penerimaan merupakan daya tukar dari penerimaan (nilai hasil) komoditas pertanian yang diproduksi petani per unit (hektar) terhadap nilai input produksi untuk memproduksi hasil tersebut. Dengan demikian, nilai tukar penerimaan menggambarkan tingkat profitabilitas dari usaha tani komoditas tertentu. Namun, nilai tukar penerimaan NTR hanya menggambarkan nilai tukar komoditas tertentu, belum keseluruhan komponen penerimaan dan pengeluaran petani.

Konsep nilai tukar subsisten merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep nilai tukar penerimaan. Nilai tukar subsisten menggambarkan daya tukar dari penerimaan total usaha tani petani terhadap pengeluaran total petani untuk kebutuhan hidupnya (Pramonosidhi, 1984). Penerimaan petani merupakan penjumlahan dari seluruh nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani dan pengeluaran nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pengeluaran petani merupakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk biaya produksi usaha tani. Dengan demikian, nilai tukar subsisten menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli dari pendapatan petani dari usaha tani terhadap pengeluaran rumah tangga petani untuk kebutuhan hidupnya yang mencakup pengeluaran konsumsi dan pengeluaran untuk biaya produksi. Dalam operasionalnya, konsep NTS ini hanya dapat dilakukan pada tingkat mikro, yaitu unit analisis rumah tangga.

Konsep nilai tukar petani (NTP) yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (sebelumnya Biro Pusat Statistik-BPS) merupakan pengembangan dan penerapan skala makro dari konsep nilai tukar. Skala makro yang dimaksud adalah NTP diukur dalam skala/unit nasional yang merupakan agregasi dari NTP regional provinsi dan agregasi subsektor (juga merupakan agregasi komoditas). Secara konsepsi, NTP mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai tukar petani didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petani (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB). Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut.

Indikator NTP yang dibangun BPS mempunyai unit analisis nasional dan regional (provinsi). NTP nasional merupakan agregasi dari NTP regional sehingga di samping analisis yang bersifat nasional, NTP dapat didisagregasi menjadi unit NTP provinsi. Dengan demikian, di samping dapat diketahui indikator kesejahteraan petani nasional juga dapat diketahui dan diperbandingkan tingkat kesejahteraan petani antarregional provinsi. Dengan metode disagregasi juga dapat dilakukan analisis NTP dari komponen/unsur dari sisi pembentuknya, yaitu subsektor maupun komoditas. Dengan demikian, NTP dapat pula diturunkan dalam NTP subsektor (NTP subsektor tanaman pangan, NTP subsektor hortikultura, NTP subsektor perkebunan, NTP subsektor peternakan, dan NTP subsektor perikanan) dan NTP komoditas penyusun subsektor (contohnya NTP padi, NTP palawija, NTP sayur-sayuran, NTP ternak unggas, dan sebagainya). Di samping sebagai komponen penyusun NTP, nilai tukar komponen penyusun NTP itu sendiri merupakan parameter penting kebijakan pembangunan pertanian. Contohnya, nilai tukar padi terhadap pupuk (NT padi-pupuk), yang didefinisikan sebagai rasio antara harga padi terhadap harga pupuk atau yang dikenal sebagai Rumus Tani, merupakan parameter yang digunakan dalam kebijakan harga pangan. Penurunan NT padi-pupuk berarti penurunan daya beli padi terhadap pupuk. Setiap nilai tukar komponen NTP tersebut masing-masing dapat dipelajari pembentukan dan perilakunya.

Analisis NTP secara makro telah banyak digunakan untuk menganalisis daya beli dan kesejahteraan petani (Simatupang, 1992; Simatupang dan Isdiyoso, 1992; Hutabarat, 1995; Rachmat, 2000; Simatupang, 2007), sedangkan penggunaan konsep nilai tukar penerimaan dan subsisten telah dipakai untuk analisis tentang daya beli dan kesejahteraan pada tingkat mikro usaha tani (Rachmat *et al.*, 2000; Supriyati *et al.*, 2000; Supriyati, 2004; Nurasa dan Rachmat, 2013).

Data dan Analisis Data

Analisis nilai tukar petani palawija dilakukan dengan menggunakan data BPS, yaitu data deret waktu NTP bulanan tahun 2008 sampai 2014, sedangkan analisis nilai tukar usaha tani palawija menggunakan data primer usaha tani yang dihasilkan dari studi Patanas tahun 2008 dan 2011 di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Nilai Tukar Palawija

Secara umum, Nilai Tukar Petani (NTP) didefinisikan sebagai nisbah antara harga yang diterima petani (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB) atau $NTP = HT/HB$. Pengukuran NTP dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

$$NTP = IT/IB \quad (1)$$

di mana: NTP = indeks nilai tukar petani
 IT = indeks harga yang diterima petani
 IB = indeks harga yang dibayar petani

Indeks tersebut merupakan nilai tertimbang terhadap kuantitas pada tahun dasar tertentu. Pergerakan nilai tukar akan ditentukan oleh penentuan tahun dasar karena perbedaan tahun dasar akan menghasilkan keragaman perkembangan indeks yang berbeda. Formulasi indeks yang digunakan adalah indeks Laspeyres (BPS, 2010).

$$I = \frac{\sum Q_0 P_i}{\sum Q_0 P_0} \quad (2)$$

di mana: I = indeks Laspeyres
 Q_0 = kuantitas pada tahun dasar tertentu (tahun 0)
 P_0 = harga pada tahun dasar tertentu (tahun 0)
 P_i = harga pada tahun ke-i

Nilai tukar petani palawija didefinisikan sebagai nisbah antara harga palawija yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani atau

$$NTP_{\text{palawija}} = HT_{\text{palawija}}/HB_{\text{palawija}}$$

di mana: NTP_{palawija} = nilai tukar petani palawija
 HT_{palawija} = harga palawija yang diterima petani
 HB_{palawija} = harga yang dibayar petani palawija

Harga palawija yang diterima petani merupakan harga tertimbang dari harga palawija yang diterima petani. Dengan demikian, Htp_{palawija} merupakan harga tingkat petani atau "*farm gate*" (BPS, 2010). Harga yang dibayar petani palawija merupakan harga tertimbang dari seluruh harga yang dibayar petani, yaitu harga barang konsumsi (makanan, konsumsi nonmakanan) dan harga barang modal yang dikonsumsi atau dibeli petani. Harga tersebut adalah harga eceran barang dan jasa di pasar perdesaan.

Perilaku NTP palawija tersebut dapat didekomposisi/ditelusuri ke dalam komponen penyusunnya terutama komponen harga yang dibayar (HB palawija). Dengan dekomposisi ini juga dapat ditelusuri faktor penentu dari perilaku (naik turunnya) NTP palawija.

Nilai Tukar Usaha Tani Palawija

Dalam skala mikro usaha tani, penghitungan nilai tukar dapat diturunkan ke dalam Nilai Tukar Usaha Tani Palawija, yaitu Nilai Tukar Pendapatan Usaha Tani terhadap Input Produksi (NTU-I) dan Nilai Tukar Harga (NT) Palawija. Nilai Tukar tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1) Nilai Tukar Pendapatan Usaha Tani terhadap Input (NTU-I)

$$NTU-I = \frac{P_{yi} Q_{yi}}{P_{xj} Q_{xj}} \quad (3)$$

di mana: $NTU-I$ = nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap input,
 P_{yi} = harga komoditas pertanian ke- i (i = jagung, kedelai, dan ubi kayu)
 Q_{yi} = produksi komoditas pertanian ke- i
 P_{xj} = harga input produksi ke- j
 Q_{xj} = jumlah input produksi ke- j
 j = input produksi (lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja)

Nilai tukar pendapatan usaha tani palawija didekomposisi sebagai berikut:

- a) NTI-Biaya atau nilai tukar pendapatan usaha tani palawija terhadap biaya produksi, yaitu rasio antara nilai pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi;
- b) NTI-Lahan atau nilai tukar pendapatan usaha tani palawija terhadap lahan, yaitu rasio antara nilai pendapatan usaha tani terhadap biaya (sewa) lahan;
- c) NTI-Upah atau nilai tukar pendapatan usaha tani palawija terhadap upah, yaitu rasio antara nilai pendapatan usaha tani terhadap biaya (upah) tenaga kerja;
- d) NTI-Pupuk atau nilai tukar pendapatan usaha tani palawija terhadap pupuk, yaitu rasio antara nilai pendapatan usaha tani terhadap biaya (nilai) pupuk.

2) Nilai Tukar (NT) Palawija

$$NT = \frac{P_i}{P_j} \quad (4)$$

di mana: NT = nilai tukar harga palawija ke- j
 P_i = harga palawija ke- i (i = jagung, kedelai, dan ubi kayu)
 P_j = harga Palawija ke- j (i = jagung, kedelai, dan ubi kayu)

Nilai tukar harga palawija dapat diturunkan sebagai berikut:

- a) NT-Pupuk atau nilai tukar harga palawija terhadap pupuk, yaitu rasio antara harga palawija terhadap harga pupuk;

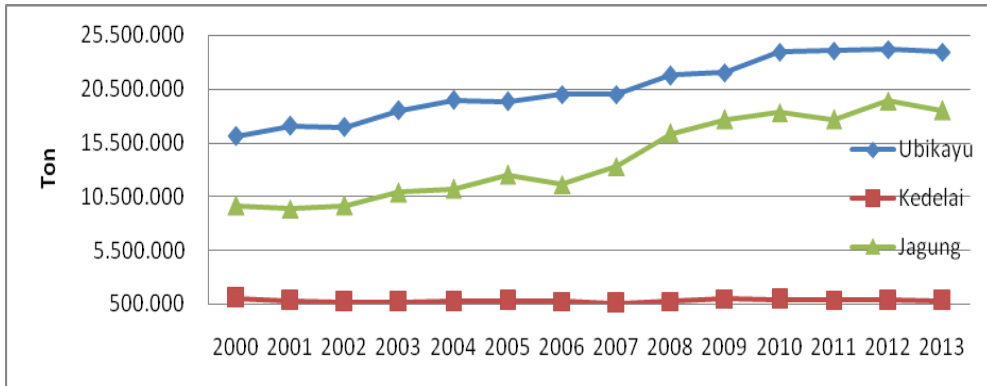
- b) NT-Lahan atau nilai tukar harga palawija terhadap lahan, yaitu rasio antara harga palawija terhadap sewa lahan;
- c) NT-Upah atau nilai tukar harga palawija terhadap upah, yaitu rasio antara harga palawija terhadap upah tenaga kerja.

KINERJA PRODUKSI PALAWIJA

Dalam tahun 2000–2013 produksi tiga komoditas palawija utama, yaitu jagung dan ubi kayu mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 5,45%/tahun dan 3,17%/tahun, sementara dalam kurun waktu yang sama produksi kedelai menurun dengan laju -0,87%/tahun. Peningkatan produksi jagung terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas yang meningkat dengan laju 4,45%/tahun, sedangkan luas panen hanya tumbuh 0,86%/tahun. Kinerja yang sama juga ditunjukkan oleh ubi kayu; peningkatan produksi ubi kayu terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas dengan laju 4,66%/tahun, sementara luas panen ubi kayu justru mengalami penurunan -1,39%/tahun. Penurunan produksi kedelai juga disebabkan oleh penurunan luas panen ubi kayu sebesar -2,01%/tahun, sedangkan produktivitas meningkat 1,10%/tahun (Gambar 1 sampai Gambar 3).

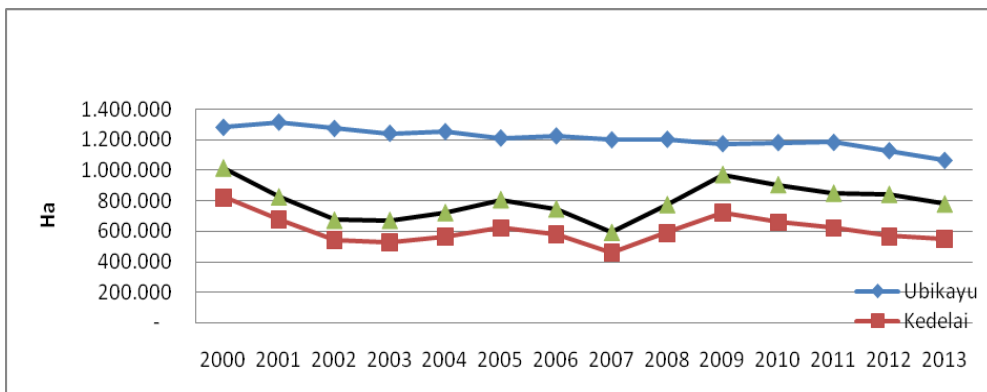
Produksi ditentukan oleh luas panen dan produktivitas sehingga kendala peningkatan produksi berkaitan dengan kendala dalam peningkatan luas panen dan atau kendala peningkatan produktivitas. Luas panen dan produktivitas dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang sesuai, ketersediaan benih, teknik budi daya, serta faktor harga, baik harga masukan (input) dan harga output (harga jual). Sebagai tanaman sekunder palawija umumnya diusahakan pada lahan dengan agroekosistem yang sama, yaitu umumnya pada musim kemarau di lahan sawah, lahan tegalan, dan lahan kering. Dengan demikian, dalam pengusahaan palawija tersebut terdapat kecenderungan adanya persaingan dalam penggunaan lahan di antara tanaman palawija dan bahkan dengan padi. Pada akhirnya, keseluruhan faktor tersebut akan memengaruhi daya saing terhadap komoditas substitusinya.

Produktivitas usaha tani dapat menggambarkan daya saing kompetisi usaha tani. Secara umum, dibandingkan dengan komoditas substitusinya, produktivitas usaha tani kedelai paling rendah. Dalam tahun 2013 produktivitas kedelai sebesar 14,16 ku/ha (Gambar 2) berada di bawah produktivitas jagung (48,44 ku/ha), dan ubi kayu (224,60 ku/ha). Rendahnya produktivitas kedelai disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) memang secara genetik potensi produksi relatif rendah dibanding komoditas lain dan (2) masih adanya kesenjangan produktivitas antara potensi hasil dengan produksi di tingkat petani (Nainggolan dan Rachmat, 2014). Senjangan produktivitas tersebut disebabkan petani menghadapi keterbatasan dalam menerapkan teknik budi daya, seperti dalam penggunaan benih unggul, pemupukan, irigasi, pengendalian hama penyakit, dan penanganan panen dan pascapanen. Beberapa penelitian menunjukkan petani kedelai cenderung menerapkan teknologi minimal sejalan dengan prinsip minimisasi biaya input dan pemeliharaan (Budhi dan Aminah, 2010).



Sumber: Kementerian Pertanian (2014), diolah

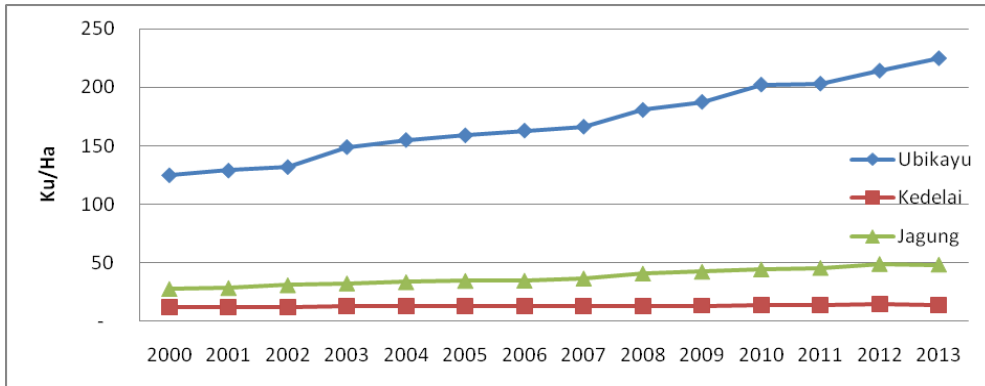
Gambar 1. Perkembangan Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di Indonesia, 2000–2013



Sumber: Kementerian Pertanian (2014), diolah

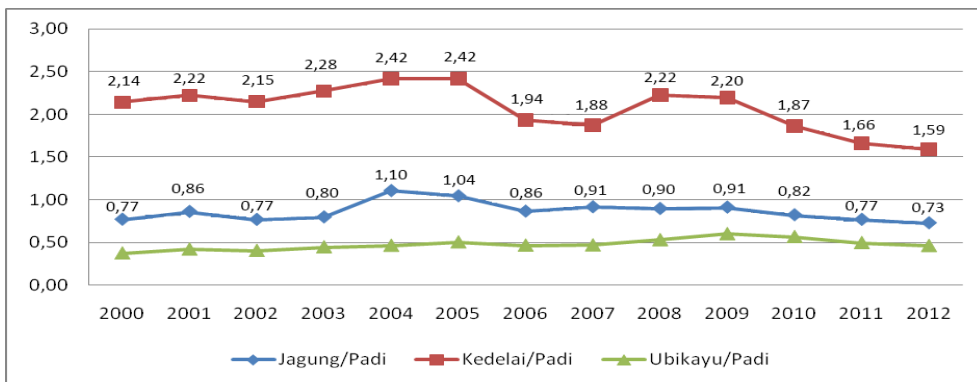
Gambar 2. Perkembangan Luas Panen Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu, di Indonesia, 2000–2013

Minat petani untuk mengusahakan palawija juga dipengaruhi oleh faktor harga. Selama ini, kebijakan harga beras selalu dimonitor melalui kebijakan harga dasar gabah dan harga atap beras, sementara pembentukan harga palawija dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Dalam Gambar 4 terlihat dalam tahun 2004–2012 rasio harga jagung/harga padi dan rasio harga kedelai/harga padi cenderung terus menurun sementara rasio harga ubi kayu/harga padi mengalami sedikit kenaikan. Penurunan harga terhadap padi terbesar terjadi pada kedelai. Dalam tahun 2004, rasio harga kedelai/harga padi sebesar 2,42; sementara pada tahun 2012 rasio tersebut hanya 1,59. Rasio harga tersebut menggambarkan daya beli atau nilai tukar komoditas kedelai terhadap padi.



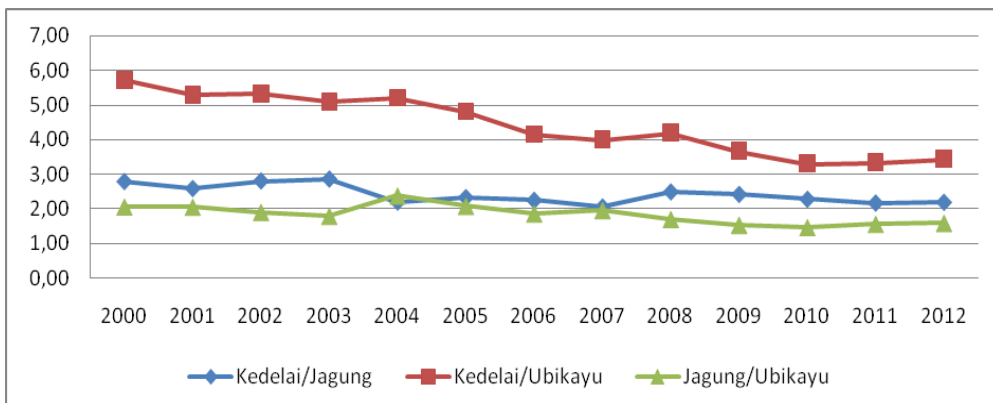
Sumber: Kementerian Pertanian (2014), diolah

Gambar 3. Perkembangan Produktivitas Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu di Indonesia, 2000–2013



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013), diolah

Gambar 4. Rasio Harga Palawija terhadap Harga Palawija di Tingkat Produsen di Indonesia, 2000–2012



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013), diolah

Gambar 5. Perkembangan Rasio Harga Komoditas Palawija Utama di Indonesia, 2000–2012

Di antara komoditas palawija, penurunan daya beli/nilai tukar juga terjadi pada komoditas kedelai, baik terhadap jagung maupun ubi kayu (Gambar 5). Sementara itu, nilai tukar harga jagung terhadap ubi kayu meningkat. Dengan dua kriteria, yaitu besarnya tingkat produktivitas usaha tani dan nilai tukar harga yang terjadi, cukup memberikan penjelasan kenapa usaha tani kedelai kurang diminati oleh petani sehingga luas panen dan produksinya menurun.

ANALISIS USAHA TANI PALAWIJA

Perilaku nilai tukar usaha tani palawija didasarkan kepada data analisis usaha tani palawija, yaitu jagung, kedelai, dan ubi kayu. Hasil analisis usaha tani palawija penelitian Patanas tahun 2008 dan 2011 terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Usaha Tani Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di Desa Contoh Patanas, 2008 dan 2011

uraian	Jagung			Kedelai			Ubi Kayu		
	2008	2011	Prbh (%)	2008	2011	Prbh (%)	2008	2011	Prbh (%)
a) Nilai produksi (Rp000/ha)	6.922	9.657	39,51	2.442	4.818	97,30	7.542	11.076	46,86
b) Biaya produksi (Rp000/ha)	2.560	3.431	34,02	816	2.975	264,58	1.741	3.469	99,25
c) Pendapatan (Rp000/ha)	4.362	6.226	42,73	1.627	1.843	13,28	5.800	7.607	31,16
d) Produktivitas (kg/ha)	4.390	4.032	-8,15	671,2	786,8	17,22	26.446	28.271	6,90
e) Harga jual produk (Rp/kg)	1.580	2.400	51,90	3.640	5.920	62,64	285	392	37,54
f) Sewa lahan (Rp000/ha)	741	1.037	39,95	741	1.037	39,95	741	1.037	39,95
g) Harga pupuk urea di petani (Rp/kg)	1.480	1.760	18,92	1.220	1.760	44,26	1.280	1.670	30,47
h) HET pupuk urea (Rp000/kg)	1.200	1.600	33,33	1.200	1.600	33,33	1.200	1.600	33,33
i) Upah buruh tani (Rp 000/hari)	23,4	27,4	17,09	25,0	29,4	17,60	21,0	28,8	37,14

Secara keseluruhan pendapatan usaha tani komoditas palawija menunjukkan nilai positif. Dalam tahun 2011 nilai pendapatan usaha tani terbesar dihasilkan oleh usaha tani ubi kayu (Rp11,08 juta/ha) disusul usaha tani tanaman jagung (Rp9,66 juta/ha), dan kedelai (Rp4,82 juta/ha). Dalam tahun 2008–2011 terjadi peningkatan nilai nominal usaha tani palawija, yaitu jagung meningkat 39,51%, kedelai meningkat 97,30%, dan ubi kayu meningkat 46,86%. Peningkatan nilai usaha tani tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual. Dalam tahun 2008–2011 harga jual jagung per kg di tingkat petani meningkat 51,91% (dari Rp1.580 menjadi

Rp2.400), harga jual kedelai meningkat 62,64% (dari Rp3.640 menjadi Rp5.920), dan harga jual ubi kayu meningkat 37,54% (dari Rp285 menjadi Rp391); sementara produktivitas kedelai meningkat hanya sebesar 17,22% dan produktivitas ubi kayu meningkat sebesar 6,90%, sedangkan produktivitas jagung justru menunjukkan penurunan sebesar -8,15%.

Secara umum, pendapatan usaha tani terbesar dijumpai pada komoditas ubi kayu, menyusul jagung dan kedelai terendah. Dalam periode tahun 2008–2011 terjadi peningkatan pendapatan usaha tani dari ketiga komoditas tersebut. Peningkatan terbesar terjadi pada komoditas jagung yang mengalami peningkatan sebesar 42,73% (dari Rp4,36 juta/ha menjadi Rp6,22 juta/ha), disusul pendapatan usaha tani ubi kayu yang meningkat sebesar 31,16% (dari Rp5,80 juta/ha menjadi Rp7,61 juta/ha), sedangkan pendapatan usaha tani kedelai meningkat hanya 13,28% (dari Rp1,62 juta/ha menjadi Rp1,84 juta/ha).

Hubungan antara nilai produksi dengan pendapatan tidak sepenuhnya sejalan akibat perbedaan dalam biaya produksi. Dalam tahun 2008–2011 biaya produksi usaha tani cenderung meningkat besar terutama pada usaha tani kedelai yang meningkat 264% (dari Rp816 ribu/ha menjadi Rp2.975 ribu/ha), disusul biaya produksi ubi kayu meningkat 99,25% (dari Rp1.741 ribu/ha menjadi Rp3.469 ribu/ha), dan biaya usaha tani jagung meningkat 34,02% (dari Rp2.560 ribu/ha menjadi Rp3.431 ribu/ha). Kenaikan biaya produksi tersebut berkaitan dengan perbaikan penggunaan input dan kenaikan harga.

Peningkatan biaya produksi dengan perubahan yang cukup besar berkaitan dengan peningkatan nilai sewa lahan, upah buruh tani, dan harga sarana produksi. Dalam tahun 2008–2011 terjadi kenaikan sewa lahan yang cukup besar, yaitu rata-rata 39,95%/tahun atau 13,32%/tahun. Dalam tiga tahun upah buruh tani juga meningkat rata-rata 23,953%/tahun atau rata-rata 7,98%/tahun. Peningkatan upah buruh paling besar terjadi pada kegiatan usaha tani ubi kayu (12,38%/tahun), menyusul usaha tani jagung (5,87%/tahun) dan kedelai (5,70%/tahun).

Peningkatan biaya pupuk berkaitan dengan peningkatan HET pupuk yang dalam periode tahun 2008–2011 meningkat 33,33%, yaitu dari Rp1.200/kg menjadi Rp1.600/kg. Hasil penelitian Patanas juga menunjukkan bahwa harga pupuk yang dibeli petani rata-rata 11,22% lebih tinggi dibandingkan HET. Hal ini berkaitan dengan biaya transportasi dari lini IV ke kios terdekat tempat pembelian petani.

NILAI TUKAR USAHA TANI PALAWIJA

Salah satu pertimbangan petani untuk memilih komoditas apa yang akan diusahakan untuk memperoleh keuntungan yang optimal adalah nilai tukar (rasio) antara nilai pendapatan usaha dengan biaya produksi. Semakin tinggi nilai rasio antara pendapatan dibanding biaya produksi, semakin banyak diminati petani dan berlaku sebaliknya.

Nilai Tukar Usaha Tani Jagung

Dari hasil analisis di atas dapat dikemukakan bahwa rasio (nilai tukar) pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi dan sewa lahan pada komoditas jagung meningkat 5,88% dari 1,70 menjadi 1,80. Perubahan rasio (nilai tukar) tersebut menggambarkan perubahan tingkat profitabilitas usaha tani jagung. Indikator NT pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi juga sering disebut R/C rasio. Dalam tahun 2011, nilai pendapatan usaha tani jagung sebesar 170% dibanding biaya produksinya (Tabel 2).

Tabel 2. Nilai Tukar Usaha Tani Jagung di Desa Contoh Patanas, 2008 dan 2011

Uraian	2008	2011	Perubahan (%)
I. Nilai Tukar Pendapatan Usaha Tani			
a) NT terhadap total biaya produksi	1,70	1,80	5,88
b) NT terhadap nilai sewa lahan	5,90	6,00	1,69
c) NT terhadap nilai tenaga kerja	186,80	227,10	21,57
d) NT Pendapatan terhadap biaya pupuk	3,00	3,50	16,67
II. Nilai Tukar Harga			
a) NT terhadap pupuk urea	1,32	1,50	13,92
b) NT terhadap sewa lahan	2,13	2,31	8,54
c) NT terhadap upah	67,52	87,59	29,72

Nilai tukar pendapatan usaha tani dibanding nilai sewa lahan jagung mengalami kenaikan dari 5,90 menjadi 6,00 atau peningkatan 1,69%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa usaha tani jagung semakin layak dilakukan walaupun dengan sistem sewa lahan karena laju peningkatan pendapatan usaha tani lebih tinggi dari laju harga sewa lahan. Nilai tukar pendapatan usaha tani dibanding nilai tenaga kerja dan terhadap biaya pupuk juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 21,57% dan 16,67%.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2008 dan 2011, iklim usaha jagung relatif menunjang kegiatan usaha tani jagung, seperti ditunjukkan oleh kondisi bahwa laju pendapatan usaha tani meningkat lebih tinggi dari laju biaya tenaga kerja dan biaya pupuk. Dari keragaan di masing-masing daerah contoh Patanas, keragaan nilai tukar usaha tani relatif lebih baik dijumpai di desa contoh di Probolingga (Jatim), Garut (Jabar), dan Blitar (Jatim), dibandingkan di Wonogiri (Jateng) dan Bulukumba (Sulsel).

Dalam konsep nilai tukar yang dibangun BPS, NTP didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Konsep nilai tukar tersebut dapat diterapkan dengan menghitung nilai tukar terhadap pupuk, lahan, dan upah buruh dengan menghitung rasio antara harga produk yang dijual/diterima petani dengan harga pupuk, sewa lahan, dan upah buruh. Hasil perhitungan nilai tukar petani terhadap pupuk urea pada jagung menunjukkan

kenaikan sebesar 13,92%; yang berarti bahwa pada kurun waktu tersebut laju harga jagung yang diterima petani meningkat lebih tinggi 13,92% dibanding laju kenaikan harga pupuk. Kenaikan nilai tukar harga jagung juga terjadi terhadap sewa lahan dan upah tenaga kerja masing-masing sebesar 8,54% dan 29,72% (Tabel 2). Peningkatan nilai tukar harga yang diterima petani terhadap harga input yang dibayar petani mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas usaha tani jagung terjadi karena didukung oleh perbaikan harga jual jagung yang diterima petani.

Nilai Tukar Usaha Tani Kedelai

Nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi kedelai mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari NT 2,0 menjadi 0,6 atau penurunan -70,0%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas pendapatan usaha tani kedelai dalam periode tersebut menurun cukup besar atau hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan usaha tani yang diperoleh tidak sebanding dengan peningkatan biaya produksinya. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan penurunan nilai tukar tersebut terutama berkaitan dengan penurunan terhadap besarnya biaya sewa lahan yang menurun -18,18%; penurunan pendapatan terhadap biaya pupuk sebesar -15,38%; dan biaya tenaga kerja sebesar -3,53% (Tabel 3).

Berdasarkan perhitungan nilai tukar petani yang merupakan rasio antara harga yang diterima petani (harga kedelai) terhadap harga yang dibayar petani (input produksi) mengindikasikan kenaikan harga kedelai di tingkat petani masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju kenaikan harga input produksi pupuk, sewa lahan, dan upah. Ini berarti bahwa penurunan nilai tukar usaha tani kedelai lebih disebabkan penurunan produktivitas dan atau peningkatan input produksi yang besar yang menyebabkan kenaikan nilai biaya produksi lebih tinggi dari kenaikan nilai pendapatan usaha tani.

Tabel 3. Nilai Tukar Usaha Tani Kedelai di Desa Contoh Patanas, 2008 dan 2011

Uraian	2008	2011	Perubahan (%)
I. Nilai Tukar Pendapatan Usaha Tani			
a) NT terhadap total biaya produksi	2,00	0,60	-70,00
b) NT terhadap nilai sewa lahan	2,20	1,80	-18,18
c) NT terhadap nilai tenaga kerja	65,10	62,80	-3,53
d) NT Pendapatan terhadap biaya pupuk	1,30	1,10	-15,38
II. Nilai Tukar Harga			
a) NT terhadap pupuk urea	3,03	3,70	21,98
b) NT terhadap sewa lahan	4,91	5,71	16,21
c) NT terhadap upah	145,60	201,36	38,30

Nilai Tukar Usaha Tani Ubi Kayu

Hasil penelitian tahun 2008–2011 menunjukkan nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi ubi kayu menurun -33,3%. Ini berarti profitabilitas pendapatan usaha tani ubi kayu menurun. Penurunan nilai tukar tersebut terutama berkaitan dengan penurunan nilai tukar terhadap input produksinya, yaitu terhadap nilai sewa lahan yang menurun -6,41% dan terhadap nilai tenaga kerja sebesar -4,20%, namun nilai tukar pendapatan terhadap biaya pupuk meningkat sebesar 2,22% (Tabel 4).

Tabel 4. Nilai Tukar Usaha Tani Ubi Kayu di Desa Contoh Patanas, 2008 dan 2011

Uraian	2008	2011	Perubahan (%)
I. Nilai Tukar Pendapatan Usaha Tani			
a) NT terhadap total biaya produksi	3,30	2,20	-33,33
b) NT terhadap nilai sewa lahan	7,80	7,30	-6,41
c) NT terhadap nilai tenaga kerja	276,20	264,60	-4,20
d) NT Pendapatan terhadap biaya pupuk	4,50	4,60	2,22
II. Nilai Tukar Harga			
a) NT terhadap pupuk urea	0,24	0,25	3,16
b) NT terhadap sewa lahan	0,38	0,38	-1,72
c) NT terhadap upah	13,57	13,61	0,29

Penurunan nilai tukar pendapatan terhadap nilai sewa lahan mempunyai implikasi penting dalam persewaan lahan karena bagi petani yang tidak mempunyai lahan akan lebih memilih menyakap atau bagi hasil dengan pemilik lahan dibandingkan menyewa lahan. Kondisi ini juga ditunjukkan oleh nilai tukar (rasio) harga jagung terhadap nilai sewa lahan yang menunjukkan penurunan.

Nilai tukar petani jagung terhadap pupuk urea dan upah menunjukkan peningkatan yang berarti bahwa pada kurun waktu yang sama laju harga ubi kayu yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibanding laju kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja. Peningkatan nilai tukar petani ubi kayu terhadap pupuk berkaitan dengan kebijakan HET pupuk yang sudah beberapa tahun tidak mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Upaya peningkatan produksi pangan termasuk palawija terus dilakukan melalui berbagai program peningkatan produksi baik dari sisi perluasan areal, peningkatan produktivitas, dan penerapan kebijakan insentif. Salah satu faktor yang memengaruhi kelangsungan usaha tani komoditas adalah besaran nilai pendapatan dan daya beli pendapatan usaha tani palawija. Salah satu alat ukur daya beli yang

biasa digunakan adalah nilai tukar usaha tani, yaitu untuk menganalisis kekuatan daya beli pendapatan usaha tani yang juga menggambarkan tingkat profitabilitas dari usaha tani komoditas. Semakin tinggi nilai tukar usaha tani berarti semakin baik daya beli komoditas tersebut baik terhadap produk lain maupun input produksi sehingga nilai tukar usaha tani yang meningkat akan mendorong kegairahan petani dalam berusaha tani.

Rasio (nilai tukar) pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi dan sewa lahan pada usaha tani jagung meningkat, sedangkan pada usaha tani kedelai dan ubi kayu menurun. Perubahan nilai tukar pendapatan usaha tani komoditas palawija tersebut berkaitan dengan nilai tukarnya terhadap sewa lahan. Penurunan nilai tukar pendapatan terhadap nilai sewa lahan mempunyai implikasi penting dalam pola penggarapan usaha tani palawija. Petani yang tidak mempunyai lahan akan lebih memilih menyakap atau bagi hasil dengan pemilik lahan dibandingkan menyewa lahan. Dengan risiko yang dihadapinya, dengan menyakap petani berbagi risiko dengan pemilik lahan, sedangkan bila menyewa lahan, kerugian akan ditanggung sendiri.

Nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap pupuk urea pada komoditas jagung dan ubi kayu menunjukkan peningkatan, sedangkan pada kedelai menunjukkan penurunan. Nilai tukar petani jagung dan ubi kayu terhadap pupuk urea dan upah menunjukkan peningkatan, yang berarti bahwa pada kurun waktu yang sama laju harga ubi kayu yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibanding laju kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja. Peningkatan nilai tukar petani ubi kayu terhadap pupuk berkaitan dengan kebijakan HET pupuk yang sudah beberapa tahun tidak mengalami peningkatan.

Perhatian lebih besar perlu diberikan kepada komoditas kedelai. Nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi kedelai mengalami penurunan yang cukup besar. Penurunan nilai tukar tersebut berkaitan dengan penurunan terhadap besarnya biaya sewa lahan, biaya pupuk, dan biaya tenaga kerja. Kondisi ini cukup memberikan penjelasan alasan kenapa usaha tani kedelai kurang diminati oleh petani sehingga luas panen dan produksinya menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Nilai Tukar Petani di Indonesia. BPS. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Harga Produsen Tanaman Pangan 2000–2012. BPS Jakarta
- Budhi, G.S. dan M. Aminah. 2010. Swasembada Kedelai: Antara Harapan dan Kenyataan. Forum Penelitian Agro Ekonomi 28(1):55–68.
- Hutabarat, B. 1995. Analisis Deret Waktu Kecenderungan Nilai Tukar Petani di Indonesia. Jurnal Agroekonomi 4(2):55–65.
- Kementerian Pertanian. 2014. Basis Data Statistik Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.

- Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010–2014. Jakarta.
- Nainggolan, K. dan M. Rachmat. 2014. Prospek Swasembada Kedelai di Indonesia. *Pangan* 23(10):83–92.
- Nurasa, T. dan M. Rachmat. 2013. Nilai Tukar Petani di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* 31(2):161–179.
- Pramonosidhi. 1984. *Tingkah Laku Nilai Tukar Komoditi Pertanian pada Tingkat Petani. Kerja sama Pusat Penelitian Agroekonomi dan Universitas Satya Wacana. Bogor dan Salatiga.*
- Rachmat, M. 2000. *Analisis Nilai Tukar Petani Indonesia. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.*
- Rachmat, M. 2013. Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 31(2):111–122.
- Rachmat, M., Supriyati, D. Hidayat, dan J. Situmorang. 2000. *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.*
- Simatupang, P. 1992. Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Barter Sektor Pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi* 11(1):33–48.
- Simatupang, P. dan B. Isdijoso. 1992. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar Sektor Pertanian: Landasan Teoritis dan Bukti Empiris. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 40(1):33–48.
- Simatupang, P. 2007. Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 25(1):1–18.
- Simatupang, P. dan M. Maulana. 2008. *Kaji Ulang Konsep dan Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2003–2006. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. LIPI.*
- Supriyati, M. Rachmat, K.S. Indraningsih, T. Nurasa, R.E. Manurung, dan R. Sajuti. 2000. *Studi Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.*
- Supriyati. 2004. *Analisis Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani. ICASEP Working Paper No. 71. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.*

DINAMIKA KEMISKINAN RUMAH TANGGA

Tri Bastuti Purwantini dan I Wayan Rusastra

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa, oleh karena itu penanganan dalam pengentasan kemiskinan sangat mendesak untuk dilakukan. Menurut Bappenas (2012), komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan komitmen negara untuk menyejahterakan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia. Sesuai dengan kesepakatan dalam MDGs bahwa tingkat kemiskinan ditargetkan menurun 50%, yakni menjadi 7,5% pada tahun 2015 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1990 (15,1%). Tingkat kemiskinan di sini diukur dengan menggunakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan mengacu pada data Susenas yang dikeluarkan oleh BPS pada waktu tertentu, sehingga garis kemiskinan tersebut relatif/dinamis. Dalam MDGs juga diungkapkan bahwa, indeks kedalaman kemiskinan juga ditargetkan harus menurun, kondisi tahun 1990 nilai indeks kedalaman kemiskinan lebih dari 4%, walau tidak secara implisit berapa besaran penurunannya.

Bila menggunakan kriteria garis kemiskinan absolut internasional, yakni dengan garis kemiskinan US\$1 PPP (*purchasing power parity*/paritas daya beli) per kapita per hari, maka tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 harus menurun maksimal menjadi 10,3% di mana kondisi pada tahun 1990 mencapai 20,6%. Kondisi ini sudah tercapai, data empiris menunjukkan bahwa pada tahun 2008 proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1 PPP per kapita per hari mencapai 5,9% (Bappenas, 2012). Namun apabila menggunakan standar US\$2 PPP kinerja tingkat kemiskinan masih belum tercapai. Secara umum dapat diungkapkan bahwa garis kemiskinan dengan acuan BPS secara nasional lebih tinggi dibanding dengan standar US\$1 PPP, sebaliknya bila menggunakan US\$2 PPP, cenderung lebih rendah. Implikasi indikator tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dengan kriteria US\$1 PPP cenderung lebih sedikit dibanding dengan menggunakan kriteria nasional dan sebaliknya bila menggunakan indikator US\$2 PPP, jumlah penduduk miskin lebih besar.

Berdasarkan acuan BPS dengan kriteria pengeluaran minimal untuk pangan dan nonpangan dari data Susenas (BPS, 2014a), terlihat selama sepuluh tahun terakhir (2003–2013) tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun baik secara absolut maupun relatif, namun sampai dengan akhir tahun 2013 kondisi kemiskinan masih memprihatinkan dan masih jauh dari yang ditargetkan MDGs. Bappenas menganalisis target penurunan kemiskinan tahun 2015 masih taraf lampu kuning belum tercapai (Bappenas, 2012). Penurunan tersebut tentunya merupakan keberhasilan dari berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan data dan pengukuran kemiskinan yang baik, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. Namun demikian, permasalahan

dan tantangan dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan masih belum teratasi. Berbagai rencana aksi dan program pengentasan kemiskinan baik yang berbasis individu atau rumah tangga, masyarakat, maupun UMKM sampai saat ini masih dilaksanakan, berbagai kendala dan masalah banyak ditemui dalam implementasi di lapang. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan paradigma pendekatan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang tidak henti-hentinya dibicarakan dan diupayakan pengentasannya. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Di sisi lain, permasalahan kemiskinan, sangat berkaitan erat dengan budaya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, tidak ada kepakaran (*skill*), akses permodalan, terbatasnya lapangan pekerjaan, lingkungan sosial dan alam di mana manusia berada, serta struktur kekuasaan yang menjalankan pemerintahan (Umar, 2012). Oleh karena itu, tercapainya pengentasan kemiskinan dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Akibat adanya budaya kemiskinan di kalangan orang-orang miskin, maka mereka seolah terbelenggu dengan kemiskinan itu sendiri sehingga muncul kepasrahan, kemalasan, ketidakberdayaan, keterasingan, dan sebagainya. Selain itu, permasalahan lain orang-orang miskin ialah tidak ada pendidikan, maka otomatis tidak ada kepakaran (keahlian). Konsekuensinya, tidak bisa bersaing dalam lapangan pekerjaan dan dunia usaha. Mengingat akar permasalahan kemiskinan beragam, program pengentasan kemiskinan harus memerhatikan akar permasalahan kemiskinan dan potensi sumber daya wilayah kemiskinan (Faharuddin, 2012).

Tujuan tulisan ini secara umum untuk memotret profil dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Secara khusus tulisan ini memuat beberapa aspek bahasan antara lain (1) perkembangan penduduk miskin baik absolut maupun secara relatif berdasarkan garis kemiskinan nasional (BPS); (2) menganalisis perkembangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta faktor-faktor yang memengaruhinya; (3) menganalisis berbagai program pengentasan kemiskinan: kinerja, permasalahan, dan antisipasi ke depan; dan (4) menganalisis paradigma dan strategi pendekatan pengentasan kemiskinan.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran dan Pendekatan

Dalam membahas kemiskinan tentunya harus paham dengan apa definisi dan kemiskinan yang digunakan. World Bank (2002) seperti yang dikutip oleh Surjono (2013) mendefinisikan kemiskinan dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, dikaitkan dengan apa yang pada umumnya dimaknai sebagai miskin, baik individu maupun keluarga di mana mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsep ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap

pendapatan, konsumsi, pendidikan atau atribut lainnya dari 'si miskin' dengan ambang batas yang telah didefinisikan, sehingga bisa dikategorikan bahwa yang bersangkutan miskin untuk atribut tertentu. *Kedua*, adalah aspek yang terkait dengan ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan, konsumsi, atau atribut lainnya yang ada dalam populasi. Aspek ini didasarkan pada premis bahwa posisi relatif seseorang/keluarga dalam masyarakat adalah merupakan aspek penting dari tingkat kemakmuran mereka. Selanjutnya, tingkat ketimpangan dalam kelompok populasi, wilayah atau negara, baik dari dimensi moneter maupun nonmoneter, mencerminkan ringkasan indikator dari tingkat kemakmuran kelompok tersebut. *Ketiga*, adalah aspek yang terkait dengan dimensi kerentanan yang didefinisikan sebagai probabilitas atau risiko saat ini untuk menjadi miskin atau justru jatuh ke tingkat kemiskinan yang lebih dalam pada suatu titik di masa mendatang. Kerentanan adalah kunci dimensi kemakmuran karena memengaruhi perilaku individu (berkenaan dengan investasi, pola produksi, strategi) dan persepsi terhadap situasi mereka sendiri.

Data dan Analisis Data

Data utama dalam penulisan ini adalah dari data sekunder yang bersumber dari BPS series tahun 2003–2013 (BPS, 2014a), namun untuk aspek tertentu hanya menganalisis beberapa tahun. Khusus untuk data tahun 2011–2013, data kemiskinan yang dianalisis adalah kondisi Maret masing-masing tahun tersebut. Hal ini menyesuaikan pada data tahun sebelumnya yang dilakukan satu kali setahun, yakni pada bulan Februari/Maret. Selain itu, juga digunakan data dari berbagai sumber terkait seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bappenas, dan sebagainya, serta *review* berbagai sumber terbitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan tabel-tabel dan grafik.

KERAGAAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA NASIONAL

Bahasan kemiskinan dalam tulisan ini fokus pada aspek pertama dengan menggunakan batas garis kemiskinan menurut BPS. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (yang disetarakan dengan 2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Konsep dasar kemiskinan dengan indikator tersebut juga digunakan negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia (Surjono, 2013).

Laju penurunan jumlah penduduk miskin lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan, dan sebaliknya secara relatif penurunan proporsi penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibanding di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan yang berbasis perdesaan harus lebih ditingkatkan. Di sisi lain,

berdasarkan data BPS dapat diproyeksikan bahwa proporsi penduduk di perkotaan akan semakin besar dibanding di wilayah perdesaan. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2035 sekitar 66,6% penduduk tinggal di perkotaan. Dengan semakin tingginya tingkat urbanisasi, maka perlu dicermati bahwa penduduk yang melakukan urbanisasi sebagian besar adalah yang bekerja di sektor nonformal. Dengan demikian, dikhawatirkan penduduk miskin di perkotaan akan semakin besar.

Analisis secara intertemporal menunjukkan bahwa terjadi perlambatan penurunan jumlah dan proporsi penduduk miskin menurut wilayah (desa dan kota) atau secara agregat nasional. Dalam periode 2003–2008, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebesar -1,04%/tahun, di mana dalam periode berikutnya mengalami perlambatan menjadi hanya 0,86%/tahun. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan yang mengalami perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,25%/tahun menjadi 1,11%/tahun. Secara agregat nasional (desa+kota) terjadi perlambatan penurunan dari 1,18%/tahun (2003–2008) menjadi 1,02%/tahun (2009–2013). Secara relatif, proporsi penduduk miskin agregat nasional juga mengalami perlambatan penurunan, yaitu dari 1,44%/tahun menjadi 1,40%/tahun dalam dua periode analisis (Tabel 1). Jika mengacu pada target pengentasan kemiskinan sebesar 50% dengan mengacu basis data tingkat kemiskinan 1990 sebesar 15,0%, maka sasaran penurunan tingkat kemiskinan 25 tahun kemudian (2015) adalah sebesar 7,5% (target MDGs Indonesia). Berdasarkan pada tingkat kemiskinan agregat nasional 2013 sebesar 11,37% dengan laju penurunan 1,40%/tahun, maka tingkat kemiskinan 2015 diperkirakan sebesar 11,05%, jauh dari sasaran awal MDGs yang besarnya 7,50%. Tantangannya adalah perumusan dan implementasi strategi, kebijakan, dan program pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.

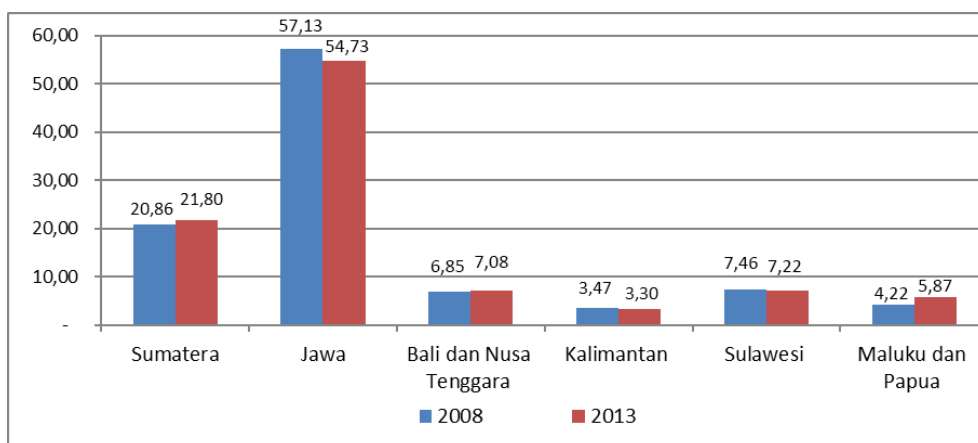
Penyebaran penduduk miskin di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa dibanding luar Jawa. Hal ini antara lain karena penduduk Indonesia dominan tinggal di Jawa sementara sumber daya alam pendukungnya semakin merosot baik jumlah maupun kualitasnya. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka penduduk miskin juga mulai menyebar di luar Jawa. Ilustrasi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2008–2013) proporsi penduduk miskin yang tinggal di Jawa berkurang -2,4%. Namun demikian, mengingat jumlah penduduk di Jawa padat, maka pengurangan proporsi tersebut tidak menggeser kontribusi penduduk di Pulau Jawa, sementara di Sumatera justru meningkat 0,94%.

Bila dilihat secara nominal, secara agregat jumlah penduduk miskin menurun selama tahun 2008–2013, kecuali di Provinsi Maluku dan Papua, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan yang meningkat masing-masing 29,25 ribu (30,8%) dan 141,67 ribu (10,3%) penduduk miskin atau secara agregat meningkat rata-rata 11,6% selama lima tahun terakhir. Terkesan bahwa percepatan pembangunan yang diprogramkan Pemerintah selama ini di wilayah tersebut masih belum berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian faktor dan permasalahan apa yang menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk miskin menurut pulau dan wilayah di Indonesia, tahun 2008 dan 2013 disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin Menurut Wilayah di Indonesia, 2003–2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)			% Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
2012	10,65	18,48	29,13	8,78	15,12	11,96
2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37
Pertumbuhan (%)						
2003–2008	-1,04	-1,25	-1,18	-1,45	-1,40	-1,44
2009–2013	-0,86	-1,11	-1,02	-1,30	-1,46	-1,40
2003–2013	-1,38	-3,30	-2,68	-4,47	-3,28	-4,05

Sumber: BPS (2014a), diolah



Sumber: BPS (2008, 2014)

Gambar 1. Perkembangan Proporsi Penyebaran Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013 (%)

Tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di kota nasional menurun -19,1%. Bila dilihat antarpulau persentase penurunan tertinggi ditemukan di Kalimantan (32,1%). Namun demikian, walaupun penurunan secara

relatif rendah, secara nominal pengurangan tersebut cukup tinggi karena jumlah absolut insiden kemiskinan tinggi. Hanya Pulau Maluku dan Papua yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Walaupun secara absolut jumlah penduduk di wilayah ini rendah, namun perlu diwaspadai karena peningkatan secara persentase cukup tinggi (30,9%). Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin harus diwaspadai. Hal ini terkait juga dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini digulirkan untuk percepatan pembangunan di wilayah ini. Optimalisasi pembangunan belum menyentuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013

Wilayah Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Perkembangan Penduduk Miskin 2008–2013	
	2008	2013	(000)	(%)
Sumatera	2.567,8	2.008,33	-559,47	-21,8
Jawa	8.559,3	6.996,12	-1.563,18	-18,3
Bali dan Nusa Tenggara	794,8	601,31	-193,49	-24,3
Kalimantan	364,3	247,45	-116,85	-32,1
Sulawesi	387,4	348,27	-39,13	-10,1
Papua dan Maluku	94,8	124,05	29,25	30,9
Indonesia	12.768,5	10.325,53	-2.442,97	-19,1

Sumber: BPS (2008, 2014b), diolah

Perkembangan penduduk miskin di wilayah perdesaan secara agregat menunjukkan penurunan yang sama dengan di wilayah perkotaan (Tabel 3), walaupun penurunannya lebih besar dibanding di wilayah perkotaan. Baik secara absolut maupun relatif penurunan penduduk miskin di wilayah perdesaan Pulau Jawa terbesar di antara wilayah pulau besar di Indonesia. Hal yang sama seperti yang ditemukan di wilayah perkotaan, di wilayah perdesaan Maluku dan Papua perkembangan penduduk miskin selama kurun tahun 2008–2013 meningkat, walaupun peningkatannya lebih rendah dibanding wilayah perkotaan di wilayah ini. Hal ini sangat kontradiktif mengingat potensi sumber daya alam di wilayah tersebut cukup baik dengan penduduk desa yang mayoritas berpenghasilan dari pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian secara luas belum bisa menopang kehidupan petaninya. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kultur sosial masyarakat (terutama Papua) juga berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah ini.

Sementara itu, gambaran agregat antarwilayah pulau disajikan pada Tabel 4. Bila diurut dari besarnya persentase penurunan masing-masing wilayah menunjukkan bahwa Kalimantan menunjukkan urutan pertama diikuti oleh Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Sumatera. Namun demikian, bila dilihat secara absolut penurunan jumlah penduduk miskin terbesar ditemukan di Jawa, kemudian Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Kalimantan. Disparitas tersebut juga terkait dengan kepadatan penduduk antarwilayah, di mana

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya dibanding pulau lainnya, sehingga kebijakan perpindahan penduduk melalui program transmigrasi relevan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk memetakan wilayah mana yang berpotensi dan berpeluang untuk bisa dijadikan wilayah transmigrasi, demikian pula halnya penduduk di wilayah mana (kantong kemiskinan) yang perlu dipindahkan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Diharapkan program tersebut dapat mengurangi disparitas penduduk miskin antarwilayah pulau di Indonesia.

Tabel 3. Perkembangan Penduduk Miskin Wilayah Perdesaan Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013

Wilayah Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Perkembangan Penduduk Miskin	
	2008	2013	(000)	(%)
Sumatera	4.726,1	4.111,09	-615,01	-13,0
Jawa	11.416,5	8.365,75	-3.050,75	-26,7
Bali dan Nusa Tenggara	1.600,0	1.385,60	-214,40	-13,4
Kalimantan	849,8	678,21	-171,59	-20,2
Sulawesi	2.221,2	1.677,51	-543,69	-24,5
Papua dan Maluku	1.381,2	1.522,87	141,67	10,3
Indonesia	22.194,8	17.741,03	-4.453,77	-20,1

Sumber: BPS (2008, 2014b), diolah

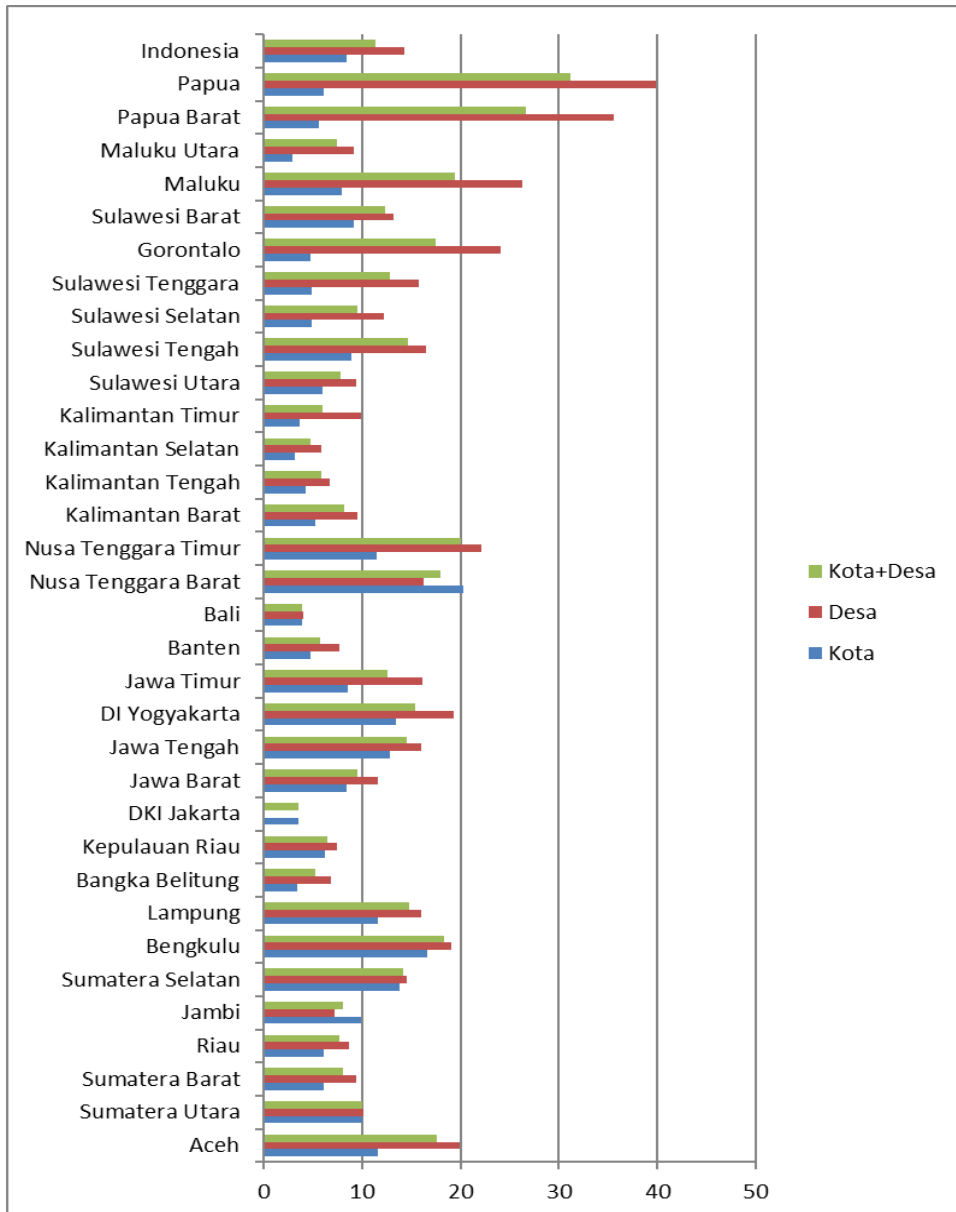
Tabel 4. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013

Wilayah Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Perkembangan Penduduk Miskin	
	2008	2013	(000)	(%)
Sumatera	7.294,00	6.119,42	-1.174,58	-16,1
Jawa	19.975,90	15.361,87	-4.614,03	-23,1
Bali dan Nusa Tenggara	2.394,60	1.986,91	-407,69	-17
Kalimantan	1.214,10	925,66	-288,44	-23,8
Sulawesi	2.608,50	2.025,78	-582,72	-22,3
Papua dan Maluku	1.476,00	1.646,92	170,92	11,6
Indonesia	34.963,30	28.066,56	-6.896,74	-19,7

Sumber: BPS (2008, 2013), diolah

Mengingat kepadatan penduduk antarwilayah provinsi di Indonesia, maka untuk melihat kondisi kemiskinan antarwilayah provinsi secara relatif dapat dilihat pada Gambar 2. Untuk wilayah kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki urutan pertama yakni mencapai 20,28%, sedangkan persentase penduduk miskin sekitar 10–19,9% di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Aceh;

sementara tiga provinsi terendah adalah Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung.



Sumber: BPS (2014b)

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Wilayah di Indonesia, 2013

Di wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin yang tinggi (>20%) adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin tiga provinsi terbaik adalah Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Secara agregat nasional persentase penduduk miskin masih tinggi, sedangkan provinsi yang menduduki urutan ketiga terbesar adalah Papua (31,19%), Papua Barat (26,7%), dan Nusa Tenggara Timur (20,03%). Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang selama ini merupakan daerah tertinggal, sehingga percepatan pembangunan wilayah ini terus dilakukan. Secara agregat nasional untuk mencapai target MDGs dari indikator jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 7,55%, diperkirakan masih belum bisa tercapai pada tahun 2015, mengingat data empiris menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 12,49% (Bappenas, 2012). Paradigma baru pembangunan global ke depan sebagai koreksi dan kelanjutan dari MDGs, yaitu paradigma *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlaku sampai dengan 2030 ke depan, dapat digunakan sebagai pedoman.

KARAKTERISTIK WILAYAH DAN PENDUDUK MISKIN

Dalam membahas kemiskinan, harus mengetahui karakteristik kemiskinan baik dari sisi wilayah maupun penduduk atau rumah tangga yang bersangkutan. Di Indonesia kriteria penduduk miskin menggunakan indikator ekonomi yang dilakukan oleh BPS. Selain itu, kemiskinan juga dapat ditunjukkan dari sisi kondisi sosial masyarakat. Menurut Rusastra dan Napitupulu (2008) karakteristik wilayah miskin umumnya adalah lahan kering dengan kompleksitas permasalahan lahan teknis, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, dikatakan bahwa karakteristik dan profil wilayah dan keluarga miskin dinilai penting dan strategis dalam konteks pendalaman permasalahan teknis, ekonomi, dan sosial penduduk miskin serta sebagai basis diagnosis dalam perumusan intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan.

Karakteristik demografi penduduk dan tingkat pendidikan merupakan indikator sosial. Data empiris (Tabel 5) menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 4,64 orang pada tahun 2008, sedangkan tahun 2013 justru rata-rata lebih besar yakni 4,89 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) pada rumah tangga miskin belum berdampak pada kinerja jumlah anak mereka.

Tabel 5. Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin di Indonesia, 2008–2013

Karakteristik Rumah Tangga	Tahun	
	2008	2013
Rata-rata JART (orang)	4,64	4,89
% Rumah tangga wanita	12,91	13,32
Rata-rata umur KK	48,09	47,60

Sumber: BPS (2008, 2013)

Tingkat pendidikan kepala keluarga (KK) miskin umumnya rendah dan didominasi tidak tamat sekolah dasar (SD) yakni 42,8% pada tahun 2008, bahkan pada tahun 2013 mencapai 43,3%. Rata-rata pendidikan KK pada rumah tangga tidak miskin umumnya lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin. Ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan KK dapat memicu kemiskinan.

Dilihat dari sumber penghasilan rumah tangga miskin, tampak bahwa sektor pertanian merupakan sektor dominan yang digeluti oleh rumah tangga miskin, yakni sekitar 54,7% pada tahun 2013. Proporsi ini menurun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2008. Sementara itu, rumah tangga tidak miskin lebih banyak bekerja di sektor lainnya (47,24%), walaupun sumber penghasilan sektor pertanian juga banyak ditemukan pada rumah tangga tidak miskin. Namun demikian, mengingat rumah tangga miskin sebagian besar mengandalkan sektor pertanian, maka pembangunan pada sektor pertanian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Rusastra dan Napitupulu (2008), untuk tujuan pengembangan agribisnis dan akses kesempatan kerja di luar pertanian tingkat pendidikan penduduk miskin dinilai tidak memadai.

Tabel 6. Karakteristik Tingkat Pendidikan dan Sumber Penghasilan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Indonesia, 2008–2013

Indikator	Rumah Tangga Miskin		Rumah Tangga Tidak Miskin	
	2008	2013	2008	2013
Tingkat Pendidikan KK (%)				
- Tidak tamat SD	42,82	43,30	23,89	23,45
- SD	39,42	36,53	30,19	29,39
- SMP	10,23	12,02	14,75	15,18
- SMA	7,12	7,67	23,32	24,18
- PT	0,41	0,47	7,85	7,80
Sumber Penghasilan RMT (%)				
- Tidak bekerja	10,62	11,90	11,10	11,14
- Pertanian	56,35	54,70	35,05	32,02
- Industri	6,86	6,40	8,70	9,59
- Sektor lainnya	26,16	27,81	45,05	47,24

Sumber: BPS (2008, 2014b)

DINAMIKA KEPARAHAN DAN KEDALAMAN KEMISKINAN

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau

poverty gap index (P1) merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan. Nilai P1 berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan, yaitu semakin tinggi P1 semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, atau kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk (Rusastra dan Napitupulu, 2008).

Pada periode 2003–2013, nilai P1 menunjukkan kecenderungan menurun. Secara agregat nasional nilai P1 selama 2003–2013 mengalami penurunan rata-rata menurun -5,2%. Penurunan nilai lebih cepat di perkotaan (6,18% per tahun) dibanding di perdesaan (3,95%). Laju penurunan nilai P1 pada periode 2009 dibanding periode tahun 2009–2013 (Tabel 7).

Jika jumlah dan proporsi penduduk miskin mengalami perlambatan penurunan, maka hal yang sebaliknya terjadi pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Kecenderungan ini mengindikasikan hal yang positif di mana tingkat kesenjangan dan intensitas kemiskinan di antara masyarakat miskin mengalami penurunan, atau terjadi 'pemerataan perbaikan kehidupan' di antara masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa P1 secara agregat nasional (desa+kota) mengalami percepatan penurunan dari 1,66%/tahun (2003–2008) menjadi 8,50%/tahun dalam periode 2009–2013.

Tabel 7. Perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Indonesia, 2007–2013 (%)

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2003	2,55	3,53	3,13	0,74	0,93	0,85
2004	2,18	3,43	2,89	0,58	0,90	0,78
2005	2,05	3,34	2,78	0,60	0,89	0,76
2006	2,61	4,22	3,43	0,77	1,22	1,00
2007	2,15	3,78	2,99	0,57	1,09	0,84
2008	2,07	3,42	2,77	0,56	0,95	0,76
2009	1,91	3,05	2,50	0,52	0,82	0,68
2010	1,57	2,80	2,21	0,40	0,75	0,58
2011	1,52	2,63	2,08	0,39	0,70	0,55
2012	1,40	2,36	1,88	0,36	0,59	0,47
2013	1,25	2,24	1,75	0,31	0,56	0,43
Tkt pert. 2003–2008	-2,90	0,19	-1,66	-3,51	1,85	-0,95
Tkt pert. 2009–2013	-9,90	-7,40	-8,50	-11,79	-9,00	-10,73
Tkt pert. 2003–2013	-6,18	-3,95	-5,20	-7,19	-4,04	-5,82

Sumber: BPS (2014a)

Dalam lima tahun terakhir ini (2009–2013) penurunan P1 di perdesaan nampak lebih lambat dibandingkan dengan di daerah perkotaan (7,40% vs 9,90%/tahun). Pada tahun 2013 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan nampak lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (2,24 vs 1,25), yang menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan di antara masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

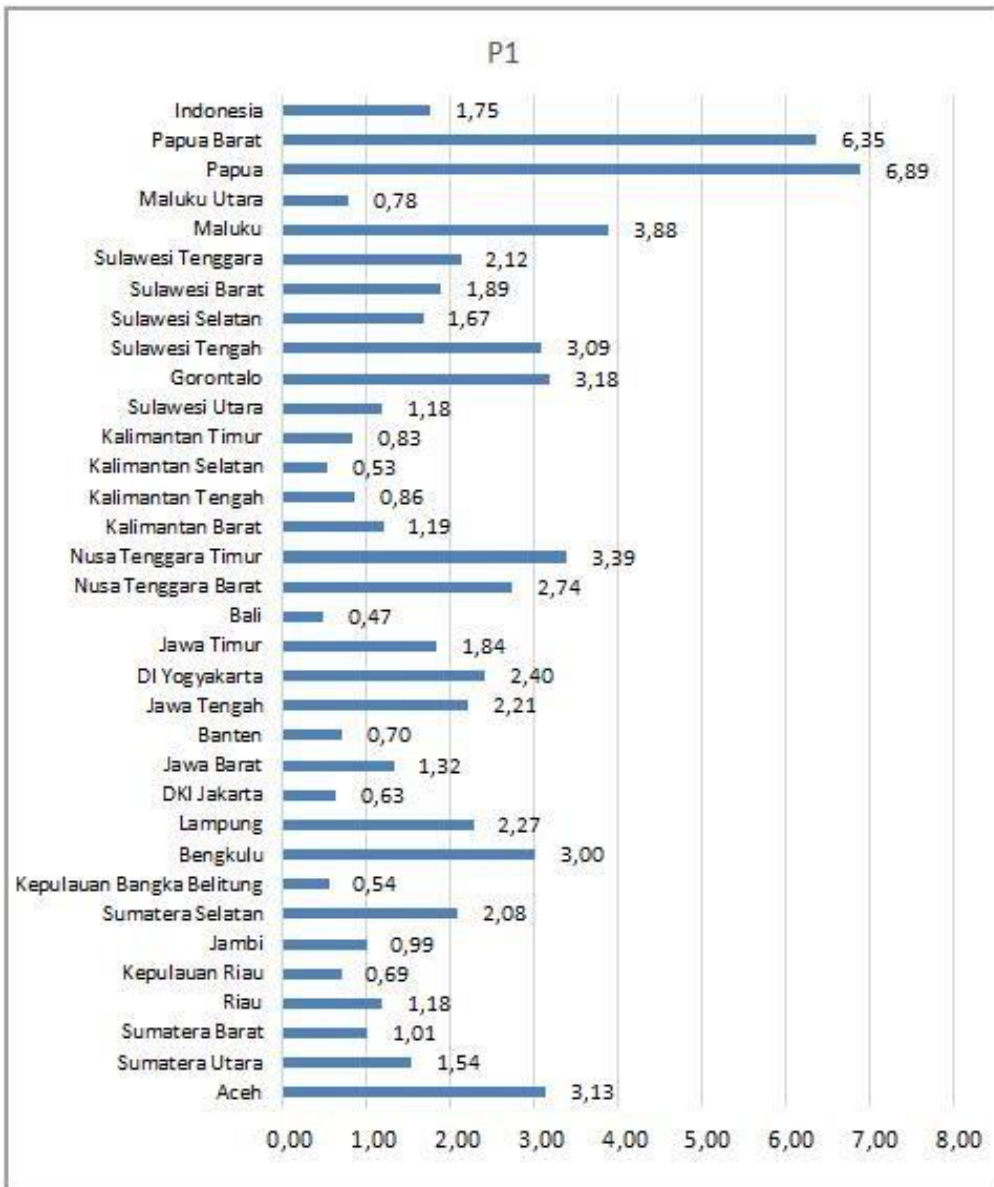
Kecenderungan yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan (P2), dengan percepatan penurunan yang relatif besar pada lima tahun terakhir dengan laju 10,73%/tahun (agregat nasional). Percepatan penurunan di perdesaan nampak lebih lambat dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 9,00% vs 11,79%/tahun (Tabel 7). Pada tahun 2013 nilai P2 di daerah perdesaan nampak lebih besar dibandingkan dengan perkotaan, yaitu 0,56 vs 0,31. Secara tersirat nampak bahwa program pengentasan kemiskinan (khususnya di perkotaan) dapat memberikan manfaat positif yang lebih besar bagi masyarakat miskin strata paling bawah (*the poorest among the poor*) untuk memperbaiki taraf hidupnya, namun upaya yang lebih baik perlu diupayakan untuk masyarakat miskin perdesaan

Nilai P1 di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan (2,24 vs 1,25), demikian pula dibandingkan agregat nasional nilai P1 lebih tinggi di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di desa lebih terpuruk dibanding di kota.

Indeks keparahan kemiskinan atau *distributional sensitive index* (P2) menunjukkan penyebaran pengeluaran penduduk miskin dan dapat mengukur tingkat intensitas kemiskinan. Secara agregat nasional nilai P2 menunjukkan 0,43 pada tahun 2013. Kondisi di wilayah perdesaan lebih buruk dibanding di kota dilihat dari nilai P2 konsisten lebih tinggi dibanding di kota selama periode tahun 2003–2013 (Tabel 7). Secara umum penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Bila bicara *poverty gap index* (P1) menurut wilayah provinsi di Indonesia masih terdapat disparitas antarprovinsi. Sesuai dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, nilai P1 di Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki urutan pertama dan kedua terbesar, masing-masing dengan nilai P1 sebesar 6,89 (Papua) dan 6,35 (Papua Barat). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin di wilayah tersebut dengan tingkat kesenjangan relatif tinggi dan jauh dari garis kemiskinan wilayah yang bersangkutan. Namun, bila dilihat perkembangannya (2007-2013), nilai P1 di wilayah tersebut semakin baik (BPS, 2014b). Gambar 3 menunjukkan disparitas P1 antarwilayah provinsi di Indonesia, sementara nilai P2 menunjukkan kecenderungan yang sama dengan nilai P1 (Gambar 4).

Pada Gambar 3, dapat dijelaskan bahwa tiga besar provinsi dengan nilai P1 terendah ditemukan di Provinsi Bali (0,47), Kalimantan Selatan (0,53), dan Bangka Belitung (0,54). Semakin rendah nilai P1 menunjukkan kondisi yang baik, artinya bila terjadi penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

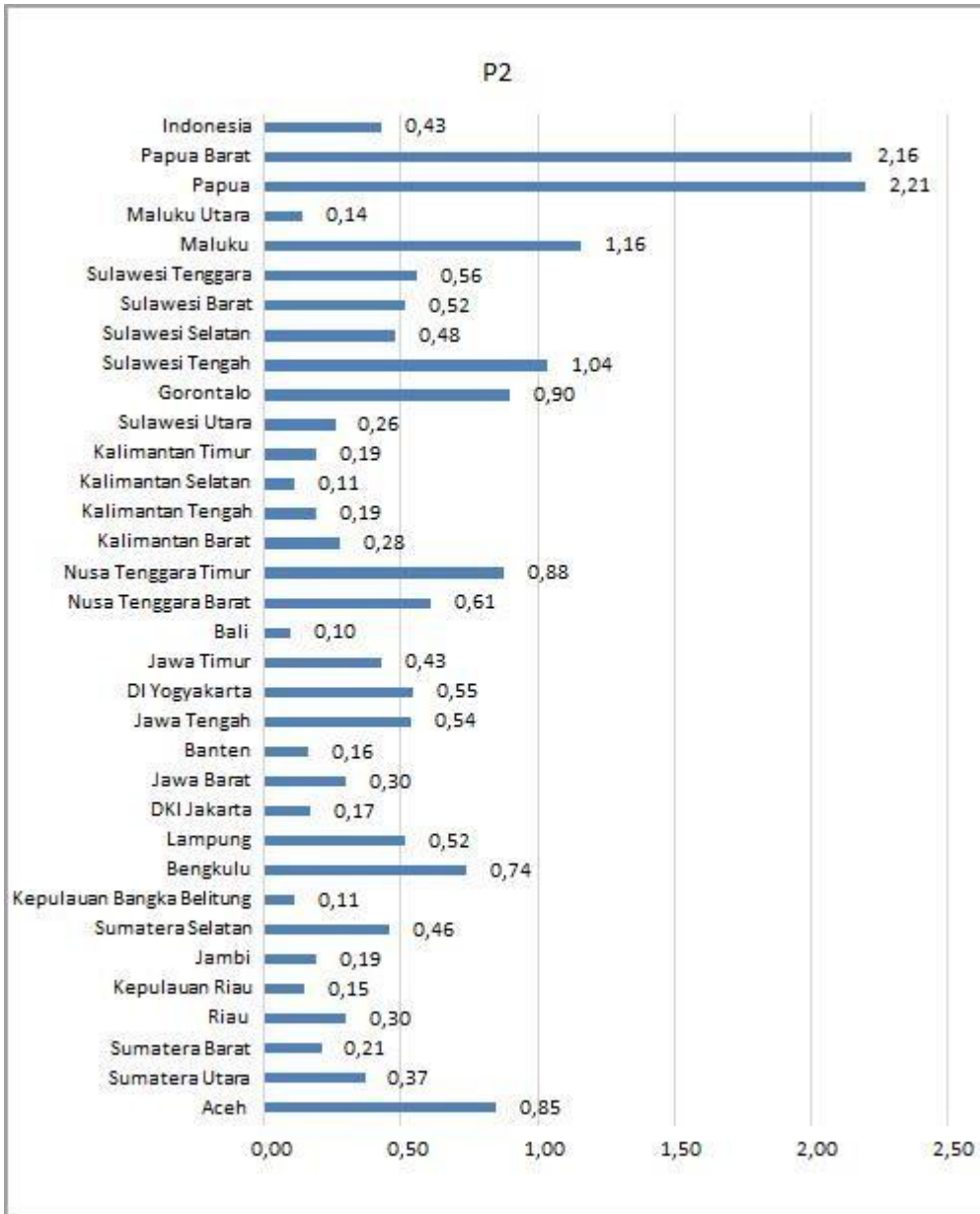


Sumber: BPS (2014b)

Gambar 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi di Indonesia, 2013

Sementara itu, nilai P2 menunjukkan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Besaran nilai P2 dapat memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh kasus, beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan tinggi, tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah; sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden

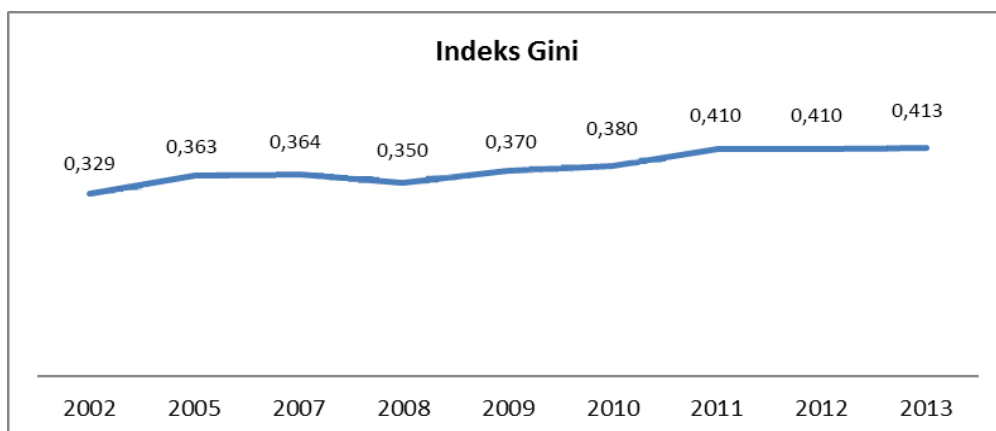
kemiskinan yang rendah, tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin (BPS, 2014b). Berdasarkan analisis data empiris, diketahui bahwa secara umum tingginya insiden kemiskinan juga diikuti oleh tingginya nilai P2. Hal ini berlaku untuk semua wilayah provinsi di Indonesia.



Sumber: BPS (2014b)

Gambar 4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi di Indonesia, 2013

Indeks Gini dari pendapatan (yang diproksi dari pengeluaran) merupakan ukuran untuk melihat kesenjangan dari pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi mendekati angka 1 berarti kesenjangan semakin melebar, sebaliknya semakin mendekati nilai 0 berarti semakin merata. Secara agregat nasional nilai indeks Gini semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan rumah tangga semakin melebar (Gambar 5).



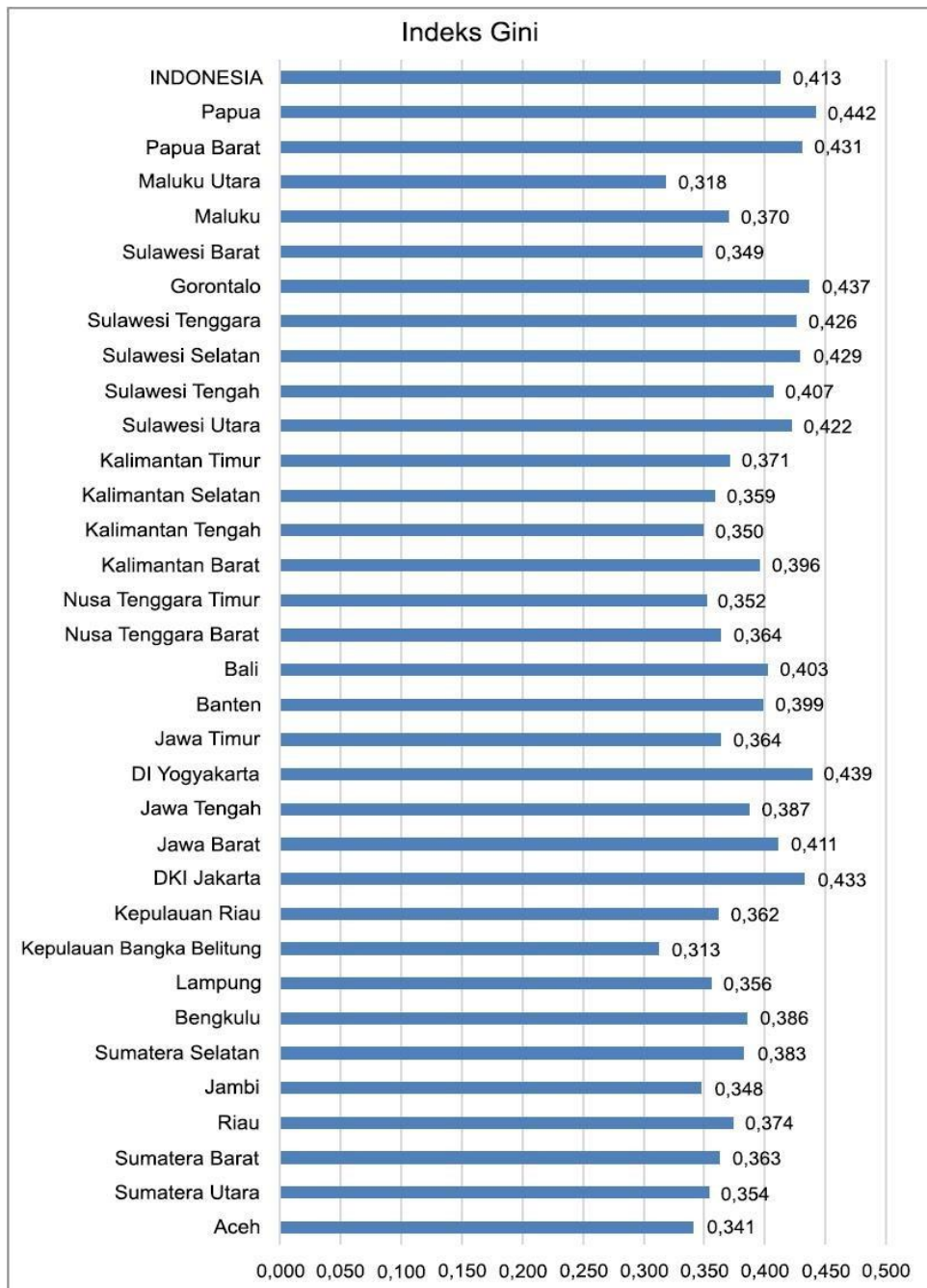
Sumber: BPS (2014c)

Gambar 5. Indeks Gini Pendapatan Penduduk Indonesia, 2002–2013

Di wilayah perdesaan, lahan berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani (dalam hal ini pendapatan dari usaha tani) lewat luasnya dan atau kesuburannya (Purwoto *et al.*, 2011). Lebih lanjut dikemukakan bahwa indikator tidak langsung tingkat pendapatan rumah tangga petani sebagai representasi tingkat kesejahteraan yang berkaitan dengan lahan adalah distribusi pemilikan/penguasaan lahan yang diukur dengan indeks Gini. Oleh karena itu, apabila indeks Gini penguasaan lahan mendekati 1 maka secara tidak langsung akan diperoleh gambaran bahwa distribusi tingkat pendapatan (paling tidak pendapatan dari usaha tani lahan dominan) sebagai representasi tingkat kesejahteraan juga akan mengalami ketimpangan berat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di perdesaan berbasis pertanian ketidakmerataan pendapatan rumah tangga berkaitan erat dengan ketidakmerataan penguasaan lahan pertanian (Nurmanaf, 2001), sehingga ketimpangan penguasaan lahan akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, yang akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat perdesaan.

Indeks Gini pendapatan di masing-masing provinsi pada kondisi tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 6. Tampak bahwa nilai indeks Gini tiga terbesar berada di Provinsi Papua (0,442), Daerah Istimewa Yogyakarta (0,439), dan Gorontalo (0,437). Tiga terendah adalah Provinsi Bangka Belitung (0,313), Maluku Utara (0,318), dan NAD (0,341). Secara keseluruhan nilai indeks Gini antarprovinsi mengalami peningkatan (Tabel 8). Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa selama tahun 2007–2013 ketimpangan pendapatan rumah tangga di Indonesia

semakin melebar. Beberapa provinsi yang menunjukkan besaran indeks Gini yang makin menurun selama tahun 2007–2013, antara lain adalah Provinsi NAD, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Timur.



Sumber: BPS (2014b), diolah

Gambar 6. Indeks Gini Pendapatan Penduduk Menurut Provinsi Indonesia, 2013

Tabel 8. Rataan dan Laju Pertumbuhan Indeks Gini Pendapatan Penduduk di Indonesia Menurut Provinsi, 2007–2013

No.	Provinsi	Rata-Rata	Laju Pertumbuhan (%/tahun)
1.	Aceh	0,30	-0,13
2.	Sumatera Utara	0,33	2,52
3.	Sumatera Barat	0,33	3,05
4.	Riau	0,35	1,61
5.	Jambi	0,31	-1,12
6.	Sumatera Selatan	0,34	4,67
7.	Bengkulu	0,35	2,78
8.	Lampung	0,36	-1,88
9.	Kepulauan Bangka Belitung	0,29	-1,16
10.	Kepulauan Riau	0,32	0,97
11.	DKI Jakarta	0,38	5,69
12.	Jawa Barat	0,38	5,03
13.	Jawa Tengah	0,35	1,95
14.	DI Yogyakarta	0,40	5,48
15.	Jawa Timur	0,35	-2,17
16.	Banten	0,38	1,27
17.	Bali	0,37	20,36
18.	Nusa Tenggara Barat	0,35	18,70
19.	Nusa Tenggara Timur	0,36	16,71
20.	Kalimantan Barat	0,36	21,08
21.	Kalimantan Tengah	0,31	19,59
22.	Kalimantan Selatan	0,36	17,62
23.	Kalimantan Timur	0,36	18,57
24.	Sulawesi Utara	0,36	21,72
25.	Sulawesi Tengah	0,36	20,78
26.	Sulawesi Selatan	0,40	19,22
27.	Sulawesi Tenggara	0,39	20,15
28.	Gorontalo	0,41	19,23
29.	Sulawesi Barat	0,33	19,16
30.	Maluku	0,35	19,21
31.	Maluku Utara	0,33	16,01
32.	Papua Barat	0,37	23,02
33.	Papua	0,41	17,94
	Indonesia	0,39	18,87

Sumber: BPS (2014b), diolah

Catatan: Berdasarkan Susenas Maret

KINERJA DAN PROSPEKTIF PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diimplementasikan baik Program Bantuan Sosial yang berbasis keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat, dan Program Pemberdayaan Berbasis UMKM. Untuk memenuhi target angka kemiskinan menjadi 8–10% pada tahun 2014, Pemerintah RI kemudian mengambil kebijakan untuk mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan berbagai pendekatan, dimulai dari pendekatan kelembagaan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Program perlindungan sosial seperti PKH, BLT, Jamkesmas, Raskin, dan BOS merupakan program utama penanggulangan kemiskinan bersasaran. Meskipun demikian, penetapan sasaran masih memerlukan penyempurnaan agar efektivitas program dapat ditingkatkan. Kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan bersasaran antara lain disebabkan berbagai program menggunakan pendekatan penargetan dan database penerima manfaat program yang berbeda sehingga masih terjadi kesalahan inklusif (*inclusive error*) dan kesalahan eksklusif (*exclusive error*) yang cukup besar. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan penargetan untuk memperbaiki kinerja program melalui Unifikasi Sistem Penargetan Nasional (TNP2K, 2013).

Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Prioritas jangka pendek–menengah dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan bantuan kesehatan untuk keluarga miskin meliputi (1) perumusan dan penentuan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan yang tepat; (2) pengkajian struktur biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; (3) penetapan paket benefit; (4) penyusunan rencana kerja yang rasional termasuk penghitungan biaya yang dibutuhkan.

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan MGD's yang akan terbantu oleh PKH adalah pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender,

pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

Melihat begitu besarnya manfaat Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*), pemerintah SBY-Boediono menargetkan PKH pada akhir tahun 2014 sudah dapat dinikmati oleh seluruh RTSM di Indonesia yang jumlahnya berkisar antara 3 juta keluarga. Untuk itu, sejak saat ini dilakukan berbagai penyempurnaan untuk memastikan bahwa PKH dilaksanakan sebagai program *Conditional Cash Transfer*.

Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat ke dalam PNPM

Prioritas jangka pendek-menengah dalam kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat adalah mengintegrasikan PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan dan fasilitas pembiayaan, meliputi (1) integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM Mandiri; (2) peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri; (3) integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan; dan (4) integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan di luar APBN/APBD.

Program Nasional Keuangan Inkusif

Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu prasyarat berhasilnya pembangunan ekonomi dan sosial yang menjangkau setiap komunitas individu. Pasar dan institusi keuangan memainkan peran penting dalam menyalurkan dana ke kegiatan ekonomi yang paling produktif serta mengalokasikan risiko ke pelaku ekonomi yang paling siap untuk menanggungnya. Dengan demikian, mereka berperan dalam mengatasi dampak negatif dari ketidakseimbangan informasi serta biaya transaksi merupakan dua penyebab klasik kegagalan pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan dan kemakmuran, serta mengurangi kemiskinan. Melihat pentingnya sektor keuangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, TNP2K diberikan mandat untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan komitmen pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat umum dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif.

PARADIGMA DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

Harmonisasi Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan

Pemahaman dan implementasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang juga dikenal dengan pembangunan inklusif membutuhkan pembahasan empat aspek terkait secara hirarkhis dari tataran makro, meso, dan mikro, yaitu (a) *triple track strategy* dan pertumbuhan inklusif nasional; (b) pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah; (c) pembangunan perdesaan dan integrasi ekonomi

desa-kota; dan (d) integrasi pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan perdesaan.

Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini adalah *triple track strategy* (*pro-poor, pro-job, dan pro growth*) tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan. Pendekatan pembangunan ini pada hakekatnya adalah paradigma pertumbuhan inklusif dengan mengedepankan pembangunan prokelompok miskin dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (dan kesempatan kerja) serta mencegah kerusakan lingkungan (Rusastra dan Erwidodo, 1998). Paradigma pertumbuhan inklusif dan berkualitas dapat dilaksanakan pada tataran nasional, wilayah, dan perdesaan yang dikomplemen dengan integrasi dan harmonisasi antara pertumbuhan dan pemerataan sehingga tercipta konvergensi produktivitas antarwilayah, antarsektor, dan kelompok masyarakat.

Komponen dasar pertumbuhan inklusif dan berkualitas mencakup tiga aspek, yaitu (a) sinergi pengembangan sumber daya manusia dan program pembangunan; (b) pendekatan pembangunan dan pemberdayaan secara holistik; dan (c) transformasi struktural ekonomi pertanian dan perdesaan (Rusastra, 2010). Dalam konteks ini dibutuhkan pengembangan kapasitas kelompok miskin (bahkan secara individual) sehingga mampu mengakses dan mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Peningkatan kesejahteraan kelompok miskin ditentukan oleh kemampuan pengambilan keputusan individu/kelompok, penguasaan aset, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka kuasai. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan secara holistik. Partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan, implementasi kebijakan dan program turut menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, pembangunan perdesaan perlu didukung oleh transformasi struktural ekonomi pertanian dan perdesaan. Prinsip dasarnya adalah pemanfaatan teknologi terbarukan, investasi pendidikan, penurunan biaya transaksi, dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya (Timmer, 2006). Sasaran akhirnya adalah konvergensi produktivitas tenaga kerja dan kapital antara sektor pertanian/perdesaan dan sektor nonpertanian/perkotaan melalui perbaikan integrasi ekonomi desa-kota (Rusastra dan Bottema, 2008).

Pada tataran meso, pendekatan pertumbuhan inklusif dapat diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah. Fokusnya di sini adalah pembangunan daerah miskin dan tertinggal dengan tetap mempertahankan pertumbuhan pada daerah potensial yang dikomplemen dengan membangun konektivitas ekonomi melalui pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan. Pada tataran mikro perdesaan, seperti disebutkan di atas adalah pengembangan integrasi ekonomi desa-kota dalam perspektif percepatan pemerataan pembangunan yang direfleksikan oleh konvergensi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pada tataran mikro rumah tangga petani dibutuhkan peningkatan kapasitas dan akses kelompok afinitas rumah tangga miskin dengan pembangunan perdesaan. Dalam konteks ini dibutuhkan harmonisasi dan integrasi antara program pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan ekonomi

perdesaan. Kesempatan kerja dan berusaha yang paling mudah diakses oleh rumah tangga miskin adalah kesempatan yang ada di tingkat desa.

Harmonisasi pertumbuhan dan pemerataan juga dapat dikemukakan secara sekuensial mikro, meso, makro nasional. Pada tataran mikro, pembangunan perdesaan inklusif mensyaratkan sinergi pertumbuhan di tingkat desa dengan program pemberdayaan kelompok miskin. Pengembangan agroindustri dapat dijadikan instrumen program pemberdayaan, pembangunan perdesaan, dan percepatan transformasi ekonomi perdesaan (Rusastra, 2010). Dalam perspektif pengembangan ekonomi wilayah (tataran meso) dan peningkatan efektivitas pembangunan dibutuhkan fokus pada pembangunan perdesaan miskin melalui optimalisasi alokasi sumber daya ekonomi dalam mendukung gerakan pengentasan kemiskinan. Secara paralel pada tingkat nasional (tataran makro), pemerintah dan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, investasi, dan iklim ekonomi yang kondusif. Optimalisasi alokasi dana pembangunan untuk program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal, wilayah, dan nasional akan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan dan secara nasional (Rusastra, *loc. cit.*).

Kebijakan Pembangunan Pertanian nasional

Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, bahasan kebijakan pembangunan pertanian nasional mencakup (a) justifikasi peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan nasional dan perdesaan; (b) pengentasan kemiskinan melalui revitalisasi sektor pertanian; (c) pembangunan kemandirian dan kedaulatan pangan untuk pengentasan petani dari kemiskinan; dan (d) pembangunan agribisnis dan agroindustri sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

Terdapat empat alasan utama terkait pentingnya peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan, yaitu mendorong pertumbuhan PDB, mendorong pertumbuhan sektor nonpertanian, meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat upah, dan menyediakan pangan dengan harga terjangkau (Sudaryanto, 2009). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sudah terbukti positif, khususnya pertumbuhan sektor pertanian melalui keberhasilan intensifikasi pertanian tanaman pangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan bila didukung oleh pemerataan pendapatan yang lebih baik. Pertumbuhan sektor pertanian memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemerataan melalui peningkatan pendapatan penduduk miskin yang sebagian besar tinggal di perdesaan.

Pertumbuhan sektor pertanian juga berdampak terhadap pertumbuhan sektor nonpertanian melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan pasar input, yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Kontribusi pendapatan nonpertanian dalam struktur pendapatan rumah tangga petani kecil dan tunakisma adalah relatif tinggi, yaitu 46,5% dan 60,0% (Susilowati *et al.*, 2008), sehingga dampak penggandanya berperan besar dalam pengentasan kemiskinan.

Bagi petani dan buruh tani kesempatan kerja dan tingkat upah sektor pertanian dan nonpertanian memegang peran penting sebagai sumber pendapatan. Kedua subsektor ini di perdesaan berperan penting sebagai *buffer* dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan dan akhirnya terhadap pengentasan kemiskinan. Bagi penduduk miskin, pengeluaran pangan menempati posisi dominan dalam struktur pengeluaran rumah tangga dan juga dalam besaran garis kemiskinan. Keberhasilan pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi pangan pokok dan kebijakan stabilisasi harga pangan akan menjamin ketersediaan dan akses pangan (harga pangan terjangkau) bagi penduduk berpendapatan rendah (Apriyantono, 2009).

Kebijakan revitalisasi sektor pertanian dalam perspektif percepatan pengentasan kemiskinan perdesaan yang patut dipertimbangkan adalah (a) pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan; (b) peningkatan akses terhadap penguasaan aset produktif; (c) diversifikasi usaha tani komoditas bernilai ekonomi tinggi; (d) penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; dan (e) kebijakan dan program yang ditargetkan untuk penduduk miskin (Sudaryanto, 2009). Ketiga aspek pertama memiliki keterkaitan yang kuat. Pengembangan infrastruktur fisik yang memadai (jalan desa, jalan usaha tani, irigasi) akan berperan positif dalam aktualisasi daya-guna sumber daya pertanian (khususnya lahan dan teknologi) dalam peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing komoditas pertanian. Perbaikan infrastruktur juga berperan positif dalam perbaikan efisiensi pasar sarana produksi dan pasar output pertanian, sehingga berperan positif dalam pengembangan diversifikasi dan hilirisasi usaha pertanian, termasuk pengembangan usaha tani komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pada saat bersamaan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan akan meningkatkan daya tawar ekonomi dan masyarakat perdesaan. Penguatan ekonomi pertanian dan perdesaan merupakan syarat penting bagi pengentasan kemiskinan melalui integrasinya dengan pemberdayaan kelompok miskin dengan adanya program pemberdayaan pengentasan kemiskinan. Kebijakan dan program pembangunan pertanian dengan orientasi pengentasan kemiskinan patut mempertimbangkan intensitas tingkat kemiskinan, potensi dan karakteristik pertanian, karakteristik masyarakat tani, dan sistem insentif pengembangan pertanian.

Penerapan program ketahanan pangan dengan tetap mengandalkan impor pangan, selama hampir enam dekade, ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan keluar dari perangkap kemiskinan (Swastika, 2010). Kebijakan antisipatif yang dinilai prospektif adalah membangun kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal yang ditopang oleh pengembangan agroindustri, skim kredit lunak, dan pengembangan infrastruktur di perdesaan. Beberapa kebijakan operasional yang perlu dipertimbangkan adalah (a) optimalisasi sumber pertumbuhan produksi dan sumber daya hayati pada berbagai agroekosistem; (b) membangun sistem pertanian korporasi dan kemitraan petani dengan perusahaan industri pertanian; (c) pembangunan perdesaan terpadu melalui pengembangan agroindustri, eliminasi ekonomi biaya tinggi, peningkatan ketersediaan dan akses sumber daya kapital, peningkatan kapasitas pertanian, pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan, serta kebijakan perdagangan yang kondusif bagi pembangunan pertanian dan perdesaan.

Kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan dalam pengentasan kemiskinan mencakup tiga dimensi (Rusastra, 2010), yaitu (a) kebijakan pengembangan usaha tani skala kecil; (b) kebijakan peningkatan daya saing komoditas pertanian; dan (c) pembangunan perdesaan berlandaskan agribisnis. Pemberdayaan usaha tani skala kecil tidak dapat dilepaskan dari pembangunan perdesaan inklusif, melalui restrukturisasi agribisnis dan peningkatan daya saing. Operasionalisasi pembangunan agribisnis berdaya saing dalam pengentasan kemiskinan membutuhkan dukungan paket kebijakan yang meliputi tujuh komponen utama (Rusastra *et al.*, 2002), yaitu (a) pembangunan infrastruktur perdesaan dengan sasaran peningkatan produktivitas dan efisiensi; (b) pengembangan sistem inovasi pertanian dengan sasaran peningkatan kapasitas produksi, produktivitas dan nilai tambah; (c) pengembangan SDM dan kelembagaan petani melalui pembentukan organisasi petani dan aliansinya dengan pelaku agribisnis lainnya; (d) optimasi sumber daya berkelanjutan dengan sasaran menjaga keberlanjutan kapasitas produksi, peningkatan produktivitas, dan daya saing; (e) konsolidasi vertikal agribisnis melalui konsolidasi usaha tani skala kecil dengan mitra usaha dengan prinsip dasar saling menguntungkan; (f) pemacuan investasi sektor agribisnis dengan fasilitasi pemerintah, khususnya kredit investasi jangka panjang dan lingkungan ekonomi yang kondusif; dan (g) rasionalisasi kebijakan subsidi dan proteksi pengembangan agribisnis dengan mempertimbangkan multifungsi pertanian dan kebijakan negara lain.

Pengembangan agribisnis nasional ke depan perlu mempertimbangkan konteks proyeksi pengembangan agribisnis global. Proyeksi berbagai lembaga internasional (FAO, IFPRI, FAPRI, IPCC, OECD) menyebutkan bahwa terdapat empat variabel penting yang akan menentukan situasi pangan global, yaitu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, urbanisasi, substitusi energi fosil dengan biofuel, dan perubahan iklim global (Saragih, 2010). Diperkirakan sekitar 75% dari 5,0 miliar penduduk negara berkembang akan naik kelas menjadi kelompok berpendapatan menengah/tinggi pada tahun 2050 dan sekitar 75% akan tinggal di perkotaan dengan perubahan preferensi konsumsi. Pengembangan global *biofuel* dan *biofiber* ke depan akan memberikan keuntungan bagi negara berkembang dengan basis pertanian melalui kenaikan harga pangan dan insentif pengembangannya (melalui pengurangan emisi/penyerapan CO₂) dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.

Dalam perspektif *feeding the world*, Indonesia perlu melakukan perubahan paradigma dan strategi pembangunan dengan mengedepankan pembangunan ekonomi yang dimotori pembangunan agribisnis (*agribusiness-led-development*) dengan mempertimbangkan empat komponen/subsistem agribisnis secara integratif dan holistik (Saragih, 2010), yaitu (a) pengembangan industri hulu pertanian seperti industri pembibitan, industri pupuk, industri vaksin dan obat-obatan, dan industri alat dan mesin pertanian; (b) pembangunan pertanian (*on-farm agribusiness*) baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; (c) pengembangan industri hasil pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi dan final produk seperti industri makanan dan minuman, industri pakan, industri *biofuel*, industri *biofiber*, dan *food service industry*; dan (d) pengembangan jasa untuk agribisnis seperti perdagangan antardaerah, penelitian

dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan, infrastruktur, perbankan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, serta kebijakan pengembangan dari pemerintah (fiskal, moneter, kelembagaan, peraturan daerah, dan tata ruang).

Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Bahasan ini mencakup tiga aspek, yaitu (a) paradigma dan strategi pembangunan dan pertumbuhan inklusif yang dinilai mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan; (b) strategi revitalisasi peran sektor pertanian dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan perdesaan; dan (c) strategi membangun kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan melalui pendekatan produksi dan konsumsi yang terintegrasi dengan pembangunan perdesaan secara terpadu.

Program pembangunan dan pengentasan kemiskinan selama ini bersifat parsial sektoral sehingga tidak mampu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan secara nasional. Paradigma baru ini menawarkan sinergi dan integrasi pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah dengan pembangunan perdesaan inklusif, program pemberdayaan, dan program bantuan terpadu berbasis rumah tangga (Rusastra, 2010). Reorientasi paradigma ini patut dikomplementasi dengan transformasi ekonomi dalam arti luas, dan menempatkan agribisnis sebagai landasan dan instrumen percepatan transformasi ekonomi pertanian, perdesaan, wilayah, dan nasional.

Dalam perspektif reorientasi paradigma pengentasan kemiskinan tersebut, strategi yang perlu dipertimbangkan (Rusastra, 2010) adalah (a) implementasi pembangunan dan pertumbuhan inklusif secara nasional melalui keberpihakan kebijakan fiskal dan sistem insentif pembangunan pertanian, peningkatan kapasitas produksi nasional dalam perspektif keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sinergi pertumbuhan inklusif dalam arti luas dengan program pemberdayaan kelompok miskin, dan peningkatan kapasitas dan akses penduduk miskin terhadap kesempatan kerja dan berusaha; (b) memposisikan agribisnis sebagai andalan pembangunan pertanian dan pedesaan melalui konsolidasi kegiatan agribisnis, pengembangan manajemen tunggal dalam pengelolaan agribisnis, pengembangan kemitraan agribisnis konsolidatif, dan pengembangan mata rantai produk agribisnis vertikal sebagai landasan agribisnis berdaya saing; dan (c) akselerasi transformasi struktural perekonomian melalui pemantapan dan perluasan program pemberdayaan kelompok miskin, sinergi program pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi desa, integrasi ekonomi desa-kota, dan percepatan serta perluasan pertumbuhan ekonomi wilayah/nasional.

Strategi revitalisasi peran sektor pertanian dalam akselerasi pengentasan kemiskinan di perdesaan mencakup tiga strategi utama (Sudaryanto, 2009), yaitu (a) akselerasi tingkat pertumbuhan sektor pertanian melalui modernisasi pertanian skala kecil, diversifikasi ke arah komoditas dengan potensi dan nilai ekonomi tinggi, akselerasi inovasi teknologi pertanian, peningkatan akses pasar domestik dan internasional, peningkatan kapasitas produksi pertanian nasional sesuai potensi wilayah, peningkatan kapasitas dan akses penduduk miskin terhadap kesempatan

dan hasil pembangunan pertanian; (b) perluasan dan pengembangan usaha nonpertanian melalui percepatan transformasi ekonomi dan memperluas sumber pendapatan nonpertanian sesuai potensi daerah, dengan prioritas pengembangan agroindustri dan pelayanan jasa sektor pertanian; dan (c) peningkatan sistem perlindungan dan jaring pengaman sosial bagi penduduk miskin.

Strategi pembangunan kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan mempertimbangkan tiga strategi pokok (Swastika, 2010), yaitu (a) peningkatan produksi pertanian melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan produksi; pengembangan wilayah komoditas sesuai keragaman agroekosistem, komoditas unggulan daerah, dan sumber daya lokal; pengembangan konsolidasi usaha tani dan program kemitraan; peningkatan ketersediaan dan akses sumber daya pertanian bagi petani skala kecil; (b) pengembangan konsumsi pangan melalui dua pendekatan, yaitu revitalisasi program keluarga berencana dan promosi diversifikasi pangan khususnya melalui pengolahan dan promosi bahan pangan lokal olahan nonberas untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan; dan (c) pembangunan perdesaan dan usaha tani terpadu melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), penerapan sistem integrasi tanaman-ternak, peningkatan pendapatan petani melalui penguatan modal kerja, dan pengolahan hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri di perdesaan.

KESIMPULAN

Selama kurun waktu 2003–2013, proporsi penduduk miskin di Indonesia menurun, dengan laju penurunan presentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibanding di perdesaan. Masih terdapat disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antarprovinsi di Indonesia, di mana proporsi penduduk miskin paling besar terdapat di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk miskin tersebut bekerja di sektor pertanian.

Analisis kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan selama periode 2003–2013. Penurunan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin kecil.

Program pembangunan dan pengentasan kemiskinan masih bersifat parsial sektoral sehingga tidak mampu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan secara nasional. Selain itu, masih sering ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan

Fokus kebijakan pengentasan kemiskinan seyogianya tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin, tetapi mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar mempertimbangkan pendekatan holistik multisektoral dan berbasis wilayah/desa miskin tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi daerah potensial, integrasi

program pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan ekonomi perdesaan (pembangunan perdesaan inklusif), percepatan transformasi ekonomi (desa-kota dan antarwilayah) dengan sasaran konvergensi tingkat produktivitas, dan modernisasi pertanian dan perdesaan. Proporsi penduduk miskin paling tinggi terdapat di Pulau Jawa dan oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan di Jawa harus lebih diperhatikan.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka paradigma pertumbuhan inklusif dan berkualitas dapat dilaksanakan pada tataran nasional, wilayah, dan perdesaan yang dikomplemen dengan integrasi dan harmonisasi antara pertumbuhan dan pemerataan sehingga tercipta konvergensi produktivitas antarwilayah, antarsektor, dan kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyantono, A. 2009. Toward Sustainable Agriculture and Food Security. Presented at the Ministerial Roundtable in the 65th Session of the Commission, 27–29 April 2009, Bangkok.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Analisis dan Penghitungan dan Tingkat Kemiskinan 2008. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Penghitungan dan Analisis Makro Kemiskinan Indonesia Tahun 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970–2013. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494> (29 Agustus 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2013. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488> (29 Agustus 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014c. Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007–2013. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1493> (29 Agustus 2014).
- Faharuddin. 2012. Mengukur Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia 2010. *Jurnal Agroekonomi* 30(2):145–157.
- Nurmanaf, A.R. 2001. An Analysis of Economic Inequalities between Household in Rural Indonesia. Dissertation Findings in Brief. Faculty of Business and Computing, Southern Cross University, Coffs Harbour Campus. Australia.
- Purwoto, A., IW. Rusastra, B. Winarso, T.B. Purwantini, A.K. Zakaria, T. Nurasa, D. Hidayat, C. Muslim, dan C.B. Adawiyah. 2011. Panel Petani Nasional (Patanas): Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

- Rusastra, IW. 2010. Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Rusastra, IW. dan Erwidodo. 1998. Growth, Equity and Environment Aspect of Agricultural Development in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 6(1):32–41.
- Rusastra, IW. dan J.W.T. Bottema. 2008. Eradicate Extreme Poverty and Hunger (MDG-1): Performance and Policy for Acceleration the Attainment of National Goal in 2015. *Palawija News* 25(2):5–9.
- Rusastra, IW. dan T.A. Napitupulu. 2008. Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Pedesaan. hlm. 9–22. *Dalam* Y.Yusdja, A.R. Nurmanaf dan I.S. Anugrah (Eds.). *Prosiding Seminar Nasional Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Bogor, 21 Agustus, 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rusastra, IW., P. Simatupang, dan B. Rachman. 2002. Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berlandaskan Agribisnis. *Dalam* T. Sudaryanto *et al.* (Eds.). *Analisis Kebijakan: Pembangunan Pertanian Andalan Berwawasan Agribisnis Monograf Series No. 23*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saragih, B. 2010. Perkembangan Mutakhir Pasar Agribisnis Global dan Implikasinya bagi Pembangunan Agribisnis Indonesia. Orasi Purnabakti Guru Besar Tetap Departemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sudaryanto, T. 2009. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan: Revitalisasi Peran Sektor Pertanian. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 52 hlm.
- Susilowati, S.H., Sumaryanto, R.N. Suhaeti, S. Friyatno, H. Tarigan, N.K. Agustin, dan C. Muslim. 2008. Konsorsium Penelitian: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani pada Berbagai Tipe Agroekosistem: Aspek Arah Penguasaan Lahan dan Tenaga Kerja Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pajajaran, Bandung.
- Surjono, 2013. Pengukuran Kemiskinan dan Analisisnya. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Swastika, D.K.S. 2010. Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 50 hlm.
- Timmer, C.P. 2006. *The Structural Transformation in Historical Perspective: Lessons from Global Patterns and Divergent Country Path*. Center for Global Development. USA.
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. Program Penanggulangan Kemiskinan. <http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan-program-penanggulangan-kemiskinan/> (12 November 2014).
- Umar, M. 2012. Mencari Akar Permasalahan Kemiskinan (Pendahuluan). Hasil Penelitian. <https://musniumar.wordpress.com/2012/06/04/mencari-akar-permasalahan-kemiskinan-pendahuluan-hasil-penelitian/> (29 Desember 2014).

KEMISKINAN RUMAH TANGGA PERDESAAN LAHAN KERING PERKEBUNAN

Adi Setiyanto

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor (World Bank, 2000). Oleh karenanya, kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional, dan menurut Ellis (1998a, 1998b, 2000, 2001, 2002, 2004) dimensi kemiskinan menyangkut berbagai aspek, di antaranya adalah ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (1) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat; (2) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumber daya yang tersedia; dan (3) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.

Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu tujuan pembangunan pertanian. Hasil pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi untuk menjangkau umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian ke depan. Evaluasi tersebut perlu dilakukan pada lingkup makro maupun mikro di mana pada lingkup makro difokuskan pada dinamika kemiskinan perdesaan secara nasional, sedangkan mikro kemiskinan di tingkat desa dan pada tingkat rumah tangga tani yang merupakan pelaku utama usaha pertanian.

Makalah ini secara umum bertujuan untuk membahas dinamika kemiskinan pertanian secara makro pada lingkup nasional dan secara mikro pada lingkup rumah tangga tani. Secara khusus penulisan makalah ini membahas dinamika kemiskinan rumah tangga lahan kering perkebunan. Keluaran yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah dinamika kemiskinan perdesaan secara makro periode 2007–2013 dan dinamika kemiskinan pada rumah tangga lahan kering perdesaan

berdasarkan data Patanas tahun 2009 dan 2012, serta rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan kedua hasil analisis tersebut.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran dan Pendekatan

Telah banyak publikasi tentang pengertian dan definisi umum kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat. Menurut BPS (2011a) dan Bappenas (2004), hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang tersebut antara lain hak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan juga memiliki pengertian kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai standar hidup yang layak yang disebabkan oleh faktor tertentu. Menurut Ismawan (2003), penyebab kemiskinan dan keterbelakangan terjadi karena persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan tidak adanya akses maka manusia menghadapi keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian, penduduk miskin mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan. Akibatnya, potensi penduduk miskin untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Adanya keterbelakangan sumber daya manusia (produktivitas), kurangnya modal, dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan penduduk miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang nantinya akan berakibat pada kurangnya modal, dan begitu seterusnya.

Kemiskinan memiliki ukuran dan batasan tertentu. BPS menggunakan ukuran yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk seseorang. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara dengan 2.100 kkal per hari) dan nonmakanan (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan). Patokan kecukupan 2.100 kkal ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk. Ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan dan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Konsep yang digunakan oleh Bank Dunia pada dasarnya sama dengan yang digunakan BPS, yang membedakan keduanya adalah garis kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia dalam dolar *purchasing power parity* (PPP) atau paritas daya beli, di mana dalam prakteknya ada dua ukuran yang digunakan yakni 1,25 dolar dan 2 dolar. Dolar PPP atau biasa

disebut dolar internasional tidak sama dengan *dollar currency* (dolar AS). Karena Bank Dunia membutuhkan data kemiskinan yang *comparable* (dapat diperbandingkan) antarnegara, maka digunakanlah garis kemiskinan dalam dolar internasional atau dolar PPP.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia (BPS, 2009). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis, GK dibangun dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Komoditas penting bagi penduduk miskin adalah beras. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan adalah sebesar 25,06% di perkotaan dan 34,67% di perdesaan (BPS, 2009).

Menurut Harniati (2007), fenomena kemiskinan perdesaan dan pertanian di Indonesia menunjukkan adanya kaitan antara faktor spasial dan sektor usaha mayoritas penduduknya. Terdapat hubungan erat antara kerentanan penduduk terhadap kemiskinan dengan ekosistem di mana ia tinggal atau dengan kata lain tingkat kemiskinan berbeda antaragroekosistem. Tingkat kemiskinan penduduk di agroekosistem dataran tinggi, lahan basah, dan lahan kering serta pantai/pesisir di bawah angka kemiskinan nasional. Namun, jumlah rumah tangga miskin di lahan kering dan di dataran tinggi jauh lebih besar daripada di lahan basah dan di pesisir. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi menggunakan suatu pola umum (*one fits for all*), tetapi perlu mengembangkan berbagai model yang spesifik sesuai karakteristik kemiskinan di berbagai agroekosistem.

Data dan Analisis Data

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder lingkup nasional dan provinsi, serta data sekunder lingkup desa contoh dan data primer lingkup rumah tangga contoh. Data sekunder diperlukan untuk analisis dinamika sosial ekonomi pertanian pada lingkup nasional dan provinsi contoh dan data tersebut dikumpulkan dari instansi terkait, sedangkan data primer lingkup rumah tangga dan lingkup lembaga agribisnis merupakan data survei Patanas yang telah dilakukan oleh PSEKP pada tahun 2009 dan 2012 pada agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan.

Analisis yang akan dilakukan untuk aspek kemiskinan rumah tangga meliputi (1) insiden kemiskinan yang akan menganalisis besaran *headcount index* (HI), *poverty gap index* (PGI), dan *poverty severity index* (PSI) dan (2) indikator kemiskinan di wilayah perdesaan yang dilakukan rumah tangga untuk mengatasi kemiskinan. Persentase penduduk miskin dihitung dengan mengacu kepada metode BPS, yaitu dengan membandingkan besaran pengeluaran per kapita dengan garis batas kemiskinan yang disusun oleh BPS untuk wilayah perdesaan. Dengan

menggunakan metode yang sama maka hasil kajian ini akan dapat melengkapi informasi tingkat kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten yang dikeluarkan oleh BPS.

Analisis dalam penelitian ini akan mencakup (a) analisis perubahan antarwaktu (dinamika) dan (b) analisis parameter. Analisis perubahan antarwaktu menurut tipe desa disesuaikan dengan ketersediaan data rumah tangga yang dikumpulkan melalui kegiatan Patanas selama tahun 2009 dan 2012. Aspek sosial ekonomi rumah tangga yang dianalisis meliputi insiden kemiskinan. Analisis parameter dilakukan untuk mengetahui besaran dari variabel/indikator tertentu yang telah ditetapkan. Analisis data tingkat kemiskinan dilakukan dengan menggunakan formula *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT). Adapun formula indeks kemiskinan FGT dinyatakan sebagai berikut (Cockburn, 2001):

$$P_{\alpha}(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha} \quad (\alpha \geq 0) \quad (1)$$

di mana: y_i = rata-rata nilai pengeluaran per kapita individu ke- i dalam rumah tangga yang sudah diranking berdasarkan tingkat pengeluaran
 n = total populasi
 q = jumlah populasi
 z = batas kemiskinan

sehingga *poverty gap ratio* adalah:

$$G_i = (z - y_i)/z, \text{ di mana } G_i = 0 \text{ pada saat } y_i > z \quad (2)$$

Nilai α ada tiga macam, yaitu:

1. Jika $\alpha = 0$, P_0 menyatakan *headcount index*, merupakan proporsi populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, formula di atas akan menjadi:

$$P_0(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^0, \text{ atau } P_0 = q/n \quad (3)$$

2. Jika $\alpha = 1$, menunjukkan ukuran *poverty gap ratio* di mana masing-masing penduduk miskin dibobot berdasarkan jarak relatif mereka dari garis kemiskinan, Formula (2) menjadi:

$$P_1 = 1/n \sum (z - y_i)/z \quad (4)$$

Misalnya, besaran $P_1 = 0,2$ artinya total kesenjangan kemiskinan seluruh populasi miskin terhadap garis kemiskinan adalah 20%, sedangkan $P_1/P_0 = 1/q$

$\sum (z - y_i)/z$ adalah rata-rata kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) yang dinyatakan sebagai proporsi terhadap garis kemiskinan.

3. Jika $\alpha = 2$, Formula (2) menjadi:

$$P_2(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2 \quad (5)$$

Indeks tersebut merupakan ukuran yang sensitif terhadap perubahan pendapatan atau distribusi pendapatan populasi miskin (*distributionally sensitive index*), ukuran ini dinamakan rasio „keparahan’ kemiskinan (*poverty severity*).

Indeks Gini digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan rumah tangga sebagai akibat ketidakmerataan aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi. Analisis distribusi pendapatan rumah tangga dilakukan dengan menghitung indeks Gini dengan rumus sebagai berikut (Glewwe, 1986; Adams *et al.*, 1995):

$$G(y) = \frac{2}{\bar{y}} \sum_{i=1}^n Cov(y_i, p(y_i)) \quad (6)$$

- di mana: $G(y)$ = indeks Gini distribusi pendapatan rumah tangga
 \bar{y} = rata-rata pendapatan rumah tangga
 y_i = total pendapatan rumah tangga ke- i
 $p(y_i)$ = urutan pendapatan rumah tangga, yaitu $p = 1$ untuk urutan rumah tangga dengan total pendapatan terkecil dan $p = n$ untuk urutan rumah tangga dengan total pendapatan tertinggi
 n = jumlah populasi rumah tangga yang dianalisis

Nilai G berada pada selang 0 dan 1. Distribusi pendapatan rumah tangga masuk kategori ketimpangan berat apabila $G > 0,5$; kategori ketimpangan sedang apabila $0,4 < G < 0,5$; dan kategori ketimpangan ringan apabila $G < 0,4$.

DINAMIKA KEMISKINAN AGREGAT NASIONAL

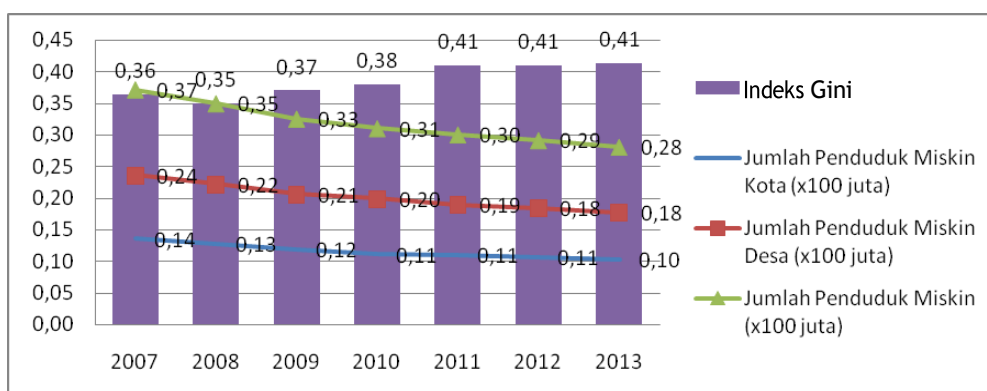
Penduduk Miskin dan Indeks Gini

Data kemiskinan menurut BPS (2011b) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2011 sebanyak 30,02 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan 1 juta orang atau 3,2% dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret tahun sebelumnya yang mencapai 31,02 juta orang. Di kawasan perkotaan persentase penduduk miskin mencapai 11,05 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin sekitar 18,94 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk perdesaan yang pada umumnya adalah petani.

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan BPS tahun 2007–2013 (BPS, 2014a), jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan lebih tinggi dari sisi jumlah, namun lebih rendah dari sisi persentase. Jumlah penduduk miskin perdesaan menunjukkan penurunan rata-rata 4,64 persen per tahun atau 0,98 juta per tahun, atau secara persentase mengalami penurunan 1,01 persen per tahun (5,68% per tahun) dengan nilai perubahan garis kemiskinan rata-rata meningkat Rp17,74 ribu per tahun (9,57% per tahun). Hal ini

menunjukkan bahwa sumber penurunan jumlah penduduk miskin lebih banyak di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian yang identik dengan perdesaan seharusnya ditempatkan menjadi fokus pembangunan.

Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun demikian indeks Gini meningkat (Gambar 2). Kebijakan pembangunan pemerintah yang *pro-job*, *pro-poor*, *pro-growth* dan *pro-environment* tidak berjalan dengan baik. Dalam kata lain, upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak berhasil. Sektor pertanian dan wilayah perdesaan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan belum menjadi prioritas dan andalan dalam pembangunan. Terdapat kecenderungan bahwa penurunan jumlah penduduk di perkotaan lebih banyak bersifat alamiah, sementara di perdesaan berjalan tanpa keberpihakan lebih tinggi dari pemerintah. Dalam arti lain, orang kaya didorong (jika tidak terdorong) tetap mejadi lebih kaya, sementara penduduk miskin bekerja keras untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi.



Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

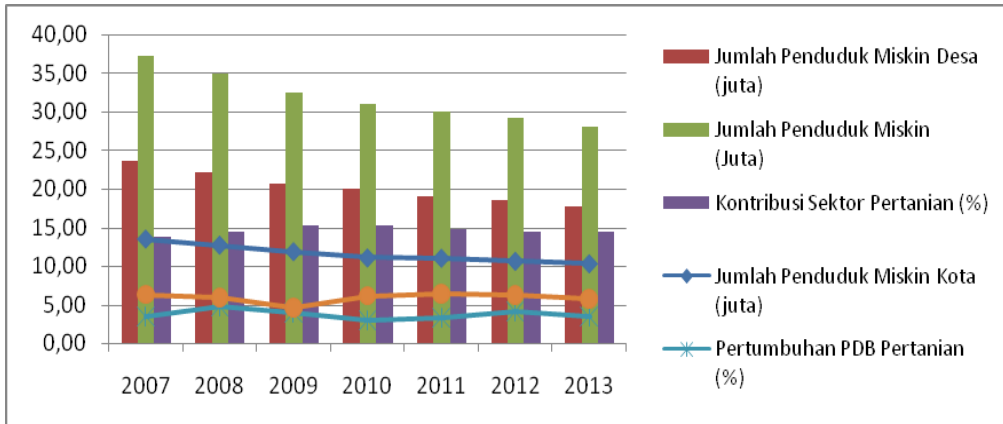
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Gini di Indonesia, 2007–2013

Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi

Bukti bahwa penurunan jumlah penduduk miskin sangat terkait dengan pertumbuhan sektor pertanian dan wilayah perdesaan, ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1. Sektor pertanian identik dengan wilayah perdesaan. Fokus dan konsentrasi pembangunan di wilayah perdesaan dan sektor pertanian memiliki peran besar di dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hal ini, sektor pertanian dan wilayah perdesaan seharusnya menjadi fokus utama dalam pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Gambar 2 dan Tabel 1 dapat diketahui bahwa semakin tinggi perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, maka semakin tinggi pula perubahan penurunan penduduk miskin perdesaan dan jumlah penduduk miskin total. Di samping itu, semakin tinggi perubahan pertumbuhan ekonomi pertanian

tahun sebelumnya akan semakin tinggi penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan dan jumlah penduduk miskin nasional. Namun demikian, pola ini tidak terjadi apabila melihat perubahan jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan maupun nasional dengan perubahan pertumbuhan ekonomi atau PDB nasional. Hal ini memberikan penjelasan kenapa penurunan jumlah penduduk miskin terjadi, tetapi indeks Gini mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kontribusi di sektor nonpertanian tidak memberikan kontribusi nyata di dalam penurunan jumlah penduduk miskin dan pemerataan, justru menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi.



Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2007–2013

Tabel 1 memberikan penjelasan bahwa hingga tahun 2010 perubahan berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDB sektor pertanian memiliki peran besar dalam penurunan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian, namun tidak di sektor nonpertanian maupun secara nasional. Hal ini semakin menjelaskan arah perubahan yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin lebih diperankan oleh sektor pertanian dari pada nonpertanian. Dengan demikian, pembangunan pertanian harus semakin fokus kepada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan mempertahankan peran atau kontribusi pertanian dalam perekonomian.

Penduduk Miskin dan Pendapatan per Kapita

Peningkatan pendapatan per kapita baik secara riil (harga konstan 2000) maupun berdasarkan harga berlaku nampaknya tidak seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Tabel 2 memberikan penjelasan di mana peningkatan pendapatan per kapita pertanian senilai rata-rata Rp0,34 juta per kapita per tahun (harga konstan) atau meningkat rata-rata 4,76% per tahun dan Rp3,29 juta per kapita per tahun (harga berlaku) atau 18,40% per tahun lebih mendorong

penurunan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan sektor nonpertanian yang memiliki rata-rata peningkatan pendapatan lebih tinggi baik dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Tabel 1. Perkembangan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Perubahan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDB (%)	Perubahan Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian (%)	Perubahan Pertumbuhan PDB (%)
2007	-0,93	-1,20	-2,13	0,75	0,11	0,85
2008	-0,79	-1,42	-2,21	0,76	1,36	-0,34
2009	-0,86	-1,57	-2,43	0,81	-0,87	-1,38
2010	-0,81	-0,69	-1,51	0,00	-0,95	1,59
2011	-0,05	-0,96	-1,00	-0,58	0,36	0,27
2012	-0,40	-0,48	-0,89	-0,21	0,83	-0,23
2013	-0,32	-0,75	-1,06	-0,07	-0,66	-0,48

Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Data pada Tabel 2 juga memberikan gambaran bahwa pada tahun 2007 dan 2008 perbandingan antara nilai pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku dibandingkan pendapatan per kapita harga konstan di sektor nonpertanian lebih tinggi sedangkan di sektor pertanian lebih rendah, namun sejak tahun 2009 terjadi sebaliknya di mana perbandingan antara nilai pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku dibandingkan pendapatan per kapita harga konstan di sektor nonpertanian lebih rendah sedangkan di sektor pertanian lebih tinggi. Pada tahun 2007 nilai perbandingan pada sektor nonpertanian adalah 2,20 (Rp57,60 juta dibanding Rp26,19 juta) dan nilai perbandingan sektor pertanian adalah 2,00 (Rp12.70 juta dibanding Rp6,36 juta). Pada tahun 2008 nilai perbandingannya adalah sektor nonpertanian 2,56 dan pertanian 2,52, pertanian masih lebih rendah. Namun demikian, sejak 2009 terjadi perubahan di mana nilai perbandingan di sektor nonpertanian lebih rendah yaitu 2,73 dan di sektor pertanian lebih tinggi yaitu 2,90. Hal tersebut terus berjalan hingga tahun 2013 di mana pada sektor nonpertanian 3,38 dan sektor pertanian 3,86. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi di sektor pertanian lebih tinggi jika dibandingkan sektor nonpertanian dan memberikan gambaran tingginya ketimpangan pendapatan antara sektor pertanian dan nonpertanian.

Sementara itu, Tabel 3 memberikan penjelasan bahwa hingga tahun 2011 perubahan peningkatan pendapatan per kapita per tahun sebelumnya sejalan dengan besarnya penurunan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian, namun tidak di sektor nonpertanian maupun secara nasional. Data juga menjelaskan jumlah penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan semakin rendah dan juga memberikan fenomena bahwa penduduk miskin di perdesaan berkecukupan di antara

garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang bekerja di perdesaan (sektor pertanian) penurunan jumlahnya tidak sebanding dengan penurunan pangsa PDB pertanian, sementara sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang relatif rendah. Padahal, sektor pertanian memiliki peran yang relatif lebih besar dalam menurunkan angka kemiskinan, jika dibandingkan sektor nonpertanian.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pendapatan per Kapita di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Pendapatan per Kapita Harga Konstan (Rp juta/kap/thn)			Pendapatan per Kapita Harga Berlaku (Rp juta/kap/thn)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Nonpertanian	Pertanian	Total	Nonpertanian	Pertanian	Total
2007	13,56	23,61	37,17	26,19	6,36	17,89	57,60	12,70	38,79
2008	12,77	22,19	34,96	26,83	6,63	18,54	68,61	16,68	47,29
2009	11,91	20,62	32,53	27,40	6,80	19,02	74,75	19,69	52,36
2010	11,10	19,93	31,02	28,13	7,05	19,81	82,32	22,79	58,83
2011	11,05	18,97	30,02	29,09	8,05	21,47	91,67	27,88	68,59
2012	10,65	18,49	29,13	29,46	8,22	21,96	96,26	29,89	72,82
2013	10,33	17,74	28,07	31,24	8,67	23,39	105,70	33,43	80,56
R1	-0,54	-0,98	-1,52	0,81	0,34	0,86	7,73	3,29	6,64
R2	-4,41	-4,64	-4,56	2,90	4,76	4,35	10,85	18,40	13,18

Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Tabel 2 dan Tabel 3 semakin menjelaskan arah perubahan yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin lebih diperankan oleh sektor pertanian dari pada nonpertanian, dan tingginya nilai pendapatan per kapita nonpertanian dan perubahan-perubahannya makin mendorong terjadinya ketimpangan sehingga angka indeks Gini makin meningkat. Berdasarkan fakta bahwa perubahan terjadi sejak 2009 (Tabel 2) dan 2011 (Tabel 3), maka dalam pembangunan pertanian ke depan harus diberikan ruang yang lebih besar dalam mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, pembangunan pertanian harus semakin fokus kepada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian.

Penduduk Miskin dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 4 memberikan gambaran bahwa peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian dan produktivitas ekonominya akan memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di perdesaan maupun secara nasional. Setiap penurunan jumlah 1 orang tenaga kerja pertanian akan berdampak penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,72 orang. Setiap penurunan tenaga kerja pertanian sebanyak 1% akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 5,80 orang. Sementara itu, pada sektor nonpertanian setiap peningkatan kerja satu orang akan menurunkan jumlah

penduduk miskin 0,22 orang, dan setiap peningkatan penyerapan tenaga kerja 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin 1,13%.

Tabel 3. Perkembangan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Pendapatan per Kapita di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta)	Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Nonpertanian		Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta)	Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Pertanian		Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Pertumbuhan Pendapatan per Kapita	
		Harga Konstan (%)	Harga Berlaku (%)		Harga Konstan (%)	Harga Berlaku (%)		Harga Konstan (%)	Harga Berlaku (%)
2007	-0,93	2,35	11,61	-1,20	1,15	22,28	-2,13	2,92	13,86
2008	-0,79	2,44	19,12	-1,42	4,11	31,34	-2,21	3,63	21,92
2009	-0,86	2,12	8,95	-1,57	2,58	18,02	-2,43	2,62	10,72
2010	-0,81	2,67	10,12	-0,69	3,71	15,75	-1,51	4,15	12,35
2011	-0,05	3,40	11,37	-0,96	14,20	22,36	-1,00	8,39	16,60
2012	-0,40	1,30	5,01	-0,48	2,17	7,21	-0,89	2,27	6,16
2013	-0,32	6,01	9,80	-0,75	5,39	11,82	-1,06	6,49	10,63

Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tenaga Kerja di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)			Jumlah Tenaga Kerja (Juta orang)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Nonpertanian	Pertanian	Total
2007	13,56	23,61	37,17	59,19	42,67	101,85
2008	12,77	22,19	34,96	61,68	42,96	104,64
2009	11,91	20,62	32,53	63,53	43,54	107,07
2010	11,10	19,93	31,02	66,35	43,24	109,59
2011	11,05	18,97	30,02	69,02	39,14	108,17
2012	10,65	18,49	29,13	73,09	39,92	113,01
2013	10,33	17,74	28,07	73,54	39,22	112,76
R1	-0,54	-0,98	-1,52	2,46	-0,36	2,11
R2	-4,41	-4,64	-4,56	3,90	-0,80	2,04

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

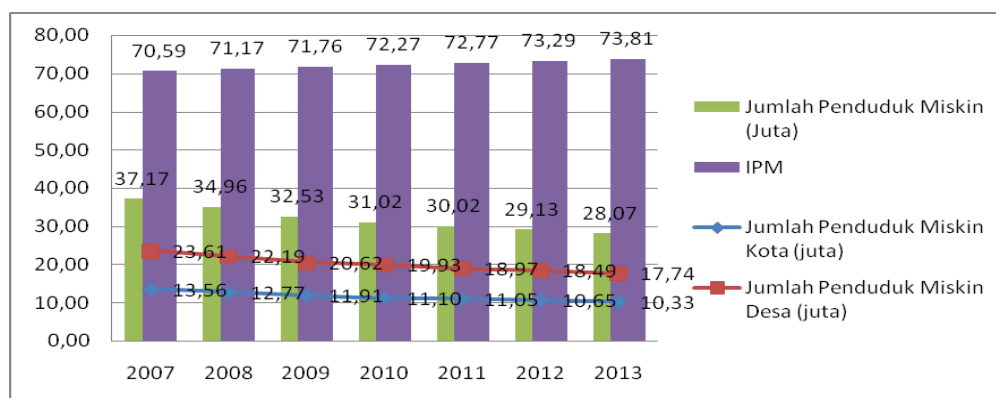
R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Pada tingkat nasional peningkatan jumlah tenaga kerja satu orang akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,72 orang, sedangkan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin 2,22%. Data pada Tabel 4 juga memberikan gambaran bahwa sektor pertanian kelebihan beban tenaga kerja, sehingga upaya untuk memperluas skala usaha pertanian dan atau pengurangan angkatan kerja akan berdampak besar terhadap

penurunan jumlah penduduk miskin. Mengingat fenomena bahwa penduduk miskin di perdesaan berkecukupan di antara garis kemiskinan, perluasan skala usaha perlu disertai dengan distribusi dan pemerataan dalam penguasaan aset dan sumber daya. Inovasi teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan kesempatan berusaha di perdesaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung kebijakan distribusi dan pemerataan dalam penguasaan aset dan sumber daya menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk dilakukan.

Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan peningkatan dari 70,59 pada tahun 2007 menjadi 73,81 pada tahun 2013 (Gambar 3). Seiring dengan peningkatan IPM, jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS (2014a), diolah

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan IPM di Indonesia, 2007–2013

Tabel 5 menunjukkan bahwa perubahan IPM sebesar satu-satuan akan terkait dengan penurunan jumlah penduduk miskin 3,03 juta orang, di mana penurunan di perkotaan hanya 1,12 juta orang sementara di perdesaan mencapai 1,91 juta orang. Hal ini menunjukkan arah peningkatan kualitas SDM manusia dengan peningkatan IPM di perdesaan menjadi kunci di dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Perkembangan Rumah Tangga dan Tenaga Kerja Miskin Pertanian

Di Indonesia kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Hasil analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk dan tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor-sektor lainnya. Jumlah rumah tangga miskin di sektor pertanian (dalam arti sempit)

disajikan pada Tabel 6. Sementara itu, jumlah tenaga kerja atau jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama disajikan pada Tabel 7.

Tabel 5. Perkembangan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin dan IPM di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Perubahan IPM
2007	-0,93	-1,20	-2,13	0,49
2008	-0,79	-1,42	-2,21	0,58
2009	-0,86	-1,57	-2,43	0,59
2010	-0,81	-0,69	-1,51	0,51
2011	-0,05	-0,96	-1,00	0,50
2012	-0,40	-0,48	-0,89	0,52
2013	-0,32	-0,75	-1,06	0,52
R1	-0,59	-1,01	-1,60	0,53
R2	-4,69	-4,67	-4,68	0,74

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh gambaran bahwa jumlah rumah tangga miskin tanaman pangan menurun rata-rata 0,10 juta atau 4,62% per tahun. Sementara itu, pada subsektor hortikultura, perkebunan, dan total sektor pertanian (dalam arti sempit) jumlah rumah tangga miskin masing-masing menurun 0,01 juta, 0,03 juta dan 0,13 juta atau 4,91%, 3,18% dan 4,15% per tahun. Terdapat fenomena yang menarik, jika pada subsektor lain menunjukkan penurunan maka pada subsektor peternakan justru menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga miskin rata-rata 9,66% per tahun. Sekalipun demikian, jika dilihat pada Tabel 7 jumlah tenaga kerja miskin menunjukkan penurunan 0,11 juta orang atau 6,66% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan peternakan telah gagal menurunkan jumlah rumah tangga miskin sekalipun pada tenaga kerja yang bekerja pada usaha peternakan mengalami penurunan.

Pada subsektor tanaman pangan jumlah tenaga kerja miskin menurun rata-rata 0,59 juta orang atau 5,47% per tahun, sementara pada subsektor hortikultura mengalami penurunan rata-rata 0,07 juta atau 6,60% per tahun dan pada subsektor perkebunan rata-rata menurun 0,15 juta atau 3,68% per tahun. Jumlah tenaga kerja miskin pertanian menurun rata-rata 0,93 juta atau 5,41% per tahun. Subsektor perkebunan memiliki jumlah tenaga kerja miskin terbesar kedua setelah tanaman pangan dan memiliki penurunan jumlah tenaga kerja miskin paling rendah.

Tabel 6. Perkembangan Rumah Tangga Miskin Sektor Pertanian di Indonesia, 2007–2013 (Juta Rumah Tangga)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian Sempit
2007	2,30	0,20	0,75	0,16	3,41
2008	2,17	0,20	0,69	0,13	3,18
2009	2,08	0,19	0,64	0,10	3,01
2010	2,04	0,16	0,78	0,25	3,22
2011	2,04	0,17	0,71	0,21	3,13
2012	1,82	0,14	0,67	0,19	2,82
2013	1,72	0,15	0,60	0,15	2,62
R1	-0,10	-0,01	-0,03	0,00	-0,13
R2	-4,62	-4,91	-3,18	9,66	-4,15

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing
R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Miskin Sektor Pertanian di Indonesia, 2007–2013 (Juta Orang)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian Sempit
2007	12,33	1,20	4,23	1,78	19,54
2008	11,53	1,10	4,05	1,61	18,29
2009	10,64	0,99	3,82	1,45	16,90
2010	10,08	0,79	4,11	1,09	16,07
2011	9,57	0,91	3,41	1,33	15,22
2012	9,26	0,83	3,42	1,20	14,71
2013	8,79	0,77	3,32	1,10	13,99
R1	-0,59	-0,07	-0,15	-0,11	-0,93
R2	-5,47	-6,60	-3,68	-6,66	-5,41

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing
R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

KEMISKINAN RUMAH TANGGA LAHAN KERING PERKEBUNAN

Garis Kemiskinan 2009 dan 2012

Berdasarkan data BPS (2014a), garis kemiskinan berkembang dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan merupakan ukuran "relatif" dan akan selalu berkembang sesuai dengan rata-rata pendapatan suatu negara. Garis kemiskinan ini berlaku pada setiap negara dan kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Perkembangan garis kemiskinan

nasional pada tahun 2009 (Maret) dan 2012 (Maret) terus meningkat dan ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Garis Kemiskinan Provinsi Contoh Patanas dan Nasional, 2009 dan 2012 (Rp per Kapita per Bulan)

Provinsi	2009			2012		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Jambi	244.516	178.107	199.623	311.311	236.165	259.257
Jatim	202.624	174.628	188.317	245.305	222.216	233.202
Kalbar	194.881	166.815	174.617	243.957	218.476	226.175
Sulsel	177.872	142.241	153.715	210.217	179.160	190.545
Nasional	222.123	179.835	200.262	267.408	229.226	248.707

Sumber: BPS (2014a)

Insiden Kemiskinan 2009 dan 2012

Insiden kemiskinan dapat diketahui dengan menghitung *headcount index* (HI) berdasarkan formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT). HI menghasilkan berapa banyak penduduk miskin di wilayah tersebut (yang dinyatakan dengan persen), namun tidak dapat diketahui seberapa parah kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Namun demikian, HI tidak dapat menunjukkan kedalaman dan keparahan kemiskinan sehingga perlu dihitung PGI (indeks kesenjangan kemiskinan atau kedalaman kemiskinan P1) yang menyatakan tingkat kesenjangan rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis batas kemiskinan yang dinyatakan dalam persentase. HI maupun PGI belum menunjukkan distribusi dan seberapa parah kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu pula dilakukan perhitungan PSI untuk mengetahui hal itu. PSI (indeks keparahan kemiskinan P2) menunjukkan kondisi distribusi kemiskinan di wilayah tersebut yang dinyatakan dalam persen. Semakin besar PSI, maka kesenjangan kemiskinan antarpenduduk miskin di wilayah tersebut semakin lebar. Hasil analisis insiden kemiskinan pada provinsi contoh Patanas dibandingkan analisis BPS Provinsi dan Nasional 2009 dan 2012 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 menunjukkan bahwa secara umum hasil analisis HI terjadi penurunan insiden kemiskinan selama 2009–2012 kecuali di Jawa Timur untuk Kabupaten Lumajang dan Sanggau untuk Kalimantan Barat. Pada saat yang sama, hasil analisis data BPS Provinsi menunjukkan penurunan, sementara di kedua kabupaten tersebut meningkat. Insiden kemiskinan di kedua kabupaten tersebut masih di bawah provinsi dan di Kabupaten Sanggau sekalipun meningkat insiden kemiskinan relatif kecil. Berbeda dengan di Kabupaten Sanggau, di Kabupaten Lumajang insiden kemiskinan cenderung meningkat dan tinggi, yaitu dari 12,50% tahun 2009 meningkat menjadi 15,00% pada tahun 2012. Peningkatan insiden kemiskinan di Kabupaten Lumajang terjadi karena para petani tebu lebih banyak melakukan keputusan untuk menyewakan lahan usaha dibandingkan mengusahakan sendiri. Pada petani contoh yang tidak menyewakan lahannya, peningkatan produksi, harga,

dan nilai pendapatan usaha tidak dapat dinikmati karena tingginya ketergantungan pada bandar penjual tebu ke pabrik gula. Sekalipun terjadi peningkatan di tahun 2012 dibanding tahun 2009, responden petani tebu di desa contoh di Kabupaten Lumajang kurang menikmati kenaikan tersebut.

Tabel 9. Insiden Kemiskinan pada Provinsi Contoh Patanas Dibandingkan Analisis BPS Provinsi dan Nasional, 2009 dan 2012

Provinsi, Desa, dan Kabupaten Contoh	Komoditas	Indeks Kemiskinan (%)					
		<i>Headcount</i>		<i>Poverty Gap</i>		<i>Poverty Severity</i>	
		2009	2012	2009	2012	2009	2012
Jambi							
Penerokan-Batanghari	Karet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matra Manunggal-Muaro Jambi	Kelapa Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPS Provinsi		6,88	7,52	0,94	1,09	0,22	0,26
Jatim							
Rejosari-Malang	Tebu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kebonan-Lumajang	Tebu	12,50	15,00	4,60	1,99	3,00	0,28
BPS Provinsi		21,00	17,35	3,54	2,31	0,91	0,48
Kalbar							
Semoncol-Sanggau	Karet	2,50	5,00	0,02	0,49	0,00	0,08
Hibun-Sanggau	Kelapa Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPS Provinsi		10,09	9,11	1,68	1,23	0,45	0,25
Sulsel							
Pakeng-Pinrang	Kakao	59,00	35,90	18,00	8,69	7,50	3,29
Bakti-Luwu	Kakao	7,30	0,00	0,81	0,00	0,11	0,00
BPS Provinsi		15,81	13,46	2,74	2,21	0,74	0,59
Nasional		17,35	15,12	3,05	2,36	0,82	0,59

Sumber: Data Patanas (2009, 2012) dan BPS (2014a), diolah

Sekalipun insiden kemiskinan meningkat di Kabupaten Lumajang, PGI dan PSI, yang berarti kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin sempit dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin sempit. Pada data PGI dan PSI, searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Jawa Timur, namun pada HI tidak searah, di mana HI pada level provinsi menunjukkan penurunan.

Di Kabupaten Sanggau juga terlihat fenomena bahwa sekalipun insiden kemiskinannya relatif kecil dan meningkat, namun PGI dan PSI juga meningkat yang berarti kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin meningkat dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin melebar. Kondisi ini tidak searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Kalimantan Barat, di mana HI, PGI, dan PSI menunjukkan penurunan.

Secara umum, insiden kemiskinan di wilayah lahan kering perkebunan relatif rendah karena masih berada di bawah level data provinsi, kecuali di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Data juga menunjukkan rumah tangga dengan usaha komoditas basis karet dan kelapa sawit memiliki tingkat kemiskinan yang relatif kecil dibandingkan usaha tebu dan kakao. Tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah Pinrang menunjukkan fenomena berbeda dan menyimpang dari kondisi umum yang terjadi. Wilayah ini merupakan wilayah agroekosistem lahan kering perkebunan berbasis kakao. Di wilayah ini kakao diusahakan pada lokasi kebun yang pada umumnya berada jauh dari pemukiman dengan kebun berada di lereng pegunungan. Di samping jarak tempuh yang jauh, tingkat pemeliharaan yang sangat rendah baik pada pemupukan maupun penyemprotan hama penyakit. Di Kabupaten Pinrang tingkat serangan penggerek buah kakao (PBK) sangat tinggi dan mengakibatkan turunnya produktivitas kakao. Produktivitas kakao di Kabupaten Pinrang per tahun kurang dari 500 kg/ha, sementara di Kabupaten Luwu mencapai sekitar 900 kg/ha. Sekalipun di kedua wilayah ini produktivitas kakao masih di bawah rata-rata, namun di produktivitas kakao di Kabupaten Luwu relatif lebih tinggi dibanding di Kabupaten Pinrang.

Tabel 9 juga menunjukkan dinamika perbedaan atau variasi antarwilayah, kecuali pada komoditas kelapa sawit di mana tidak terjadi insiden kemiskinan di Kabupaten Sanggau maupun di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2009 dan 2012. Pada komoditas lain, baik karet, kakao, maupun tebu terlihat variasi dinamika antarwilayah kabupaten yang menunjukkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan karakteristik masing lokasi secara spesifik haruslah dipertimbangkan.

Distribusi Pendapatan 2009 dan 2012

Hasil analisis distribusi pendapatan menggunakan indeks Gini disajikan pada Tabel 10. Tabel tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di lokasi contoh Patanas berada dalam tingkat ketimpangan sedang hingga berat. Berbeda dengan hasil analisis pada Tabel 9 yang menunjukkan kondisi rata-rata berada di bawah level provinsi dan nasional, hasil analisis pada Tabel 10 menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dan menunjukkan perubahan yang searah dengan level provinsi maupun nasional, kecuali di Muaro Jambi dan Sanggau dengan komoditas kelapa sawit lahan kering. Di Kabupaten Muaro Jambi dan Sanggau distribusi pendapatan menunjukkan ketimpangan sedang dan ringan dan menurun dari 0,44 menjadi 0,42 di Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan di Kabupaten Sanggau menurun dari 0,36 menjadi 0,34 pada tahun 2009 dan 2012.

Berdasarkan Tabel 10, dari empat provinsi contoh hanya di Kalimantan Barat yang memiliki ketimpangan ringan, sedangkan di tiga provinsi lainnya cenderung sedang (Provinsi Jambi), sedang (Provinsi Sulawesi Selatan) dan cenderung berat (Jawa Timur). Peningkatan ketimpangan terbesar terjadi di Jawa Timur dengan nilai perubahan 0,09 di Kabupaten Malang dan 0,18 di Kabupaten Lumajang, nilai perubahan berikutnya adalah di Kabupaten Sanggau dengan komoditas karet, di Kabupaten Luwu dan Pinrang dengan komoditas kakao masing-masing 0,07, dan terendah adalah di Kabupaten Batanghari (karet) dengan nilai perubahan 0,03. Hasil

ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antarpetani pekebun di desa-desa Patanas semakin meningkat, kecuali pada desa yang berbasis komoditas kelapa sawit.

Tabel 10. Indeks Gini pada Provinsi Contoh Patanas Dibandingkan Analisis BPS Provinsi dan Nasional, 2009 dan 2012

Provinsi, Desa, dan Kabupaten Contoh	Komoditas	Tahun		Perubahan 2009–2012
		2009	2012	
Jambi				
Penerokan-Batang Hari	Karet	0,38	0,41	0,03
Matra Manunggal-Muaro Jambi	Kelapa Sawit	0,44	0,42	-0,02
Data BPS Provinsi		0,27	0,34	0,07
Jatim				
Rejosari-Malang	Tebu	0,43	0,52	0,09
Kebonan-Lumajang	Tebu	0,40	0,58	0,18
Data BPS Provinsi		0,33	0,36	0,03
Kalbar				
Semoncol-Sanggau	Karet	0,26	0,33	0,07
Hibun-Sanggau	Kelapa sawit	0,36	0,34	-0,02
Data BPS Provinsi		0,32	0,38	0,06
Sulsel				
Pakeng-Pinrang	Kakao	0,40	0,47	0,07
Bakti-Luwu	Kakao	0,42	0,49	0,07
Data BPS Provinsi		0,39	0,41	0,02
Total seluruh Provinsi-Desa Contoh		0,39	0,44	0,05
Data BPS Indonesia		0,37	0,41	0,04

Sumber: Data Primer Patanas (2009, 2012) dan BPS (2014a), diolah

Berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan antarpetani. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di antaranya adalah peningkatan produktivitas dan stabilisasi harga. Produktivitas dan harga menjadi sumber utama peningkatan pendapatan, juga sumber utama perubahan pendapatan. Di samping itu, kondisi infrastruktur yang mendorong peningkatan produktivitas dan stabilisasi harga nampaknya perlu mendapatkan perhatian penting.

Komoditas kelapa sawit memiliki kondisi infrastruktur yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan harga yang lebih terjamin stabilitasnya. Apabila kebijakan yang mendukung hal tersebut tidak dilakukan secara kondusif, maka ketimpangan akan tetap terjadi dan bahkan semakin meningkat serta pertanian nonkelapa sawit akan semakin ditinggalkan. Lebih jauh lagi rumah tangga petani akan beralih pada sumber pendapatan nonpertanian yang memberikan insentif pendapatan lebih tinggi dan risiko lebih rendah.

Tabel 11. Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Patanas pada Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan, 2009 dan 2012

Provinsi-Desa	Tahun	Satuan	Pendapatan		
			Pertanian	Nonpertanian	Total
Jambi-Penerokan	2009	Nilai (Rp Juta)	11,66	9,72	21,38
		Persentase (%)	54,53	45,47	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	36,07	18,46	54,53
		Persentase (%)	66,16	33,84	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	209,44	89,84	155,06
		Persentase (%)	11,63	-11,63	
Jambi-Matra Manunggal	2009	Nilai (Rp Juta)	20,20	11,49	31,69
		Persentase (%)	63,75	36,25	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	32,42	22,21	54,64
		Persentase (%)	59,34	40,66	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	60,51	93,40	72,43
		Persentase (%)	-4,41	4,41	
Jatim-Rejosari	2009	Nilai (Rp Juta)	4,75	9,30	14,05
		Persentase (%)	33,82	66,18	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	25,12	16,62	41,74
		Persentase (%)	60,19	39,81	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	428,50	78,69	197,01
		Persentase (%)	26,36	-26,36	
Jatim-Kebonan	2009	Nilai (Rp Juta)	5,91	5,10	11,01
		Persentase (%)	53,69	46,31	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	9,52	25,15	34,67
		Persentase (%)	27,45	72,55	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	61,03	393,49	214,98
		Persentase (%)	-26,24	26,24	
Kalbar-Semoncol	2009	Nilai (Rp Juta)	18,10	2,89	20,98
		Persentase (%)	86,24	13,76	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	24,65	8,26	32,91
		Persentase (%)	74,91	25,09	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	36,25	185,90	56,84
		Persentase (%)	-11,33	11,33	
Kalbar-Hibun	2009	Nilai (Rp Juta)	30,14	7,59	37,73
		Persentase (%)	79,88	20,12	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	67,31	7,94	75,25
		Persentase (%)	89,45	10,55	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	123,34	4,57	99,45
		Persentase (%)	9,57	-9,57	
Sulsel-Pakeng	2009	Nilai (Rp Juta)	5,93	3,19	9,12
		Persentase (%)	64,99	35,01	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	4,30	17,63	21,93
		Persentase (%)	19,59	80,41	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	-27,52	452,30	140,45
		Persentase (%)	-45,40	45,40	
Sulsel-Bakti	2009	Nilai (Rp Juta)	9,44	17,98	27,41
		Persentase (%)	34,42	65,58	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	4,22	39,91	44,13
		Persentase (%)	9,56	90,44	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	-55,29	121,99	60,97
		Persentase (%)	-24,86	24,86	

Dinamika perubahan lingkungan dan pembangunan pertanian yang terjadi dapat mengakibatkan sumber pendapatan rumah tangga berubah. Perubahan kondisi lingkungan strategis perdesaan aktivitas usaha dan perekonomian perdesaan berubah seiring dengan perubahan waktu. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, perubahan tingkat aksesibilitas atau keterbukaan ekonomi desa, perubahan iklim, dinamika harga, dan perubahan lainnya menyebabkan usaha pertanian dan usaha komoditas utama bukan lagi menjadi sumber pendapatan utama. Aktivitas ekonomi perdesaan menjadi semakin berkembang dan sumber pendapatan rumah tangga juga demikian. Karakteristik sumber daya lahan dan agroekosistem, letak geografis desa, dan akses jalan dan komunikasi yang semakin baik dan maju menyebabkan tidak dominannya sumber pendapatan dari sektor pertanian, karena sumber pendapatan yang tadinya didominasi oleh sumber pendapatan dari sektor pertanian menjadi dari nonpertanian. Petani yang berada pada kelompok pemilik lahan sempit berupaya keras memenuhi tuntutan kebutuhan rumah tangganya melalui bekerja dan berusaha sebagai buruh dan jasa nonpertanian, sementara yang memiliki lahan luas semakin meningkatkan dan memperluas usahanya ke arah usaha nonpertanian untuk memanfaatkan kelebihan sumber daya produktif yang dimilikinya dan meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Perkembangan usaha perkebunan dan peningkatan aksesibilitas desa menjadi sumber penyebab peningkatan sumber pendapatan dari usaha nonpertanian terutama di desa Patanas Sulawesi Selatan. Adanya jalan lintas Sulawesi menyebabkan kondisi desa sangat ramai dan aktivitas ekonomi menjadi berkembang dan semakin beragam. Masyarakat di wilayah ini menambah pendapatannya terutama dari sektor nonpertanian seperti berdagang, buka warung/toko dan usaha transportasi. Usaha pertanian tetap menjadi sumber pendapatan masyarakatnya, namun pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan pertanian.

KESIMPULAN

Secara makro jumlah penduduk miskin dalam periode 2007–2013 mengalami penurunan, namun demikian indeks Gini meningkat, menunjukkan penduduk miskin perdesaan berada pada posisi di sekitar garis kemiskinan. Sektor pertanian memiliki kontribusi tinggi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, maka semakin tinggi pula perubahan penurunan penduduk miskin perdesaan dan jumlah penduduk miskin total. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kontribusi di sektor nonpertanian tidak memberikan kontribusi nyata di dalam penurunan jumlah penduduk miskin dan pemerataan, justru menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi.

Jumlah tenaga kerja miskin pertanian menurun rata-rata 0,93 juta orang atau 5,41% per tahun dengan penurunan pada subsektor perkebunan rata-rata menurun 0,15 juta orang atau 3,68% per tahun. Subsektor perkebunan memiliki jumlah

tenaga kerja miskin terbesar kedua setelah tanaman pangan dan memiliki penurunan jumlah tenaga kerja miskin paling rendah. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pertanian menjadi kunci dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Setiap penurunan jumlah satu orang tenaga kerja pertanian akan berdampak penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,72 orang. Sementara itu, pada sektor nonpertanian setiap peningkatan kerja satu orang hanya akan menurunkan jumlah penduduk miskin 0,22 orang, dan setiap peningkatan penyerapan tenaga kerja 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin 1,13%.

Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan. Perubahan IPM sebesar satu-satuan akan terkait dengan penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan 3,03 juta orang di mana penurunan di perkotaan hanya 1,12 juta orang sementara di perdesaan mencapai 1,91 juta orang.

Secara umum, analisis mikro data Patanas 2009–2012 menunjukkan bahwa insiden kemiskinan di wilayah lahan kering perkebunan relatif rendah dan berada di bawah insiden kemiskinan tingkat provinsi, kecuali di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak terjadi insiden kemiskinan pada petani komoditas kelapa sawit baik di Kabupaten Sanggau maupun di Muaro Jambi. Pada komoditas lain baik karet, kakao, maupun tebu menunjukkan variasi dinamika antarwilayah kabupaten yang menunjukkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan karakteristik masing-masing lokasi secara spesifik haruslah dipertimbangkan.

Sekalipun insiden kemiskinan meningkat, kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin sempit dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin sempit. Pada kasus Kabupaten Lumajang, data PGI dan PSI, searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Jawa Timur, namun pada HI tidak searah, di mana HI pada level provinsi menunjukkan penurunan.

Pada Kabupaten Sanggau juga menunjukkan fenomena bahwa sekalipun insiden kemiskinannya relatif kecil dan meningkat, namun PGI dan PSI juga meningkat yang berarti kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin meningkat dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin melebar. Kondisi ini tidak searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Kalimantan Barat, di mana HI, PGI, dan PSI menunjukkan penurunan.

Berdasarkan hasil analisis indeks Gini tingkat ketimpangan pada wilayah lahan kering perkebunan berada pada kondisi sedang hingga berat dan menunjukkan peningkatan. Perubahan yang ketimpangan yang terjadi searah dengan level provinsi maupun nasional, kecuali di Kabupaten Muaro Jambi dan Sanggau dengan komoditas kelapa sawit sebagai komoditas utama yang menunjukkan penurunan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan antarpetani pekebun di desa-desa Patanas semakin meningkat, kecuali pada desa yang berbasis komoditas kelapa sawit.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan di antaranya: *Pertama*, hasil analisis data Patanas menunjukkan tingkat relevansi yang memadai untuk memantau dinamika perekonomian perdesaan. Survei Patanas selanjutnya dilanjutkan untuk memonitor dinamika rumah tangga pertanian dan perdesaan

yang tidak tergambar pada publikasi statistik. *Kedua*, peningkatan kualitas SDM manusia dengan peningkatan IPM di perdesaan menjadi kunci di dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Kebijakan peningkatan kualitas SDM pertanian baik melalui pendidikan formal maupun dengan peningkatan jumlah penyuluh, fasilitator, dan pemandu lapangan sangat penting. *Ketiga*, peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian dan produktivitas ekonominya akan memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di perdesaan maupun secara nasional. Upaya menciptakan kondisi kondusif bagi penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di perdesaan menjadi sangat penting. *Keempat*, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia lebih banyak bersumber dari wilayah perdesaan, di mana sektor pertanian (dalam arti luas) identik dengan wilayah perdesaan. Fokus dan konsentrasi pembangunan di wilayah perdesaan dan sektor pertanian memiliki peran besar di dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Kelima*, kebijakan pemerintah diharapkan semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, baik melalui penyediaan infrastruktur pertanian dan perdesaan maupun upaya untuk memperluas skala usaha pertanian. Upaya ini akan berpengaruh terhadap pengurangan angkatan kerja yang tergantung pada sektor informal dan pertanian dan akan berdampak besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams Jr., R.H. and J.J. He. 1995. Sources of Income Inequality and Poverty in Rural Pakistan. Research Report 102. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku I. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011a. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Februari 2011. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011b. Perkembangan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia. Jakarta. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1 (13 November 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha. http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=11¬ab=1. (13 November 2014).
- Cockburn, J. 2002. Procedures for Conducting Non-Parametric Poverty/Distribution with DAD. CREFA, Universite Laval. <http://jcoc@ecn.ulaval.ca>.
- Ellis, F. 1998a. Survey Article: Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. The Journal of Development Studies 35(1):1-38.

- Ellis, F. 1998b. Livelihood Diversification and Sustainable Rural Livelihoods. *In* D. Carney (Ed.). *Sustainable Rural Livelihoods: What Contribution Can We Make?* Department for International Development. London.
- Ellis, F. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press. Oxford.
- Ellis, F. 2001. *Mixing It: Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press. Oxford.
- Ellis, F. 2002. *Rural Livelihoods, Diversity and Poverty Reduction Policies: Uganda, Tanzania, Malawi and Kenya*. LADDER Working Paper No. 1, September 2001.
- Ellis, F. 2004. *Occupational Diversification in Developing Countries and Implications for Agricultural Policy*. Hot Topic Paper. Programme of Advisory and Support Services to DFID (PASS) Project No. WB0207. December 2004
- Glewwe, P., 1986. The Distribution of Income in Sri Lanka in 1969-1970 and 1980-1981: A Decomposition Analysis. *Journal of Development Economics* 24(2):255-274.
- Harniati. 2007. Program-Program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan. Materi Sekretaris Badan Pengembangan SDM Pertanian pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan. Diseminarkan tanggal 21 Agustus 2007 di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Ismawan, B. 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. The World Bank. Washington, D.C.

DINAMIKA KEMISKINAN RUMAH TANGGA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGUASAAN LAHAN PADA BERBAGAI AGROEKOSISTEM

Sri Hery Susilowati

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kinerja sektor pertanian tumbuh menggembirakan yang ditunjukkan melalui rata-rata pertumbuhan PDB pertanian tahun 2015 tumbuh sebesar 3,31%, yang didukung oleh pertumbuhan subsektor tanaman pangan 3,48%, subsektor hortikultura 2,49%, dan subsektor perkebunan 3,54% (BPS, 2016). Data bulan Maret 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia juga menurun, dari sebesar 13,33% pada tahun 2010 menjadi tinggal 11,25% atau 28,59 juta orang. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, penduduk miskin yang tinggal di perdesaan berjumlah 14,21%. Indeks keparahan kemiskinan (P1) dan dan kedalaman kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan, yang menunjukkan pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan yang disertai dengan distribusinya yang makin merata.

Kinerja pembangunan seperti diuraikan di atas sudah barang tentu merupakan hasil berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian yang telah dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, Pemerintah telah berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan pertanian dan memberikan dukungan terhadap regenerasi petani, di antaranya melalui peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi perdesaan, peningkatan kemampuan petani dan organisasi tani, pembangunan infrastruktur pertanian dan kelembagaan pasar secara merata. Dalam hal reformasi agraria, pemerintah juga berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan distribusi lahan melalui *land reform* dan program pemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, serta meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian. Pemerintah juga berkomitmen dalam pembangunan agribisnis kerakyatan, UKM, dan koperasi (Bappenas, 2014). Tujuan akhir dari berbagai kebijakan dan program pemerintah tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan sekaligus berimplikasi terhadap pengurangan kemiskinan.

Meskipun secara makro kinerja ekonomi menunjukkan perbaikan seperti ditunjukkan melalui data di atas, namun hasil pembangunan pertanian masih tetap menyisakan berbagai permasalahan yang perlu dijadikan fokus perbaikan pada Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015–2019. Permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, meskipun secara nasional kemiskinan menurun, namun isu rawan pangan yang disebabkan oleh kemiskinan laten masih tetap muncul terutama pada agroekosistem pertanian lahan kering marginal, yang disebabkan oleh sumber daya yang kurang mendukung dan belum meratanya pembangunan ke

semua wilayah, khususnya di luar Jawa. Dengan penguasaan aset produktif terutama lahan yang sangat terbatas, maka berbagai program dan kebijakan untuk mengentaskan rumah tangga miskin di sektor pertanian masih merupakan tantangan yang cukup berat.

Agar pemerintah dapat menerapkan berbagai program dan kebijakan secara efektif spesifik lokasi, maka diperlukan informasi tentang keragaman kondisi kemiskinan di berbagai wilayah dan agroekosistem. Badan Pusat Statistik telah menghasilkan data tingkat kemiskinan di berbagai wilayah baik kota maupun desa. Namun, diperlukan informasi yang lebih rinci bagaimana kondisi kemiskinan di berbagai wilayah dengan agroekosistem yang berbeda dan bagaimana keterkaitan tingkat kemiskinan dengan faktor-faktor lainnya terutama penguasaan lahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah (1) menganalisis tingkat kemiskinan rumah tangga di berbagai agroekosistem; (2) membandingkan tingkat kemiskinan dengan pendekatan garis batas kemiskinan BPS dan internasional; dan (3) menganalisis hubungan antara kemiskinan dengan penguasaan lahan

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran

Kemiskinan di Indonesia secara umum dapat dikatakan merupakan bentuk fenomena pertanian. Hal ini disebabkan sumber kemiskinan sebagian besar berada di wilayah perdesaan dan sangat berhubungan dengan pola kepemilikan dan produktivitas lahan, struktur kesempatan kerja, dan pasar tenaga kerja. Thorbecke dan Pluijm (1993) menyatakan terdapat korelasi antara standar hidup dengan luas dan kualitas lahan yang dimiliki serta tingkat keahlian dan pendidikan anggota rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap lahan dan keahlian dan pendidikan yang terbatas akan cenderung berada dalam kemiskinan sampai mereka memperoleh bantuan dan transfer dari pihak lain.

Peran sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung pembangunan pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produktivitas total faktor (*total factor productivity*/TFP). Peningkatan produktivitas pertanian akan meningkatkan pendapatan petani dan lebih lanjut akan menurunkan kemiskinan, sedangkan peran secara tidak langsung adalah melalui sektor nonpertanian. Pembangunan sektor pertanian pada awalnya akan memengaruhi pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi secara agregat dan selanjutnya akan mengurangi kemiskinan. Komponen yang memengaruhi produktivitas faktor di antaranya kapital fisik, infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, R & D, kepadatan populasi perdesaan serta perubahan teknologi (Mundlak et al., 1997). Kontribusi pembangunan sektor pertanian terhadap pengurangan kemiskinan selain tergantung dari struktur pendapatan masyarakat, distribusi alokasi peningkatan pendapatan, juga sangat dipengaruhi oleh ketidakmerataan penguasaan lahan (Adam dan He,

1995). Jika distribusi lahan pertanian sangat timpang dan pertumbuhan produktivitas pertanian lebih banyak dihasilkan oleh pemilik lahan luas, maka pertumbuhan sektor pertanian tersebut tidak banyak berarti bagi pengurangan kemiskinan. Beberapa kajian mendukung keterkaitan antara peningkatan produktivitas pertanian dengan pengurangan kemiskinan, di mana peningkatan produktivitas sektor pertanian tradisional merupakan cara yang paling efektif menurunkan kemiskinan (Ravallion dan Datt, 1999).

Data dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data Panel Petani Nasional (Patanas) yang dikumpulkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), yaitu data panel rumah tangga dengan selang waktu tiga tahun, masing-masing untuk data panel rumah tangga di agroekosistem sawah (2007–2010), agroekosistem lahan kering berbasis sayuran dan palawija (2008–2011), dan agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan (2009–2012).

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang, mencakup analisis frekuensi dan rata-rata. Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel kemiskinan (diproksi dari tingkat pengeluaran rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan) dengan luas kepemilikan lahan. Insiden kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT), sedangkan formula FGT *poverty index* dinyatakan sebagai berikut (Cockburn, 2001):

$$P_{\alpha}(y_i/z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha} \quad (\alpha \geq 0) \quad (1)$$

di mana y_i = rata-rata nilai pengeluaran per kapita individu ke- i dalam rumah tangga yang sudah diranking berdasarkan tingkat pengeluaran, n = total populasi, q = jumlah populasi, z = batas kemiskinan, sehingga *poverty gap ratio* adalah $G_i = (z - y_i)/z$, di mana $G_i = 0$ pada saat $y_i > z$.

Nilai α ada tiga macam, yaitu

1. Jika $\alpha = 0$, P_0 menyatakan *headcount index*, merupakan proporsi populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Formula di atas akan menjadi

$$P_0(y_i/z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^0, \text{ atau } P_0 = q/n \quad (2)$$

2. Jika $\alpha = 1$, menunjukkan ukuran *poverty gap ratio* di mana masing-masing penduduk miskin dibobot berdasarkan jarak relatif mereka dari garis kemiskinan:

$$P_1 = 1/n \sum (z - y_i)/z \quad (3)$$

Misalkan besaran $P_1 = 0,2$ artinya total kesenjangan kemiskinan seluruh populasi miskin terhadap garis kemiskinan adalah 20%, sedangkan $P_1/P_0 = 1/q$ $\sum (z - y_i)/z$ adalah rata-rata kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) yang dinyatakan sebagai proporsi terhadap garis kemiskinan.

3. Jika $\alpha = 2$, Formula (2) menjadi

$$P_2(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2 \quad (4)$$

Indeks tersebut merupakan ukuran yang sensitif terhadap perubahan pendapatan atau distribusi pendapatan populasi miskin (*distributionally sensitive index*). Ukuran ini dinamakan rasio 'keparahan' kemiskinan (*poverty severity*).

Untuk menetapkan rumah tangga tergolong sebagai rumah tangga miskin, Garis batas kemiskinan yang digunakan adalah konsep BPS. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal/kapita/hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.), sedangkan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan. Selain menggunakan batas kemiskinan konsep BPS, juga akan diperbandingkan dengan garis batas kemiskinan konsep Bank Dunia, yaitu sebesar US\$1 per hari.

DINAMIKA TINGKAT KEMISKINAN DI BERBAGAI AGROEKOSISTEM

Dinamika insiden kemiskinan dua titik waktu menunjukkan perubahan yang cukup menggembirakan, di mana tingkat kemiskinan di berbagai agroekosistem menunjukkan kecenderungan persentase menurun. Tingkat kemiskinan di setiap agroekosistem relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada tahun yang sama, kecuali di agroekosistem lahan kering palawija. Di agroekosistem tersebut insiden kemiskinan mencapai 26,86% pada tahun 2008, dan menurun dengan sangat nyata menjadi 15,52% pada tahun 2011. Penurunan insiden kemiskinan sesuai dengan semangat Deklarasi Milenium pada tahun 2000 yang disepakati oleh 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia telah ikut menyepakati MDG dengan adanya komitmen menurunkan jumlah penduduk miskin dunia yang jumlahnya mencapai 1,3 miliar dapat dikurangi menjadi setengahnya pada tahun 2015. Penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi di negara-negara di dunia. Dengan menggunakan garis kemiskinan internasional

sebesar US\$1,25 per kapita per hari, jumlah penduduk dunia yang berada di bawah garis kemiskinan menurun dari 51,8% pada tahun 1981 menjadi 25,2% pada tahun 2005 (Ravallion, 2007).

Apabila dibandingkan tingkat kemiskinan dan perubahan yang terjadi antaragroekosistem, terlihat bahwa tingkat kemiskinan terendah berada di agroekosistem lahan kering sayuran, diikuti berturut-turut agroekosistem lahan kering perkebunan lahan sawah berbasis padi dan tingkat kemiskinan tertinggi di agroekosistem lahan kering palawija (Tabel 1). Hasil analisis tersebut sesuai dengan kondisi di lapang pada umumnya, yaitu komoditas sayuran (cabai, kubis dan kentang) yang termasuk komoditas bernilai tinggi yang didukung oleh aksesibilitas dan keterbukaan wilayah desa contoh yang cukup baik sehingga pendapatan rumah tangga bukan hanya bersumber dari usaha tani semata. Pendapatan nonpertanian juga berkontribusi terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga yang cukup tinggi.

Tabel 1. Dinamika Tingkat Kemiskinan di Berbagai Agroekosistem, Desa Patanas, 2007–2012

Agroekosistem	Tahun	Insiden Kemiskinan (%)
Padi sawah	2007	15,14
	2010	7,14
Palawija	2008	26,86
	2011	15,52
Sayuran	2008	9,09
	2011	5,79
Kebun	2009	12,06
	2012	8,33

Keterangan: Garis kemiskinan mengacu pada BPS

Urutan kedua adalah agroekosistem lahan kering perkebunan, di mana fenomena umum menunjukkan bahwa petani pekebun sewajarnya memiliki tingkat pendapatan dari hasil usaha tani kebun yang lebih baik dibandingkan dengan petani pada umumnya. Tingkat kemiskinan di agroekosistem kebun lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering sayuran karena dua desa contoh dengan komoditas basis kakao, secara umum memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah dengan basis komoditas lainnya (kelapa sawit dan karet). Desa kakao yang menjadi contoh pada penelitian ini termasuk kriteria desa yang kurang maju usaha taninya karena serangan hama dan penyakit dan tanaman kurang pemeliharaan (karena lokasi kebun berada di perbukitan jauh dari pemukiman penduduk). Kondisi tersebut ditambah dengan aksesibilitas desa dengan sumber-sumber pendapatan nonpertanian yang kurang mendukung sehingga sumber pendapatan nonpertanian juga kurang berkontribusi pada total pendapatan rumah tangga.

Pada agroekosistem lahan sawah padi, usaha tani monokultur padi yang cukup baik ditambah aksesibilitas wilayah dengan sumber-sumber pendapatan nonpertanian yang cukup baik pula (di antaranya Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat) memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang cukup tinggi. Sementara, pada agroekosistem lahan kering palawija dengan basis komoditas kedelai dan jagung, pendapatan dari usaha tani kurang dapat menyokong pendapatan rumah tangga.

Dari hasil kajian Susilowati *et al.* (2015) diketahui bahwa secara umum faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di antaranya adalah peningkatan penguasaan aset produktif serta terbukanya akses dan pemanfaatan kesempatan kerja, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian Raskin, dan bantuan lain juga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, seperti misalnya diversifikasi kesempatan berusaha/bekerja, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan integrasi ekonomi desa-kota masih sangat terbatas.

Apabila dianalisis menurut lokasi provinsi pada masing-masing agroekosistem, pada agroekosistem padi sawah (Tabel 2), insiden kemiskinan tertinggi terjadi di Jawa Timur, yaitu sebesar 25,3%; namun pada tahun 2010 menurun dengan cepat. Lokasi contoh Patanas di Jawa Timur adalah Desa Padomasan, Kabupaten Jember; Desa Kaligondo, Kabupaten Banyuwangi; dan Desa Sungegeneng, Kabupaten Lamongan. Hal ini diduga karena rata-rata pendapatan penduduk miskin pada tahun 2007 tidak jauh dari garis batas kemiskinan, sehingga peningkatan pendapatan rumah tangga yang terjadi pada tahun 2010 sedikit saja telah mampu mengangkat penduduk yang semula termasuk kriteria miskin menjadi tidak miskin.

Tabel 2. Dinamika Tingkat Kemiskinan di Agroekosistem Padi Sawah, Desa Patanas, 2007–2010

Provinsi	2007			2010		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2
Jawa Barat	8	0,39	0,07	1,33	0,04	0,004
Jawa Tengah	10	0,46	0,14	12	0,52	0,14
Jawa Timur	25,3	1,45	0,55	7,89	0,35	0,12
Sulawesi Selatan	20	0,75	0,25	4	0,06	0,003
Sumatera Utara	16	0,46	0,09	8,16	0,19	0,02

Keterangan: Garis kemiskinan mengacu pada BPS

Konsisten dengan dinamika insiden kemiskinan *headcount index* (P0), indeks kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) secara konsisten juga mengalami penurunan antarwaktu yang berarti distribusi pendapatan antarpenduduk miskin cenderung tidak bertambah timpang, namun sebaliknya cenderung merata. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity*) atau indeks keparahan kemiskinan

semakin mengecil, yang bermakna bahwa kondisi rata-rata pendapatan penduduk miskin di wilayah semakin mendekati ke garis batas kemiskinan.

Kondisi senada untuk dinamika tingkat kemiskinan di wilayah agroekosistem lahan kering palawija yang juga cenderung mengalami penurunan secara cukup nyata selama dua periode analisis yang sama (Tabel 3). Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Lampung dan Jawa Barat. Lampung sebagai contoh desa berbasis komoditas ubi kayu dan Jawa Barat dengan komoditas basis kedelai yang dengan rata-rata luasan usaha tani yang diusahakan kurang bisa diandalkan sebagai pendapatan rumah tangga. Tingkat kemiskinan yang moderat adalah untuk desa contoh di Jawa Tengah dengan komoditas basis kacang tanah dan Sulawesi Selatan dengan komoditas basis jagung. Konsisten dengan nilai insiden kemiskinan, kesenjangan kemiskinan (P1) dan kedalaman kemiskinan (P2) tertinggi juga berada di Provinsi Lampung (basis ubi kayu) dan Jawa Barat (basis kedelai), meskipun dalam dua titik waktu juga menunjukkan kecenderungan penurunan.

Tabel 3. Dinamika Tingkat Kemiskinan di Agroekosistem Lahan Kering Palawija, Desa Patanas, 2008–2011

Provinsi	2008			2011		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2
Jawa Barat	39,10	2,15	0,73	17,74	1,07	0,48
Jawa Tengah	14,06	0,56	0,13	10,94	0,59	0,18
Jawa Timur	23,44	1,06	0,25	21,43	1,10	0,29
Lampung	40,00	2,66	1,06	16,00	0,41	0,06
Sulawesi Selatan	24,00	1,28	0,50	8,00	0,24	0,03

Keterangan: Garis kemiskinan mengacu pada BPS

Pada agroekosistem lahan kering sayuran, seperti telah diuraikan sebelumnya, tingkat kemiskinan rumah tangga relatif paling rendah di antara agroekosistem yang lain, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan secara nasional pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani sayuran memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani. Komoditas yang diusahakan di desa contoh adalah kentang, kubis, dan pada tahun-tahun terakhir berkembang komoditas cabai terutama di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Blitar dan Malang. Tingkat *headcount index* pada desa-desa beragroekosistem lahan kering sayuran hanya berkisar 6–12,5% (Tabel 4). Untuk Provinsi Jawa Tengah dengan desa contoh Karang Tengah, Kabupaten Banjarnegara, tingkat kemiskinan pada dua titik waktu cenderung meningkat. Hasil usaha tani kentang di desa tersebut cenderung semakin menurun. Beberapa penyebab antara lain karena penggunaan bibit yang kurang berkualitas, artinya bibit yang ada merupakan bibit yang terus menerus dibudidayakan dan tidak adanya peremajaan bibit baru. Hal ini disebabkan mahalnnya harga bibit. Masalah lain adalah tingkat kesuburan tanah yang cenderung semakin menurun sebagai

akibat dari eksploitasi penanaman kentang yang terus-menerus tanpa istirahat. Permasalahan lainnya adalah meningkatnya hama penyakit tanaman kentang.

Tabel 4. Dinamika Tingkat Kemiskinan di Agroekosistem Lahan Kering Sayuran, Desa Patanas, 2008–2011

Provinsi	2008			2011		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2
Jawa Barat	12,50	0,21	0,03	3,13	0,01	0,00
Jawa Tengah	6,25	0,67	0,41	9,38	0,18	0,02
Jawa Timur	9,38	0,74	0,46	3,13	0,31	0,13
Sulawesi Selatan	8,00	0,14	0,02	8,00	0,47	0,17

Keterangan: Garis Kemiskinan mengacu pada BPS

Pada agroekosistem lahan kering perkebunan, besarnya tingkat kemiskinan antarwilayah dengan komoditas basis tertentu relatif bervariasi (Tabel 5). Insiden kemiskinan terendah pada desa dengan basis komoditas kelapa sawit, sedangkan tertinggi pada desa dengan basis komoditas kakao. Tingginya tingkat kemiskinan di desa berbasis kakao disebabkan oleh rendahnya produktivitas tanaman karena serangan hama penyakit, tanaman sudah tua, tidak dilakukan pemajaan dan kurang pemeliharaan. Insiden kemiskinan di desa berbasis tebu juga relatif tinggi karena rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga di desa tersebut relatif kecil, yaitu hanya 0,3 ha–0,6 ha kebun tebu lahan kering dengan tingkat produktivitas kebun yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tebu yang ditanam pada lahan sawah. Dinamika dua titik waktu periode 2009–2012 menunjukkan kecenderungan insiden kemiskinan yang menurun kecuali untuk desa dengan komoditas basis karet.

Tabel 5. Dinamika Tingkat Kemiskinan di Agroekosistem Perkebunan, Desa Patanas, 2009–2012

Komoditas	Provinsi	2009			2012		
		P0	P1	P2	P0	P1	P2
Kelapa sawit	Jambi	1,25	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00
Tebu	Jatim	12,50	0,89	0,46	7,50	0,56	0,09
Karet	Kalbar	1,33	0,00	0,00	2,67	0,10	0,02
Kakao	Sulsel	32,5	1,38	0,56	22,78	1,67	0,60

Keterangan: Garis kemiskinan mengacu pada BPS

Peningkatan insiden kemiskinan pada desa berbasis karet tersebut disebabkan antara lain harga karet dalam tiga tahun terakhir yang cenderung menurun. Dengan adanya penurunan harga karet, maka efisiensi di tingkat usaha tani tidak dilakukan, dan belum ada inovasi teknologi untuk komoditas karet yang diterapkan oleh petani. Penurunan harga karet yang mengakibatkan penurunan

pendapatan petani karet ditambah dengan kesempatan kerja dan berusaha di nonpertanian relatif terbatas menyebabkan pendapatan petani karet di desa contoh secara umum cenderung menurun. Secara kumulatif peningkatan insiden kemiskinan di desa contoh berbasis karet antara lain karena (1) ketersediaan dan akses kesempatan kerja pertanian semakin menurun karena sebagian pemilik lahan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga; (2) ketersediaan dan akses kesempatan berusaha pertanian semakin sulit karena tidak ada modal; (3) peluang menggarap lahan semakin sulit, walaupun ada, sistem bagi hasilnya semakin kecil karena permintaan garapan relatif tinggi sementara kebun garapan semakin terbatas.

INSIDEN KEMISKINAN DENGAN PENDEKATAN WORLD BANK

Tingkat kemiskinan yang diuraikan di atas didekati dengan menggunakan garis batas kemiskinan BPS agar dapat diperbandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan rumah tangga yang dihitung dengan menggunakan garis batas kemiskinan konsep Bank Dunia (pendapatan kurang dari US\$1 per hari/kapita) menunjukkan bahwa insiden kemiskinan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsep BPS, yaitu berkisar 21,15% sampai 72,31% (Tabel 6).

Tabel 6. Dinamika Tingkat Kemiskinan di Berbagai Agroekosistem Berdasarkan Garis Kemiskinan BPS dan World Bank, Desa Patanas, 2008–2011

Agroekosistem	Tahun	Insiden Kemiskinan (%) (Konsep BPS)	Insiden Kemiskinan (%) (Konsep Bank Dunia)
Padi sawah	2007	15,14	60,00
	2010	7,14	34,57
Palawija	2008	26,86	72,31
	2011	15,52	36,21
Sayuran	2008	9,09	59,50
	2011	5,79	21,49
Kebun	2009	12,06	48,89
	2012	8,33	21,15

Keterangan: Garis kemiskinan mengacu pada BPS dan Bank Dunia

Dengan menggunakan konsep garis batas kemiskinan Bank Dunia, status kemiskinan di Indonesia dapat diperbandingkan antarnegara. Sebagai contoh, dengan menggunakan batas garis kemiskinan internasional sebesar US\$1,25 per kapita per hari, jumlah penduduk miskin di India sebesar 41% pada tahun 2005 (Ravallion, 2007). Dibandingkan dengan India, kemiskinan di Indonesia pada tahun yang sama jauh lebih rendah dibandingkan India, yaitu 16,69%. Namun, perlu diingat bahwa garis batas kemiskinan yang digunakan di Indonesia adalah konsep BPS seperti telah diuraikan dalam metodologi, yang jika dinilai ke dalam rupiah, nilainya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan garis batas kemiskinan

international. Dengan demikian, melakukan perbandingan dengan kondisi kemiskinan Indonesia dengan negara-negara lain menjadi tidak relevan jika garis batas kemiskinan tidak mengikuti standar yang sama. Oleh karenanya, menjadi penting informasi tingkat kemiskinan di Indonesia juga disajikan menggunakan standar garis kemiskinan internasional jika akan dilakukan perbandingan antar negara.

KEMISKINAN DAN LUAS PENGUSAHAAN LAHAN

Tingkat kemiskinan rumah tangga yang bervariasi menurut agroekosistem seperti yang telah dipaparkan di atas berkaitan dengan penguasaan lahan. Hasil penelitian Purwoto *et al.* (2011) dan Susilowati *et al.* (2012) menunjukkan bahwa penguasaan lahan petani di Jawa dan di luar Jawa pada umumnya di bawah 1 ha, kecuali untuk petani di agroekosistem perkebunan yang rata-rata penguasaan lahan masih di atas 1 ha. Angka ini mengindikasikan bahwa kepemilikan lahan oleh petani memang sempit atau lebih dikenal sebagai petani gurem. Pada kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang dialami oleh rumah tangga petani tersebut merupakan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan masyarakat miskin dapat bekerja. Dalam hal ini keterbatasan sumber daya lahan sebagai aset produktif utama merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan yang terjadi karena tidak mampu bekerja dengan hasil maksimal.

Jika dikaitkan dengan kepemilikan lahan di desa contoh (Tabel 7), maka terlihat bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga (di atas 50%) memiliki lahan, namun jumlah penyewa dan penyakap juga masih relatif tinggi yang jumlahnya bervariasi menurut agroekosistem dan selama kurun waktu tiga tahun jumlah penyakap dan penyewa cenderung meningkat. Hubungan sewa dan sakap tersebut muncul karena rumah tangga yang bersangkutan memang betul-betul tidak memiliki lahan sehingga untuk melakukan usaha tani perlu menyewa atau menyakap lahan orang lain atau untuk tujuan menambah luas garapan. Namun, selain penyewa dan penyakap yang mengusahakan lahan, sebetulnya masih terdapat rumah tangga yang meskipun pendapatan utama dari sektor pertanian, namun tidak mengusahakan lahan karena memang tidak memiliki lahan garapan baik milik atau melalui sakap/sewa, sehingga status mereka hanya sebagai buruh tani. Rumah tangga buruh tani inilah utamanya yang tergolong sebagai rumah tangga miskin, selain rumah tangga petani gurem lainnya.

Bila persentase kemiskinan ini dikaitkan dengan data persentase penyakapan ternyata tidak menunjukkan korelasi. Kondisi penyakapan dengan kemiskinan pada masing-masing daerah survei, baik di Jawa maupun luar Jawa, dapat dijelaskan melalui Tabel 8. Tabel tersebut menunjukkan kondisi perubahan dua titik waktu, yaitu terjadi penurunan insiden kemiskinan di satu sisi, dan di sisi lain penyewa/penyakap meningkat. Arah perubahan dua variabel tersebut tidak sesuai dengan

perkiraan, di mana kemiskinan akan lebih banyak terjadi pada kondisi tingkat penyewaaan/penyakapan yang tinggi pula.

Apabila dilihat korelasi antara luas penguasaan lahan dengan jumlah rumah tangga miskin (Tabel 9), secara umum korelasi dua variabel tersebut tidak seluruhnya menunjukkan arah hubungan yang konsisten dan secara umum memiliki korelasi yang tidak kuat yang ditunjukkan melalui besaran koefisien korelasi negatif yang relatif rendah (kurang dari 0,5). Pengecualian terjadi pada agroekosistem lahan kering sayuran pada tahun 2010, yang menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat antara penurunan insiden kemiskinan dengan peningkatan jumlah penyakap/penyewa.

Tabel 7. Jumlah Pemilik dan Penyakap/Penyewa Lahan di Berbagai Agroekosistem, Desa Patanas, 2007–2012

Agroekosistem/Tahun	Pemilik Lahan (%)	Penyewa/Penyakap (%)
Lahan sawah basis padi		
2007	98,00	3,14
2010	54,29	20,71
Lahan kering palawija		
2008	95,04	2,48
2011	84,98	11,59
Lahan kering sayuran		
2008	94,21	0,83
2011	76,86	26,45
Lahan Kering Perkebunan		
2009	80,63	10,48
2012	88,78	25,00

Tabel 8. Insiden Kemiskinan dan Persentase Penyakap/Penyewa di Berbagai Agroekosistem, Desa Patanas 2007–2012

Agroekosistem	Tahun	Insiden Kemiskinan (%)	Penyakap/Penyewa (%)
Padi Sawah	2007	15,14	3,14
	2010	7,14	20,71
Palawija	2008	26,86	2,48
	2011	15,52	11,59
Sayuran	2008	9,09	0,83
	2011	5,79	26,45
Kebun	2009	12,06	10,48
	2012	8,33	25,00

Hubungan antara persentase kemiskinan dan penyakap yang bersifat negatif pada agroekosistem lahan sawah berbasis padi juga ditunjukkan oleh hasil analisis Haeruman *et al.* (2010). Secara umum korelasi negatif dari hasil hubungan dua variabel tersebut mempunyai makna jika jumlah penyakap/penyewa meningkat maka jumlah rumah tangga miskin berkurang, sementara korelasi positif pada agroekosistem lahan sawah pada tahun 2010 dan lahan kering palawija tahun 2008 bermakna jika jumlah penyakap/penyewa meningkat akan diikuti oleh jumlah rumah tangga miskin yang meningkat pula, meskipun tidak menunjukkan tingkat hubungan yang erat. Pada kasus ini dapat dimaknai pula bahwa keterbatasan lahan petani atau ketidakmampuan rumah tangga petani untuk memiliki lahan sendiri yang direpresentasikan melalui menyakap atau menyewa lahan, diikuti oleh jumlah kemiskinan rumah tangga yang meningkat pula.

Tidak eratnya korelasi antara jumlah rumah tangga miskin dengan tingkat kepemilikan lahan yang direpresentasikan melalui jumlah penyakap atau penyewa salah satunya karena dewasa ini sumber pendapatan rumah tangga tani tidak semata-mata tergantung dari usaha tani lahan, melainkan juga didukung oleh peran pendapatan nonpertanian. Hasil analisis Sensus Pertanian 2013 (BPS, 2013) menunjukkan peran pendapatan nonpertanian terhadap total pendapatan rumah tangga berkisar 53% (BPS, 2013)

Tabel 9. Hubungan antara Luas Lahan dengan Tingkat Kemiskinan di Berbagai Agroekosistem, Desa Patanas, 2007–2012

Agroekosistem/Tahun	Korelasi
AE Lahan Sawah	
2007	-0,03362
2010	0,23314
AE LK Palawija	
2008	0,04728
2011	-0,47550
AE LK sayuran	
2008	-0,18022
2011	-0,81594
AE LK Perkebunan	
2009	-0,21711
2012	-0,14173

KESIMPULAN

Dinamika insiden kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun di berbagai agroekosistem. Penurunan kemiskinan di berbagai agroekosistem dalam penelitian ini merupakan dampak dari pembangunan pertanian dan perdesaan yang

dilakukan oleh pemerintah yang terus menerus. Berdasarkan metoda sampling yang digunakan sehingga terpilih populasi contoh dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan di masing-masing agroekosistem lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Agroekosistem lahan kering sayuran memiliki tingkat kemiskinan terendah, diikuti oleh agroekosistem lahan kering perkebunan, lahan sawah berbasis padi, dan tingkat kemiskinan tertinggi di agroekosistem lahan kering palawija. Tingkat kesenjangan pendapatan antarpenduduk miskin juga semakin menurun, demikian pula rata-rata pendapatan penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Penurunan insiden kemiskinan diikuti dengan jumlah penyewa/penyakit yang meningkat, tidak sesuai dengan perkiraan di mana kemiskinan akan lebih banyak terjadi pada kondisi tingkat penyewaan/penyakit yang semakin tinggi. Hubungan antara tingkat kemiskinan dengan luas penguasaan lahan tidak menunjukkan arah hubungan yang konsisten dan secara umum memiliki korelasi yang tidak kuat, yang diduga karena sumber pendapatan rumah tangga petani dewasa ini tidak semata-mata tergantung dari usaha tani lahan, melainkan juga didukung oleh peran pendapatan nonpertanian.

Penyebab masih terdapatnya kemiskinan yang cukup tinggi di salah satu agroekosistem contoh adalah (a) terbatasnya akses produktif terutama lahan; (b) terbatasnya kemampuan (SDM dan modal) untuk melakukan praktik usaha tani yang baik mengacu pada *Good Agricultural Practices (GAP)*; (c) terbatasnya kualitas infrastruktur; dan (d) kebijakan pembangunan pertanian yang belum sepenuhnya merata menjangkau berbagai wilayah dan aspek.

Kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan hendaknya dilakukan tidak bersifat seragam untuk seluruh wilayah, melainkan harus berbasis spesifik wilayah dengan memperhatikan keragaman sumber daya alam dan manusianya (pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan lain-lain), keragaman dan perkembangan kondisi perekonomian wilayah agroekosistem setempat, serta secara spesifik memperhatikan karakteristik rumah tangga miskin.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif rumah tangga miskin, diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian melalui percepatan reforma agraria, perluasan areal pertanian serta fasilitasi sistem penguasaan lahan. Penguasaan lahan dengan sistem sewa, sakap, gadai, dan lainnya perlu difasilitasi dengan pola hubungan kelembagaan yang lebih menguntungkan kemampuan ekonominya yang lebih lemah dari pemilik lahan. Peningkatan kegiatan ekonomi juga diperlukan melalui perluasan diversifikasi usaha nonpertanian sehingga rumah tangga miskin yang terbatas dalam kepemilikan lahan tidak hanya bergantung pada kegiatan *on-farm* sebagai buruh tani atau penyakit/penyewa lahan, melainkan juga memiliki sumber pendapatan lain dari nonpertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams Jr., R.H. and J.J. He. 1995. Sources of Income Inequality and Poverty in Rural Pakistan. Research Report 102. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
- [Bappenas] Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2014. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th.XIX, 05 Februari 2016. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Cockburn, J. 2001. Trade Liberalisation and Poverty in Nepal. A Computable General Equilibrium Micro Simulation Analysis. Centre for the Study of African Economies and Nuffield College (Oxford University) and CREFA. jjcoc@ecn.ulaval.ca.
- Irawan, B., IW. Rusastra, Hermanto, T. Pranaji, G.S. Hardono, T.B. Purwantini, dan E. Ariningsih. 2014. Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data Panel Petani Nasional (Patanas). Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Mundlak, Y., D.F. Larson, and R. Butzer (1997). The Determinants of Agricultural Production: A Cross Country Analysis. Policy Research Working Paper 1827. World Bank. Washington D.C.
- Purwoto, A., IW. Rusastra, B. Winarso, T.B. Purwantini, A.K. Zakaria, T. Nurasa, D. Hidayat, C. Muslim, dan C.R. Adawiyah. 2011. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Ravallion, M. and D. G. Datt. 1999. When is Growth Pro-Poor Evidence from the Diverse Experience of India's States. Policy Research Working Paper 2263. The World Bank. Washington D.C.
- Ravallion, M. 2007. Economic Growth and Poverty Reduction. Do Poor Countries Need to Worry About Inequality? 2020 Focus Brief on the World's Poor and Hungry People. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Washington, D.C.
- Susilowati, S.H., T.B. Purwantini, D. Hidayat, M. Maulana, A.M. Ar-Rozi, R.D. Yofa, Supriyati, dan W.K. Sejati. 2012. Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Susilowati, S.H., IW. Rusastra, Supriyati, E. Suryani, T.B. Purwantini, D. Hidayat, dan C. Muslim. 2015. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya pada Berbagai Agroekosistem 2007–2015. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Thorbecke, E. and T.V.D. Pluijm. 1993. Rural Indonesia: Socioeconomic Development in a Changing Environment. IFAD. New York University Press. New York.

**BAB V AGENDA KE DEPAN
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI**

AGENDA KE DEPAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Secara makro, perekonomian Indonesia selama periode 2004–2013 tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tersebut juga diiringi dengan laju inflasi yang cukup tinggi, sehingga pendapatan riil secara nasional tidak tumbuh secepat pertumbuhan pendapatan menurut harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia ternyata mempunyai dampak yang tidak dikehendaki, yaitu timbulnya senjang pendapatan per kapita yang semakin meningkat. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut lebih terkonsentrasi di Jawa, sehingga pemerataan pendapatan menurut wilayah pun juga cenderung semakin timpang.

Sumbangan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) cenderung menurun dari 12,24% pada tahun 2000, menjadi 10,59% pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi transformasi ekonomi nasional dari sektor pertanian sebagai sumber pendapatan nasional, menuju ke dominasi sektor nonpertanian sebagai sumber pendapatan.

Menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan industri perdesaan, yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat dan memperluas pembangunan sarana dan prasarana pertanian di kawasan timur Indonesia, serta mempercepat konektivitas antarwilayah di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor pertanian pada khususnya. Di samping itu, sehubungan dengan transformasi sumber pendapatan rumah tangga dari pertanian ke nonpertanian, petani di perdesaan perlu dipersiapkan agar mereka mempunyai kemampuan untuk menganekaragamkan sumber pendapatan rumah tangga dengan mengembangkan kegiatan usaha lain yang lebih produktif.

Sejalan dengan data makro, data Patanas menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga di perdesaan meningkat, namun laju peningkatan pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Struktur pendapatan rumah tangga khususnya di desa berbasis padi sawah masih didominasi oleh pendapatan dari pertanian, walaupun cenderung menurun. Sebaliknya, sumbangan pendapatan pertanian di desa berbasis sayuran cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha pertanian sayuran yang mempunyai nilai tambah tinggi cukup berkembang sehingga menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga petani yang dominan. Namun, tidak demikian halnya yang terjadi pada desa yang berbasis lahan kering palawija. Pendapatan pertanian bagi rumah tangga perdesaan pada agroekosistem lahan kering palawija semakin tidak dominan dan juga tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari usaha dan kegiatan pertanian diperlukan dukungan teknologi untuk peningkatan produktivitas, serta kebijakan

yang memberikan insentif dan stabilitas harga bagi produksi hasil pertanian. Di samping itu, perlu untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di kegiatan nonpertanian.

Hasil analisis data Patanas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di daerah perdesaan dapat dikategorikan sedang hingga tinggi. Distribusi pendapatan di perdesaan berbasis padi sawah cenderung moderat, sedangkan distribusi pendapatan di desa berbasis sayuran cenderung tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah yang pendapatannya relatif tinggi cenderung mempunyai distribusi pendapatan yang kurang merata. Gejala ini juga konsisten dengan kondisi ketimpangan pendapatan rumah tangga hasil analisis data makro. Akses terhadap lahan pertanian produktif dan akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di perdesaan

Sebenarnya petani mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatannya melalui diversifikasi usaha taninya. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya rumah tangga di desa-desa Patanas yang berusaha di bidang budi daya ternak yang dapat diintegrasikan dengan usaha tani tanaman. Nilai tambah usaha ternak sebenarnya dapat mendatangkan hasil sampingan berupa pupuk kandang, baik cair maupun padat yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan bagi rumah tangga peternak. Pemakaian pupuk kandang ini sebenarnya dapat menekan biaya produksi tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Bantuan modal pinjaman berbunga ringan atau sistem dana bergulir (*revolving fund*) diperlukan agar rumah tangga peternak miskin mampu untuk memperbaiki kondisi ekonominya melalui usaha budi daya ternak.

Pertumbuhan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada perubahan struktur pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan bukan pangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mengubah pola konsumsi pangannya. Data makro menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan di kedua wilayah ini secara ekonomi kebutuhan pangan sudah tidak terlalu membebani pengeluaran rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan perubahan pola konsumsi rumah tangga, paling tidak ada tiga masalah yang memerlukan perhatian untuk penanganan selanjutnya, yaitu (1) telah terjadi perubahan pola pengeluaran dari yang didominasi kelompok padi-padian dengan harga per unit kalori dan protein yang relatif rendah ke kelompok makanan jadi dengan harga per unit kalori dan protein yang semakin tinggi; (2) telah terjadi kenaikan skor PPH secara bertahap, tetapi mulai tahun 2011 skor PPH mulai menurun, yang menunjukkan bahwa keragaman dan kualitas konsumsi pangan menurun; dan (3) tingkat konsumsi beras dan umbi-umbian cenderung menurun digantikan oleh konsumsi terigu, yang berarti bahwa masyarakat semakin tergantung kepada sumber energi dari pangan eks impor.

Terkait dengan penurunan kualitas konsumsi masyarakat, pemerintah perlu melakukan perluasan dan percepatan program diversifikasi pangan menjadi suatu gerakan nasional untuk meningkatkan keragaman konsumsi dan peningkatan

kualitas gizi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal, serta mengurangi ketergantungan pada pangan eks impor. Diperlukan upaya peningkatan produksi, promosi, dan pengolahan pangan lokal. Selain itu, diperlukan adanya program bantuan pangan pokok berbasis sumber daya lokal untuk masyarakat miskin.

Berbeda dengan hasil analisis data makro, hasil analisis data Patanas menunjukkan bahwa rumah tangga di desa yang berbasis padi sawah, palawija, sayuran, dan perkebunan, proporsi pengeluaran untuk pangannya cenderung meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat konsumsi energi dan protein masih belum memenuhi standar kecukupan yang dianjurkan. Hasil analisis data Patanas juga menunjukkan bahwa sebagian pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga umumnya berasal dari produksi sendiri. Tingkat partisipasi dan konsumsi untuk beras paling tinggi, sedangkan untuk pangan lokal menurun secara drastis.

Upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga pada semua agroekosistem menjadi penting agar mereka dapat hidup sehat dan produktif. Upaya tersebut dilakukan dengan (1) meningkatkan pendapatan dari usaha pertanian melalui bantuan sarana produksi dan pendampingan teknologi; (2) melakukan diversifikasi usaha di sektor pertanian dan di luar pertanian; (3) menambah kesempatan kerja dan penciptaan tenaga kerja oleh pemerintah/pemerintah daerah dan swadaya; serta (4) meningkatkan kesadaran kepada semua anggota rumah tangga akan pentingnya makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat dan produktif.

Secara nasional NTP menunjukkan kecenderungan meningkat, yang artinya bahwa petani cenderung mengalami surplus karena kenaikan harga produk yang dijual petani lebih besar dibanding dengan kenaikan harga barang konsumsi yang dibeli petani. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. NTP rata-rata tahun 2010–2014 tertinggi adalah pada subsektor tanaman hortikultura, diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan, dan terendah adalah subsektor tanaman pangan. Dalam konteks peningkatan NTP dan kesejahteraan petani, maka pemantapan dan penguatan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan harga output dalam mendukung stabilitas peningkatan produksi dan harga menjadi sangat penting.

Dari hasil analisis data Patanas dapat dikemukakan bahwa nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi dan sewa lahan pada usaha tani jagung meningkat, sedangkan pada usaha tani kedelai dan ubi kayu menurun. Perubahan nilai tukar pendapatan usaha tani komoditas palawija tersebut berkaitan dengan nilai tukarnya terhadap sewa lahan. Penurunan nilai tukar pendapatan terhadap nilai sewa lahan mempunyai implikasi bahwa petani yang tidak mempunyai lahan akan lebih memilih menyakap atau bagi hasil dengan pemilik lahan dibandingkan menyewa lahan guna mengurangi risiko yang dihadapinya. Adapun nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap pupuk urea pada komoditas jagung dan ubi kayu menunjukkan peningkatan, sedangkan pada kedelai menunjukkan

penurunan. Kondisi ini perlu diantisipasi untuk mencegah penurunan luas panen dan produksi kedelai.

Secara umum NTP berbasis komoditas pekebunan cenderung meningkat terutama komoditas karet dan komoditas tebu. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis usaha tani beberapa komoditas perkebunan rakyat menghasilkan keuntungan positif, terutama karena peningkatan harga jual hasil produksi perkebunan. Dengan kondisi kecilnya skala pemilikan lahan rumah tangga petani, maka diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan pola usaha tani terpadu. Melalui pengembangan pola usaha tani terpadu akan mengurangi risiko kegagalan produksi dan antisipasi terhadap anomali iklim yang semakin sulit diprediksi.

Selama kurun waktu 2003–2013 proporsi penduduk miskin di Indonesia menurun, dengan laju penurunan presentase penduduk miskin di desa lebih besar dibanding di kota. Masih terdapat disparitas jumlah dan presentase penduduk miskin antarprovinsi di Indonesia, di mana proporsi penduduk miskin paling besar terdapat di Pulau Jawa. Analisis kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan juga menunjukkan penurunan selama periode 2003–2013. Penurunan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin kecil. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk miskin tersebut bekerja di sektor pertanian, maka sektor pertanian memiliki kontribusi tinggi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB maka semakin tinggi pula perubahan penurunan penduduk miskin di perdesaan.

Sehubungan dengan hal ini, maka hendaknya fokus kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar mempertimbangkan pendekatan holistik multisektoral dan berbasis wilayah/desa miskin tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi daerah potensial. Perlu ada (1) integrasi program pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan ekonomi perdesaan (pembangunan perdesaan inklusif); (2) percepatan transformasi ekonomi (desa-kota dan antarwilayah) dengan sasaran konvergensi tingkat produktivitas; dan (3) modernisasi pertanian dan perdesaan.

SEKILAS TENTANG PENULIS:

SEKILAS TENTANG PENULIS

Adi Setiyanto, S.P., M.Si. Peneliti Muda bidang Kebijakan Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: amihardjo@yahoo.com

Dr. Ir. Bambang Irawan, M.S. Ahli Peneliti Utama bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: irawanbir@yahoo.com

Drs. Bambang Winarso. Peneliti Madya bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: winarso13@yahoo.co.id

Dr. Ir. Ening Ariningsih, M.Si. Peneliti Muda bidang Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: ening.ariningsih@yahoo.com

Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si. Peneliti Pertama bidang Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: erma_pse@yahoo.com

Dr. Ir. Gatoet Sroe Hardono, M.Si. Peneliti Madya bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: g4toet@yahoo.com / g4toet@yahoo.co.id

Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem, M.S. Peneliti Utama bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: handewipurwati@gmail.com

Dr. Ir. Hermanto, M.S. Peneliti Madya bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: hermanto809@yahoo.com

Prof. Dr. Ir. I Wayan Rusastra. Peneliti Utama bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: wrusastra@yahoo.com

Ir. Mewa Ariani, M.S. Peneliti Utama bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: mewa_tan@yahoo.com

Dr. Ir. Muchjidin Rachmat, M.S. Peneliti Utama bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: muchjidin_r@yahoo.com

Dr. Ir. Reni Kustiari, M.Sc. Peneliti Madya bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: renikustiari@yahoo.com / kustiarireni@yahoo.com

Rizma Aldillah, S.P, M.Si. Penganalisis Data bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: rizma_pisces@hotmail.com

Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si. Peneliti Muda bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: srih4stuti@yahoo.com

Dr. Ir. Sri Hery Susilowati, M.S. Peneliti Madya bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: srihery@yahoo.com

Sri Nuryanti, S.T.P., M.P. Peneliti Madya bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: yantisl@yahoo.com

Ir. Supriyati, M.S. Peneliti Madya bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: supriyati_pse@yahoo.com / supriyati.pse@gmail.com

Ir. Tri Bastuti Purwantini. Peneliti Muda bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. E-mail: tribastuti_p@yahoo.co.id

INDEKS

A

adopsi teknologi	43, 143, 213, 215
agribisnis	259, 260, 287
agroekosistem	3, 4, 5, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 67, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 128, 131, 140, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 197, 67, 280, 283, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 303, 305
agroindustri	258, 260, 261
angka kecukupan gizi	172, 173, 175
angkatan kerja	12, 47
anomali iklim	306

B

bantuan tunai bersyarat	255
benih	212, 213, 218
<i>biofuel</i>	259
<i>biofiber</i>	259

D

desentralisasi	5
dinamika	3, 4, 5, 6, 9, 22, 35, 27, 38, 84, 86, 140, 143, 149, 152, 166, 168, 204, 206, 237, 246, 265, 269, 283, 284, 290, 292, 294, 298
distribusi pendapatan	9, 19, 43, 44, 48, 49, 53, 304
distribusi pupuk	213, 214
diversifikasi	3, 4, 5, 6, 92, 93, 97, 261, 299, 304
diversifikasi konsumsi	4, 187, 197
diversifikasi pangan	102, 125, 131, 136, 146, 155, 170, 171, 175, 180, 185, 304
diversifikasi pertanian	4

E

efisiensi	4, 6, 201, 211, 212, 214, 217, 257
efisiensi alokatif	211, 217
efisiensi teknis	211, 217
ekonomi pangan	5
ekonomi perdesaan	283

G

garis kemiskinan	266, 267, 269, 273, 275, 277, 287, 289, 290, 291
gizi	159, 162, 163, 175, 176

H

hortikultura 32

I

impor pangan 261
indeks Gini 20, 21, 22, 23, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 53, 54, 55, 62, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 104, 105, 250, 251, 252, 253, 268, 269, 270, 271, 273, 280, 283, 284
indeks harga 203, 204, 205, 210, 224
indeks pembangunan manusia 275, 284
industri pertanian 258
infrastruktur pertanian 285, 287
inovasi teknologi 91
inpres perberasan 216
integrasi 4, 6, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 91, 92, 96, 255, 261

J

jagung 221, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234

K

kebijakan 5, 103, 212, 213, 214, 215, 216, 257, 258, 260, 261, 266, 306
kedaulatan pangan 258, 260, 261, 287
kedelai 221, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234
kemandirian pangan 258, 260, 261
kemiskinan 6, 48, 55, 82, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 258, 261, 265, 266, 267, 268, 269, 275, 277, 278, 280, 283, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 306
kemitraan petani 258
kerawanan pangan 5, 102, 106, 121, 190
kesejahteraan petani 3, 6, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 217, 222, 246, 258, 265, 305
kesempatan kerja 3, 4, 6, 39, 44, 45, 51, 54, 57, 257, 304
ketahanan pangan 5, 27, 101, 102, 106, 112, 139, 143, 149, 159, 161, 163, 179, 183, 189, 215, 216, 258
ketersediaan pangan 193
konsumen 203
konsumsi 139, 140, 143, 149, 150, 152
konsumsi daging nasional 4
konsumsi energi 172, 174, 180, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197
konsumsi nonpangan 159, 160, 163, 167, 179
konsumsi pangan 3, 5, 101, 102, 103, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 125, 131, 136, 140, 143, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164, 168, 170, 171,

	172, 175, 178, 179, 183, 184, 186, 193, 195, 196, 197, 305
krisis ekonomi	15, 16, 18, 19
L	
lahan garapan	38
lahan kering	3, 4, 48, 140, 265, 287, 288, 289, 291, 294, 299
lahan kering palawija	3, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 290, 292, 293, 298, 299, 303
lahan kering perkebunan	3, 88, 90, 92, 93, 94, 95
lahan kering sayuran	3, 86, 88, 89, 92, 93, 96, 293, 297, 299
lahan pertanian	82, 83, 84
lahan sawah	3, 5, 38, 39, 41, 42, 102, 292, 299
laju inflasi	3, 87, 89, 91, 96, 303
laju pertumbuhan,	47
<i>land reform</i>	287
limbah sawit	65
limbah tanaman tebu	69
M	
modernisasi pertanian	3, 6, 47, 260
MP3EI	22, 23, 26, 27, 101
multidimensi	265
N	
negara agraris	203
nilai tukar petani	203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 221, 222, 223, 224, 305
nilai tukar subsisten	222
nilai tukar usaha tani	225, 229, 231, 232, 233
nonpertanian	35, 39, 43, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91
O	
optimalisasi	258, 261
overintensifikasi	4
P	
padi	4, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45
pakar	65
paket teknologi	4
palawija	223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 233, 234
pangan	3, 4, 5, 6, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 152, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 179, 178, 183, 185, 190

paradigma	260, 262
partisipasi konsumsi	133, 143, 144, 145, 146, 169, 170, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Patanas	3, 36, 37, 48, 51, 66, 84, 86, 90, 95, 126, 127, 128, 229, 231, 232, 233, 266, 279, 284, 289, 303, 304, 305
PDB	3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 32, 47, 283, 287
PDRB	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33
pemasaran	4
pembangunan agribisnis	259
pembangunan ekonomi	82
pembangunan pangan	159
pembangunan perdesaan	261
pembangunan pertanian	160, 221, 265, 266, 271, 273, 283, 287, 288, 299
pemberdayaan	260, 261
penanggulangan kemiskinan	254, 255
pendapatan	3, 4, 9, 19, 20, 33, 35, 39, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 203, 204, 205, 206, 212, 213, 288, 303
pengeluaran pangan	126, 128, 129, 163, 164, 185, 189
pengentasan kemiskinan	237, 238, 240, 245, 246, 248, 254, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 270, 284, 285, 306
penggarap	37
penguasaan lahan	49, 52, 53, 57, 185, 193, 288, 294, 296, 297, 299
perbaikan gizi	4, 5
perdesaan	3, 4, 5, 47, 48, 82, 83, 84, 260, 261, 265, 270, 272, 283, 285, 304
perekonomian	4, 10, 12, 15, 16, 22, 206, 283, 284, 303
perkebunan	65
pertanian	4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 211, 212
pertumbuhan ekonomi	9, 10, 11, 22, 25, 26, 47, 62, 103, 104, 109, 121, 270, 271, 283, 303, 304
petani	3, 4, 9, 39, 52, 203, 204, 205, 206, 212, 213, 288, 296
pola konsumsi	183, 184, 190, 193, 196
pola pangan harapan	141, 161, 162
probiotik	69
produktivitas pertanian	4
produsen	203
pupuk	66, 68, 74, 78, 212, 213, 214, 218, 305
R	
reformasi agraria	33, 299
rekonstruksi	3
restrukturisasi agribisnis	259

revitalisasi 257, 260, 261
rumah tangga 3, 4, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 70, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 185

S

sapi potong 4, 65, 66, 67, 68, 77
sistem sewa, sakap, gadai 299
skim kredit lunak 258,
strategi revitalisasi 260, 261
subsektor hortikultura 32
subsektor kehutanan 12, 17, 25, 31
subsektor perikanan 12, 17, 25, 31
subsektor perkebunan 12, 15, 16, 17, 19, 25, 31, 32, 33
subsektor peternakan 12, 15, 16, 17, 19, 25, 32, 33
subsektor tanaman pangan 12, 15, 17, 32
subsidi benih jagung 213, 214
sumber daya manusia 101, 288
swasembada pangan 221

T

tanaman pangan 12, 15, 17, 32
teknologi spesifik lokasi 4
tenaga kerja 9, 25, 82
tenaga kerja perdesaan 47
ternak 4, 65
tingkat kesejahteraan petani 305
tingkat konsumsi 134, 135, 136, 146, 148, 149, 190, 195, 196
tingkat partisipasi 133, 143, 144, 146, 168, 169, 170, 180
transformasi 3, 4, 10, 12, 15, 16, 33, 260, 261, 303
transmigrasi 243

U

ubi jalar 168
ubi kayu 221, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234
urbanisasi 183, 184, 240, 259
usaha tani 4
UU Pangan No. 18/2012 5

Panel Petani Nasional

REKONSTRUKSI AGENDA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama kegiatan usaha pertanian. Peningkatan kesejahteraan petani diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan sekaligus mempertahankan keberlanjutan sektor pertanian. Pertanyaannya adalah sejauh mana pembangunan pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan bagaimana pula kecenderungannya dalam jangka panjang dan variasinya menurut wilayah pedesaan. Permasalahan tersebut perlu dipahami dengan baik untuk mempertajam agenda pembangunan pertanian demi terwujudnya sektor pertanian yang memiliki daya tahan, berdaya saing, berkelanjutan, dan kesejahteraan petani. Buku ini mengupas permasalahan tersebut baik pada lingkup makro nasional maupun lingkup mikro pada berbagai tipe desa. Empat aspek terkait kesejahteraan petani yang dibahas secara kritis, yaitu aspek pendapatan rumah tangga petani, aspek konsumsi rumah tangga, aspek nilai tukar petani, dan aspek kemiskinan.



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp.: +62 21 7806202, Faks.: +62 21 7800644

Pertanian

ISBN 978-602-344-104-4

